



Pemerintah
Kabupaten Banjar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar

Tahun 2025-2029





BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Banjar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
13. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. menjabarkan sasaran Visi, Misi, dan Arah Kebijakan pada RPJPD Kabupaten Banjar; dan
- d. pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- e. pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa.

BAB III PENETAPAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029
- (2) Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
 - e. RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045; dan
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:
 - a. Renstra Perangkat Daerah;
 - b. sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029; dan
 - c. RKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 6

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan Bupati.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program prioritas Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memberikan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 7

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya;
- b. memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan; dan
- d. memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Bagian Ketiga
Sistematika

Pasal 8

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. goncangan politik;
 - d. krisis ekonomi;
 - e. konflik sosial budaya;
 - f. gangguan keamanan;
 - g. pemekaran Daerah; atau
 - h. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

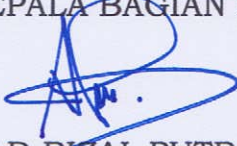
Ttd

IHWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6-60/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Kabupaten Banjar memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banjar pada tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi pendahuluan, gambaran umum daerah, visi, misi dan program pembangunan daerah, program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta penutup.

Prinsip RPJMD adalah:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;

- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan; dan
- h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.



Pemerintah Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar

Tahun 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I-9
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD	I-10
1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan	I-10
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RTRW	I-10
1.3.4 Hubungan RPJMD dengan KLHS	I-10
1.3.5 Hubungan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD.....	I-11
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Sektoral Lainnya	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Penulisan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	II-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	II-20
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-21
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	II-23
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-32
2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-34
2.1.7 Demografi	II-39
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-58
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-59
2.2.2 Kesehatan untuk Semua	II-74
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-76
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-85

2.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-85
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-89
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-92
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-92
2.3.2	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-95
2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-101
2.3.4	Transformasi Digital.....	II-103
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-103
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-104
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	II-109
2.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II-111
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-111
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	II-113
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	II-113
2.4.4	Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-115
2.4.5	Kerjasama Daerah	II-119
2.4.6	Pembangunan Infrastruktur Pendanaan APBN dan APBD	II-130
2.4.7	Kinerja BUMD	II-131
2.4.8	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-134
2.5	Gambaran Keuangan Daerah.....	II-147
2.5.1	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024.....	II-147
2.5.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030	II-189
2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-207
2.6.1	Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor.....	II-207
2.6.2	Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .	II-212
2.6.3	Isu Strategis	II-227
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1	Visi dan Misi	III-1
3.1.1	Visi Daerah.....	III-1
3.1.2	Misi Daerah	III-6
3.2	Tujuan dan Sasaran Daerah	III-10
3.3	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	III-15
3.3.1	Strategi Pembangunan	III-15

3.3.2	Lokus Pembangunan Kewilayahan	III-17
3.3.3	Arah Kebijakan	III-50
3.3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-61
3.3.5	Dukungan Program RPJMD Banjar Tahun 2025-2029 terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029	III-91
3.3.6	Dukungan Program RPJMD Banjar Tahun 2025-2029 terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-98
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-53
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-53
4.2.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-57
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V-3
5.2	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	V-5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Struktur Bab RPJMD Kabupaten Banjar.....	I-12
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjar	II-2
Tabel 2. 2 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Banjar 2019-2024	II-24
Tabel 2. 3 Cakupan Pelayanan PT Air Minum Intan Banjar	II-26
Tabel 2. 4 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Teraliri/Belum Teraliri Oleh PT Air Minum Intan Banjar	II-27
Tabel 2. 5 Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Banjar	II-29
Tabel 2. 6 Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	II-29
Tabel 2. 7 Capaian Komponen Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar	II-30
Tabel 2. 8 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjar.....	II-30
Tabel 2. 9 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Banjar.....	II-35
Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-43
Tabel 2. 11 Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2. 12 Proyeksi Tingkat Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030	II-52
Tabel 2. 13 Proyeksi Komposisi Umur di Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.....	II-54
Tabel 2. 14 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)	II-60
Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2023	II-84
Tabel 2. 16 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banjar Tahun 2020 Per Kecamatan . II- 93	
Tabel 2. 17 Proyeksi Rasio Ketergantungan (dalam Persen) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045	II-94
Tabel 2. 18 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024.....	II-101

Tabel 2. 19 Distribusi Persentase PDRB Non Tambang Menurut Lapangan Usaha (Persen)	II-101
Tabel 2. 20 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023	II-104
Tabel 2. 21 Capaian Kinerja SAKIP Daerah, Indeks SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2. 22 Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjar	II-113
Tabel 2. 23 Capaian SPM Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2. 24 Daftar Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024.....	II-119
Tabel 2. 25 Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Banjar	II-130
Tabel 2. 26 Capaian Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026	II-134
Tabel 2. 27 Realisasi APBD Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2. 28 Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2. 29 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)	II-151
Tabel 2. 30 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)	II-154
Tabel 2. 31 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2. 32 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)	II-157
Tabel 2. 33 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2. 34 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-161
Tabel 2. 35 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-162
Tabel 2. 36 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)	II-163
Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)	II-165
Tabel 2. 38 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)	II-166
Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-167
Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-168

Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-169
Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-172
Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-173
Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-174
Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-175
Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-176
Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar).....	II-177
Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar, 2019–2024 (Rp. Miliar).....	II-178
Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Banjar, 2020–2024 (Rp. Miliar).....	II-179
Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Banjar, 2020–2024 (Rp. Miliar).....	II-180
Tabel 2. 51 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024.....	II-182
Tabel 2. 52 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030....	II-190
Tabel 2. 53 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030	II-194
Tabel 2. 54 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030	II-197
Tabel 2. 55 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030.....	II-201
Tabel 2. 56 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030	II-204
Tabel 2. 57 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor	II-208
Tabel 2. 58 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	II-212
Tabel 2. 59 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2025-2029	II-237
Tabel 2. 60 Target Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 ..	II-238
Tabel 2. 61 Capaian TPB Berdasarkan Pilar di Kabupaten Banjar	II-243
Tabel 2. 62 Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	II-248

Tabel 3. 1 Penyandingan Visi dan Misi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan Indonesia	III-4
Tabel 3. 2 Isu Strategis dan Tujuan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	III-10
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	III-12
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Periode I RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045	III-15
Tabel 3. 5 Strategi Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025- 2029	III-17
Tabel 3. 6 Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Kabupaten Banjar	III-18
Tabel 3. 7 Strategi Kewilayahan Per Kecamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	III-21
Tabel 3. 8 Strategi Kewilayahan Kabupaten Banjar berdasarkan RTRW	III-28
Tabel 3. 9 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	III-50
Tabel 3. 10 Arah Kebijakan Dukungan Pencapaian SPM.....	III-54
Tabel 3. 11 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	III-63
Tabel 3. 12 Definisi dan Rincian Program Prioritas RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	III-80
Tabel 3. 13 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-91
Tabel 3. 14 Dukungan Program RPJMD Banjar Tahun 2025-2045 terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029	III-98
 Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah	 IV-2
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.....	IV-53
Tabel 4. 3 Dukungan Kabupaten Banjar Terhadap Pencapaian Target Indikator Makro di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	IV-55
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	IV-58
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	IV-69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-9
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Banjar	II-2
Gambar 2. 2 Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) di Kabupaten Banjar Tahun 2015- 2024	II-25
Gambar 2. 3 Peta Pelayanan Air Minum PAMSIMAS Kabupaten Banjar	II-28
Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar	II-32
Gambar 2. 5 Akses Sanitasi Masyarakat Kabupaten Banjar	II-33
Gambar 2. 6 Capaian Penanganan Persampahan Kabupaten Banjar	II-34
Gambar 2. 7 Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Banjar	II-36
Gambar 2. 8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banjar	II-38
Gambar 2. 9 Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjar	II-38
Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banjar Tahun 2019-2024	II-40
Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-42
Gambar 2. 12 Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	II-51
Gambar 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Kabupaten Banjar untuk Periode 2025-2029	II-58
Gambar 2. 14 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 II- 59	
Gambar 2. 15 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Kabupaten Banjar Tahun 2020- 2024	II-62
Gambar 2. 16 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Orang). II- 64	
Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-65
Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Nilai)	II-66
Gambar 2. 20 Grafik PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 ...	II-67

Gambar 2. 21 Grafik PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 ...	II-68
Gambar 2. 22 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2. 23 Grafik Indeks Gini Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-71
Gambar 2. 24 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-73
Gambar 2. 25 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-74
Gambar 2. 26 Prevalensi Stunting di Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023	II-75
Gambar 2. 27 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-77
Gambar 2. 28 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-78
Gambar 2. 29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2. 30 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-80
Gambar 2. 31 Peta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	II-83
Gambar 2. 32 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banjar Tahun 2021-2023	II-87
Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2023	II-88
Gambar 2. 34 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2023	II-90
Gambar 2. 35 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2. 36 Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-96
Gambar 2. 37 Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-97
Gambar 2. 38 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024	II-99
Gambar 2. 39 Panjang Jalan Berdasarkan Wewenang Pengelolaan Kabupaten Banjar	II-105

Gambar 2. 40 Persentase Konektivitas, Persentase Kondisi Jalan Mantap, dan Indeks Konektivitas di Kabupaten Banjar.....	II-106
Gambar 2. 41 Kondisi Jalan Kabupaten Banjar	II-107
Gambar 2. 42 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kabupaten Banjar .	II-108
Gambar 2. 43 Grafik Laju Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin 2020-2024	II-110
Gambar 2. 44 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banjar	II-112
Gambar 2. 45 Skor Indeks Daya Saing Daerah	II-114
Gambar 2. 46 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023-2024	II-115
Gambar 2. 47 Total modal dan kepemilikan saham atas BUMD Kabupaten Banjar tahun 2022-2024 (Triliun rupiah)	II-132
Gambar 2. 48 Dividen atas kepemilikan BUMD yang disetorkan kepada Kabupaten Banjar tahun 2023 dan 2024 (Miliar rupiah)	II-133
Gambar 2. 49 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-150
Gambar 2. 50 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2020-2024 (Persen). II-152	
Gambar 2. 51 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 (Persen).....	II-164
Gambar 2. 52 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2024 (Persen)	II-170
Gambar 2. 53 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2019 – 2024	II-172
Gambar 2. 54 Rasio Likuiditas Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)	II-185
Gambar 2. 55 Rasio Solvabilitas Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)	II-187
Gambar 2. 56 Rasio Aktivitas Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen).....	II-188
Gambar 2. 57 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lampiran IV RPJMD Tahun 2025-2029	II-233
Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.	III-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan proses perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini dikembangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan proses perencanaan sebagai proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dari berbagai definisi ini, proses perencanaan dalam pembangunan daerah memiliki peran yang sentral dan strategis bagi efektivitas pembangunan daerah melalui pengelolaan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah saat era otonomi daerah saat ini. Perencanaan pembangunan daerah juga merupakan manifestasi maupun pengejawantahan atas ruang interaksi yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dalam konteks pemerintahan yang berjejaring dan *good governance*.

Perencanaan pembangunan daerah sendiri memiliki dua pendekatan utama yang masing-masing diatur oleh UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Kedua pendekatan tersebut masing-masing adalah pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi hasil. Pendekatan berorientasi proses terdiri dari:

- a. Pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

- b. Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD; dan
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Adapun pendekatan perencanaan berorientasi hasil di antaranya adalah:

- Pendekatan holistik-tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- Pendekatan spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat berbagai ketentuan seperti visi, misi, dan program Kepala Daerah. Ketiga aspek ini dijabarkan melalui berbagai komponen perencanaan seperti tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. RPJMD juga memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun

dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam penyusunannya, RPJMD memiliki beberapa tahapan yang perlu dilalui. Dokumen RPJMD merupakan langkah mula bagi penyusunan Rancangan RPJMD yang nantinya akan digunakan oleh para bakal calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program unggulan yang akan ditawarkan saat Pilkada 2024 serentak. Dokumen RPJMD bertujuan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari perencanaan-perencanaan lain yang perlu diacu dalam proses perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, diantaranya adalah RPJPD, RTRW, dan dokumen perencanaan lain yang relevan. Secara umum, berikut merupakan proses tahapan penyusunan RPJMD yang akan dilalui hingga penetapannya:



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Banjar sebelumnya, yaitu RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, serta dilantiknya pasangan calon H. Saidi Mansyur, S.I.Kom dan H. Said Idrus Al-Habsyi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banjar masa bakti 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 mendorong dibutuhkannya perencanaan pembangunan jangka menengah yang baru. Proses penyusunan RPJMD dimulai dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rancangan RPJMD nantinya disusun dengan memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan direspons melalui rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah. Nantinya, substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah termuat dalam RPJMD akan menjadi acuan dasar bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam merumuskan kebijakan perencanaan strategis instansi daerah melalui rencana strategis perangkat daerah. Oleh karenanya, RPJMD memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, diperlukan berbagai rujukan regulasi yang menjadi dasar hukum penyusunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 mengacu pada beberapa regulasi, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

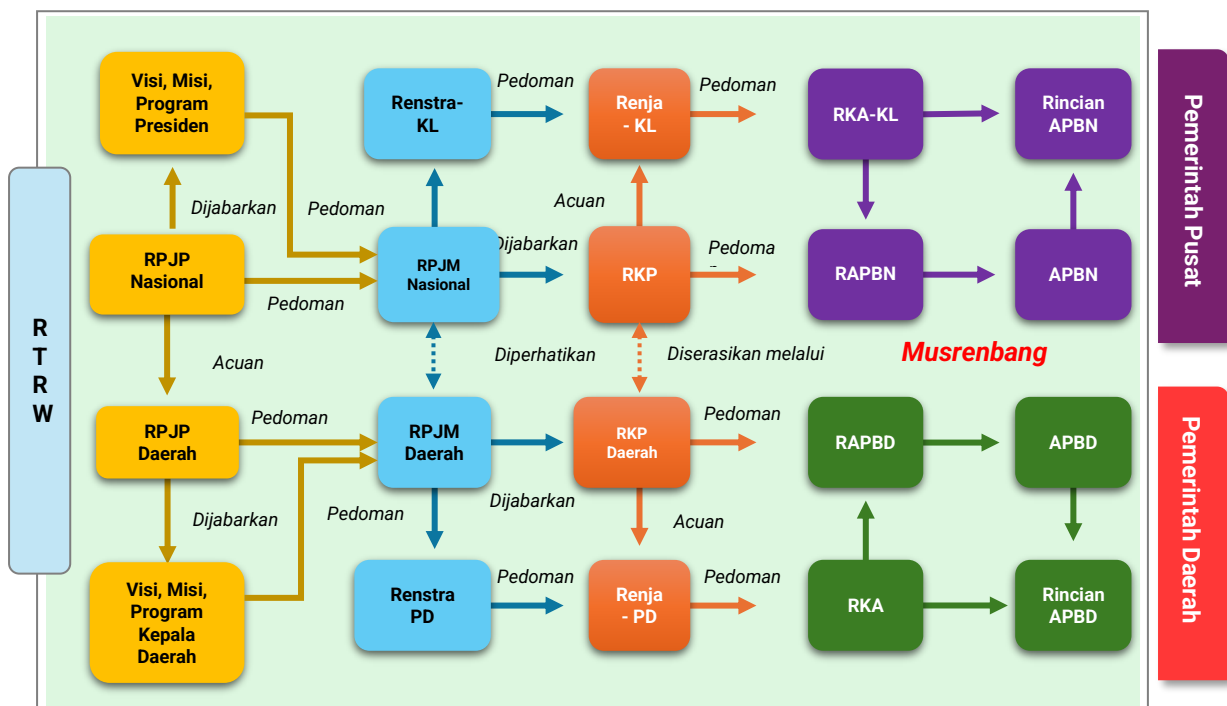
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 175);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491); dan
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4); dan

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11).

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian proses penyusunan RPJMD, yaitu mulai tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga penetapan Perda RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD utuh, seluruh pendekatan perencanaan digunakan dan dipadukan di dalam dokumen. Selain pendekatan yang berorientasi proses, pendekatan perencanaan yang berorientasi substansi juga digunakan. Pendekatan ini berupa tematik-holistik, integratif dan spasial. Melalui pendekatan ini, dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan kuat dengan rencana tata ruang wilayah. Gambaran hubungan RPJMD dengan seluruh dokumen perencanaan makro dan tata ruang sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan hubungan antar dokumen seperti terdapat di dalam gambar di atas, maka penjelasan hubungan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Sebagai penjabaran tahap pertama perencanaan jangka panjang, maka RPJMD mulai mengacu pada substansi dokumen RPJPD. Substansi RPJPD yang ditelaah dan diacu antara lain isu-isu strategis jangka panjang, visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan periode pertama dan sasaran pokok. Telaah tersebut diharapkan mampu merumuskan isu strategis jangka menengah dalam rangka merespons isu jangka panjang, serta perumusan rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari penjabaran arah kebijakan periode pertama pembangunan jangka panjang.

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan RPJMD berkesesuaian waktu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. RPJMN tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. Pembangunan jangka menengah daerah dengan demikian juga memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah.

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RTRW

RPJMD harus mulai membangun sinkronisasi antara perencanaan makro dengan perencanaan tata ruang. Berdasarkan perkembangan Kabupaten Banjar yang dinamis, maka RTRW Kabupaten Banjar mengalami perubahan. RTRW Kabupaten Banjar memiliki tujuan berupa mewujudkan daerah sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana.

1.3.4 Hubungan RPJMD dengan KLHS

KLHS akan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang kemudian akan menjadi salah satu landasan bagi perumusan isu-isu strategis

pembangunan jangka menengah. Selain itu, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD. Dengan demikian, Integrasi dokumen KLHS di dalam RPJMD untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan di dalam perencanaan pembangunan.

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD

RPJMD harus membangun keterhubungan yang sinergis dengan perencanaan lebih operasional di dalam Renstra maupun perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterhubungan ini membangun perencanaan yang sinergis mulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan tercapai pendekatan perencanaan dan penganggaran berupa money follow program, program follow result, serta penganggaran berbasis kinerja.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Sektorial Lainnya

RPJMD sebagai dokumen perencanaan induk suatu daerah perlu memerhatikan berbagai dokumen sektorial lainnya. Berbagai dokumen sektorial seperti *masterplan*, rencana induk, dan dokumen lain yang relevan menjadi dasar bagi perumusan-perumusan kebijakan umum yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Beberapa dokumen sektorial yang dimaksud diantaranya meliputi Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID), Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK), dan berbagai dokumen sektorial lainnya. Penajaman-penajaman perencanaan sektorial yang termuat dalam dokumen ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan-kebijakan perencanaan daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program, serta landasan bagi penyusunan RPJMD secara utuh. Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD, yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat analisis mendalam kinerja pembangunan dan penganggaran daerah, serta memetakan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan.
2. Tersedianya dokumen yang merumuskan rekomendasi kebijakan yang selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan muatan RPJMD secara utuh, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program.
3. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk persiapan penyusunan Renstra.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Struktur Bab RPJMD Kabupaten Banjar

Bab	Penjelasan
Bab I Pendahuluan	Bab I memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.
Bab II Gambaran Umum Daerah	Bab II memuat gambaran umum meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga turut memuat gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah.
Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bab III memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

Bab	Penjelasan
Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bab IV memuat daftar program perangkat daerah yang digunakan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah.
Bab V Penutup	Bab V memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah (IKD).

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

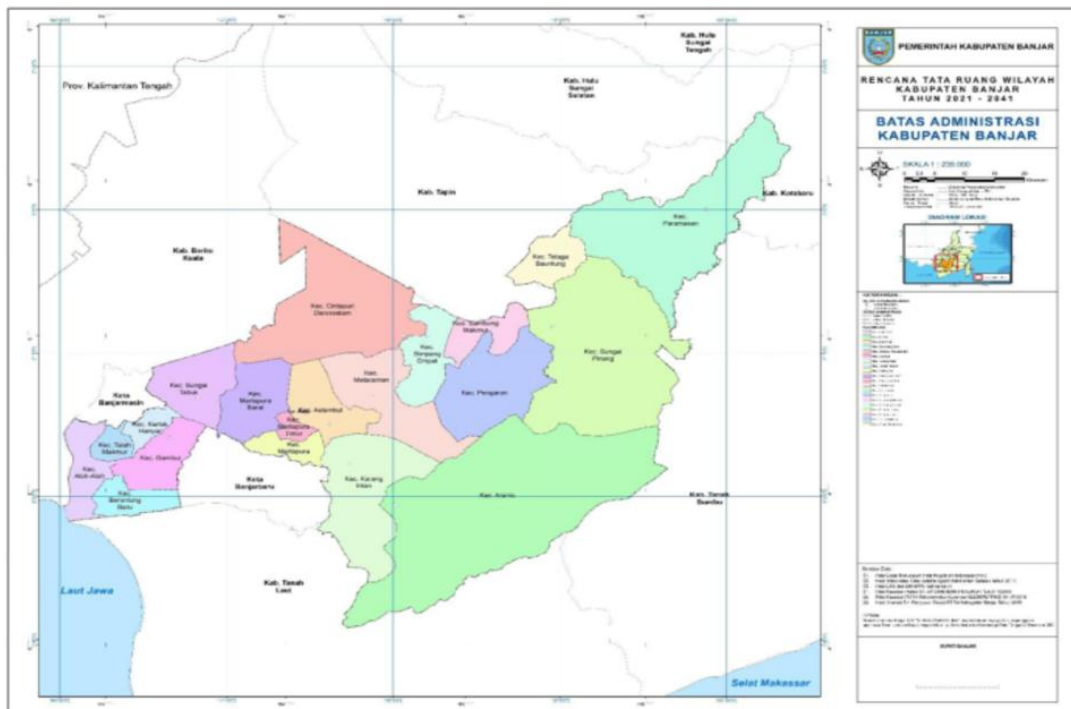
Aspek geografi Kabupaten Banjar memuat pendekatan keruangan yang bertumpu pada tiga konsep utama yaitu konsep lokasi, geofisik dan biofisik lahan, dan interaksi manusia dengan lingkungannya.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Banjar terletak pada koordinat antara 2°49' 55"- 3° 43' 38" Lintang Selatan dan 114° 30' 20" – 115° 33' 37" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banjar memiliki luas 4.589 km² atau 458.908,87 Ha, yang secara administratif berada pada bagian tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin;
2. Sebelah Selatan : Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut;
3. Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu;
4. Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Banjar

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041

Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan yang mencakup 277 desa dan 13 kelurahan dengan luasan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjar

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Aluh-Aluh	9.906,91	11	Martapura Timur	2.243,34
2	Aranio	100.753,13	12	Mataraman	23.405,82
3	Astambul	12.850,45	13	Paramasan	52.823,06
4	Beruntung Baru	7.336,19	14	Pengaron	26.045,54
5	Cintapuri Darussalam	44.869,07	15	Sambung Makmur	8.235,61
6	Gambut	11.730,55	16	Simpang Empat	12.190,32
7	Karang Intan	30.549,62	17	Sungai Pinang	64.077,86
8	Kertak Hanyar	4.061,61	18	Sungai Tabuk	15.159,30
9	Martapura	5.368,41	19	Tatah Makmur	3.679,65
10	Martapura Barat	14.487,22	20	Telaga Bauntung	9.135,20

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Banjar tahun 2021-2041

Kabupaten Banjar terletak pada ketinggian antara 0 - 1.878 meter dari permukaan laut (mdpl). Berdasarkan ketinggian wilayahnya, 55,54% kawasan Kabupaten Banjar berada pada ketinggian 50 – 300 mdpl, 35% kawasan berada di ketinggian 0 – 7 mdpl, dan sebanyak 9,45% berada pada ketinggian lebih dari 300 mdpl. Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar yang terletak lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar, sehingga sebagian wilayah Banjar selalu tergenang oleh air permukaan (29,93%) serta sebagian wilayah lagi tergenang secara periodik (0,58%). Bentuk morfologi wilayah Kabupaten Banjar cukup bervariasi dikarenakan kondisi kemiringan lereng dikategorikan dalam 4 (empat) kelas kemiringan, yang meliputi dataran landai, daerah yang bergelombang, berbukit, serta pegunungan.

Kondisi tanah wilayah Kabupaten Banjar didominasi dengan jenis tanah yang memiliki tekstur halus (77,62%), yang meliputi tanah liat, tanah berlempung, tanah berpasir dan berdebu. Selain itu, sekitar 14,93% wilayah Kabupaten Banjar memiliki tekstur tanah sedang yakni jenis lempung, berdebu, dan liat berpasir. Sisanya sebesar 5,39% wilayah Kabupaten Banjar memiliki tekstur tanah kasar yaitu pasir berlempung dan pasir berdebu. Terkait dengan kondisi kedalaman tanah yang efektif bagi akar tanaman/tumbuhan yang dapat dengan mudah mengambil air, wilayah Banjar secara umum merupakan lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm memiliki proporsi sebesar 66,45%, selanjutnya wilayah dengan kedalaman efektif antara 60 – 90 cm sebesar 18,72% serta wilayah dengan kedalaman tanah efektif antara 30 – 60 cm hanya sekitar 14,83% dari total luas yang ada.

Wilayah Kabupaten Banjar terbentuk dari jenis tanah organosol dan glei humus dengan bahan induk aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi hampir 28,57% dari luas wilayah keseluruhan. Selanjutnya, tanah aluvial dengan bahan induk aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72% wilayah. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29% wilayah kabupaten. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84% wilayah. Terakhir

adalah jenis tanah kompleks podsolik merah kuning dan latosol dengan bahan induk batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Kondisi klimatologi Kabupaten Banjar salah satunya digambarkan menggunakan rata-rata jumlah curah hujan hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Banjarbaru tahun 2023 tercatat sebesar 204,09 mm/tahun. Hujan dengan intensitas rata-rata terendah terjadi pada bulan September (4,5 mm/tahun) sedangkan hujan dengan intensitas rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Februari (564,60 mm). Kondisi hujan di Kabupaten Banjar dapat digambarkan dari rata-rata jumlah hari hujan per bulan, yakni pada tahun 2017 sebanyak 16 hari hujan. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari (25 hari) sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September (4 hari).

Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Banjar berasal dari jaringan sungai dan sistem kanal yang ada. Sebagian besar sungai yang ada mempunyai sumber tangkapan air pada kawasan kaki Pegunungan Meratus dan semuanya mengalir ke barat menyatu membentuk Sungai Alalak, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa. Ketiga sungai tersebut mengalir sepanjang tahun sehingga membentuk daerah aliran sungai (DAS). Selain jaringan sungai, Kabupaten Banjar memiliki Bendungan Riam Kanan seluas 161.993 Ha yang dijadikan sumber air bagi pembangkit listrik PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor dan irigasi bagi wilayah pertanian. Luas tiap DAS di Kabupaten Banjar yaitu:

1. Riam Kanan, memiliki daerah aliran sungai dengan luas 115.378 Ha atau sebesar 25,31% menunjukkan luas DAS yang paling terkecil.
2. Riam Kiwa memiliki daerah aliran sungai dengan 191.132 Ha atau sebesar 41,74% menunjukkan DAS yang paling terluas.
3. DAS Alalak seluas 150.885 Ha atau sebesar 32,95%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042, Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai:

1. Bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam sistem pusat permukiman pada rencana struktur ruang wilayah Kalimantan Selatan. PKN merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi. PKN Kalimantan Selatan terdapat di kawasan perkotaan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa industri, industri kelautan, pertanian dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan.
2. Salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem pusat permukiman pada rencana struktur ruang wilayah Kalimantan Selatan. PKW merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. PKW di Kabupaten Banjar adalah Martapura yang memiliki fungsi sebagai pusat pariwisata dan kegiatan keagamaan skala regional dan nasional, serta pusat perdagangan dan jasa skala internasional.
3. Bagian dari kawasan lindung pada rencana pola ruang wilayah Kalimantan Selatan, meliputi: badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung dan kawasan lindung gambut), kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sultan Adam dan Taman Hutan Raya Sultan Adam), dan kawasan ekosistem mangrove.
4. Bagian dari kawasan budidaya pada rencana pola ruang wilayah Kalimantan Selatan, meliputi: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan transportasi.
5. Bagian dari kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut (Banjarbakula) pada Kawasan Strategis Nasional (KSN). KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

6. Bagian dari Kawasan Rawa Batang Banyu yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. KSP merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan Kawasan Rawa Batang Banyu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kawasan Rawa Batang Banyu yang maju dan sejahtera melalui pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan.
7. Bagian dari KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: kawasan Pegunungan Meratus dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Penetapan Kawasan Pegunungan Meratus bertujuan untuk mewujudkan Pegunungan Meratus sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Sedangkan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya WP3K (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Kabupaten Banjar memiliki potensi pengembangan wilayah yang strategis di wilayah Kalimantan, yaitu:

1. Potensi industri kecil yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Banjar yaitu industri kecil penggosokan batu mulia, penggosokan batu permata, serta industri kecil kerajinan emas dan perak;
2. Potensi pertanian yang besar khususnya komoditi padi mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
3. Kabupaten Banjar merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Banjar Bakula;

4. Terdapat beberapa kawasan yang memiliki pertumbuhan cepat, Kawasan tersebut berbatasan dengan Kota Banjarmasin. Kawasan-kawasan tersebut antara lain Gambut, Kertak Hanyar, dan Sungai Tabuk;
5. Posisi Kabupaten Banjar sebagai penghubung utama antarwilayah di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Banjar merupakan salah satu simpul kegiatan perekonomian wilayah di Kalimantan Selatan.
6. Potensi industri kecil yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Banjar yaitu industri kecil penggosokan batu mulia, penggosokan batu permata, serta industri kecil kerajinan emas dan perak di Martapura di Kabupaten Banjar, selain itu terdapat beberapa potensi industri di Kabupaten Banjar, diantaranya:
 - a. Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan
 - b. Industri *Rubber Sheet Smoked* (RSS) di Kecamatan Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai Pinang
 - c. Industri Perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh

2.1.1.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 memberikan rekomendasi KLHS terhadap sasaran, strategi dan arah kebijakan yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program RPJMD. Rekomendasi KLHS disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat menjadi 82,20% pada tahun 2030	1. Peningkatan kesadaran masyarakat (terutama penduduk usia 13-15 tahun) untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP/MTs/ sederajat 2. Melakukan pendataan penduduk (usia 13-15 tahun) yang menempuh pendidikan non-formal setingkat SMP/MTs/ sederajat 3. Peningkatan dan pemerataan akses layanan Pendidikan tingkat SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Banjar
2	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat menjadi 106,94% pada tahun 2030	1. Peningkatan kesadaran masyarakat (terutama penduduk usia 13-15 tahun) untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP/MTs/ sederajat 2. Melakukan pendataan penduduk (usia 13-15 tahun) yang menempuh pendidikan non-formal setingkat SMP/MTs/ sederajat 3. Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan tingkat SMP/MTs/ sederajat

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
3		Pendidikan	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah penduduk (umur ≥ 15 tahun) menjadi 8,8 tahun pada tahun 2030	1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun 2. Melakukan pendataan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan non-formal setingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat
4		Pendidikan	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B menjadi 84,20% pada tahun 2030	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta manajemen satuan pendidikan SD/MI sehingga dapat memperoleh akreditasi Minimal B.
5		Pendidikan	Meningkatnya proporsi anak di atas standar kompetensi minimum dalam tes PISA (programme for international student assessment) menjadi 34,1% (membaca) dan 30,9% (matematika) pada tahun 2030	Melaksanakan tes PISA (programme for international student assessment) atau tes sejenis untuk kemampuan membaca dan matematika bagi siswa kelas 4 dan 6 serta kelas 9
6	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pendidikan	Meningkatnya persentase guru SD dan SMP yang bersertifikat pendidik	Meningkatkan kualitas guru SD dan SMP serta manajemen tenaga pendidik sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
7	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Kesehatan	Meningkatnya proporsi perempuan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 95% pada tahun 2030	1. 2. 3. Peningkatan pengetahuan tentang keamanan proses persalinan pada ibu hamil Peningkatan dan pemerataan sistem layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
8		Kesehatan	Meningkatnya persentase perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 95% pada tahun 2030	1. Peningkatan pengetahuan tentang keamanan proses persalinan pada ibu hamil 2. Peningkatan dan pemerataan sistem layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 3. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan
9		Kesehatan	Penurunan angka kematian ibu (AKI) menjadi 183 pada tahun 2030	1. 2. 3. 4. Peningkatan pengetahuan tentang keamanan proses persalinan pada ibu hamil Peningkatan dan pemerataan sistem layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
10	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Kesehatan	Peningkatan angka imunisasi lengkap menjadi 90% pada tahun 2030	1. Peningkatan pengetahuan tentang imunisasi 2. Peningkatan dan pemerataan sistem layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 3. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan 4. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan
11	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Kesehatan	Penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2030	1. Peningkatan pengetahuan tentang stunting 2. Peningkatan dan pemerataan sistem layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 3. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan 4. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan
12	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Kesehatan	Terkendali penyalahgunaan narkoba menjadi 0,02% pada tahun 2030	1. Sosialisasi penyalahgunaan narkoba 2. Peningkatan kesadaran tentang bahaya narkoba 3. Peningkatan fasilitas rehabilitasi narkoba 4. Peningkatan program pendidikan penyalahgunaan narkoba

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
13	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk	Kesehatan	Penurunan presentase merokok menjadi 8,7% pada tahun 2030	1. Peningkatan kampanye anti rokok 2. Peningkatan pendidikan kesehatan di sekolah dan masyarakat
14	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Peningkatan akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan menjadi 14% pada tahun 2030	1. Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air minum 2. Peningkatan melibatkan masyarakat untuk penyediaan air bersih
15	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun dan Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi 30% pada tahun 2030	1. Pemetaan risiko bencana 2. Perencanaan tata ruang 3. Peningkatan infrastruktur tahan bencana
16	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi 95% pada tahun 2030	1. 2. 3. Peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk daerah pedesaan Memastikan dana jaminan kesehatan digunakan dengan semestinya Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan
17	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	Peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN menjadi 98% pada tahun 2030	1. Peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk daerah pedesaan 2. Memastikan dana jaminan kesehatan digunakan dengan semestinya 3. Peningkatan jumlah

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan
18	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun dan Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Sosial	Peningkatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan menjadi 74,57% pada tahun 2030	1. Peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk daerah pedesaan 2. Memastikan dana jaminan kesehatan digunakan dengan semestinya 3. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan
19	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, dan Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Sosial	Peningkatan jumlah korban lebih besar dari 0,2 per 100.000 jiwa/tahun	1. Peningkatan pelatihan dan simulasi tanggap darurat 2. Pengadaan sistem peringatan dini yang efektif 3. Peningkatan pendidikan tentang risiko bencana
20	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Sosial	Target maksimal 0,10% PDB	1. Pengembangan infrastruktur tahan bencana 2. Diversifikasi ekonomi 3. Pendanaan mitigasi risiko

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
21	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	Terlaksana menjadi 183 pada tahun 2030 penyediaan pendidikan layanan khusus (SMAB = Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	1. Pelaksanaan SMAB 2. Peningkatan pendidikan mitigasi bencana
22	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penurunan Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki (L) dan anak Perempuan (P)	1. Peningkatan pelatihan guru dan tenaga pendidik 2. Peningkatan pendidikan tentang kekerasan terhadap anak 3. Peningkatan kampanye anti kekerasan di media sosial
23	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pangan	Penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan menjadi 5% dari jumlah penduduk	1. Peningkatan produksi pangan 2. Pengembangan infrastruktur pertanian 3. Penguatan ketahanan pangan rumah tangga
24	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan hidup	Tercapainya target 20% pengurangan sampah	1. Peningkatan program daur ulang 2. Peningkatan kampanye kesadaran masyarakat 3. Pengurangan plastik sekali pakai
25	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	Lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran air	1. Peningkatan konservasi lahan dan hutan 2. Peningkatan pengelolaan limbah domestik dan industri 3. Pemantauan dan analisis kualitas air

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
26	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	1. Peningkatan sistem pengumpulan dan transportasi limbah B3 2. Peningkatan kerjasama pemerintah dan industri 3. Peningkatan sosialisasi pengurangan limbah B3
27	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menjadi 100%	1. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil 2. Peningkatan pelayanan mobile
28	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya proporsi anak yang memiliki akta kelahiran menjadi 100%	1. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil 2. Peningkatan pelayanan mobile
29	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Menurunnya unmet need KB menjadi 9,9%	1. Peningkatan akses ke layanan KB 2. Pengintegrasian layanan KB dengan layanan kesehatan lainnya 3. Kemitraan dengan sektor pendidikan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
30	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peningkatan pemahaman pasangan usia subur tentang kontrasepsi modern menjadi 85%	1. Peningkatan akses ke layanan KB 2. Pengintegrasian layanan KB dengan layanan kesehatan lainnya 3. Kemitraan dengan sektor pendidikan
31	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) menjadi 18%	1. Peningkatan pendidikan seksual yang komprehensif 2. Penyediaan program konseling dan mentor 3. Peningkatan kampanye di media sosial
32	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peningkatan angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi 23,5%	1. Peningkatan pendidikan seksual yang komprehensif 2. Penyediaan program konseling dan mentor 3. Peningkatan kampanye di media sosial
33	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peningkatan kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur menjadi 66%	1. Peningkatan pendidikan seksual yang komprehensif 2. Penyediaan program konseling dan mentor 3. Peningkatan kampanye di media sosial
34	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Komunikasi dan informatika	Peningkatan pengguna internet menjadi 82,30%	1. Program subsidi dan akses terjangkau 2. Peningkatan akses internet di ruang publik 3. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
35	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Peningkatan akses UMKM menjadi 30,8% pada tahun 2030	1. Peningkatan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro 2. Penyederhaan proses pemberian kredit 3. Skema jaminan kredit bersama
36	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Energi dan sumber daya mineral	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik menjadi 100% pada tahun 2023	1. Program subsidi listrik 2. Perluasan jaringan listrik 3. Kemitraan dengan swasta
37	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Statistik sektoral	Peningkatan pendapatan pemerintah menjadi 11,4-12% pada tahun 2023	1. Reformasi pajak 2. Diversifikasi pajak 3. Efisiensi pengeluaran publik
38	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Statistik sektoral	Peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB menjadi 8,41-8,87% PDRB pada tahun 2030	1. Reformasi pajak 2. Diversifikasi pajak 3. Efisiensi pengeluaran publik
39	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Statistik sektoral	Peningkatan Laju pertumbuhan PDB per kapita	1. Stimulus investasi 2. Pengembangan sektor pertanian 3. Peningkatan ekspor

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
40	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Statistik sektoral	Peningkatan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur menjadi 8,1% pada tahun 2023	1. Investasi dalam infrastruktur manufaktur 2. Peningkatan keterampilan kerja 3. Pembentukan klaster industri
41	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Statistik sektoral	Peningkatan laju pertumbuhan PDB pariwisata manufaktur menjadi 4,5% pada tahun 2023	1. Pengembangan destinasi wisata 2. Promosi pariwisata 3. Pemberdayaan komunitas lokal
42	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Statistik sektoral	Peningkatan nilai tambah pertanian menjadi Rp 59,9 juta	1. Peningkatan kualitas benih 2. Pengembangan infrastuktur pertanian 3. Pengembangan produk bernilai tambah
43	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Statistik sektoral	Peningkatan nilai tambah pertanian menjadi 21%	1. Peningkatan kualitas produk 2. Peningkatan sertifikasi dan standar kualitas 3. Peningkatan efisiensi energi
44	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Statistik sektoral	Peningkatan presentase tenaga kerja formal menjadi 51%	1. Reformasi regulasi tenaga kerja 2. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan 3. Perbaikan jaminan sosial
45	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta	Statistik sektoral	Peningkatan presentase tenaga kerja sektor industri menjadi 15,7%	1. Reformasi regulasi tenaga kerja 2. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
	mendorong inovasi			3. Perbaikan jaminan sosial
46	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Statistik sektoral	Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan ISO menjadi 10%	1. Pemberiaan bimbingan dan konsultasi 2. Fasilitas sertifikasi 3. Kolaborasi dengan asosiasi industri
47	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Statistik sektoral	Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,14	1. Pengembangan kultur integritas 2. Partisipasi penuh pemangku kebijakan 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
48	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Statistik sektoral	Peningkatan persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menjadi 80%	1. Pembentukan tim khusus SAKIP 2. Standarisasi indikator kinerja 3. Inklusi aspek kepatuhan dan integritas
49	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Statistik sektoral	Peningkatan persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik menjadi 70%	1. Pembentukan tim reformasi 2. Pengadaan pelatihan dan pengembangan SDM 3. Pengukuran kinerja

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan Pemerintah Daerah	Rekomendasi	
			Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
50	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Statistik sektoral	Peningkatan persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik menjadi 80%	1. Penyusunan standar pelayanan 2. Penyusunan standar sistem pemantauan kinerja 3. Peningkatan keterbukaan dan transparansi

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banjar, 2025-2029

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil analisa kondisi keruangan fisik dan sosial wilayah dapat dirumuskan beberapa potensi sumber daya alam Kabupaten Banjar, yakni:

1. Kabupaten Banjar memiliki sumber daya air yang melimpah selain sungai, yaitu Bendungan Riam Kanan seluas 161.993 Ha. Beberapa sungai besar yang mengalir sepanjang tahun antara lain Sungai Alalak, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa. Sungai yang membentuk daerah/wilayah Aliran sungai adalah Riam Kanan, Riam Kiwa dan Alalak. Potensi sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata, pendukung kegiatan budidaya pertanian dan mendukung kawasan minapolitan serta sebagai pendukung transportasi di wilayah Kabupaten Banjar;
2. Sebagian besar wilayah berupa hutan dengan luas 86.510 Ha yang memiliki keanekaragaman hayati merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banjar;
3. Adanya potensi sumber daya alam berupa bahan galian dan mineral berupa batu bara, emas, dan batu mulia;
4. Potensi industri kecil yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Banjar yaitu industri kecil penggosokan batu mulia, penggosokan batu permata, serta industri kecil kerajinan emas dan perak;

5. Potensi pertanian yang besar khususnya komoditi padi mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
6. Kabupaten Banjar merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Banjar Bakula;
7. Terdapat beberapa kawasan yang memiliki pertumbuhan cepat, Kawasan tersebut berbatasan dengan Kota Banjarmasin. Kawasan-kawasan tersebut antara lain Gambut, Kertak Hanyar, dan Sungai Tabuk;
8. Posisi Kabupaten Banjar sebagai penghubung utama antarwilayah di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Banjar merupakan salah satu simpul kegiatan perekonomian wilayah di Kalimantan Selatan.
9. Potensi industri kecil yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Banjar yaitu industri kecil penggosokan batu mulia, penggosokan batu permata, serta industri kecil kerajinan emas dan perak di Martapura di Kabupaten Banjar, selain itu terdapat beberapa potensi industri di Kabupaten Banjar, diantaranya:
 - a. Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan
 - b. Industri *Rubber Sheet Smoked* (RSS) di Kecamatan Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai Pinang
 - c. Industri Perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pada kajian ini, penentuan D3TLH Kabupaten Banjar mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) sebagai berikut:

1. Daya dukung lahan permukiman

Daya dukung lahan permukiman didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 2022 sebanyak 579.910 jiwa dan asumsi kebutuhan lahan permukiman layak 60 m²/orang maka kebutuhan lahan permukiman di kabupaten Banjar ± 34.794.600 m². Berdasarkan hasil analisis spasial, lahan permukiman di Kabupaten Banjar tahun 2022 seluas ± 88.625.506 m². Dengan demikian, DDL_{Pm} Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,5 yang berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk hingga ± 1.477.092 jiwa.

2. Daya dukung pangan

Daya dukung pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas pertanian untuk menghasilkan makanan (terutama beras) yang memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 2022 sebanyak 579.910 jiwa dengan angka konsumsi beras 124 kg/kapita/tahun, maka jumlah konsumsi beras di Kabupaten Banjar tahun 2022 sebanyak 71.909 ton. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah produksi padi di Kabupaten Banjar tahun 2022 sebanyak 141.592,25 ton atau setara dengan 83.780 ton gabah kering giling (GKG). Dengan demikian, DDP_n Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 1,17 yang berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi hingga ± 675.645 penduduk.

3. Daya dukung air

Daya dukung air didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan air secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan berbagai jenis pemanfaatan. Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.146/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, diketahui bahwa 17,60% (807,61 Km²) wilayah Kabupaten Banjar berstatus melampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), sedangkan 82,40% (3.781,39 Km²) berstatus belum melampaui

(ketersediaan air lebih besar daripada kebutuhan air). Sementara itu, mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) diketahui bahwa 32,40% (1.486,82 Km²) wilayah Kabupaten Banjar berstatus telah buruk/terlampau (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 10,32% (473,43 Km²) berstatus sedang/bersyarat (kebutuhan air hampir seimbang dengan ketersediaan air), dan 57,28% (2.628,75 Km²) berstatus belum baik/aman (ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan air). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 6.403.353.583 m³/tahun dan total kebutuhan air sebesar 2.635.123.871 m³/tahun (kebutuhan domestik 16.516.542 m³/tahun dan non-domestik 2.618.607.329 m³/tahun), maka DDA Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,43 yang berarti termasuk dalam kategori “sedang/bersyarat”.

2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan di Kabupaten Banjar digambarkan dengan beberapa capaian kinerja pemerintah daerah tentang pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi, pelayanan ketenagalistrikan, air bersih, dan akses terhadap pangan.

2.1.4.1 Ketenagalistrikan

Kondisi pelayanan kelistrikan di suatu daerah menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembangunan. Tersedianya listrik bagi rumah tangga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Dengan tersedianya listrik untuk diakses, masyarakat dapat memiliki akses terhadap berbagai kebutuhan seperti penerangan, komunikasi, dan sebagainya. Kondisi kelistrikan di suatu wilayah dapat digambarkan melalui data rasio elektrifikasi dan jumlah pelanggan listrik PLN di suatu wilayah. Rasio elektrifikasi ditemukan melalui pembagian antara jumlah wilayah yang sudah teraliri listrik dibagi dengan jumlah total keseluruhan wilayah. Berikut merupakan data mengenai rasio elektrifikasi di Kabupaten Banjar selama tahun 2019-2024.

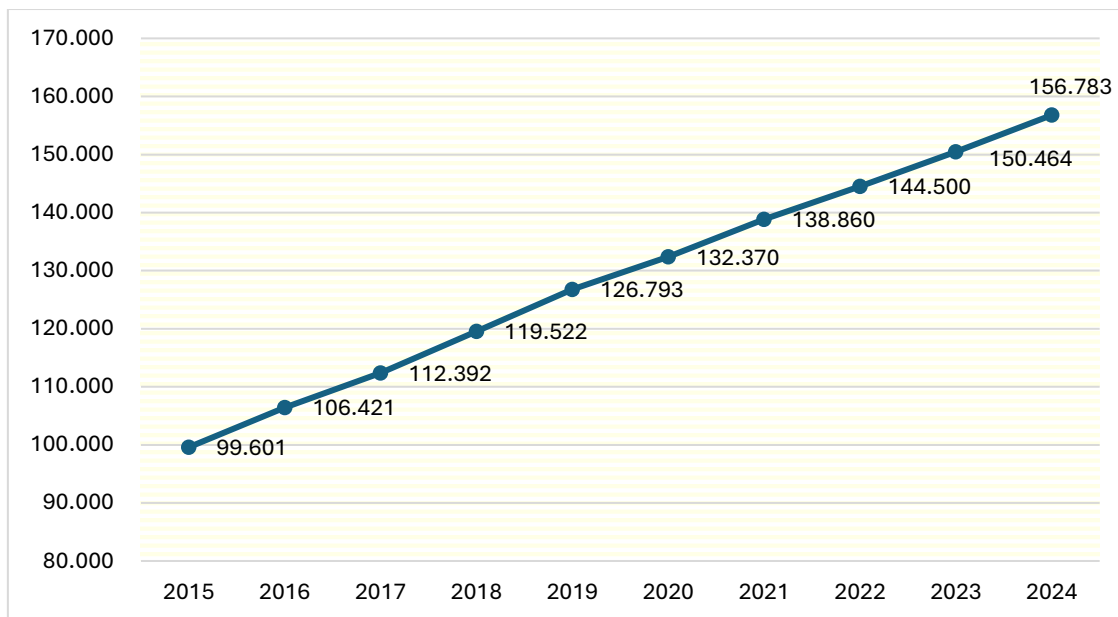
Tabel 2. 2 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Banjar 2019-2024

Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Banjar	93,66%	99,22%	99,41%	100,85%	100%*	100%*

Sumber: Satu Data Banua Kalimantan Selatan, 2024

Rasio elektrifikasi Kabupaten Banjar selama tahun 2019-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat dengan cakupan layanan telah mencapai 100%. Pertumbuhan rasio elektrifikasi ini menunjukkan peningkatan cakupan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Banjar secara umum dengan meningkatnya cakupan wilayah yang teraliri listrik. Dalam rasio elektrifikasi yang ditampilkan di atas merupakan hasil pembagian antara jumlah rumah tangga (RT) yang teraliri listrik (baik PLN maupun non-PLN) dengan total jumlah RT yang ada di Kabupaten Banjar. Peningkatan rasio elektrifikasi ini menunjukkan peningkatan infrastruktur kelistrikan yang ada di Kabupaten Banjar, sehingga tantangan ke depannya adalah mempertahankan rasio elektrifikasi yang sudah cukup baik di Kabupaten Banjar dengan pemeliharaan rutin infrastruktur-infrastruktur pendukung kelistrikan demi terjaganya rasio elektrifikasi yang optimal.

Pada tahun 2022 rasio elektrifikasi di Kabupaten Banjar bahkan sudah melebihi 100 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat RT yang memiliki akses listrik dari dua sumber sekaligus, yaitu listrik yang bersumber baik dari PLN maupun non-PLN. Hal ini diketahui dari jumlah RT yang dialiri listrik PLN sudah mencakup jumlah total RT keseluruhan di Kabupaten Banjar, yaitu sebanyak 170.126 RT. Data selanjutnya yang dapat menggambarkan kondisi kelistrikan adalah jumlah pelanggan PT PLN (Persero) di Kabupaten Banjar. Walaupun tidak semua sumber listrik dihasilkan dari PT PLN, tetapi data ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan cakupan kelistrikan di suatu wilayah. Berikut merupakan data mengenai data pelanggan PT PLN di Kabupaten Banjar 2015-2024.



Gambar 2. 2 Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar Dalam Angka 2016-2025

Jumlah pelanggan listrik Unit Layanan Pelanggan (ULP) Martapura dan Gambut di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 2015-2024 dengan rata-rata pertumbuhan pelanggan listrik setiap tahunnya tercatat sebesar 4,91 persen. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kualitas infrastruktur kelistrikan daerah yang meliputi jaringan distribusi listrik. Peningkatan pelanggan listrik ini juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banjar secara keseluruhan, mengingat listrik merupakan suatu kebutuhan yang cukup dikategorikan sebagai esensial dalam era digital saat ini. Meningkatnya jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Banjar juga menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, terlebih pelanggan listrik PT PLN sendiri bukan hanya terdiri dari rumah tangga, tetapi juga dari pelaku ekonomi seperti perusahaan maupun perkantoran. Meningkatnya jumlah pelanggan listrik ini juga menunjukkan peningkatan daya saing perekonomian Kabupaten Banjar secara umum, mengingat aktivitas perekonomian yang modern juga erat kaitannya dengan akses kelistrikan.

2.1.4.2 Air Bersih

Pelayanan air bersih juga mencakup air minum bagi kebutuhan masyarakat. Untuk melihat kondisi cakupan layanan air minum dapat dilihat data mengenai aliran PT Air Minum Intan Banjar di Kabupaten Banjar. Persentase cakupan pelayanan eksisting SPAM PT Air Minum Intan di tahun 2021 sebesar 43,75 persen dan telah mencapai 60,89 persen pada tahun 2024. Berikut merupakan data mengenai jumlah desa/kelurahan baik yang sudah dialiri maupun yang belum dialiri di Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 3 Cakupan Pelayanan PT Air Minum Intan Banjar

Kecamatan	2022	2023	2024
BNA	8.171	8.659	9.344
MARTAPURA 1	3.457	3.548	3.937
MARTAPURA 2	4.246	4.659	4.952
DALAM PAGAR	252	242	239
KARANG INTAN	216	210	216
CABANG	9.242	9.637	9.915
GAMBUT	9.242	9.637	9.915
CABANG 1 1	31.559	33.618	35.445
SEI TABUK	6.137	6.493	6.673
KERTAK HAWAR	14.229	15.457	16.792
ALUH ALUH	672	637	627
TAMBAK SIRANG	4.699	4.819	5.045
TATAH MAKMUR	5.134	5.453	5.479
BERUNTUNG BARU	688	759	829
CABANG 1 1 1	5.894	6.032	6.063
ASTAMBUL	1.348	1.324	1.436
MATARAMAN	1.692	1.694	1.665
SIMPANG EMPAT	1.079	1.123	1.078
PENGARON	916	935	933
SAMBUNG MAKMUR	385	388	382
SUNGAI PINANG	474	568	569
Kabupaten Banjar	109.732	115.892	121.534

Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka Tahun 2025

Pelayanan air minum di Kabupaten Banjar pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pelayanan pada tahun 2015, hal ini dikarenakan telah dilakukan penyusunan dokumen Rispam pada tahun 2015, sehingga perencanaan pelayanan air minum Kabupaten Banjar lebih tertata. Selain itu terdapat IPA baru yang beroperasi yaitu IPA Sambung

Makmur dimana pada tahun 2015 belum beroperasi dan IPA Karang Intan yang tahun 2020 ini sudah tidak beroperasi. Oleh karena itu pada tahun 2020 ini untuk wilayah pelayanan Cab 3 Sambung Makmur sudah dilayani oleh IPA Sambung Makmur. Kondisi di atas menunjukkan bahwa program-program SPAM yang sudah terlaksana oleh PT Air Minum sudah cukup baik meskipun belum maksimal.

Tabel 2. 4 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Teraliri/Belum Teraliri Oleh PT Air Minum Intan Banjar

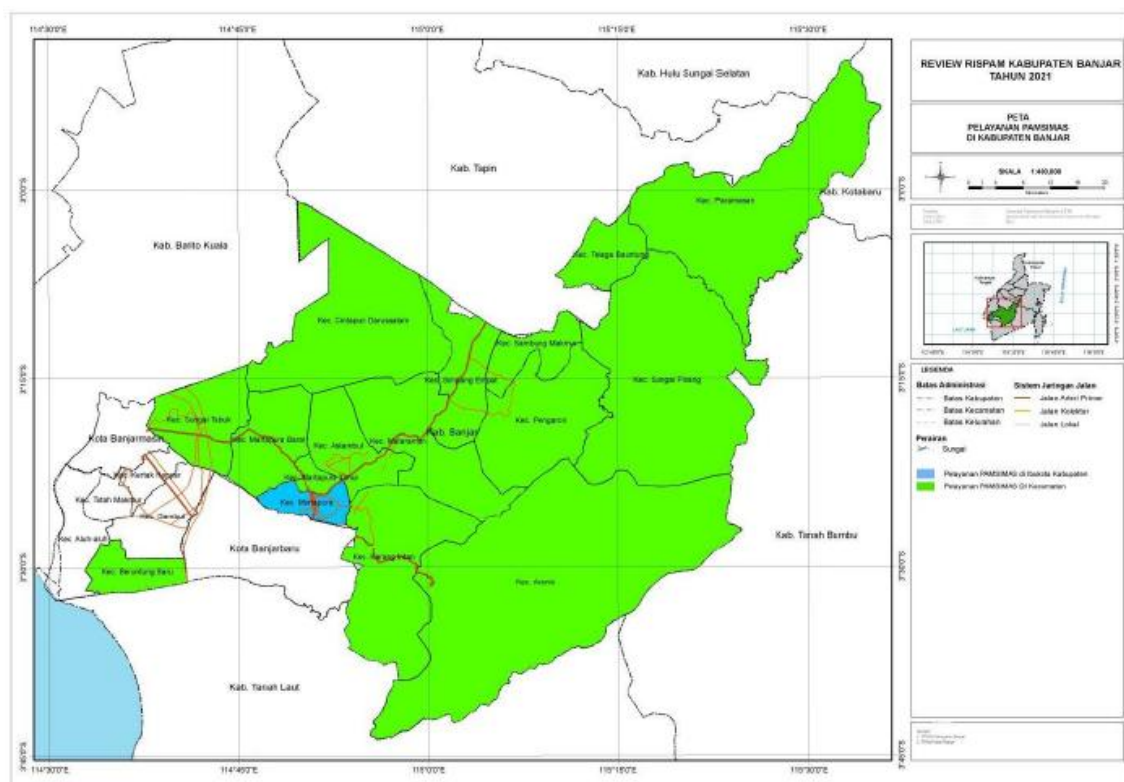
Kecamatan	Teraliri	Belum Teraliri
Aluh-Aluh	6	13
Beruntung Baru	10	2
Gambut	14	0
Kertak Hanyar	13	0
Tatah Makmur	13	0
Sungai Tabuk	12	9
Martapura	26	0
Martapura Timur	20	0
Martapura Barat	11	2
Astambul	14	8
Karang Intan	6	20
Aranio	0	12
Sungai Pinang	5	6
Paramasan	0	4
Pengaraon	5	7
Sambung Makmur	2	5
Mataraman	7	8
Simpang Empat	4	11
Telaga Bauntung	0	4
Cinta Puri Darussalam	0	11
TOTAL	168	122

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kabupaten Banjar Tahun 2022

Data mengenai jumlah wilayah baik yang sudah maupun belum teraliri air minum oleh PT Air Minum Intan Banjar menunjukkan beberapa daerah masih belum terjangkau oleh pelayanan air minum. Daerah-daerah yang masih belum terjangkau tersebut di antaranya adalah Kecamatan Paramasan, Aranio, Telaga Bauntung, dan Cinta Puri Darussalam. Dilihat dari data desa/kelurahan, total terdapat 58,13 persen desa/kelurahan yang sudah teraliri air minum dan 41,87

persen belum teraliri. Dari persentase tersebut, daerah dengan tingkat belum teraliri tertinggi di antaranya adalah Aranio (100 persen), Paramasan (100 persen), Telaga Bauntung (100 persen), Simpang empat (84,62 persen), dan Karang Intan (76 persen).

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Aranio, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Karang Intan mengakses air bersih melalui SPAM Perdesaan yang banyak dikelola oleh Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).



Gambar 2. 3 Peta Pelayanan Air Minum PAMSIMAS Kabupaten Banjar

Sumber: Laporan RISPAM Kabupaten Banjar Tahun 2023-2038

Beberapa daerah telah memiliki tingkat keteraliran air minum yang sudah optimal atau sudah 100 persen. Daerah-daerah tersebut secara umum merupakan daerah dengan karakteristik urban yang berbatasan langsung baik dengan Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru, di antaranya adalah Gambut, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Martapura, dan Martapura Timur. Data ini menunjukkan perlunya akselerasi cakupan layanan air minum ke daerah-daerah

yang masih memiliki tingkat keteraliran yang rendah, atau bahkan belum sama sekali.

Tabel 2. 5 Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Banjar

Parameter	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Air Bersih Perpipaan	74,33%	82,69%	84,22%	84,65%	86,94%	90,46%
Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	20,38%	26,91%	34,17%	55,69%	62,41%	69,82%

Sumber: Analisis Data, 2023

Cakupan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat terus mengalami peningkatan pada periode 2019 hingga 2024, walaupun belum mencapai keseluruhan wilayah. Capaian pelayanan air minum pada tahun 2024 telah mencapai 90,46 persen penduduk telah memperoleh pelayanan air minum atau air bersih perpipaan.

2.1.4.3 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor untuk mendukung capaian kinerja kualitas sumber daya manusia dan menjadi faktor penopang bagi kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar. Ketahanan pangan umumnya dinilai menggunakan indikator indeks ketahanan pangan. Indikator ini memiliki tiga dimensi, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Berikut adalah skor indeks ketahanan pangan di Kabupaten Banjar tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2. 6 Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Banjar	79,85	80,09	80,72	80,17	81,63
Barito Kuala	79,87	80,08	79,19	81,02	80,84
Tapin	83,16	83,98	85,18	84,60	88,10
Tanah Laut	81	81,85	81,61	82,06	83,45
Tanah Bumbu	81,45	86,5	85,56	83,53	83,73
Kota Banjar Baru	67,06	68,92	72,23	80,65	82,35
Kota Banjarmasin	80,21	78,02	78,34	79,20	85,62
Hulu Sungai Selatan	77,33	78,68	80,26	79,59	81,31
Kotabaru	79,56	79,96	78,85	77,03	69,84

Sumber: Kementerian Pertanian, 2020-2024

Capaian indeks ketahanan pangan di Kabupaten Banjar masih berada di nomor enam se-Provinsi Kalimantan Selatan. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Banjar mengalami tren yang fluktuatif dengan rata-rata capaian sebesar 80,49 pada tahun 2019 hingga 2023. Rata-rata capaian indeks ketahanan pangan Kabupaten Banjar ini sudah masuk ke dalam kategori baik, walaupun posisi indeks ketahanan pangan Kabupaten Banjar masih di bawah Kabupaten Tanah Bumbu, Tapin dan Tanah Laut. Persoalan ini disebabkan oleh masih kurangnya capaian indeks pemanfaatan di Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 7 Capaian Komponen Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar

Indeks Ketahanan Pangan dan Komponen pembentuknya	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketersediaan	90,54	92,41	91,13	89,69	85,92
Indeks Keterjangkauan	93,4	92,12	91,67	91,07	91,98
Indeks Pemanfaatan	61,68	61,84	64,71	64,87	70,64
Indeks Ketahanan Pangan	79,85	80,09	80,72	80,17	81,63

Sumber: Kementerian Pertanian, 2020-2024

Indeks ketahanan pangan memiliki tiga komponen indeks, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Indeks ketersediaan memiliki bobot 30 persen, indeks keterjangkauan memiliki bobot 30 persen, sedangkan indeks pemanfaatan memiliki bobot 40 persen untuk mengungkit capaian indeks ketahanan pangan. Berikut adalah data mengenai capaian komponen indeks ketahanan pangan Kabupaten Banjar tahun 2019 hingga 2023. Rata-rata capaian indeks pemanfaatannya masih berada di angka 64,75 pada tahun 2019 hingga 2023. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya diversifikasi pangan lokal, terutama untuk pangan non-beras. Konsumsi sayuran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ikan juga menjadi salah satu penyebab masih kurangnya pemanfaatan pangan di Kabupaten Banjar tahun 2019 hingga 2023. Kesejahteraan petani masih menjadi faktor yang harus diperhatikan, karena sebagian petani masih terjerat pinjaman hutang.

Tabel 2. 8 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjar

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Padi (Ton)	135.603	133.271	127.136	92.021	147.593

Jagung (Ton)	2.497	N/A	5.386	N/A	309,04
--------------	-------	-----	-------	-----	--------

Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka, 2021-2025

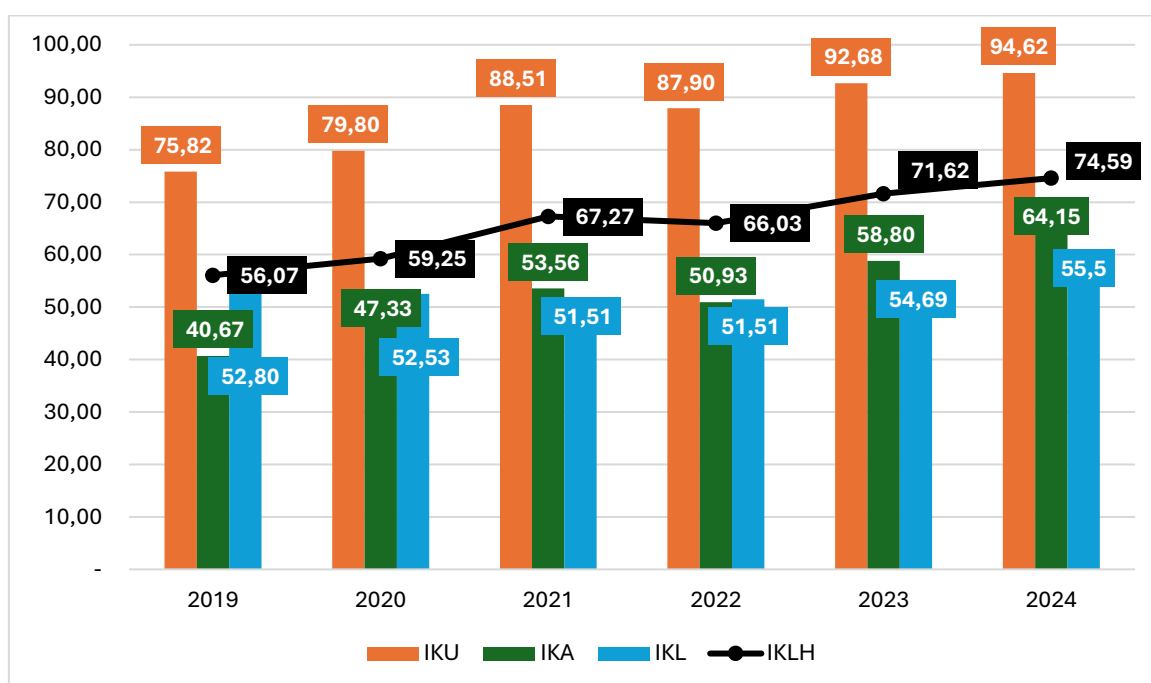
Kabupaten Banjar merupakan daerah penghasil Padi tertinggi kedua dan penghasil Jagung tertinggi kelima di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua jenis Tanaman Pangan ini merupakan sektor unggulan yang menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Banjar. Produksi Padi di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan selama tahun 2020-2024. Secara umum, ada faktor penyebab yang mempengaruhi produksi Padi di Kabupaten Banjar. *Pertama*, terjadinya bencana alam misalnya banjir besar di awal tahun 2021 yang membuat lahan sawah terendam. *Kedua*, harga pupuk mahal, padahal alokasi subsidi pupuk terbatas. Hal ini menyebabkan kurang meratanya pemberian pupuk bersubsidi kepada para petani. *Ketiga*, harga padi cenderung turun saat musim panen karena tidak ada subsidi harga Padi dari pemerintah, sehingga menyebabkan etos kerja (semangat) petani menurun. Produksi Jagung di Kabupaten Banjar mengalami tren fluktuatif cenderung menurun pada tahun 2020-2024. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjar, terutama Padi dan Jagung, perlu lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

Besarnya produksi padi menjadikan komoditas beras banjar menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Banjar. Beras banjar sendiri memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan beras pada umumnya, dimana beras banjar memiliki bentuk yang lebih memanjang dengan tekstur yang lebih pera. Karakteristik beras banjar yang berbeda ini mendorong beras banjar menjadi salah satu komoditas yang cukup diminati masyarakat. Salah satu kendala dalam proses pemasaran beras banjar adalah harga jual beras banjar yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga jual komoditas beras lainnya. Lebih tingginya harga jual beras banjar ini menurunkan daya saing komoditas beras banjar dengan komoditas beras lainnya yang relatif memiliki harga yang lebih rendah. Efisiensi faktor produksi dan efektivitas proses produksi menjadi kunci untuk mendorong harga beras banjar yang lebih kompetitif sehingga dapat lebih bersaing dengan komoditas beras lainnya. Pengembangan di sektor

pertanian melalui penerapan teknologi dan penguatan rantai pasok menjadi hal yang penting dalam rangka pengembangan komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Banjar.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjaga kondisi kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banjar ditunjukkan dengan kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta turunannya, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



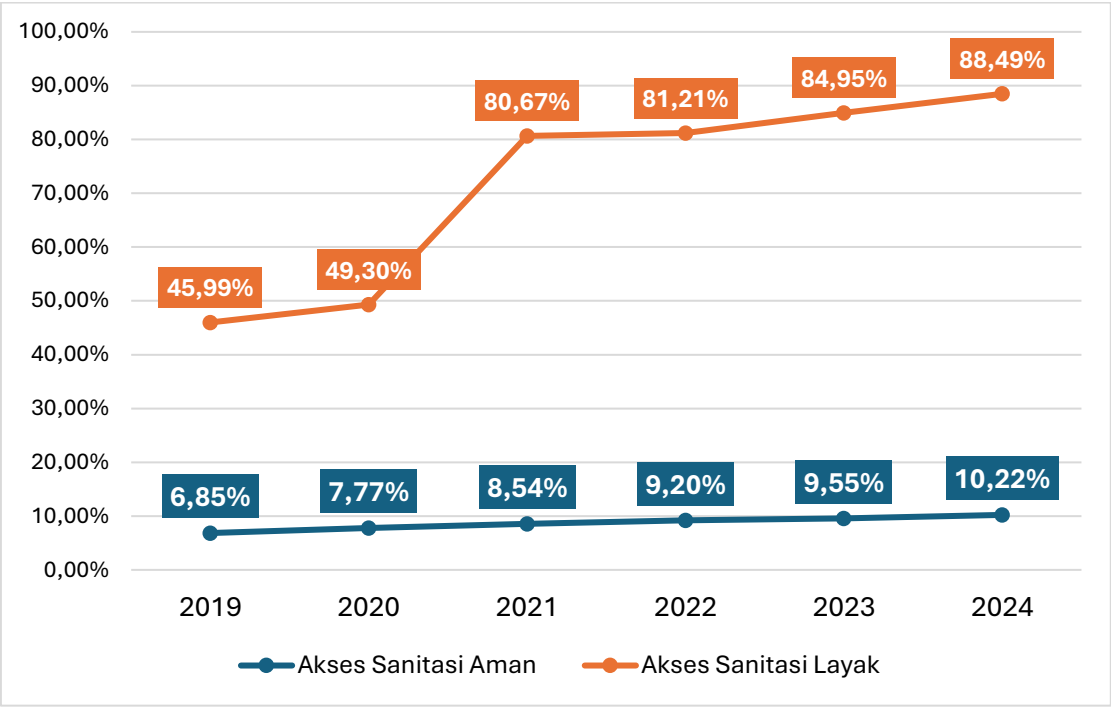
Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

Sumber: Analisis Data, 2025

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banjar menunjukkan capaian yang terus meningkat sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain penghijauan dan penanaman pohon, kampanye pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan energi terbarukan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banjar juga terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kabupaten Banjar perlu terus

meningkatkan kajian dan pemahaman tentang perubahan iklim, serta mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko dampaknya.

Akses sanitasi aman mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan untuk mengelola limbah manusia, seperti air seni dan feses. Fasilitas sanitasi aman termasuk toilet yang terhubung ke sistem pengolahan limbah, sistem pembuangan air limbah, dan tempat sampah yang sesuai. Akses sanitasi aman sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kurangnya akses sanitasi aman dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan yang serius, seperti penyebaran penyakit, polusi air, dan pencemaran tanah. Selain itu, kurangnya akses sanitasi aman dapat memengaruhi kehormatan dan martabat manusia serta hak asasi manusia.

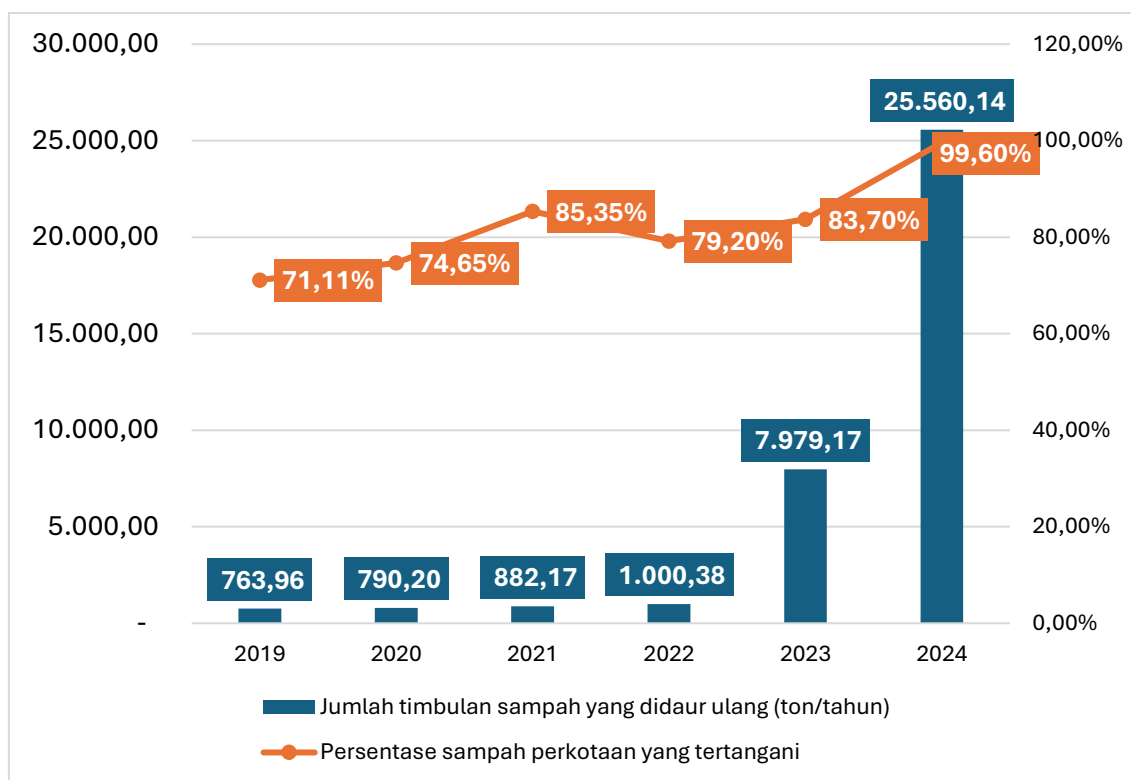


Gambar 2. 5 Akses Sanitasi Masyarakat Kabupaten Banjar

Sumber: DPUPRP Kabupaten Banjar, 2024

Akses sanitasi layak di Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan. Tercatat pada 2019, rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 45,99 persen dan terus meningkat menjadi 88,49 persen pada tahun 2024. Pemerintah telah membangun fasilitas sanitasi yang memadai, seperti toilet dan tempat pembuangan limbah, di daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur

sanitasi. Namun, jika dibandingkan dengan cakupan sanitasi aman, masih terdapat gap yang cukup jauh, karena pada tahun 2024, persentase layanan sanitasi aman di Kabupaten Banjar baru mencapai 10,22 persen.



Gambar 2. 6 Capaian Penanganan Persampahan Kabupaten Banjar

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, 2025

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99,60 persen pada tahun 2024. Angka tersebut selaras dengan jumlah timbulan sampah yang telah diolah di Kabupaten Banjar, yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2024, yakni mencapai 25.560,14 ton sampah terolah.

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

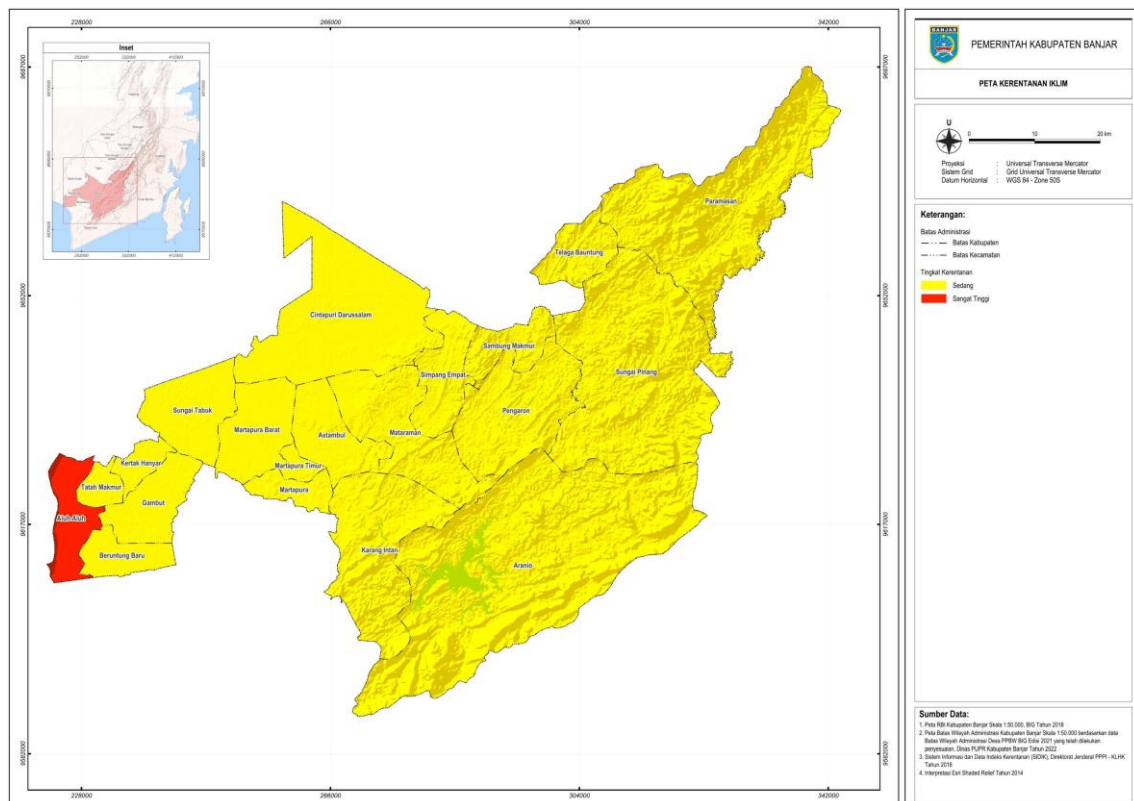
Tingkat kerentanan menggambarkan derajat, ukuran, atau tingkat kemudahan suatu sistem terkena dampak buruk dari suatu bahaya/bencana akibat perubahan iklim. Penentuan tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Banjar mengacu pada hasil perhitungan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 2. 9 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Banjar

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kekeringan
Aluh - Aluh	0,434	0,656	7	5	5
Aranio	0,474	0,614	4	4	4
Astambul	0,439	0,537	4	4	4
Beruntung Baru	0,433	0,601	4	4	4
Cintapuri Darussalam	0,416	0,557	4	4	4
Gambut	0,473	0,533	4	4	4
Karang Intan	0,457	0,563	4	4	4
Kertak Hanyar	0,505	0,448	4	4	4
Martapura	0,504	0,472	4	4	4
Martapura Barat	0,497	0,533	4	4	4
Martapura Timur	0,476	0,568	4	4	4
Mataraman	0,409	0,55	4	4	4
Paramasan	0,421	0,544	4	4	4
Pengaron	0,371	0,444	4	4	4
Sambung Makmur	0,461	0,516	4	4	4
Simpang Empat	0,381	0,498	4	4	4
Sungai Pinang	0,444	0,451	4	4	4
Sungai Tabuk	0,463	0,597	4	4	4
Tatah Makmur	0,426	0,57	4	4	4
Telaga Bauntung	0,371	0,465	4	4	4

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (KLHK, 2018), KLHS RPJMD Kabupaten Banjar, 2024

Indikator utama yang mempengaruhi tingkat keterpaparan dan sensitivitas terhadap perubahan iklim di Kabupaten Banjar adalah rendahnya ketersediaan fasilitas Kesehatan (skor 0 - 0,1), kegiatan pelestarian lingkungan hidup (skor 0 - 0,3) dan lembaga keuangan (skor 0 - 0,7). Sedangkan indikator pembatas utama kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Banjar adalah kepadatan dan sumber penghasilan penduduk yang mayoritas mendekati skor 1.



Gambar 2. 7 Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Banjar

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (KLHK, 2018), KLHS RPJMD Kabupaten Banjar, 2024

Kawasan dengan kerentanan sangat tinggi di Kabupaten Banjar terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh, selain itu kecamatan lain berada dalam kondisi sedang. Berdasarkan kajian lingkungan hidup untuk perencanaan daerah, analisis mengenai kondisi lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk aktivitas manusia di Kabupaten Banjar yang menimbulkan dampak menurunnya kualitas lingkungan hidup. Salah satu fenomena yang berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup adalah adanya bencana alam yang telah dijelaskan sebelumnya. Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Kalimantan yang sering kali mengalami bencana alam, dalam beberapa tahun terakhir jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang signifikan, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan infrastruktur setempat.

Bencana alam adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang mulai terganggu baik oleh proses alam maupun akibat perbuatan manusia dalam memanfaatkan sumber

daya alam. Berdasarkan hasil survei, potensi bencana alam di Kabupaten Banjar adalah tanah longsor, banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Daerah rawan bencana tersebut perlu dikenali sedini mungkin agar upaya pencegahan dan evakuasi dapat dilakukan secara efektif.

1. Tanah Longsor

Berdasarkan data historis kejadian bencana, kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Paramasan tepatnya di desa Remo, Angkipih, Paramasan Atas, dan Paramasan Bawah. Sementara itu, berdasarkan hasil analisa rawan bencana, kawasan rawan longsor terdapat pada daerah yang memiliki morfologi dataran tinggi, yaitu di Kecamatan Paramasan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, serta terdapat sedikit pada Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Telaga Bauntung.

2. Banjir

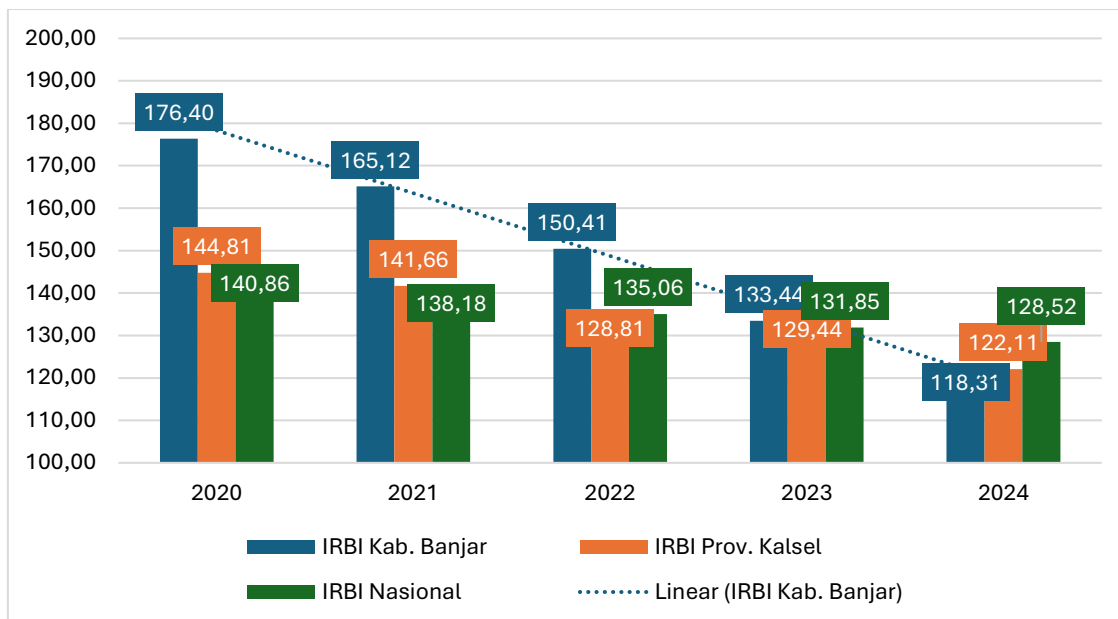
Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Karang Intan, Astambul, Pengaron, Martapura, Martapura Timur. Martapura Barat, Simpang Empat, Sambung Makmur, Aluh-Aluh, Tatah Makmur, Beruntung Baru, Kertak Hanyar, Gambut, Cintapuri Darussalam, dan di daerah sepanjang sungai yang terdapat di seluruh Kabupaten Banjar.

3. Angin Puting Beliung

Angin puting beliung merupakan bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar.

4. Gelombang Pasang

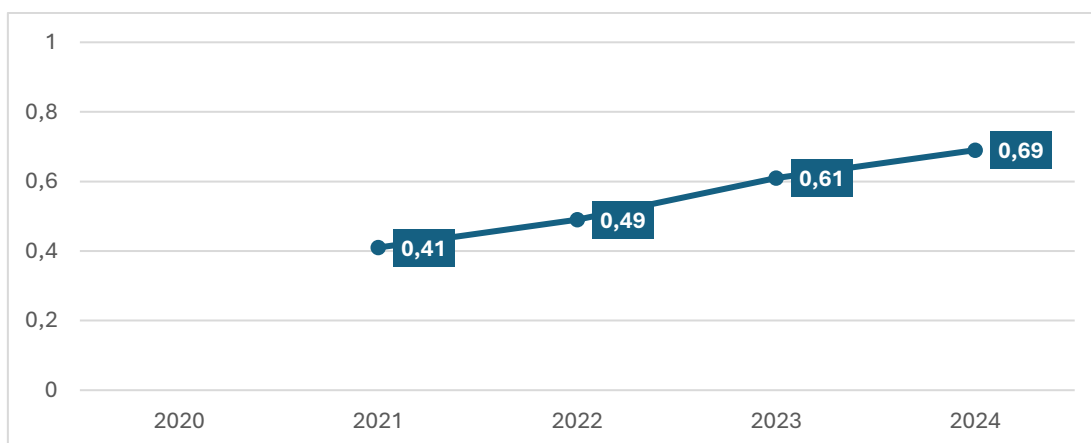
Kawasan Bencana Gelombang pasang terdapat di 11 desa yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh.



Gambar 2. 8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banjar

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/>, Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2024

Nilai IRB Kabupaten Banjar terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta lebih rendah jika dibandingkan nilai IRB provinsi ataupun nasional pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meminimalkan dampak bencana yang ditimbulkan meliputi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pihak terkait, pembangunan sarana dan prasarana yang tahan terhadap bencana, serta penyediaan informasi dan edukasi tentang bencana alam kepada masyarakat. Kedepannya, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi antara berbagai pihak untuk mengurangi dampak bencana alam di Kabupaten Banjar.



Gambar 2. 9 Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjar

Indeks Ketahanan daerah di Kabupaten Banjar baru diukur pada tahun 2021, nilai yang terukur terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Hal tersebut selaras dengan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjar yang terus mengalami penurunan, upaya meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Banjar terus dilakukan. Selain bencana alam, perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Banjar seperti peningkatan suhu rata-rata, peningkatan intensitas hujan, dan peningkatan frekuensi kejadian bencana alam. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebesar 0,3-0,6 derajat Celsius per dekade selama 30 tahun terakhir. Peningkatan suhu rata-rata ini dapat menyebabkan berbagai dampak, seperti penurunan produktivitas pertanian dan meningkatnya kebutuhan energi pendingin. Selain itu, data BMKG juga menunjukkan peningkatan intensitas hujan di Kabupaten Banjar, terutama pada musim hujan. Hal ini dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor.

2.1.7 Demografi

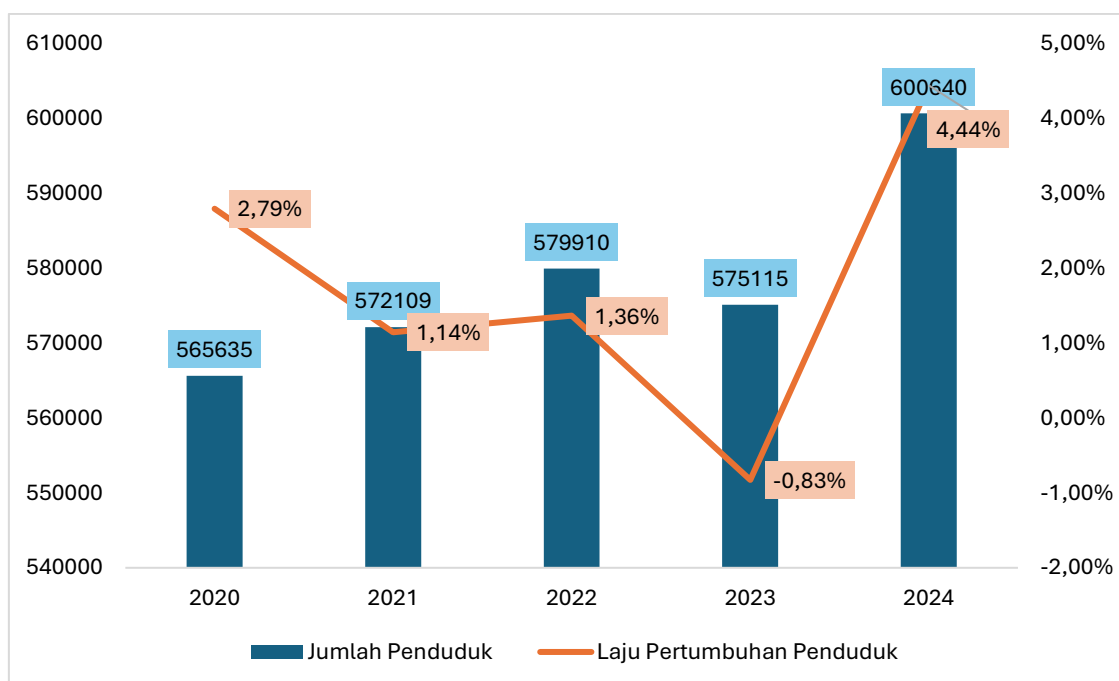
Demografi di Kabupaten Banjar bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk masuk maupun keluar daerah. Data kependudukan mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Informasi demografi yang tersedia akan menjadi dasar dalam perencanaan proyeksi kependudukan untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Banjar.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik

di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Pusat Statistik dalam laporan tahunan Kabupaten Banjar dalam Angka Tahun 2025 mencatat bahwa terdapat penduduk di Kabupaten Banjar sebanyak 600.640 jiwa pada tahun 2024. Angka ini terdiri dari 303.100 penduduk laki-laki dan 297.540 penduduk perempuan. Jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 5,83 persen atau bertambah sebanyak 35.005 jiwa dibandingkan dengan tahun 2020. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar dalam rentang tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banjar Tahun 2019-2024

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Banjar, Buku Agregat Kependudukan Semester I, 2023, BPS, Kabupaten Banjar dalam Angka 2025

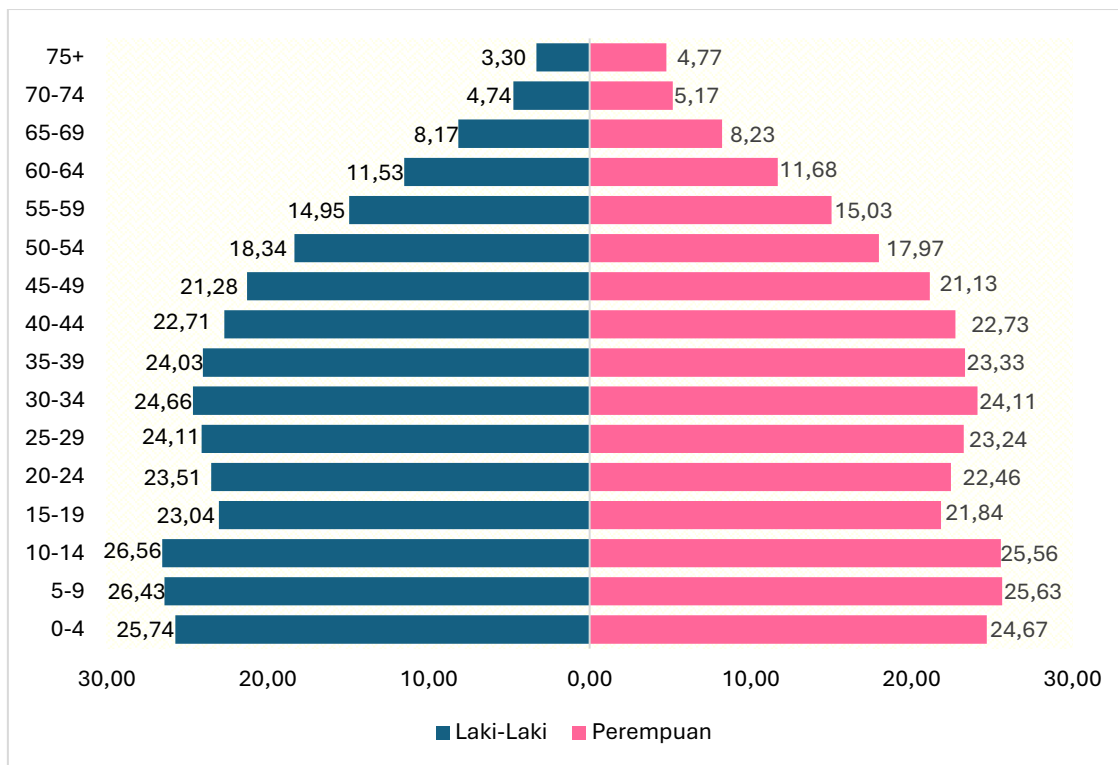
Jumlah penduduk di Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebanyak 25.525 jiwa. Hal ini disebabkan oleh adanya selisih data yang digunakan pada rincian jumlah penduduk pada struktur umur dan jenis kelamin tahun 2024 dengan rincian tahun sebelumnya. Data penduduk yang dikeluarkan Kabupaten Banjar dalam Angka tahun 2024 menggunakan angka terperinci,

sedangkan dalam angka 2025 masih menggunakan angka proyeksi dalam ribu jiwa. Hal itu juga mengakibatkan adanya selisih antara jumlah penduduk yang diproyeksikan pada setiap jenjang umur dengan jumlah penduduk per kecamatan yang jika ditotal hanya sebanyak 584.684. Perbedaan tersebut menyebabkan selisih sebanyak 15.596 jiwa. Selain itu, penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023 disebabkan oleh perbedaan sumber data. Data yang digunakan pada tahun 2022 merupakan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 hingga pertengahan tahun, sedangkan pada tahun 2023, data yang digunakan berasal dari Buku Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Perubahan sumber data ini turut memengaruhi fluktuasi laju pertumbuhan penduduk selama periode tersebut.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar sempat meningkat sebesar 4,61 poin pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Namun, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,19 poin dibandingkan tahun 2022. Fluktuasi yang cukup signifikan ini dapat berdampak pada hasil proyeksi kependudukan, yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan ke depan.

2.1.7.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, seperti aspek geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dianalisis melalui kategori usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, seperti proporsi tenaga kerja produktif dan non-produktif, potensi bonus demografi, serta angka ketergantungan. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan. Komposisi penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2024, berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: BPS, Kabupaten Banjar dalam Angka 2025

Struktur penduduk Kabupaten Banjar berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 membentuk pola piramida stasioner. Pola ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil antara kelompok usia produktif dan non-produktif. Mayoritas penduduk berada dalam usia produktif (15-64 tahun) mencapai 68,54 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, dan terdiri dari 50,56 persen laki-laki dan 49,44 persen perempuan. Sementara itu, kelompok non-produktif didominasi oleh penduduk usia 0-14 tahun sebesar 25,74 persen, sedangkan penduduk lanjut usia hanya mencapai 5,72 persen.

Proporsi usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non-produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar sedang mengalami bonus demografi yang diperkuat dengan angka ketergantungan sebesar 45,90 persen. Angka ketergantungan yang berada di atas 45 persen tidak dapat dikategorikan sebagai bonus demografi. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu memperhatikan capaian ini karena banyaknya kelompok non produktif akan turut serta dalam menghambat produktivitas di daerah.

2.1.7.3 Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Banjar dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penghitungan rasio ini berperan dalam memahami proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin dalam data *sex ratio* yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai *sex ratio* penduduk Kabupaten Banjar, berdasarkan data awal tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	285.885	279.750	565.635	102,19
2021	289.057	283.052	572.109	102,12
2022	292.892	287.018	579.910	102,05
2023	290.271	284.844	575.115	101,91
2024	303.100	297.540	600.640	101,95

Sumber: BPS, Kabupaten Banjar dalam Angka 2021-2025

Sex ratio di Kabupaten Banjar menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, *sex ratio* di Kabupaten Banjar tercatat sebesar 102,19 poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 102 hingga 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Banjar. Data yang dikeluarkan BPS pada Kabupaten Banjar dalam Angka 2025 menunjukkan *sex ratio* penduduk sebesar 101,95 pada tahun 2024. Hal itu mengindikasikan bahwa terdapat 101 hingga 102 laki-laki terhadap 100 perempuan.

Penurunan *sex ratio* yang semakin mendekati angka 100 mencerminkan keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penurunan yang cukup signifikan ini dapat disebabkan oleh tiga faktor utama: meningkatnya kelahiran bayi perempuan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan akibat migrasi masuk, serta berkurangnya jumlah laki-laki. Penurunan jumlah penduduk laki-laki sendiri bisa dipengaruhi oleh meningkatnya angka kematian atau meningkatnya migrasi keluar dari wilayah Kabupaten Banjar.

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan distribusi jumlah penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan luas area yang ditempati. Indikator ini berperan penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam aspek penyediaan infrastruktur, fasilitas umum, serta pengelolaan sumber daya. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi atau rendah dapat memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu daerah. Oleh karena itu, analisis kepadatan penduduk menjadi faktor krusial dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Banjar pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 11 Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Aluh-Aluh	82,48	28363	343,88	28.592	346,65	28665	347,54	29.493	357,58	30.107	365,02
2	Beruntung Baru	61,42	14254	232,07	14.813	241,18	14511	236,26	14.801	240,98	14.828	241,42
3	Gambut	129,3	44751	346,10	41.513	321,06	46815	362,06	44.933	347,51	46.159	356,99
4	Kertak Hanyar	45,83	45489	992,56	39.120	853,59	47014	1025,83	41.571	907,07	42.325	923,52
5	Tatah Makmur	35,47	12545	353,68	12.380	349,03	12909	363,94	13.184	371,69	13.364	376,77
6	Sungai Tabuk	147,3	64890	440,53	59.710	405,36	66751	453,16	62.190	422,2	62.868	426,80
7	Martapura	42,03	121153	2882,54	117.325	2.791,46	125722	2991,24	125.164	2.977,97	127.355	3.030,10
8	Martapura Timur	29,99	29370	979,33	29.499	983,63	29483	983,09	30.459	1.015,64	30.831	1.028,04
9	Martapura Barat	149,38	18833	126,07	19.019	127,32	19269	128,99	19.364	129,63	19.552	130,89
10	Astambul	216,5	34531	159,50	35.313	163,11	34929	161,33	36.223	167,31	36.589	169
11	Karang Intan	215,35	34912	162,12	35.064	162,82	35894	166,68	36.581	169,87	37.155	172,53
12	Aranio	1.166,35	8982	7,70	9.305	7,98	9157	7,85	9.377	8,04	9.522	8,16
13	Sungai Pinang	458,65	13938	30,39	14.275	31,12	13976	30,47	14.521	31,66	15.152	33,04
14	Paramasan	560,85	3755	6,70	3.708	6,61	3765	6,71	3.715	6,62	3.826	6,82

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
15	Pengaron	433,25	16557	38,22	16.251	37,51	16761	38,69	17.392	40,14	17.387	41,17
16	Sambung Makmur	134,65	11841	87,94	11.388	84,57	12139	90,15	12.486	92,73	13.143	97,61
17	Mataraman	148,4	24586	165,67	25.715	173,28	24837	167,37	25.225	169,98	25.207	169,86
18	Simpang Empat	141,1	22927	162,49	22.987	162,91	23285	165,02	23.957	169,79	24.236	171,76
19	Telaga Bauntung	158	3322	21,03	3.261	20,64	3373	21,35	3.349	21,2	3.385	21,42
20	Cintapuri Darussalam	312,2	10636	34,07	11.026	35,32	10665	34,16	11.130	35,65	11.243	36,01

Sumber: BPS, Kabupaten Banjar dalam Angka 2021-2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, sebanyak 11 kecamatan mengalami penurunan kepadatan penduduk, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, kepadatan di 9 kecamatan lainnya relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Kecamatan Martapura tercatat memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024, dengan angka mencapai 3.030,10 jiwa per kilometer persegi, atau yang berarti setiap kilometer persegi wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 3.031 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Paramasan memiliki kepadatan terendah, dengan hanya 7 jiwa per kilometer persegi. Perbedaan kepadatan yang mencapai 450 kali lipat ini disebabkan oleh perbedaan luas wilayah antara kedua kecamatan tersebut. Selain faktor luas wilayah, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, lingkungan, geografis, politik, serta aksesibilitas.

Kecamatan Martapura berfungsi sebagai pusat ekonomi Kabupaten Banjar dan memiliki infrastruktur serta fasilitas yang lebih mudah diakses. Sementara itu, Kecamatan Paramasan memiliki akses yang lebih terbatas, bahkan harus melewati kabupaten lain untuk dapat memasuki wilayahnya. Kondisi ini menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan wilayah secara lebih seimbang.

2.1.7.5 Keberadaan Masyarakat Adat dan Kondisi Sosilogis Masyarakat

Pemahaman tentang masyarakat di suatu wilayah tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan individu, melainkan sebagai suatu entitas sosial yang memiliki dinamika, nilai, dan struktur yang khas. Dari perspektif sosiologis, masyarakat merupakan sistem yang terbentuk melalui interaksi sosial, norma, serta institusi yang saling berkaitan, sehingga mampu menciptakan keteraturan sekaligus menghadirkan tantangan dalam proses pembangunan. Pendekatan

sosiologis menjadi penting dalam penyusunan RPJMD agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menekankan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Dalam kerangka tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat memiliki posisi strategis.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat, memiliki wilayah tertentu, serta diikat oleh identitas dan tata kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari keragaman sosial, tetapi juga penjaga nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas daerah. Dengan memasukkan perspektif masyarakat, pendekatan sosiologis, dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam RPJMD merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah.

Kabupaten Banjar memiliki masyarakat yang relatif homogen secara demografis. Dari sisi agama, mayoritas penduduk memeluk Islam sebanyak 575.692 jiwa (99,25 persen), sementara pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan menyumbang persentase yang relatif kecil. Cukup dominannya agama Islam erat kaitannya dengan dominannya etnis Banjar secara jumlah yang sebagian besar beragama Islam di Kabupaten Banjar.

Ciri sosial pertama yang menonjol adalah kuatnya nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari jumlah pesantren yang cukup banyak, yakni mencapai 39 pesantren, di mana angka tersebut juga menjadikan Kabupaten Banjar sebagai daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Kalimantan Selatan. Keagamaan ini mempererat hubungan sosial antarwarga melalui beragam ritual seperti *bahaul*, *baayun maulid*, *batahlil*, dan *bahandil*, yang merupakan bentuk kekuatan sosial masyarakat. Dalam budaya Banjar juga dikenal nilai "*berelaan*" yang mencerminkan keikhlasan dan rasa syukur sebagai bentuk ibadah.

Ciri sosial lainnya adalah dominasi sektor agrikultur sebagai mata pencaharian utama. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang rata-rata 17,82 persen terhadap PDRB dalam 15 tahun terakhir, hanya kalah dari sektor pertambangan dan penggalian. Dalam sektor pertanian, Banjar dikenal dengan produksi beras khas “Beras Banjar” yang memiliki karakteristik unik dan harga tinggi, namun ketersediaannya kerap terbatas. Pada sektor perkebunan, karet menjadi komoditas andalan dengan pasar luas hingga ke Banjarmasin. Meski berkualitas, beberapa produsen belum memenuhi standar produksi, yang bisa menurunkan nilai jual. Di bidang perikanan, ikan patin banjar menjadi produk unggulan dengan ukuran besar dan harga lebih tinggi, bahkan telah diekspor. Namun, tantangan seperti akses pakan, air bersih, dan distribusi pasar masih menjadi hambatan.

Selain agrikultur, sektor pariwisata juga memiliki potensi besar. Pada tahun 2023, lebih dari 1,5 juta wisatawan mengunjungi Banjar. Lok Baintan, pasar terapung yang unik, menjadi salah satu destinasi utama. Ciri khas bahasa yang digunakan di pasar ini menjadi daya tarik tersendiri. Pariwisata religi juga sangat menonjol karena karakter religius masyarakat. Haul Abah Guru Sekumpul di Martapura menarik jutaan peziarah setiap tahunnya. Rata-rata setiap tahunnya, makam beliau dikunjungi oleh kurang lebih 5,8 juta orang. Selain itu, banyak makam ulama lain juga menjadi tujuan ziarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa wisata religi menjadi salah satu potensi besar sektor pariwisata di Kabupaten Banjar.

Selain dari aspek sosiologis masyarakat, hal yang tidak kalah krusial untuk diperhatikan adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat hukum adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Pemerintah Kabupten Banjar telah menyusun Naskah Akademik tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2025.

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat merupakan langkah strategis dalam memperkuat landasan normatif dan konseptual bagi kebijakan pembangunan di Kabupaten Banjar yang inklusif. Isu masyarakat hukum adat perlu memperoleh perhatian khusus mengingat prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pengakuan masyarakat hukum adat menjadi dasar legal-formal untuk memastikan hak-hak masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi. Perlindungan masyarakat hukum adat diperlukan agar eksistensi, kelembagaan, dan kearifan lokal mereka tidak tergerus oleh arus modernisasi maupun eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, naskah akademik tentang masyarakat hukum adat ini berfungsi sebagai rujukan konseptual, analitis, dan empiris dalam perumusan kebijakan daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Kehadiran naskah ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029, sehingga program dan kegiatan yang dirancang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

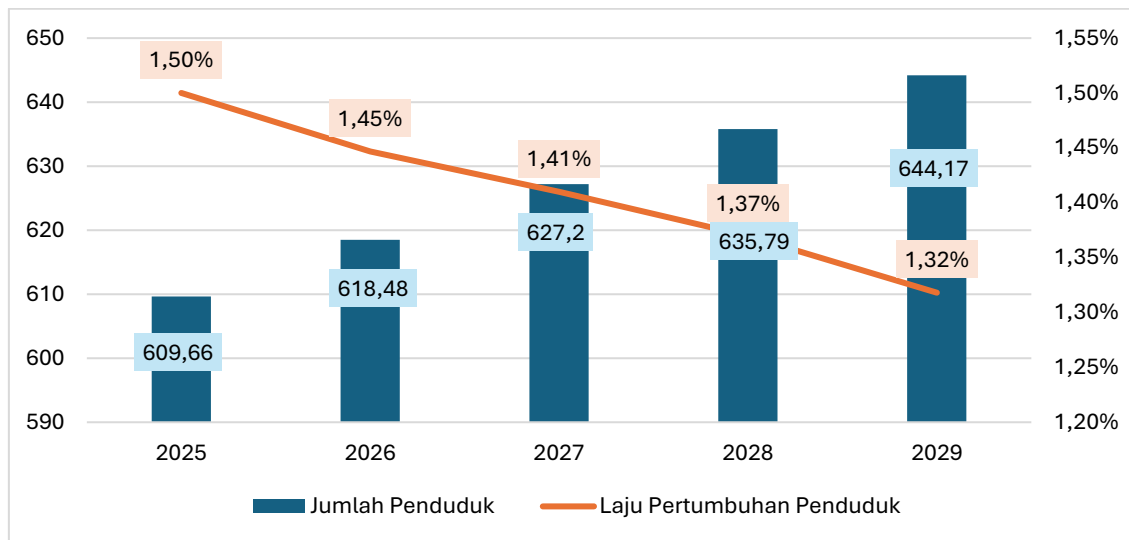
2.1.7.6 Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perubahan jumlah penduduk berdasarkan berbagai kategori, seperti total populasi, tingkat kepadatan, serta distribusi penduduk menurut usia di Kabupaten Banjar. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk memahami berbagai aspek kependudukan, termasuk kondisi lanjut usia, jumlah penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, serta potensi bonus demografi. Berikut ini merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Banjar untuk periode 2025 hingga 2029.

1. Jumlah Penduduk

Analisis dinamika kependudukan memiliki peran penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah. Beberapa aspek utama yang perlu dikaji meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan tingkat kepadatan. Masing-

masing indikator ini memberikan perspektif berbeda mengenai kondisi kependudukan, namun saling melengkapi dalam memahami tren demografi secara menyeluruh. Proyeksi demografi Kabupaten Banjar didasarkan pada data kependudukan tahun 2020 sebagai acuan utama. Berikut ini merupakan hasil proyeksi terkait jumlah penduduk dan laju pertumbuhan di Kabupaten Banjar untuk periode 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 12 Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2035; hasil olah data BPS Long Form Survey Penduduk 2020

Proyeksi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banjar selama periode 2025 hingga 2029. Tren serupa juga terlihat pada laju pertumbuhan penduduk yang diperkirakan terus meningkat secara konsisten dalam rentang waktu tersebut. Selama periode tersebut, jumlah penduduk di Kabupaten Banjar diproyeksikan bertambah sebanyak 56,03 ribu jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,73 persen.

Proyeksi ini turut mempertimbangkan *Total Fertility Rate* (TFR) yang berada pada angka 2,04. TFR sendiri mengacu pada jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Dengan angka TFR sebesar 2,04, setiap perempuan di Kabupaten Banjar diperkirakan rata-rata akan melahirkan dua anak, yang berkontribusi dalam menjaga kelangsungan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

2. Kepadatan Penduduk

Proyeksi kepadatan penduduk merupakan estimasi mengenai distribusi jumlah penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan luas area yang ditempati pada periode tertentu di masa mendatang. Analisis ini penting untuk memahami dinamika perubahan kepadatan yang dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti kebutuhan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas wilayah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti laju pertumbuhan penduduk, migrasi, serta perubahan penggunaan lahan, proyeksi kepadatan penduduk dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Melalui proyeksi ini, pemerintah daerah dapat mengantisipasi tantangan kependudukan dan merumuskan kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2025-2029.

Tabel 2. 12 Proyeksi Tingkat Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2020 (jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	
				2025	2030
1	Aluh-Aluh	82,48	342,5	372,5	399,1
2	Beruntung Baru	61,42	231,1	248,3	259,3
3	Gambut	129,30	344,7	359,2	385,3
4	Kertak Hanyar	45,83	988,6	1.143,7	1.291,4
5	Tatah Makmur	35,47	352,3	391,1	424,2
6	Sungai Tabuk	147,30	438,8	464,2	487,2
7	Martapura	42,03	2.870,9	3.019,7	3.143,5
8	Martapura Timur	29,99	975,5	1.073,0	1.156,9
9	Martapura Barat	149,38	125,6	133,9	141,0
10	Astambul	216,50	158,8	172,9	184,9
11	Karang Intan	215,35	161,5	177,6	191,5
12	Aranio	1166,35	7,7	8,3	8,9
13	Sungai Pinang	458,65	30,3	37,3	45,8
14	Paramasan	560,85	6,7	7,3	8,0
15	Pengaron	433,25	38,1	41,3	43,9
16	Sambung Makmur	134,65	87,6	93,9	96,4
17	Mataraman	148,40	165,0	177,7	188,5

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2020 (jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	
				2025	2030
18	Simpang Empat	141,10	161,8	174,2	185,1
19	Telaga Bauntung	158,00	20,9	22,4	23,8
20	Cintapuri Darussalam	312,20	33,9	37,9	41,2
	KABUPATEN BANJAR	4668,50	121,0	131,0	140,0

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2035; hasil olah data BPS Long Form Survey Penduduk 2020

Proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk di Kabupaten Banjar berada di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk yang dihasilkan dari proyeksi selaras dengan kondisi kepadatan penduduk saat ini. Dari 20 kecamatan yang ada, tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi secara berurutan adalah Kecamatan Martapura, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Martapura Timur. Kepadatan penduduk di Kecamatan Martapura tinggi karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Banjar. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah umumnya adalah wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan, seperti Kecamatan Aranio dan Kecamatan Paramasan.

Dalam konteks perkotaan, pertumbuhan penduduk cenderung meningkat karena kota memiliki daya tarik tersendiri, terutama di Kabupaten Banjar. Kota menawarkan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas, sehingga menarik banyak orang untuk menetap. Di satu sisi, daya tarik ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah akibat tingginya mobilitas masyarakat. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan berbagai tantangan khas perkotaan, seperti permukiman kumuh, kriminalitas, dan perilaku agresif. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya kepadatan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan antisipatif yang mendorong pemerataan pembangunan agar Kabupaten Banjar dapat mengurangi berbagai permasalahan perkotaan.

3. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif merupakan kelompok penduduk dalam rentang usia yang secara umum dianggap mampu berkontribusi secara aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Kelompok ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Proporsi penduduk usia produktif yang tinggi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi suatu wilayah. Jika dikelola dengan baik melalui kebijakan pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja, bonus demografi yang dihasilkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa perencanaan yang tepat, tingginya jumlah penduduk usia produktif dapat menimbulkan permasalahan, seperti pengangguran, ketimpangan sosial, dan meningkatnya beban ekonomi bagi negara atau daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja yang sesuai. Dengan demikian, potensi mereka dapat dimanfaatkan secara optimal demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2. 13 Proyeksi Komposisi Umur di Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	155,59	156,05	156,11	155,85	155,42
15-64	417,28	423,17	429,25	435,42	441,51
65+	36,79	39,26	41,84	44,52	47,24
Angka ketergantungan	46,10%	46,15%	46,12%	46,02%	45,90%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2035; hasil olah data BPS Long Form Survey Penduduk 2020

Proyeksi penduduk usia produktif dalam rentang 15-64 tahun menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah

penduduk usia kerja diperkirakan mencapai 417,28 ribu jiwa dan terus bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,41 persen per tahun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berusia 10-14 tahun pada periode 2020-2025, yang kemudian bertransisi ke kelompok usia produktif dan menambah proporsi serta jumlah total penduduk usia kerja.

Bertambahnya jumlah penduduk usia produktif berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja di Kabupaten Banjar. Diperkirakan pada tahun 2029, kelompok ini akan mencapai 68,53 persen dari total penduduk. Kondisi ini dapat menjadi peluang untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan penduduk usia produktif memiliki kualitas yang memadai dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Namun, jika pertumbuhan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan dan sosial di masa mendatang di Kabupaten Banjar.

4. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan adalah indikator yang digunakan untuk membandingkan jumlah penduduk usia kerja dengan penduduk yang berada di luar kelompok usia produktif. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 0-14 tahun serta 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Angka ketergantungan mencerminkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dalam membiayai kehidupan kelompok penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar beban yang dipikul oleh penduduk usia kerja, dan sebaliknya.

Proyeksi angka ketergantungan di Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2025, angka ketergantungan diperkirakan mencapai 46,10 persen dan sedikit menurun menjadi 45,90 persen pada tahun 2029. Ini berarti bahwa pada tahun 2025, setiap 100 penduduk usia produktif akan menopang sekitar 45 hingga 46 orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, jumlah tanggungan per

100 penduduk usia produktif pada tahun 2029 diperkirakan tetap sama atau berkurang hanya satu orang. Penurunan beban ketergantungan ini berpotensi mendorong percepatan pembangunan daerah karena penduduk usia produktif memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penurunan angka ketergantungan di Kabupaten Banjar disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk non-produktif yang hampir seimbang dengan pertumbuhan penduduk produktif, yakni 1,41 persen. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dengan dominasi pertumbuhan dari kelompok usia lanjut yang mencapai 6,56 persen, sementara kelompok 0-14 tahun hanya tumbuh 0,11 persen. Secara jumlah, penduduk usia 0-14 tahun diproyeksikan mengalami penurunan sekitar 170 jiwa antara tahun 2025 dan 2029. Penurunan ini terkait dengan angka kelahiran yang diperkirakan menurun, tercermin dari angka Total Fertility Rate (TFR) yang turun dari 2,30 pada tahun 2025 menjadi 2,25 pada tahun 2030.

Meskipun angka TFR tetap di atas 2—menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kabupaten Banjar melahirkan dua anak yang diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan populasi—transisi penduduk usia 10-14 tahun ke kelompok produktif pada periode 2025-2029 lebih besar dibandingkan jumlah kelahiran baru.

Sebaliknya, tren yang berbeda terjadi pada penduduk usia 65 tahun ke atas, yang mengalami pertumbuhan signifikan dengan rata-rata laju pertumbuhan 6,56 persen. Secara absolut, jumlah penduduk lanjut usia diproyeksikan bertambah sekitar 10,45 ribu jiwa dalam kurun waktu 2025 hingga 2029. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Banjar. Namun, lonjakan jumlah lansia juga menjadi tantangan tersendiri karena semakin banyaknya penduduk yang tidak lagi produktif akan meningkatkan beban yang harus ditanggung pemerintah dalam memastikan kesejahteraan mereka.

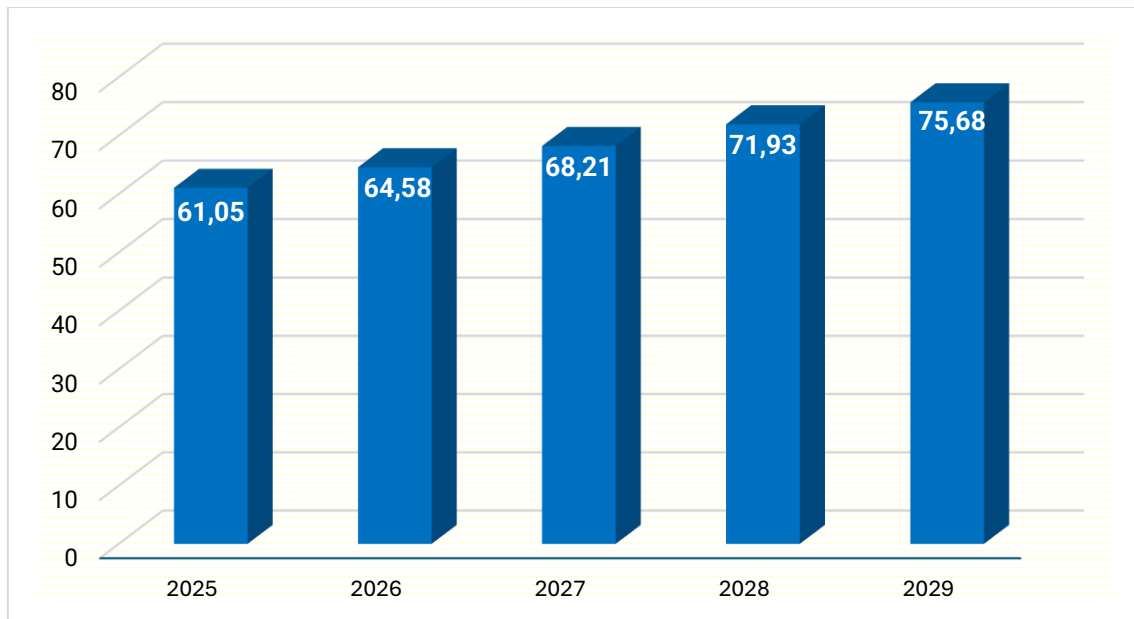
5. Bonus Demografi

Bonus demografi merujuk pada kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk non-produktif, dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total populasi. Kondisi ini dapat dianalisis melalui proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Banjar pada periode 2025-2029. Selain melihat struktur usia penduduk, keberadaan bonus demografi juga dapat ditentukan melalui angka ketergantungan. Kabupaten Banjar dianggap mengalami bonus demografi apabila angka ketergantungannya berada di bawah 45 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan angka ketergantungan pada tahun 2025-2029, Kabupaten Banjar belum mencapai kondisi bonus demografi. Hal ini terlihat dari angka ketergantungan yang masih lebih tinggi dari 45 persen. Tidak tercapainya bonus demografi di Kabupaten Banjar disebabkan oleh menurunnya proporsi penduduk usia produktif dibandingkan dengan total populasi, sementara jumlah penduduk non-produktif terus meningkat. Pergeseran ini tercermin dalam bentuk piramida penduduk yang semakin menyempit di bagian tengah. Akibatnya, beban tanggungan terhadap penduduk non-produktif semakin besar, yang berpotensi menurunkan tingkat produktivitas dan memengaruhi perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu mengambil langkah strategis untuk mengelola perubahan demografi dalam lima tahun ke depan. Dengan kebijakan yang tepat, dinamika kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan struktur penduduk di Kabupaten Banjar berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kelahiran serta meningkatnya angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia merujuk pada individu yang berusia 60 tahun ke atas. Berikut ini adalah hasil proyeksi jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029.



Gambar 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Kabupaten Banjar untuk Periode 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2035; hasil olah data BPS Long Form Survey Penduduk 2020

Proyeksi jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan sebesar 14,63 ribu jiwa dalam periode 2025 hingga 2029, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,62 persen per tahun. Lonjakan jumlah lansia ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar, karena di satu sisi diperlukan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat memberdayakan penduduk lanjut usia agar tetap mandiri dan berdaya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

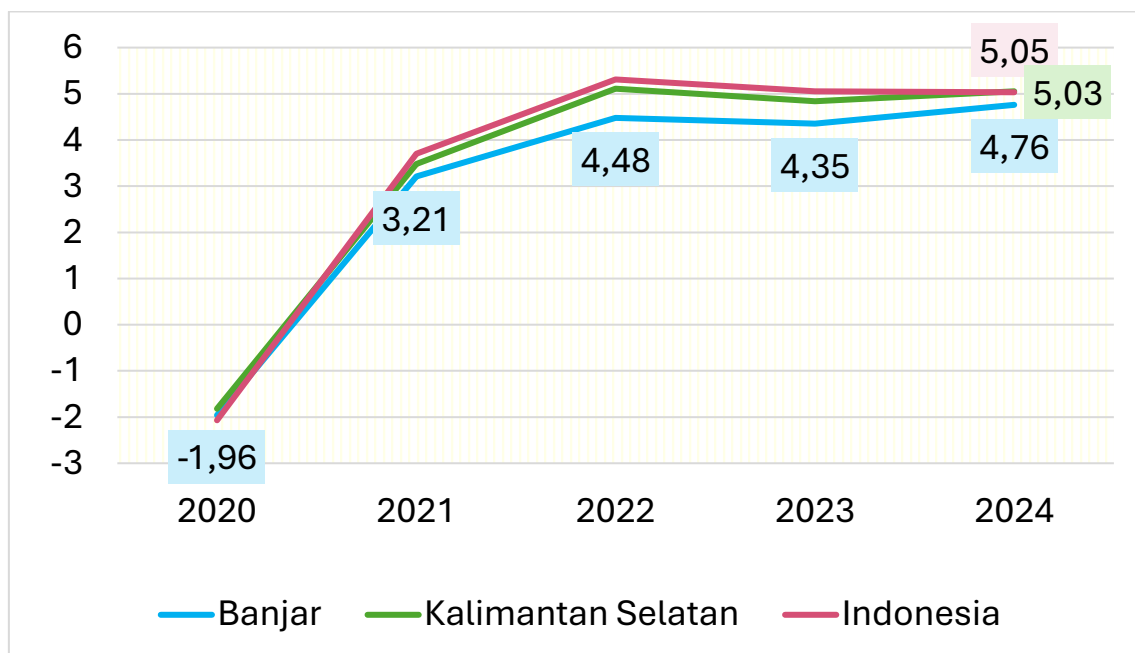
Bagian ini memuat enam aspek yang berusaha menggambarkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum, meliputi kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, agama, budaya, dan kondisi keluarga serta pengarusutamaan gender. Keenam aspek ini menjadi hal yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum dari berbagai dimensi pembangunan.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah dan dapat menjadi indikator bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar dapat diukur melalui berbagai indikator makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kemiskinan, Indeks Gini, serta laju inflasi. Berikut ini adalah pemaparan berbagai data tersebut yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan sebuah indikator makro pada rumpun perekonomian yang menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berperan untuk menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan, dengan mengukur tingkat produktivitas suatu daerah dalam menghasilkan nilai ekonomi secara umum. Berikut adalah gambaran LPE Kabupaten Banjar selama periode Tahun 2020-2024.



Gambar 2. 14 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang cukup positif. Dalam konteks pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada tahun 2020, Kabupaten Banjar dapat mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu bersangkutan sebesar 2,97 persen setiap tahunnya. Perekonomian Kabupaten Banjar pada awal data mengalami kontraksi sebesar minus 1,96 persen pada tahun 2020. Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian secara umum sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi penyebaran virus Covid-19. Perekonomian Kabupaten Banjar setelahnya mencatatkan capaian yang cukup positif dengan pertumbuhan di atas 3 persen selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2024 sendiri, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar masih berada di bawah angka provinsi maupun nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Kabupaten Banjar pasca pandemi masih perlu didorong secara lebih lanjut melalui berbagai dorongan kebijakan untuk kembali meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Selain pertumbuhan ekonomi secara umum, diperlukan penyajian data perekonomian daerah per lapangan usaha untuk mengetahui bagaimana kinerja perekonomian masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Banjar. Berikut merupakan data distribusi ekonomi Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

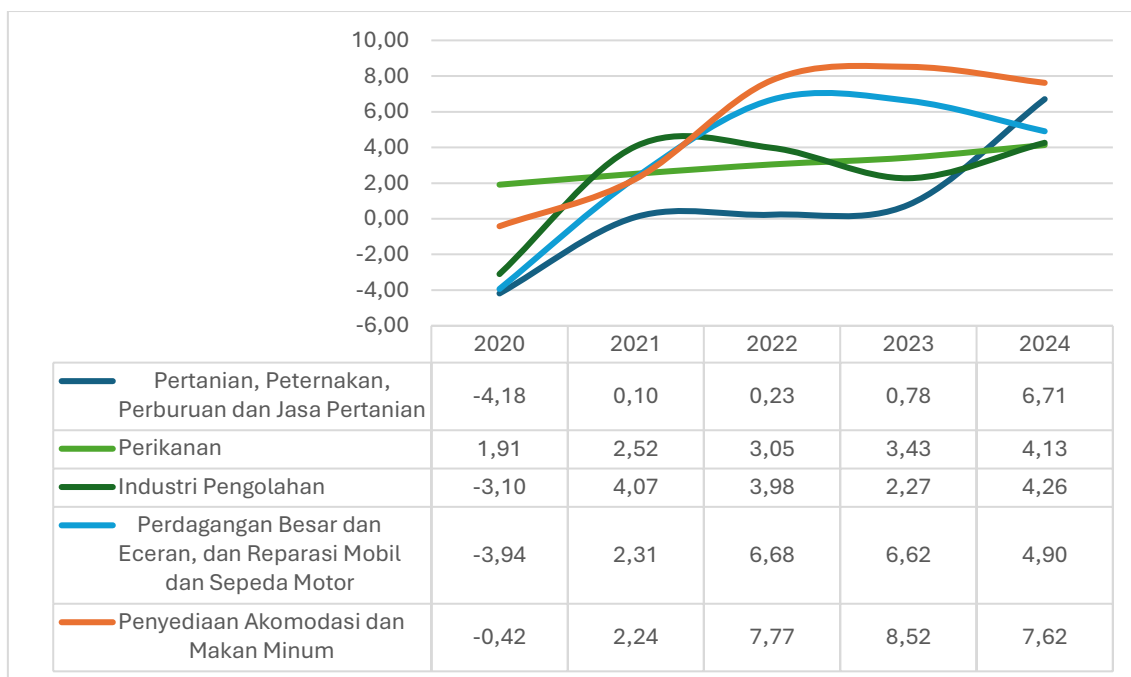
Tabel 2. 14 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,65	16,77	15,07	14,85	15,02
B. Pertambangan dan Penggalian	13,50	16,08	23,07	22,05	20,82
C. Industri Pengolahan	6,84	6,82	6,27	5,95	6,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
F. Konstruksi	10,48	10,34	9,59	9,74	9,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,64	14,32	13,68	14,60	14,78
H. Transportasi dan Pergudangan	4,79	4,57	4,29	4,63	4,72

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,32	3,21	3,00	3,10	3,24
J. Informasi dan Komunikasi	4,09	4,13	3,80	3,84	3,96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,25	1,97	1,96	1,98
L. Real Estate	3,61	3,59	3,24	3,24	3,28
M,N. Jasa Perusahaan	0,38	0,36	0,34	0,36	0,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	7,04	6,12	6,07	6,13
P. Jasa Pendidikan	5,98	5,79	5,16	5,14	5,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,58	2,65	2,46	2,51	2,52
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,77	1,68	1,57	1,59	1,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2025

Distribusi ekonomi daerah Kabupaten Banjar menunjukkan beberapa sektor dominan daerah secara proporsi. Perekonomian Kabupaten Banjar secara umum didominasi oleh beberapa lapangan usaha diantaranya adalah: pertambangan dan penggalan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lapangan usaha pertambangan dan penggalan menjadi sektor usaha dominan di Kabupaten Banjar dengan rata-rata distribusi sebesar 19,10 persen setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor selanjutnya yang cukup dominan di Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian dan perikanan yang digambarkan oleh distribusi lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan rata-rata distribusi sebesar 15,87 persen per tahun dalam waktu lima tahun terakhir. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor dengan distribusi terbesar ketiga dengan rata-rata distribusi sebesar 14,40 persen setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih cukup bergantung dengan sektor ekstraktif, walaupun terdapat potensi di sektor lain. Berikut merupakan data mengenai laju pertumbuhan beberapa sub-sektor unggulan di Kabupaten Banjar:



Gambar 2. 15 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

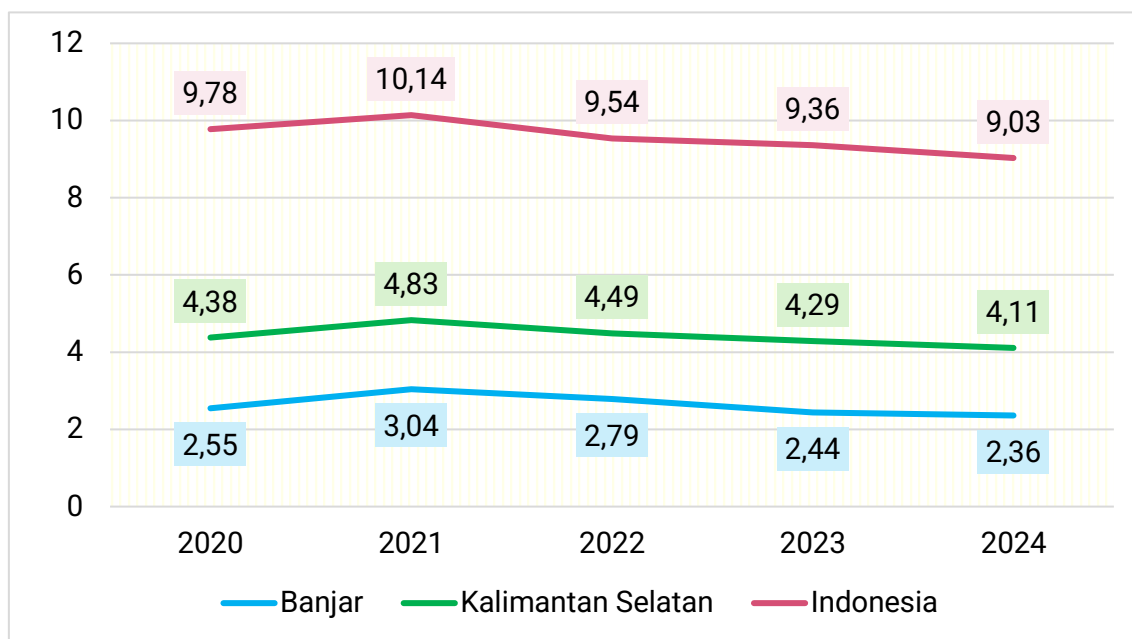
Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2025

Laju pertumbuhan sektor unggulan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan masing-masing sektor unggulan daerah secara umum. Lima tahun terakhir, beberapa sektor unggulan daerah berhasil tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,90 persen per tahun. Sektor unggulan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pariwisata, yang diukur melalui PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,15 persen per tahunnya. Hal ini menunjukkan kesempatan dan peluang pengembangan lebih lanjut dalam sektor pariwisata daerah. Sektor unggulan daerah dengan rata-rata-rata pertumbuhan terendah relatif dengan sektor unggulan lain adalah sektor pertanian yang diukur dengan PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dengan rata-rata pertumbuhan hanya 0,73 persen per tahun. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi dan pembangunan sektor pertanian lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah daerah secara umum.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*

approach). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

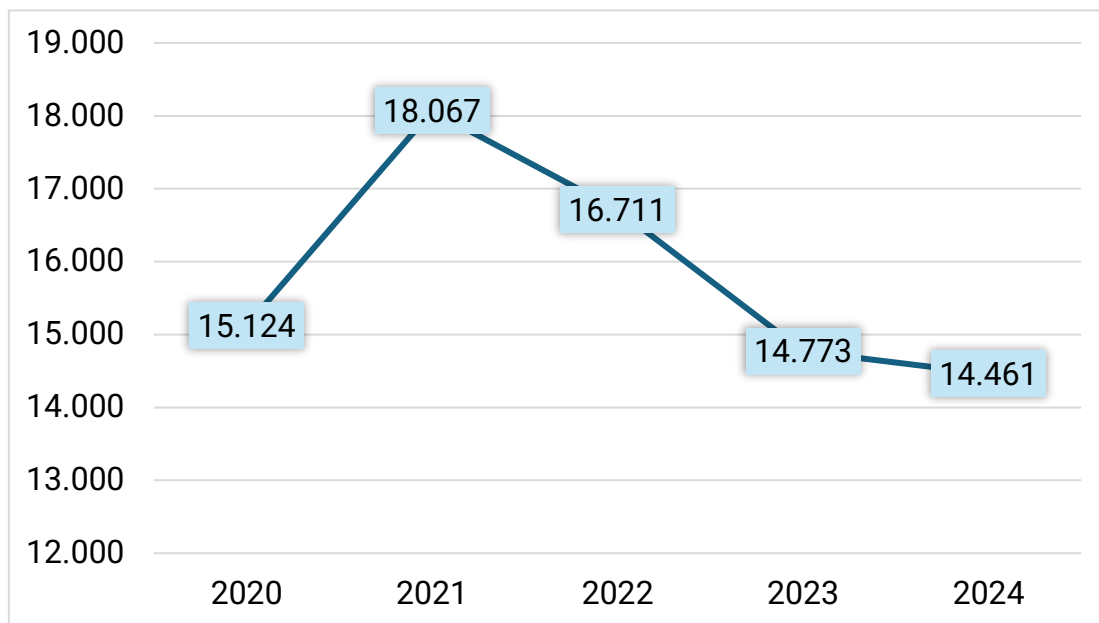


Gambar 2. 16 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Tingkat kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar ini tercatat terjadi sebesar 0,19 angka dengan persentase penurunan sebesar 7,45 persen dari kondisi awal. Capaian penurunan tingkat kemiskinan ini lebih baik dibandingkan dengan penurunan tingkat kemiskinan di level provinsi, namun masih berada di bawah pencapaian di tingkat nasional. Tingkat kemiskinan di tingkat provinsi tercatat menurun sebesar 0,27 angka dengan persentase penurunan sebesar 6,16 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di tingkat nasional tercatat menurun sebesar 0,75 angka dengan persentase penurunan sebesar 7,67 persen. Capaian penurunan tingkat kemiskinan ini mengindikasikan telah optimalnya berbagai intervensi

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Meskipun demikian, peningkatan angka tingkat kemiskinan pada tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 mengindikasikan sistem perlindungan sosial yang belum cukup optimal dalam menghadapi masa-masa krisis yang cenderung meningkatkan jumlah maupun tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan daerah secara lebih lanjut, berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjar selama lima tahun terakhir.

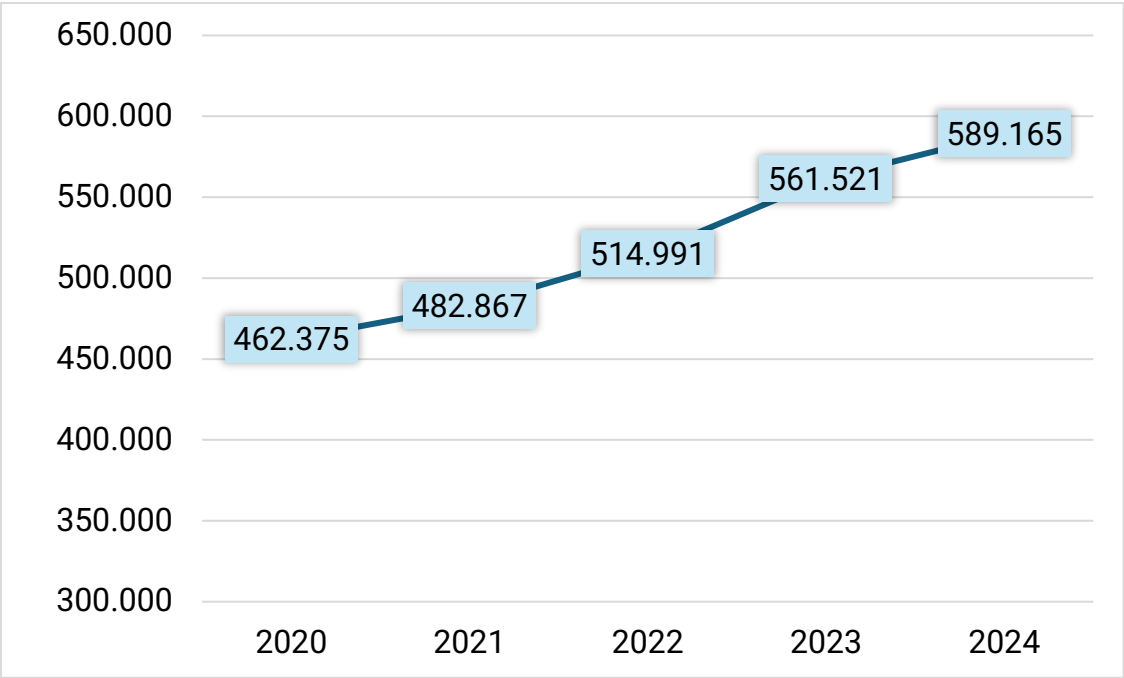


Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Orang)

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun meskipun terdapat kenaikan cukup signifikan pada tahun 2021. Dalam kurun waktu 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar menurun sebesar 663 jiwa atau dengan persentase penurunan sebesar 4,17 persen dibandingkan dengan angka pada tahun 2020. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian dan pemasukannya, sehingga masyarakat ini jatuh ke bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjar ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar yang sudah pulih dari kondisi pandemi Covid-19 dan jumlah masyarakat yang

terbebas dari kategori miskin semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan data mengenai garis kemiskinan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

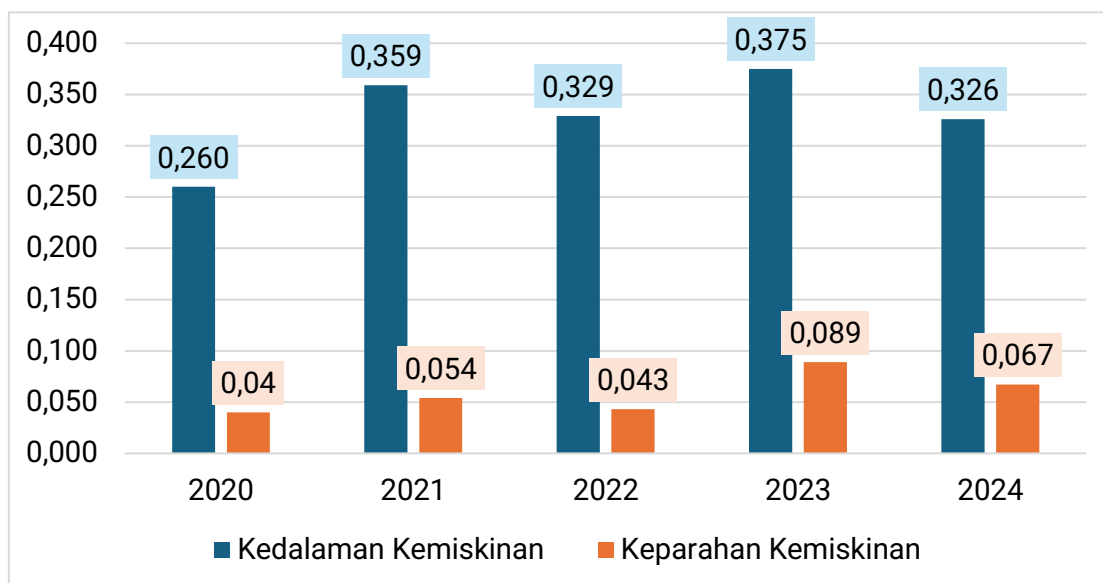


Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Garis kemiskinan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan merupakan minimal pengeluaran yang menjadi ukuran seseorang dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau sebaliknya. Peningkatan garis kemiskinan ini terjadi sebesar Rp126.760 atau dengan persentase peningkatan sebesar 29,53 persen dibandingkan dengan data tahun awal. Meningkatnya garis kemiskinan ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan barang pokok dan penting daerah, yang menyebabkan pengeluaran minimum masyarakat yang diperlukan untuk tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin semakin meningkat. Meskipun demikian, meningkatnya garis kemiskinan daerah yang disertai dengan menurunnya tingkat dan jumlah kemiskinan daerah menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang riil didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan antar masyarakat miskin, berikut merupakan data mengenai indeks

kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



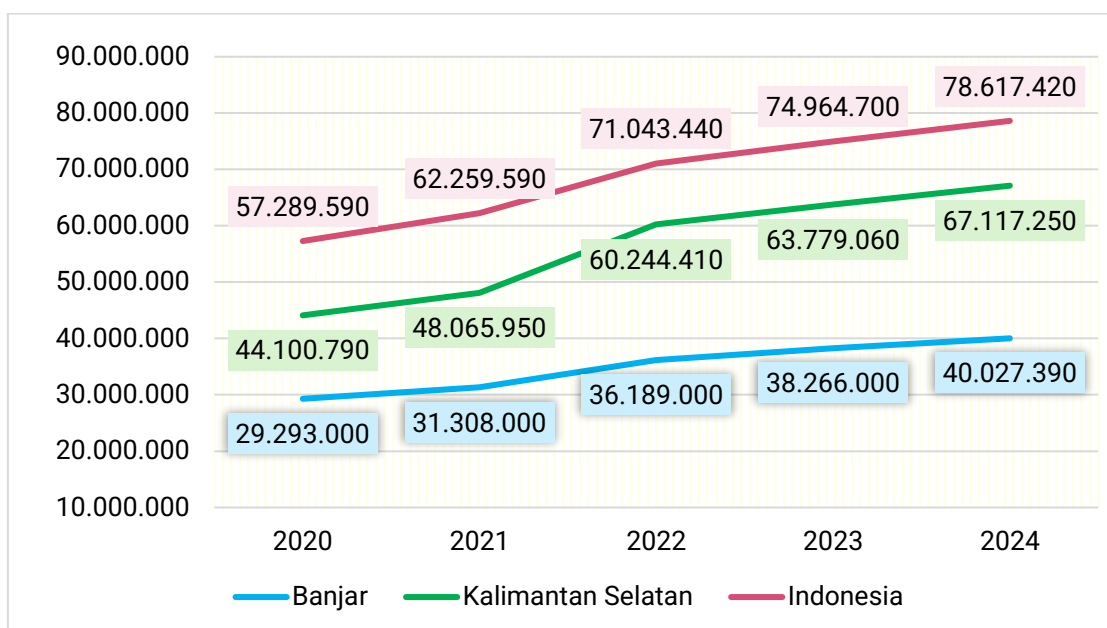
Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Nilai)

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dengan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan peningkatan sebesar 0,066 poin dengan persentase peningkatan sebesar 25,38 persen dibandingkan dengan data awal, sedangkan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,027 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 90 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa diantara masyarakat yang dikategorikan penduduk miskin, ketimpangan semakin melebar dan masyarakat miskin ekstrem memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan kondisi lima tahun sebelumnya. Hal ini perlu direspons melalui berbagai intervensi spesifik kepada masyarakat miskin ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi, jaminan sosial menyeluruh, dan pemerataan akses dan kesempatan atas pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro yang dihitung dengan membagi total pendapatan ekonomi suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Di tingkat daerah di Indonesia, pendapatan per kapita biasanya direpresentasikan melalui proksi PDRB per kapita, yaitu hasil pembagian antara nilai PDRB dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar berdasarkan data makro yang mencerminkan nilai tambah ekonomi daerah dalam periode tertentu, yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Adapun data mengenai PDRB per kapita Kabupaten Banjar untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

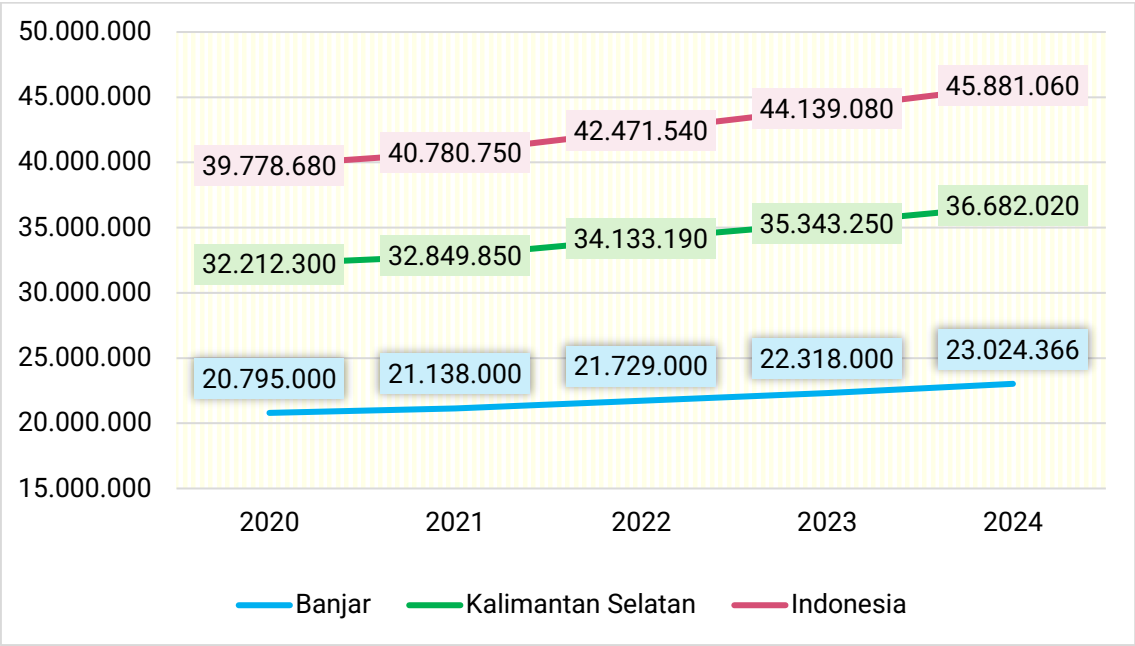


Gambar 2. 20 Grafik PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, 2025; BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS Kabupaten Banjar, 2025

PDRB ADHB per kapita Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Dalam periode 2020-2024, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan sebesar 10,73 juta rupiah atau setara dengan peningkatan sebesar 36,64 persen. Persentase pertumbuhan ini lebih rendah baik dengan level provinsi (52,19 persen) maupun terhadap level nasional (37,23 persen). Di tingkat provinsi, PDRB ADHB per kapita tercatat meningkat

sebesar 23,02 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 52,19 persen, sedangkan di tingkat nasional, peningkatan mencapai 21,33 juta rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 37,23 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam produktivitas ekonomi masyarakat secara nominal, meskipun pertumbuhan persentasenya masih berada di bawah tingkat provinsi. Untuk memahami pertumbuhan PDRB per kapita lebih lanjut dari aspek pertumbuhan riil, dengan menghilangkan pengaruh inflasi, digunakan indikator PDRB ADHK per kapita. Adapun data PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 21 Grafik PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS RI, 2025; BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS Kabupaten Banjar, 2025

Dalam lima tahun terakhir, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar menunjukkan tren pertumbuhan. Namun, laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB per kapita, karena PDRB ADHK per kapita telah disesuaikan dengan faktor inflasi, sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil.

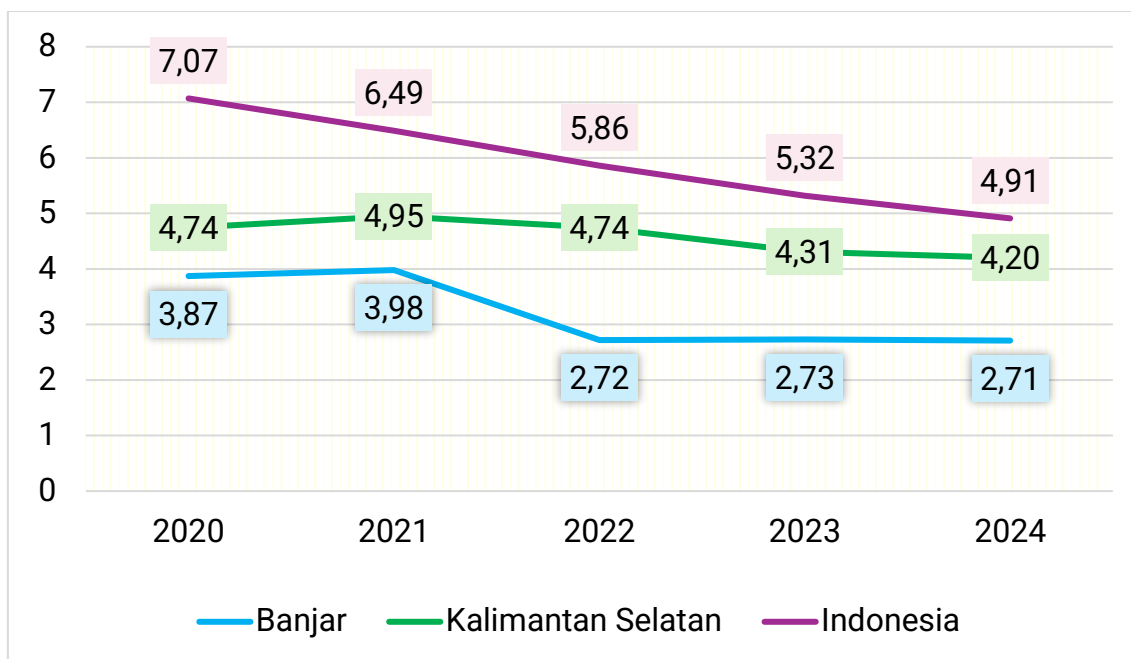
Selama periode 2020-2024, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar meningkat sebesar 2,23 juta rupiah dengan persentase pertumbuhan mencapai 10,72 persen. Secara umum, persentase pertumbuhan ini lebih rendah baik terhadap tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam periode yang sama, PDRB

ADHK per kapita di tingkat provinsi mengalami peningkatan sebesar 4,47 juta rupiah atau tumbuh 13,88 persen, sedangkan di tingkat nasional, pertumbuhannya mencapai 6,10 juta rupiah dengan peningkatan sebesar 15,34 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional. Namun, dengan PDRB per kapita yang selalu tumbuh setiap tahunnya mengindikasikan adanya potensi untuk terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar di masa mendatang.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro kesejahteraan ekonomi yang mengukur proporsi antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah pengangguran suatu wilayah dalam tahun tertentu. Semakin rendah TPT suatu daerah tipikalnya mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat wilayah yang semakin baik dengan asumsi masyarakat yang terserap dalam pasar kerja daerah memiliki tingkat pengupahan yang sesuai dengan regulasi pengupahan daerah yang berlaku. Dengan asumsi ini, penggambaran dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan secara hati-hati, mengingat rendahnya TPT suatu wilayah belum secara pasti menggambarkan sejahteranya masyarakat suatu wilayah. Oleh karenanya, penyajian dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan dengan melihat indikator-indikator lain yang relevan dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan dan indeks gini. Data tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 22 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup fluktuatif meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan. TPT di Kabupaten Banjar meningkat pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2022 dan 2024. Secara keseluruhan, periode 2020-2024 mencatat penurunan TPT sebesar 1,16 poin atau setara dengan 29,97 persen.

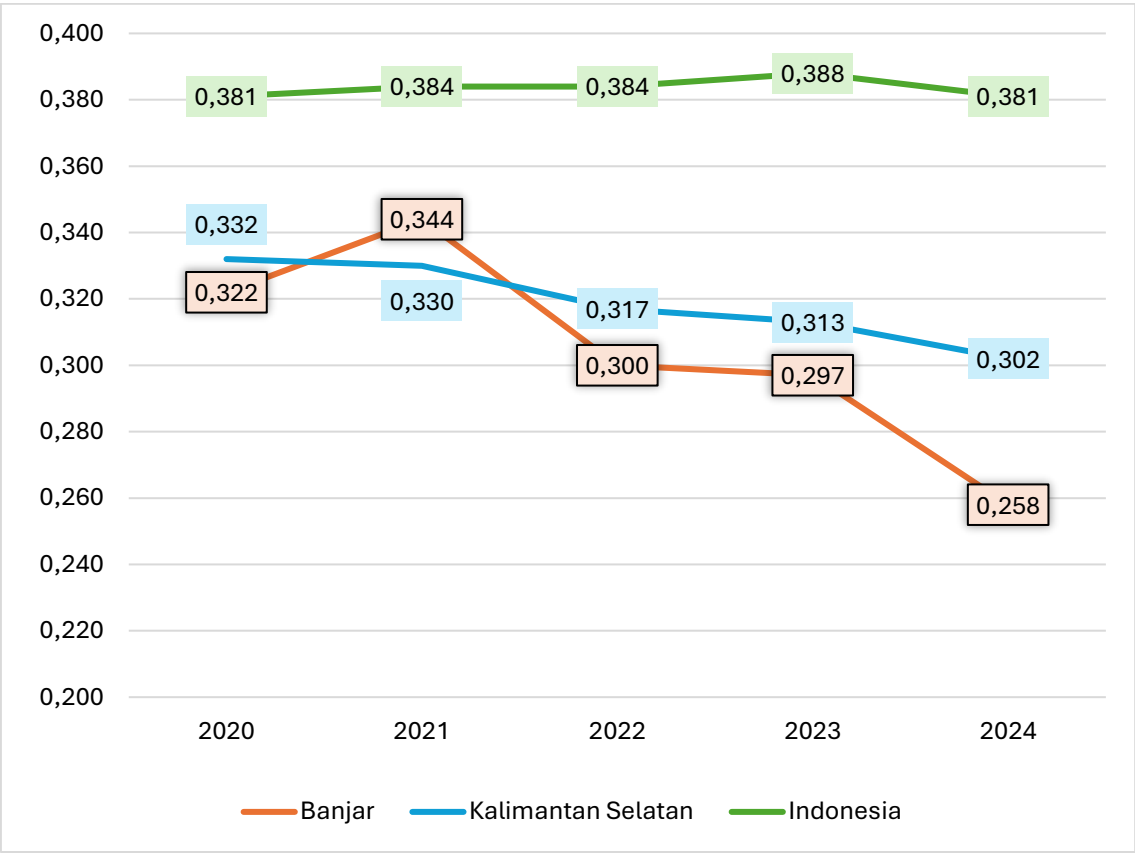
Pada periode yang sama, TPT di tingkat provinsi dan nasional juga mengalami penurunan. TPT provinsi turun sebesar 0,54 poin dengan persentase penurunan 11,39 persen, sementara TPT nasional menurun sebesar 2,16 poin dengan penurunan 30,55 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Mengingat data awal tahun 2020 bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, penurunan TPT ini mencerminkan pemulihan yang cukup signifikan dalam sektor ketenagakerjaan daerah.

Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Banjar telah cukup terserap oleh pasar kerja, mencerminkan peningkatan kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, upaya lebih lanjut tetap diperlukan guna mengoptimalkan kondisi ini sehingga tingkat pengangguran di

Kabupaten Banjar dapat terus ditekan hingga mencapai tingkat yang lebih minimal.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Indeks Gini sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga Indeks Gini agar mendekati 0, yang mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 23 Grafik Indeks Gini Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

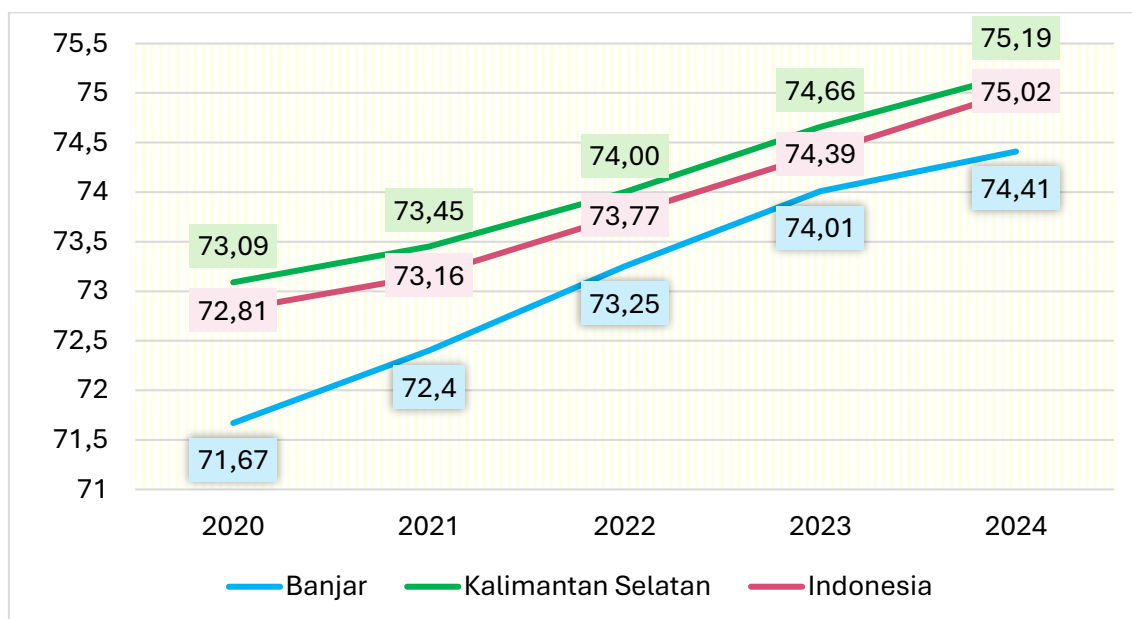
Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Banjar dalam lima tahun terakhir secara umum menunjukkan tren yang menurun, kecuali pada tahun 2021. Pada tahun 2021, indeks Gini mengalami peningkatan yang cukup tajam, tetapi kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Secara keseluruhan, indeks Gini Kabupaten Banjar selama periode 2020-2024 mengalami penurunan sebesar 0,064 poin atau setara dengan 19,88 persen. Persentase penurunan ini tergolong cukup optimal jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di tingkat nasional.

Dalam periode yang sama, indeks Gini di tingkat provinsi juga mengalami penurunan, sedangkan indeks Gini nasional cenderung stagnan tanpa perubahan. Penurunan indeks Gini di tingkat provinsi tercatat sebesar 0,030 poin atau setara dengan 9,04 persen, sedangkan indeks Gini nasional tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan data awal dan terbaru. Data ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Banjar, yang mengindikasikan penurunan ketimpangan ekonomi secara umum. Tren positif ini perlu dipertahankan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di masa mendatang.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dihitung dengan didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. AHH didasarkan pada umur panjang merupakan sesuatu yang dapat terwujud jika manusia mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Sedangkan RLS dan HLS merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal, termasuk di antaranya sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri, swasta, dan sekolah agama seperti Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. IPM juga melihat dari pengeluaran per kapita yang mencerminkan pendapatan dan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah capaian IPM Kabupaten Banjar selama periode 2020-2024.



Gambar 2. 24 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

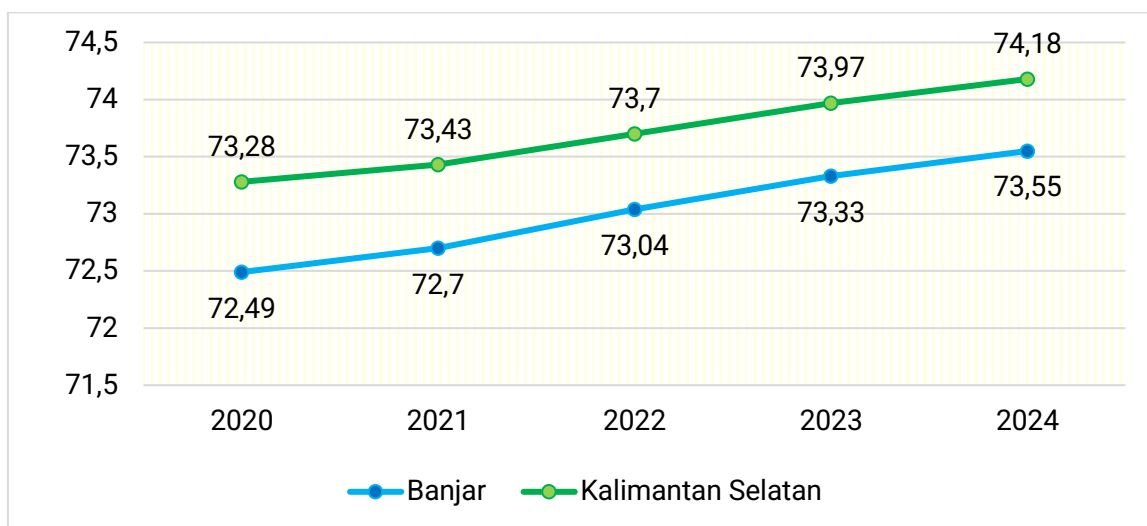
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 2,74 poin, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,78 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

Di tingkat provinsi, IPM meningkat sebesar 2,10 poin dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,86 persen, sedangkan di tingkat nasional, kenaikan IPM tercatat sebesar 2,21 poin dengan pertumbuhan 3,04 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup baik, IPM Kabupaten Banjar masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Banjar perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang berkaitan dengan pengembangan SDM agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya *promotive*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitative*, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar.



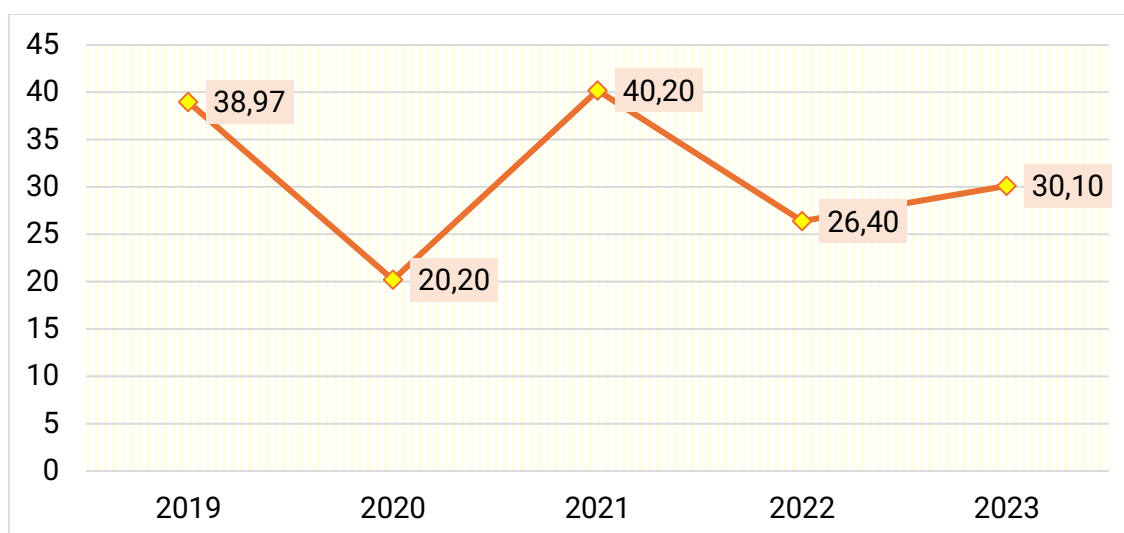
Gambar 2. 25 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, UHH Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebesar 1,06 poin. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar berjalan cukup baik. UHH dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah yang memadai.

Pada tahun 2024, capaian UHH Kabupaten Banjar sebesar 73,55. Artinya, rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 73,55 tahun. Meskipun mengalami peningkatan, capaian UHH Kabupaten Banjar masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Banjar selisih 0,63 poin lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas kesehatan perlu dioptimalkan melalui program-program kesehatan seperti peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

Indikator makro lain yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada sektor kesehatan adalah prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan kekebalan tubuh anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis.



Gambar 2. 26 Prevalensi Stunting di Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023

Sumber: Diolah dari Laporan Studi Status Gizi Indonesia (2019-2022) dan data.kalseslprov.go.id, 2023

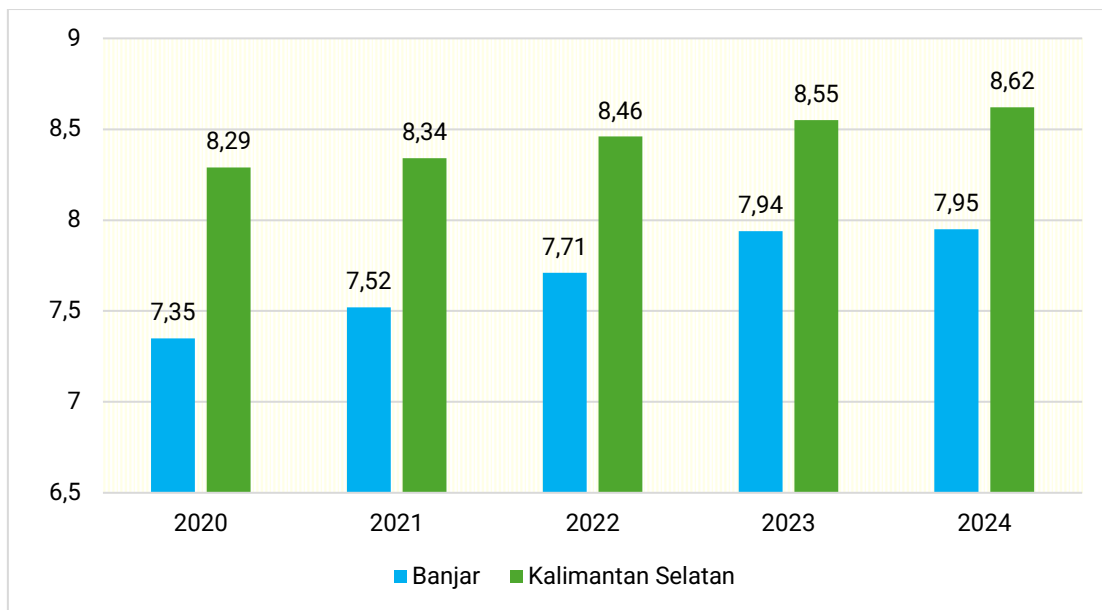
Selama periode 2019-2023, capaian prevalensi stunting Kabupaten Banjar mengalami tren yang fluktuatif. Capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 40,20 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 20,20. Pada tahun 2023, capaian stunting kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 30,10 persen.

Capaian tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan target RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2045 sebesar 5 persen. Untuk itu, pemerintah perlu memiliki terobosan untuk upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar.

Adapun upaya yang dilakukan melalui pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitive. Intervensi spesifik berkaitan langsung dengan aspek kesehatan seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, pemberian suplemen zat besi dan asam folat pada ibu hamil, imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang tepat, dan posyandu rutin untuk memantau perkembangan anak. Intervensi sensitive berkaitan dengan aspek non kesehatan seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan gizi bagi ibu dan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pertumbuhan serta perkembangan anak yang optimal di Kabupaten Banjar

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas di suatu daerah dapat dilihat dari capaian beberapa indikator makro pada urusan pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk umur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan harapan lamanya sekolah yang akan dijalani oleh anak usia 7 tahun dimasa mendatang. RLS dan HLS digunakan untuk mengetahui kualitas dan kondisi sistem pendidikan pada suatu wilayah. Berikut capaian RLS dan HLS Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan



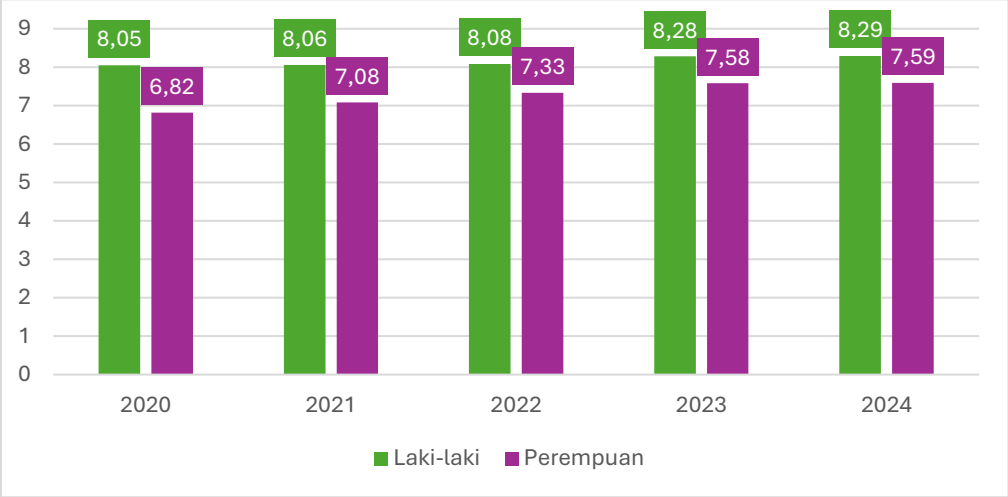
Gambar 2. 27 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar mengalami tren yang meningkat. RLS Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin selama lima tahun terakhir. Meskipun mengalami kenaikan, capaian tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Banjar berada pada angka 7,95. Capaian tersebut selisih 0,67 poin lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,62. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Banjar yang berusia 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga 7,95 tahun atau setara kelas 1 SMP, sedangkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan hingga 8,62 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Dengan demikian, capaian RLS Kabupaten Banjar perlu ditingkatkan. Rata-rata lama sekolah yang meningkat akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan secara lebih luas. Selain itu, peningkatan lama sekolah juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang mencanangkan program wajib belajar 13 tahun.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan rata-rata sekolah dan meningkatkan kualitas SDM secara

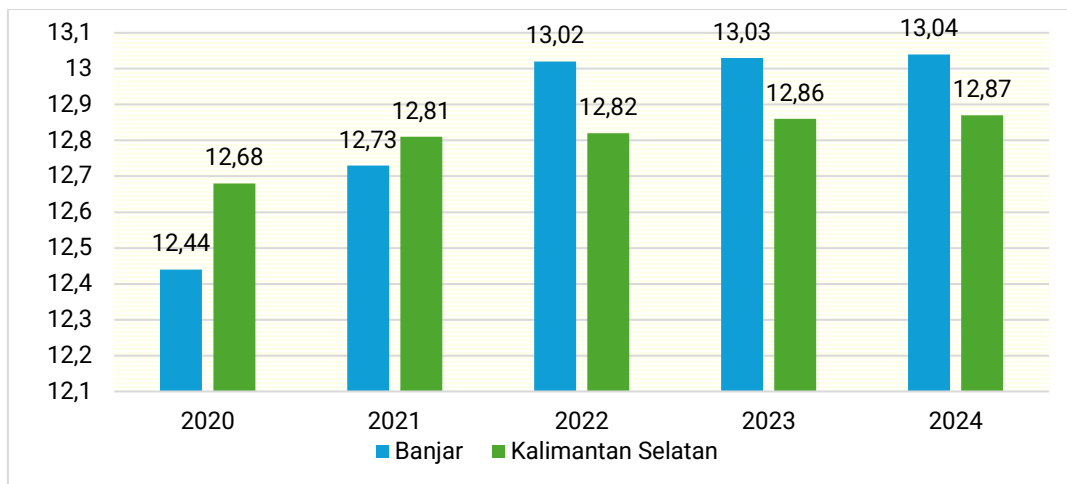
lebih luas. Peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, pemenuhan fasilitas pembelajaran, peningkatan jumlah dan distribusi guru dan tenaga pendidikan, serta peningkatan upaya promosi dan edukasi terkait pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kemampuan literasi, serta kolaborasi antar institusi pendidikan.



Gambar 2. 28 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2025

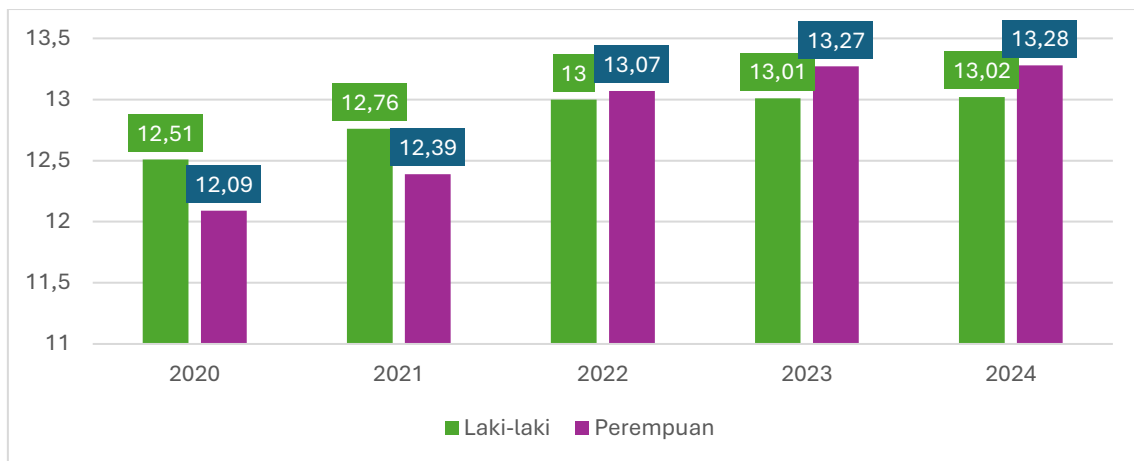
Selama periode 2020-2024, capaian RLS berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa RLS laki-laki selalu lebih unggul dibanding RLS perempuan. Pada tahun 2024, RLS laki-laki 8,29, sedangkan RLS perempuan 7,59, sehingga terdapat selisih 0,7 poin. RLS laki-laki relative stabil pada angka 8 atau setara kelas 2 SMP dan RLS perempuan pada kisaran angka 7 atau setara kelas 1 SMP. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya kesenjangan gender pada akses pelayanan pendidikan Untuk itu, upaya peningkatan akses layanan pendidikan perlu memperhatikan distribusi pelayanan berdasarkan jenis kelamin



Gambar 2. 29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Selama periode 2020-2024, harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Banjar mengalami tren yang meningkat. Capaian tersebut berada di atas rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Selatan. HLS Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebesar 0,76 poin selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Banjar sebesar 13,04. Capaian tersebut selisih 0,17 poin lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,87. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Banjar diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga 13,04 tahun atau setara tingkat D1, sedangkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan hingga 12,87 tahun atau setara kelas 3 SMA. Namun demikian, capaian harapan lama sekolah (HLS) perlu untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara lebih luas, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan generasi emas 2045.



Gambar 2. 30 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian HLS laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan. Pada periode awal 2020-2021, HLS perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Namun, pada tahun berikutnya HLS perempuan dan laki-laki hampir sama pada angka 13. Dengan demikian, anak-anak di Kabupaten Banjar, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas hingga tinggi. Capaian peningkatan kesetaraan gender dalam akses pendidikan perlu ditingkatkan pada periode berikutnya.

2.2.3.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akses dan keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat pada berbagai jenjang usia. APS menggambarkan persentase penduduk suatu kelompok umur yang sedang bersekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama, sehingga dapat mencerminkan seberapa luas kesempatan pendidikan telah dimanfaatkan. Tingginya APS menunjukkan semakin banyak anak dan remaja yang memperoleh layanan pendidikan, sementara rendahnya APS dapat mengindikasikan adanya hambatan seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun ketersediaan sarana pendidikan. Oleh karena itu, analisis terhadap angka partisipasi sekolah menjadi dasar penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan program

peningkatan akses, pemerataan, serta kualitas pendidikan di suatu wilayah. Berikut adalah capaian partisipasi sekolah jenjang SD hingga SMA di Kabupaten Banjar.

Tabel... Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD – SMA Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Angka Partisipasi Sekolah	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur SD (7–12 Tahun)	98,45	100	99,17	100	98,43	100	99,41	98,63	98,61	96,72
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur SMP (13–15 Tahun)	85,42	82,46	80,76	91,76	89,22	82,68	89,5	88,61	84,42	92,18
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur SMA (16–18 Tahun)	65,73	44,97	58,58	53,47	50,06	64,47	50,15	64,91	58,52	64,55

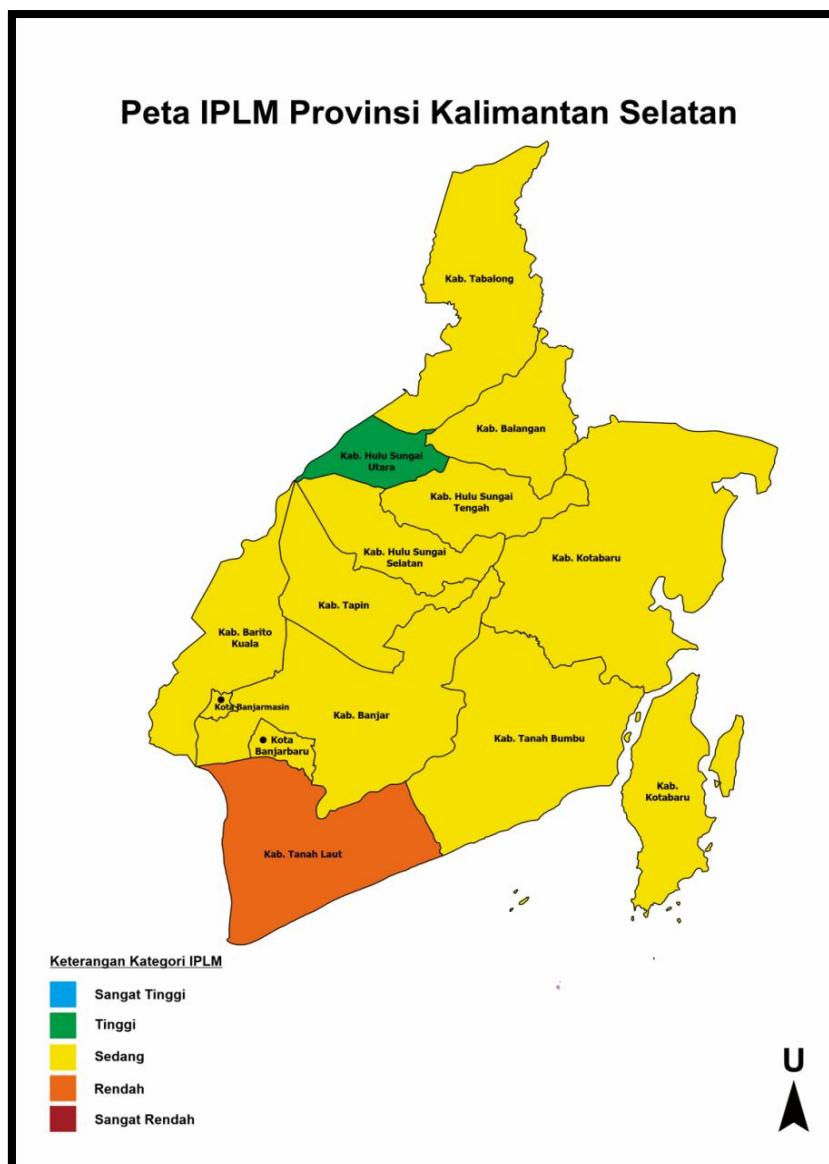
Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2025

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Banjar periode 2020–2024, menunjukkan bahwa pada kelompok umur SD (7–12 tahun) baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Hampir seluruh anak di usia SD bersekolah dengan capaian di atas 96 persen, bahkan pada beberapa tahun partisipasi perempuan mencapai 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Banjar relatif merata tanpa perbedaan signifikan antar jenis kelamin. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terlihat sedikit penurunan partisipasi, khususnya pada perempuan yang semula mencapai 100 persen turun menjadi 96,72 persen, sehingga meskipun relatif kecil, hal ini tetap perlu diantisipasi agar tidak berlanjut di tahun berikutnya.

Berbeda dengan jenjang SD, APS pada tingkat SMP (13–15 tahun) dan SMA (16–18 tahun) menunjukkan variasi yang lebih besar serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tingkat SMP, perempuan cenderung memiliki partisipasi lebih tinggi dibanding laki-laki, misalnya pada 2021 (91,76 persen untuk perempuan dan 80,76 persen untuk laki-laki) serta pada 2024 (92,18 persen untuk perempuan dan 84,42 persen untuk laki-laki). Kondisi yang sama juga terlihat pada jenjang SMA, di mana partisipasi perempuan relatif lebih tinggi, khususnya pada 2022–2024 dengan selisih cukup mencolok. Fakta ini

menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih rentan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Faktor penyebabnya dapat berasal dari dorongan ekonomi keluarga, budaya kerja dini, atau kurangnya motivasi pendidikan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang menekankan pada peningkatan partisipasi pendidikan menengah, terutama bagi anak laki-laki, menjadi sangat penting untuk pemerataan kesempatan belajar di Kabupaten Banjar.

Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM diukur dari 7 unsur dan 16 indikator. Ketujuh unsur tersebut yakni pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Nilai IPLM dalam skala 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPLM, maka semakin baik tingkat literasi masyarakat. Ada lima tingkatan dalam nilai IPLM yaitu 0-30 sangat rendah, 30-50 rendah, 50-80 sedang, 80-90 tinggi, dan 90-100 sangat tinggi. Capaian sangat rendah dan rendah mengindikasikan perlunya upaya pembinaan dari pemerintah pusat/provinsi, capaian sedang mengindikasikan tingkat literasi memenuhi standar, capaian tinggi mengindikasikan tingkat literasi cukup baik, dan capaian sangat tinggi mengindikasikan budaya literasi yang baik dan bisa menjadi perpustakaan percontohan. Capaian IPLM diukur oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Berikut capaian IPLM menurut kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.



Gambar 2. 31 Peta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Sumber: Laporan Akhir Kajian IPLM, Perpustakaan Nasional Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menunjukkan capaian yang cukup baik dengan nilai 71,29 (sedang). Dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 11 kabupaten/kota yang memiliki status IPLM sedang, 1 kabupaten berstatus IPLM tinggi, dan hanya 1 kabupaten berstatus IPLM rendah. Secara nilai, Kabupaten Banjar berada pada urutan ke delapan dengan nilai IPLM sebesar 67,23 (sedang). Capaian tersebut hampir sama dengan Kabupaten Balangan sebesar 67,73, namun masih terpaut jauh dengan Kabupaten Tabalong 79,04, Kabupaten Tapin 79,60 dan Kabupaten Hulu

Sungai Utara 82,34. Secara lebih rinci, berikut unsur pembentuk IPLM Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2023

No	Unsur IPLM	2022	2023	Ket
1	UPLM 1: pemerataan layanan perpustakaan	0,0025	0,5506	Naik
2	UPLM 2: ketercukupan koleksi	1,6011	0,1361	Turun
3	UPLM 3: ketercukupan tenaga perpustakaan	0,0025	1,0000	Naik
4	UPLM 4: tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,3289	0,0191	Turun
5	UPLM 5: jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP	2,3458	1,0000	Turun
6	UPLM 6: keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi	0,2364	1,0000	Turun
7	UPLM 7: anggota perpustakaan	0,5596	1,0000	Naik
Nilai IPLM		72,53 (Sedang)	67,23 (Sedang)	Turun

Sumber: Laporan Akhir Kajian IPLM, Perpustakaan Nasional Tahun 2023

Pada tahun 2023, capaian indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kabupaten Banjar sebesar 67,23 atau berstatus sedang. Capaian tersebut menurun sebesar 5,3 poin dari tahun sebelumnya sebesar 72,53 (2021). Ada empat unsur yang mengalami penurunan yakni ketercukupan koleksi, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa indikator dalam masing-masing unsur masih perlu ditingkatkan. Indikator tersebut diantaranya rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, kekurangan koleksi perpustakaan yang memenuhi standar, kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pemanfaatan perpustakaan.

Sedangkan tiga unsur lain yang mengalami peningkatan yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, dan anggota

perpustakaan. Adapun indikator yang menunjukkan peningkatan dari ketiga unsur tersebut yakni rasio ketersediaan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, dan persentase anggota perpustakaan. Dengan demikian, semua unsur pembentuk IPLM masih perlu dioptimalkan untuk mewujudkan budaya literasi masyarakat yang lebih baik

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Hingga tahun 2024, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar, terus mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu langkah signifikan adalah pelaksanaan sosialisasi kepada perangkat desa dan pengusaha lokal, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Program ini mencakup berbagai skema perlindungan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, pemerintah Kabupaten Banjar juga mendorong partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program BPJS Ketenagakerjaan melalui dialog sosial yang melibatkan pengusaha dan tenaga kerja informal. Upaya ini bertujuan agar lebih banyak pekerja, terutama dari sektor informal yang mendapatkan perlindungan sosial secara layak. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan seluruh pekerja di Kabupaten Banjar, baik formal maupun informal, dapat menikmati manfaat jaminan sosial yang lebih luas, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi mereka serta keluarganya

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

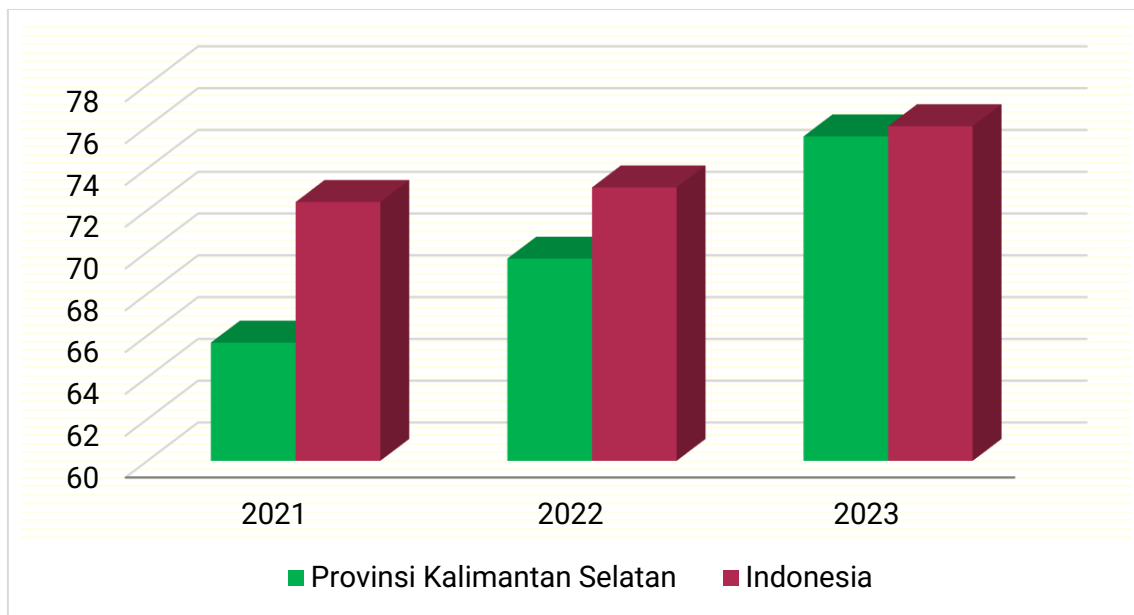
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara kehidupan beragama yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat serta perkembangan budaya yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kemajuan zaman. Beragama maslahat berarti praktik

keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kehidupan beragama yang demikian menumbuhkan sikap toleransi, kepedulian, serta keharmonisan antar individu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan dinamika kebudayaan yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya. Kemajuan budaya mencakup inovasi dalam seni, pendidikan, teknologi, serta tata kehidupan sosial yang tetap menghargai warisan leluhur namun mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang terus berkembang menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, serta memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja sama antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Berikut merupakan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banjar Tahun 2021 hingga 2023.



Gambar 2. 32 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banjar Tahun 2021-2023

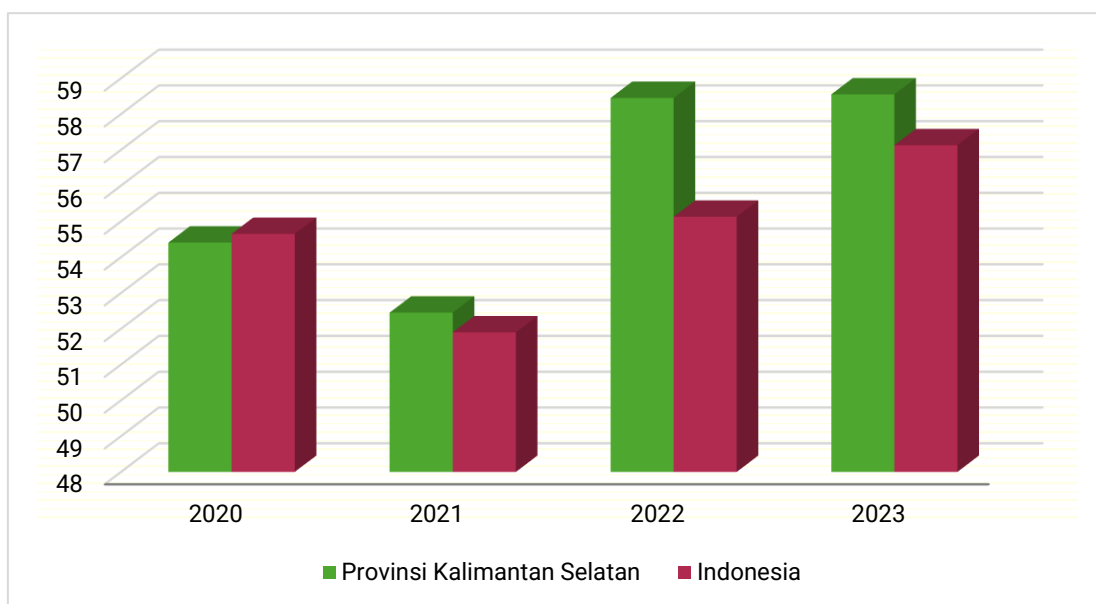
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar menggunakan data proksi dari Provinsi Kalimantan Selatan karena pengukuran IKUB hanya dilakukan hingga level provinsi. IKUB di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dari tahun 2021 hingga 2023. Meskipun begitu, terdapat tren peningkatan indikator tersebut baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki dinamika sosial-keagamaan yang cukup kompleks. Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peran tokoh agama dan adat dalam membangun komunikasi lintas agama, program pemerintah daerah yang mendukung dialog dan toleransi antar umat beragama, dan peningkatan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural. Tren peningkatan IKUB di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar perlu dijaga melalui kebijakan inklusif, pendidikan toleransi, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun identitas, karakter, dan daya saing suatu bangsa. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu negara atau daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Banjar Tahun 2020 hingga 2023.



Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2023

Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendikbud, 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan sektor kebudayaan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek, seperti pelestarian budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta kontribusi budaya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. IPK Kabupaten Banjar menggunakan data

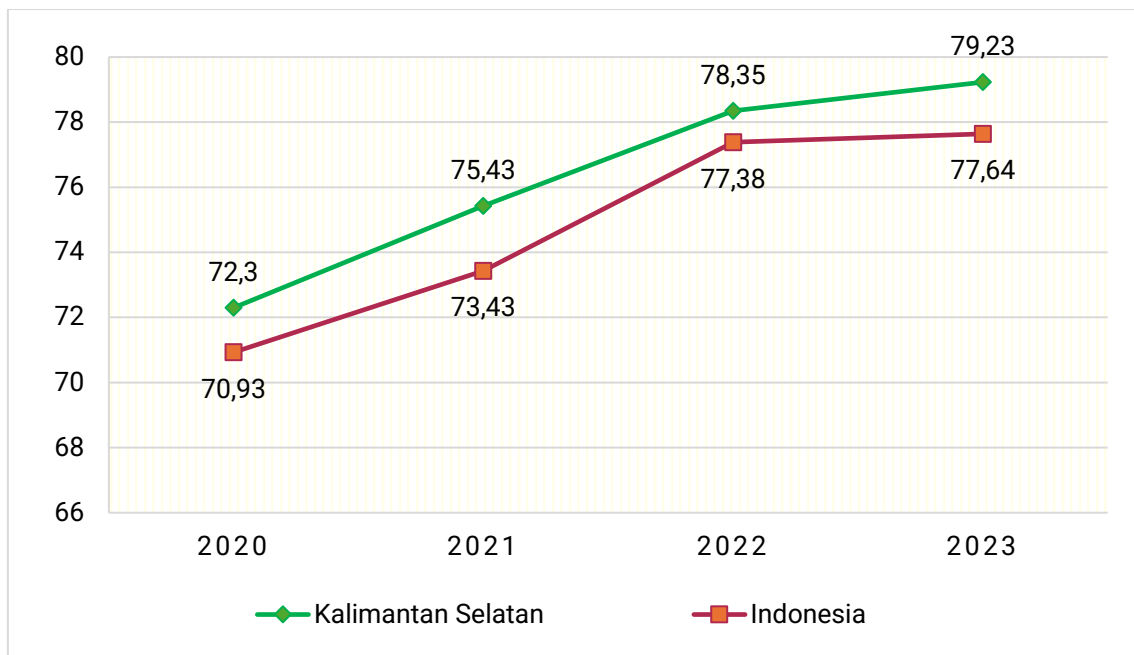
proksi dari Provinsi Kalimantan Selatan karena pengukuran IPK hanya dilakukan hingga level provinsi.

Dinamika Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kalimantan Selatan dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Penurunan data IPK yang cukup signifikan baik di tingkat provinsi maupun nasional terjadi pada tahun 2021 sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kebudayaan, seperti pagelaran seni, kegiatan komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya yang membutuhkan interaksi sosial. Peningkatan capaian IPK dapat dilakukan pada tahun 2022 yang menandakan bahwa adanya upaya pemulihan budaya pasca pandemi, termasuk kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.

Fluktuasi data capaian IPK yang mengarah pada tren peningkatan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti Revitalisasi warisan budaya lokal, seperti seni tradisional, rumah adat, dan bahasa daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, dukungan kebijakan pemerintah daerah termasuk bantuan bagi pelaku seni dan budaya, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya lokal dan menarik generasi muda dalam pelestarian budaya.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa data seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.



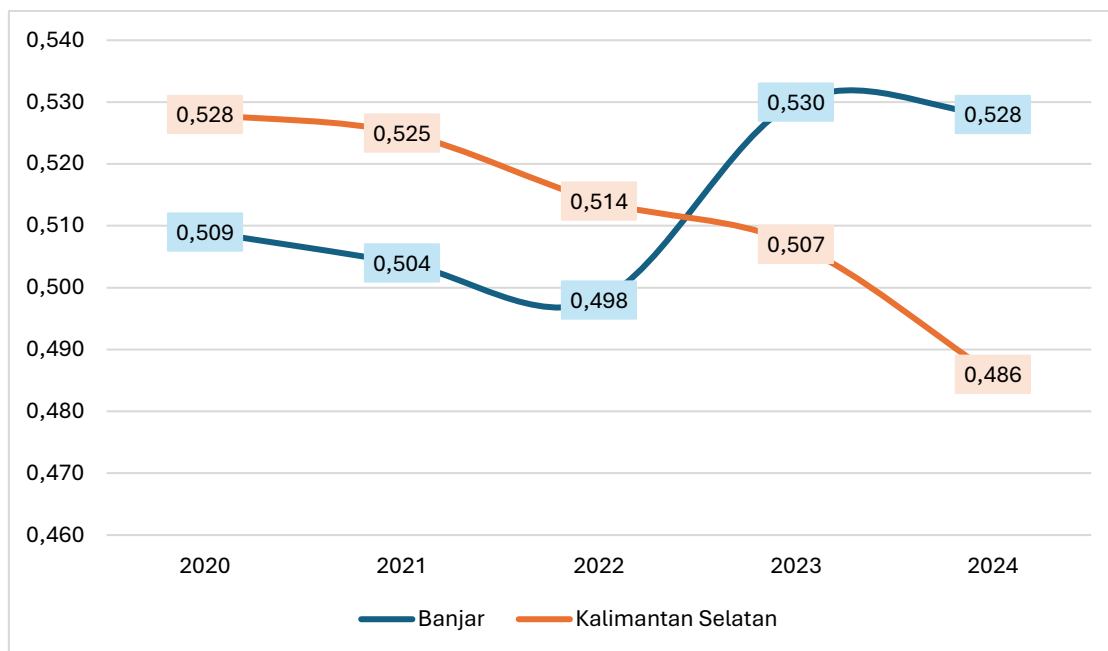
Gambar 2. 34 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2023

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020-2023, Kementerian PPPA, 2024

Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2016, 2019, dan 2020-2021 dengan jumlah dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Namun, perhitungan tersebut baru sampai pada level provinsi. Oleh karena itu, capaian rata-rata kualitas keluarga Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu proksi yang digunakan untuk melihat gambaran kualitas keluarga di Kabupaten Banjar. Selama periode 2020-2023, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tren yang meningkat, bahkan selalu berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2023, indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 79,23. Capaian tersebut lebih tinggi 1,59 poin dibanding rata-rata nasional sebesar 77,64.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata kualitas keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk dalam hal ini Kabupaten Banjar, sudah berada pada kondisi yang relatif baik. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas keluarga tetap perlu ditingkatkan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Peningkatan

peran dan fungsi keluarga dapat dilakukan melalui pemenuhan dimensi keluarga berkualitas seperti aspek legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.



Gambar 2. 35 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Selama periode 2020-2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banjar mengalami fluktuasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Banjar masih cukup volatil. Pada tahun 2023 kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Banjar berada di atas rata-rata provinsi dan tren tersebut berlangsung hingga tahun 2024. Ketimpangan gender rendah apabila mendekati angka 0. Dengan demikian, upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Banjar masih perlu dioptimalkan pada periode pembangunan berikutnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah intervensi lebih lanjut pada masing-masing dimensi IKG seperti peningkatan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan pasar tenaga kerja. Dari 3 dimensi tersebut terdapat 5 indikator yang diukur yakni persentase perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, angka fertilitas remaja, persentase laki-laki/perempuan dalam parlemen, persentase laki-laki/perempuan berpendidikan minimal SMA, dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki/perempuan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, daya saing tidak hanya mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi unggulan, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, inovasi, teknologi, dan lainnya.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan kemajuan suatu daerah. SDM yang kompetitif tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan individu dalam menguasai keterampilan, pendidikan, serta inovasi menentukan efektivitas mereka dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Tingkat produktivitas berkaitan erat dengan kualitas SDM yang ada pada daerah terkait. SDM yang unggul akan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, menghasilkan *output* yang lebih tinggi, serta meningkatkan efisiensi kerja. Produktivitas yang meningkat secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Daya saing SDM juga berkorelasi dengan angka ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif. Daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi cenderung menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar karena beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif lebih tinggi. Sebaliknya, jika angka ketergantungan menurun dan diimbangi dengan peningkatan produktivitas, suatu daerah dapat menikmati "bonus demografi," di mana sebagian besar penduduk berada dalam usia kerja dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Angka ketergantungan adalah indikator demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (kombinasi usia 0–14

tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam membiayai kebutuhan kelompok usia tidak produktif. Faktor-faktor yang memengaruhi angka ketergantungan meliputi tingkat kelahiran, angka harapan hidup, serta migrasi penduduk. Negara dengan angka kelahiran tinggi cenderung memiliki angka ketergantungan tinggi karena banyaknya anak-anak yang belum memasuki usia produktif. Berikut merupakan capaian angka ketergantungan di Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 16 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banjar Tahun 2020 Per Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun
		2020
1	Aluh-Aluh	42,77
2	Beruntung Baru	45,93
3	Gambut	46,37
4	Kertak Hanyar	43,27
5	Tatah Makmur	44,87
6	Sungai Tabuk	45,29
7	Martapura	41,28
8	Martapura Timur	45,07
9	Martapura Barat	44,92
10	Astambul	43,86
11	Karang Intan	45,76
12	Aranio	48,72
13	Sungai Pinang	43,17
14	Paramasan	44,03
15	Pengaron	43,87
16	Sambung Makmur	44,12
17	Mataraman	39,21
18	Simpang Empat	42,36
19	Telaga Bauntung	42,90
20	Cintapuri Darussalam	46,36
	Kabupaten Banjar	44,37

Tabel 2. 17 Proyeksi Rasio Ketergantungan (dalam Persen) Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Tahun 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (persen) Kabupaten Banjar				
	Tahun 2020	2025	2030	2035	2040	2045
Umur 0-14	26,14	25,52	23,75	22,73	21,72	21,12
Umur 15-64	69,27	68,45	68,58	67,86	67,13	66,06
Umur 65+	4,60	6,03	7,67	9,41	11,15	12,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dependency Ratio	44,37	46,10	45,82	47,35	48,96	51,39
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif angkatan kerja di Kabupaten Banjar akan menanggung 44 hingga 45 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif. Angka tersebut merupakan rata-rata penduduk dari seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Angka ketergantungan di Kabupaten Banjar termasuk cukup tinggi karena jumlah penduduk produktif dan non produktif hampir sama.

Secara umum, rasio ketergantungan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2025 dan 2030 diproyeksikan akan menurun sebesar 0,28 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam lima tahun mendatang pertumbuhan penduduk usia produktif masih memiliki laju pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Meskipun demikian, proyeksi yang dilakukan hingga tahun 2045 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah akan diproyeksikan meningkat.

Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan antisipasi apabila kenaikan angka ketergantungan semakin tinggi. Hal itu dikarenakan semakin tinggi angka ketergantungan, maka semakin tinggi pula beban produktivitas yang harus ditanggung oleh masyarakat usia angkatan kerja. Hal itu akan berimplikasi terhadap daya saing dan kesejahteraan sosial daerah secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menyesuaikan kebijakan untuk memastikan kelompok usia produktif mampu mendukung kelompok tidak produktif tanpa

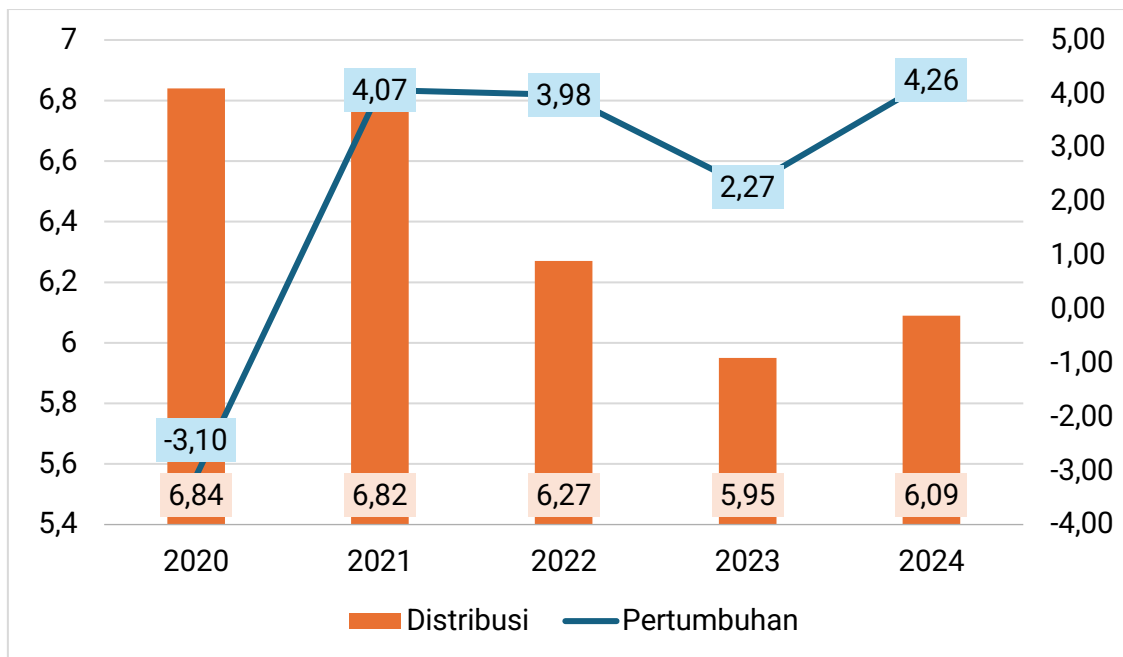
mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan. Oleh karena itu, strategi seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem pensiun, serta penciptaan lapangan kerja menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan demografis dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu didorong oleh perkembangan teknologi yang mumpuni dan iklim inovasi daerah yang mendukung. Perkembangan teknologi dan informasi di daerah dapat digambarkan melalui tingkat pembangunan sektor-sektor daerah yang padat akan penerapan teknologi dalam prosesnya, seperti industri. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga dapat menjadi salah satu tanda ukur bagi penerapan iptek daerah mengingat ekonomi kreatif didukung oleh teknologi digital yang mumpuni. Dalam sub bagian ini dijabarkan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ini, seperti rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB akomodasi makan dan minum, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks inovasi daerah.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator ekonomi makro yang menghitung nilai produksi dari lapangan usaha industri pengolahan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan sektor industri merupakan salah satu prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih lanjut. Sektor industri memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan atas bahan mentah menjadi produk konsumsi final. Rasio PDRB Industri Pengolahan dihitung dengan cara menyandingkan angka PDRB lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB total. Berikut merupakan data mengenai Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:



Gambar 2. 36 Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2025

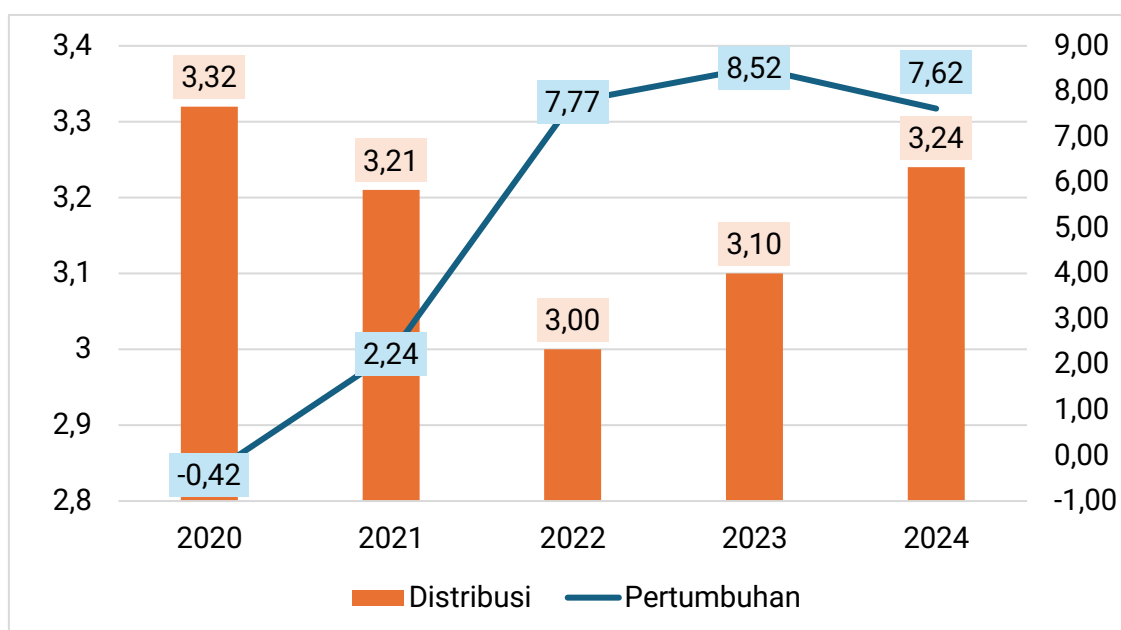
PDRB industri pengolahan di Kabupaten Banjar mengalami fluktuasi dalam distribusi dan pertumbuhan selama periode 2020-2024. Distribusi PDRB sektor ini mengalami tren penurunan, dari 6,84% pada tahun 2020 menjadi 6,09% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap total perekonomian daerah semakin mengecil. Sementara itu, pertumbuhan sektor ini menunjukkan pola yang bervariasi. Pada tahun 2020, industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar -3,10%, tetapi kemudian tumbuh pesat di tahun 2021 dengan angka 4,07%. Pertumbuhan positif berlanjut pada 2022 dan 2023, meskipun mengalami sedikit perlambatan pada 2023 dengan angka 2,27%, sebelum kembali meningkat menjadi 4,26% di tahun 2024.

Meskipun industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif setelah kontraksi pada 2020, tren penurunan dalam distribusi menunjukkan bahwa sektor ini masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan kontribusinya terhadap ekonomi Kabupaten Banjar. Stabilitas pertumbuhan yang terjadi setelah tahun 2021 perlu didukung dengan kebijakan yang memperkuat daya saing industri, seperti peningkatan investasi, penguatan SDM, serta akses pasar yang lebih luas. Jika sektor ini terus berkembang, dapat menjadi pendorong

utama bagi perekonomian daerah dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum merupakan salah satu komponen dalam data PDRB secara keseluruhan. Dalam perhitungannya, rasio PDRB akomodasi makan dan minum dihitung dengan membandingkan nilai produksi dalam lapangan usaha akomodasi makan dan minum dengan jumlah total dari keseluruhan PDRB. Indikator ini dapat menggambarkan produktivitas ekonomi daerah dalam sektor-sektor yang terkait seperti pariwisata. Berikut merupakan data PDRB lapangan usaha makan dan minum Kabupaten Banjar selama tahun 2020-2024.



Gambar 2. 37 Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2025

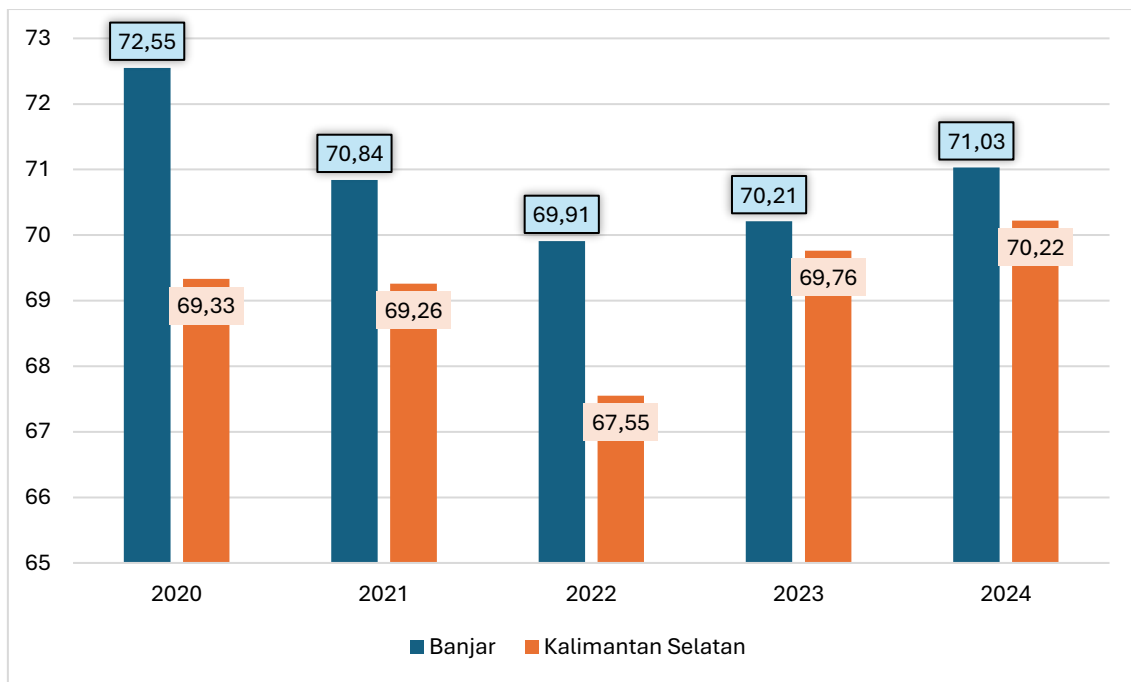
PDRB akomodasi makan dan minum di Kabupaten Banjar menunjukkan dinamika pertumbuhan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, distribusi sektor ini terhadap PDRB tercatat sebesar 3,32%, tetapi mengalami sedikit penurunan menjadi 3,21% pada 2021. Meskipun demikian, kontribusinya kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 3,24% pada 2024. Dari sisi pertumbuhan, sektor ini sempat mengalami kontraksi sebesar -0,42% pada tahun 2020, namun berhasil bangkit dengan pertumbuhan

2,24% pada 2021 dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 8,52%, sebelum sedikit melambat ke 7,62% di tahun 2024.

Tren pertumbuhan yang positif ini mencerminkan pemulihan sektor akomodasi, makanan, dan minuman pasca pandemi serta meningkatnya aktivitas ekonomi yang mendorong permintaan terhadap jasa terkait. Meskipun distribusinya terhadap total PDRB belum mengalami peningkatan yang signifikan, pertumbuhan yang cukup tinggi menunjukkan potensi besar sektor ini sebagai penggerak ekonomi daerah kedepannya. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan kebijakan yang mendukung sektor pariwisata, investasi dalam infrastruktur pendukung, serta penguatan daya saing pelaku usaha di bidang pariwisata agar terus berkembang secara berkelanjutan.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang membandingkan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut capaian TPAK Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan.

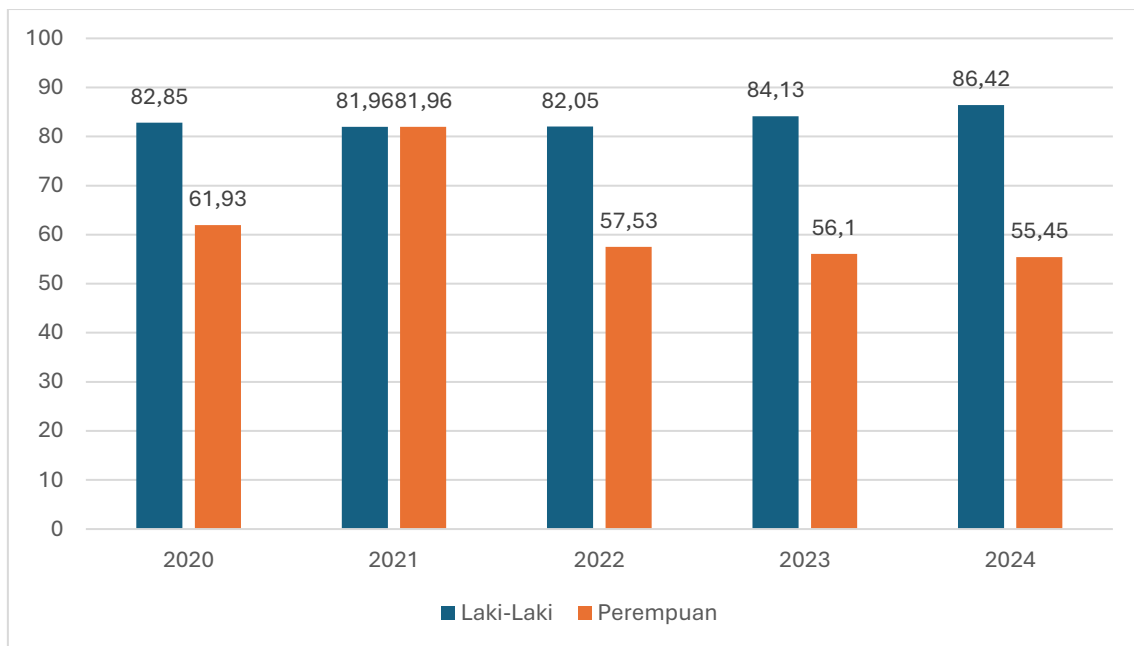


Gambar 2. 38 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Selama periode data, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, TPAK Kabupaten Banjar secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Banjar relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Banjar mencapai 71,03 persen, yang berarti terdapat sekitar 70 orang angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 70,21 persen. Peningkatan TPAK ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja yang tersedia untuk berkontribusi dalam produksi barang dan jasa di Kabupaten Banjar semakin meningkat.

Berdasarkan data pilah gender, TPAK di Kabupaten Banjar masih didominasi oleh laki-laki, yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berikut gambaran TPAK di Kabupaten Banjar menurut jenis kelamin.



Gambar 2. xx Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2024, tingkat partisipasi laki-laki di Kabupaten Banjar mencapai 86,42 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase laki-laki dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik itu bekerja maupun mencari pekerjaan di Kabupaten Banjar lebih tinggi daripada persentase perempuan. Nilai TPAK laki-laki yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar laki-laki di Kabupaten Banjar aktif dalam angkatan kerja, yang berkontribusi pada pasokan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan inovasi dalam suatu daerah. Inovasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ditempuh dengan cara baru atau cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses inovasi menjadi penting bagi produktivitas ekonomi daerah, dimana inovasi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah secara umum ke depannya. Berikut merupakan data mengenai indeks inovasi daerah Kabupaten Banjar selama tahun 2020-2024:

Tabel 2. 18 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	53	48,62	52,53	57,64	57,75
Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara nilai, Kabupaten Banjar berhasil meningkatkan skor inovasi daerah sebesar 4,75 poin atau persentase peningkatan sebesar 8,96 persen. Peningkatan dalam indeks inovasi daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mengindikasikan tumbuhnya iklim inovasi di daerah secara umum, baik inovasi yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hal ini menjadi potensi bagi Kabupaten Banjar ke depan untuk memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada di daerah untuk mendorong produktivitas ekonomi dan peningkatan pelayanan publik secara umum.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

PDRB Non-Tambang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan mengecualikan sektor pertambangan dan penggalian, sehingga mencerminkan kontribusi sektor ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Perhitungan ini bertujuan untuk menilai kinerja ekonomi daerah tanpa pengaruh sektor ekstraktif yang cenderung fluktuatif akibat perubahan harga komoditas global. Dengan demikian, PDRB Non-Tambang memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai daya saing dan ketahanan ekonomi suatu daerah dalam jangka panjang, terutama dalam sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Berikut adalah data distribusi PDRB non tambang di Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 19 Distribusi Persentase PDRB Non Tambang Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,65	16,77	15,07	14,85	15,02
C. Industri Pengolahan	6,84	6,82	6,27	5,95	6,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
F. Konstruksi	10,48	10,34	9,59	9,74	9,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,64	14,32	13,68	14,6	14,78
H. Transportasi dan Pergudangan	4,79	4,57	4,29	4,63	4,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,32	3,21	3,00	3,10	3,24
J. Informasi dan Komunikasi	4,09	4,13	3,80	3,84	3,96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,25	1,97	1,96	1,98
L. Real Estate	3,61	3,59	3,24	3,24	3,28
M,N. Jasa Perusahaan	0,38	0,36	0,34	0,36	0,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	7,04	6,12	6,07	6,13
P. Jasa Pendidikan	5,98	5,79	5,16	5,14	5,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,58	2,65	2,46	2,51	2,52
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,77	1,68	1,57	1,59	1,66
Produk Domestik Regional Bruto	86,49	83,9	76,93	77,95	79,18

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2024

PDRB non tambang di Kabupaten Banjar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 15,87 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor kedua penopang perekonomian Kabupaten Banjar terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 14,40 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor ketiga terdapat di sektor konstruksi. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 10,00 persen pada periode yang sama.

Faktor determinan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan PDRB non tambang di Kabupaten Banjar adalah pembangunan sektor pertanian yang berfokus pada penerapan teknologi modern dan diversifikasi produk. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur

yang terfokus pada peningkatan kualitas jalan dan perhubungan serta ketenagalistrikan. Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah yang terfokus pada formulasi kebijakan dan dukungan secara berkesinambungan. Investasi pada sektor UMKM yang terfokus pada pembangunan UMKM dan pemberian kemudahan terhadap bantuan permodalan.

2.3.4 Transformasi Digital

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya mengubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perekonomian yang optimal membutuhkan keterhubungan yang erat antara pasar domestik dan pasar global. Dalam konteks globalisasi, muncul berbagai peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lokal dan domestik untuk memperluas akses pasar. Bagian ini akan menganalisis hubungan antara perekonomian lokal dan perekonomian global dengan menggunakan data terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan pengeluaran yang mencerminkan nilai investasi yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi dalam bentuk pembelian barang modal dengan masa pakai lebih dari satu tahun. Dengan kata lain, PMTB berfungsi sebagai indikator tingkat pengeluaran suatu daerah dalam rangka reinvestasi untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya nilai PMTB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana masyarakat cenderung mengalokasikan kembali hasil produksi ekonominya

untuk investasi di tahun berikutnya. Hal ini juga mencerminkan kondisi pasar yang kondusif dan keterbukaan ekonomi lokal terhadap peluang pasar yang lebih luas. Berikut adalah data mengenai PMTB Kabupaten Banjar untuk periode 2019-2023.

Tabel 2. 20 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan	-0,47	1,34	3,25	4,44	4,46
Distribusi	32,46	31,10	28,62	29,23	29,79

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2025

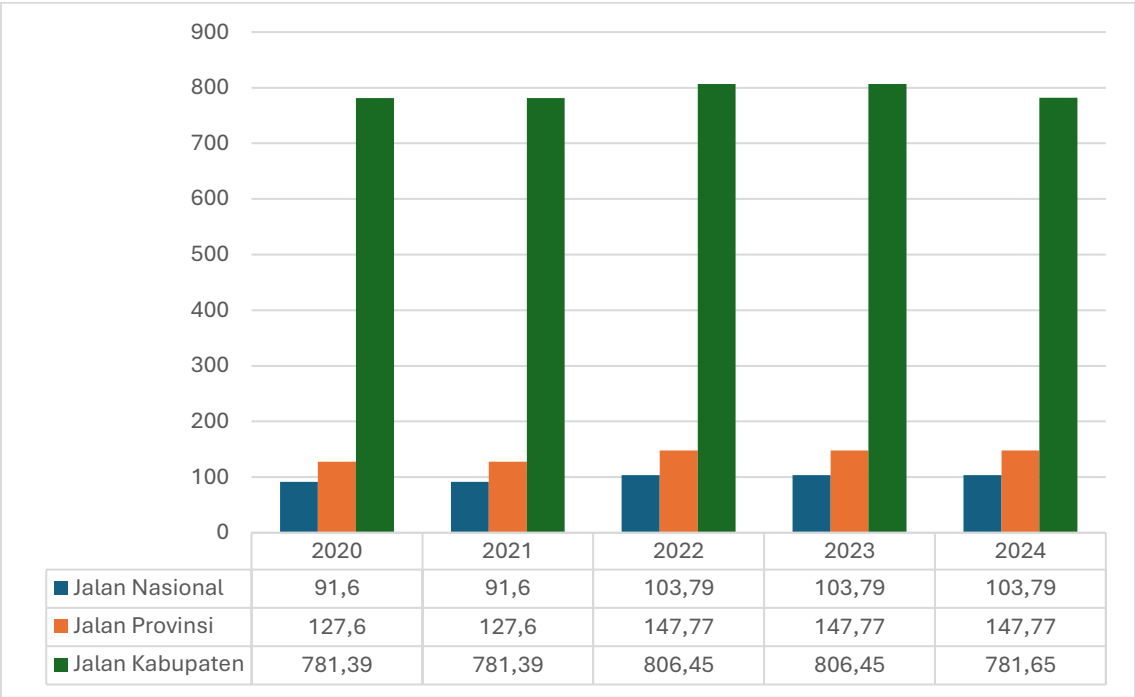
Kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang menurun selama tahun 2020 hingga 2024. Kondisi ini terjadi karena peningkatan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap perekonomian. Walaupun kontribusi PMTB menurun, namun pertumbuhan PMTB di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Kondisi ini berhubungan dengan peningkatan target realisasi investasi pada tahun 2023 di Kabupaten Banjar.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan dan perdesaan menunjukkan daya saing daerah yang dilihat dari kondisi infrastruktur, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan. Penjelasan gambaran daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah eksisting sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Komponen indeks infrastruktur daerah digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan dukungan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lain.

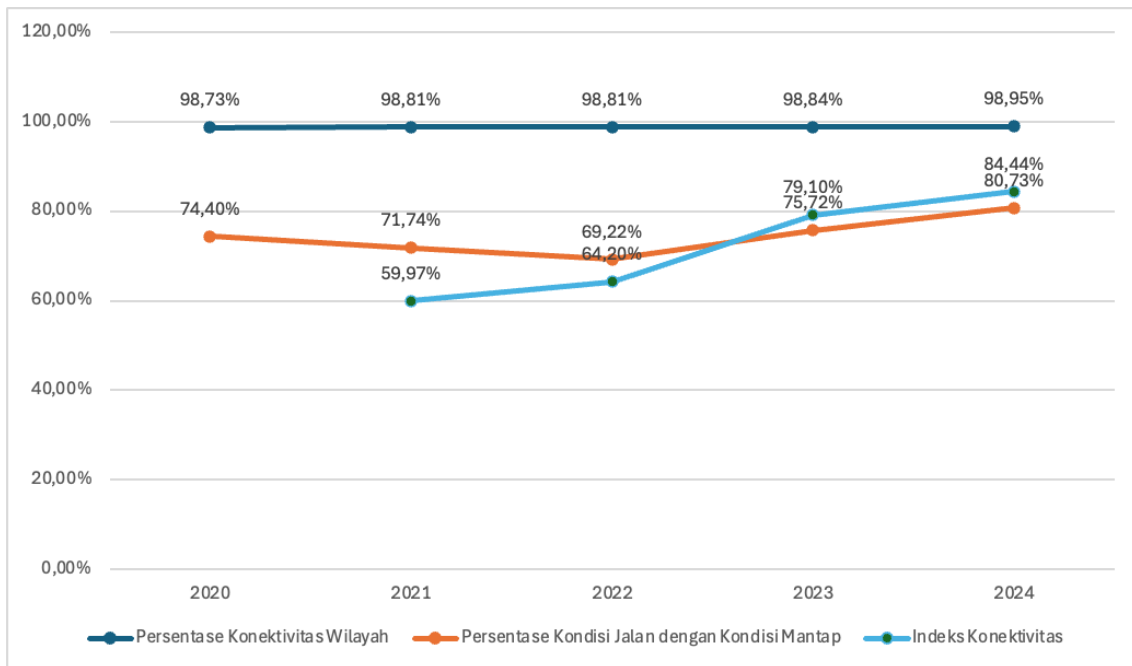
Jaringan transportasi merupakan infrastruktur dasar yang penting untuk menunjang perkembangan wilayah. Jaringan transportasi yang baik akan memudahkan mobilitas dan konektivitas masyarakat serta distribusi barang. Jaringan sistem transportasi di Kabupaten Banjar terdiri dari jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Klasifikasi dan

penetapan fungsi jalan di Kabupaten Banjar didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.



Gambar 2. 39 Panjang Jalan Berdasarkan Wewenang Pengelolaan Kabupaten Banjar
Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka dan Satu Data Kabupaten Banjar , 2020-2024

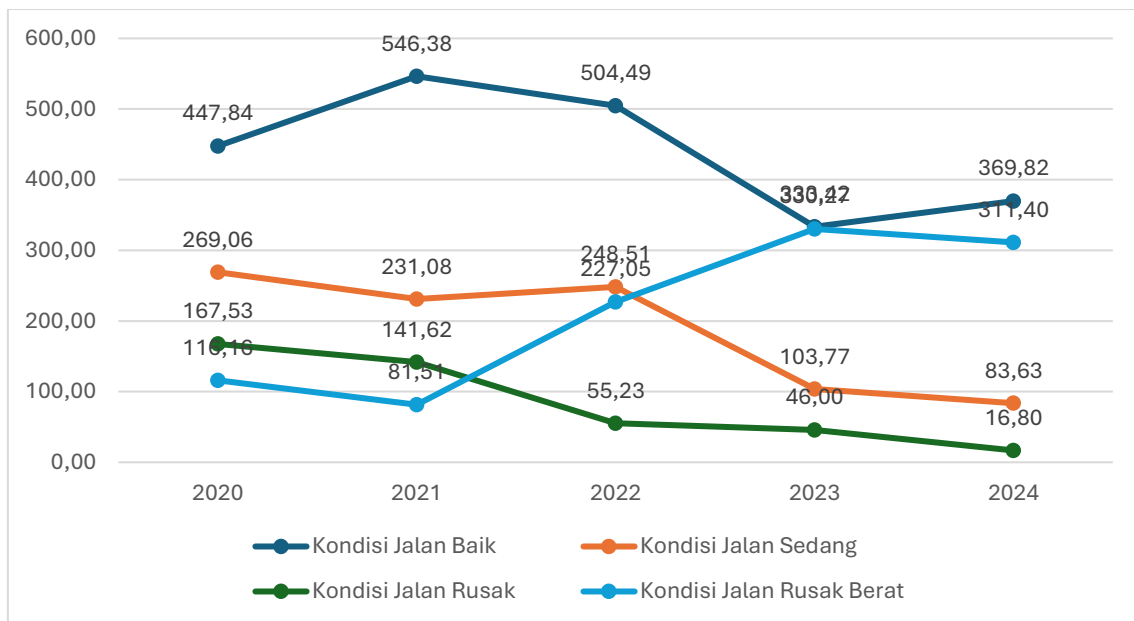
Pembangunan jalan di Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya persentase konektivitas wilayah. Jalan terbangun di Kabupaten Banjar dilengkapi dengan jalan nasional dan jalan provinsi yang melintas. Selain itu jalan kabupaten terus mengalami penambahan panjang jalan yang digunakan, baik untuk menghubungkan antarwilayah di Kabupaten Banjar maupun dengan kabupaten kota lain yang bersebelahan. Kondisi jalan terbangun di Kabupaten Banjar tergambar bervariasi jika dilihat dari kondisi struktur jalannya.



Gambar 2. 40 Persentase Konektivitas, Persentase Kondisi Jalan Mantap, dan Indeks Konektivitas di Kabupaten Banjar

Sumber: Analisis Data, 2025

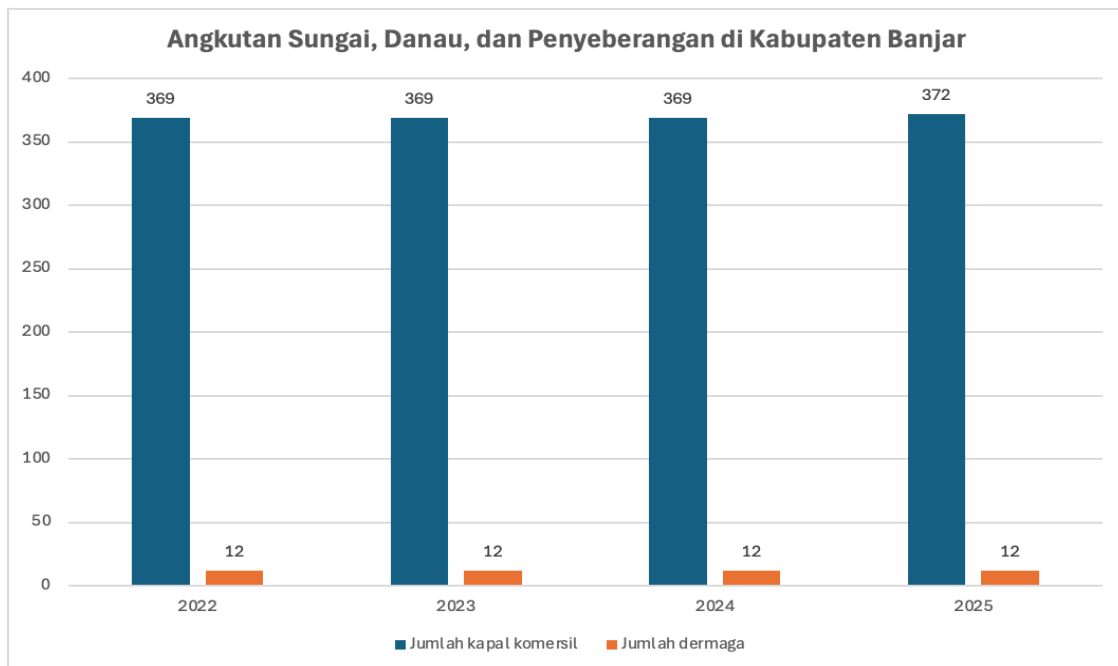
Konektivitas wilayah Kabupaten Banjar dilihat dengan ketersediaan panjang jalan terbangun yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Banjar. Tren persentase konektivitas Kabupaten Banjar terus menunjukkan kenaikan semenjak indikator ini digunakan untuk mengukur keterhubungan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Banjar. Hal tersebut menunjukkan semakin mudahnya mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Konektivitas wilayah juga didukung dengan adanya prasarana pendukung, seperti panjang jalan yang terbangun dalam kondisi mantap dan dilengkapi dengan perlengkapan jalannya. Namun memang panjang jalan dalam kondisi mantap masih belum menyeluruh dengan persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 80,73 persen, meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2023.



Gambar 2. 41 Kondisi Jalan Kabupaten Banjar
 Sumber: Satu Data Kabupaten Banjar, 2020-2024

Jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjar memiliki panjang yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kondisi jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan perawatan jaringan jalan telah berjalan dengan baik. Kondisi jalan rusak juga terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kondisi jalan baik. Namun, masih diperlukan intervensi terhadap kondisi jalan rusak dan rusak berat agar aksesibilitas antarwilayah dapat dirasakan nyaman.

Wilayah Kabupaten Banjar yang dilalui sungai dan memiliki danau juga perlu memperhatikan ketersediaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagai konektivitas melalui jalur perairan. Kondisi eksisting konektivitas angkutan sungai dan danau di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar berikut.

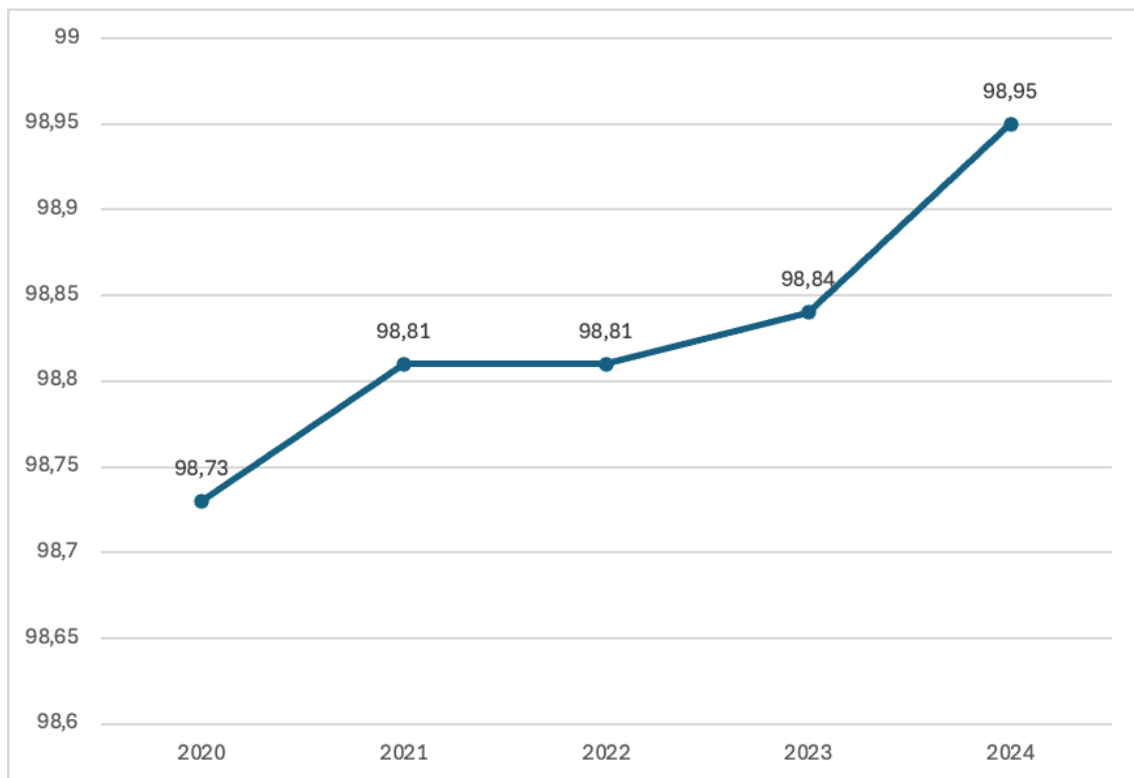


Gambar 2. 42 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kabupaten Banjar

Sumber: Satu Data Kabupaten Banjar, 2025

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari ketersediaan jumlah kapal komersil yang meningkat jumlahnya hingga tahun 2025 (data sementara) yang dilayani oleh dua belas dermaga. Keberadaan konektivitas sungai, danau, dan penyeberangan ini memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan yang berada di wilayah sungai. Pengembangan konektivitas perairan di Kabupaten Banjar masih perlu mendapatkan dukungan penyediaan rambu-rambu untuk menjaga keselamatan lalu lintas angkutan sungai dan danau.

Secara keseluruhan, aspek daya saing wilayah selain dapat digambarkan oleh indeks konektivitas juga didukung oleh indeks konektivitas prasarana yang menunjukkan kekuatan dan intensitas interaksi atau keterhubungan antarwilayah, yang mengukur wilayah-wilayah tersebut terhubung melalui berbagai jaringan infrastruktur seperti jalan, transportasi, hingga teknologi informasi. Semakin tinggi nilai indeks konektivitas, semakin baik dan kuat koneksi atau interaksi antarwilayah tersebut. Indeks konektivitas prasarana di Kabupaten Banjar digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. xx Indeks Konektivitas Prasarana di Kabupaten Banjar

Sumber: Satu Data Kabupaten Banjar, 2025

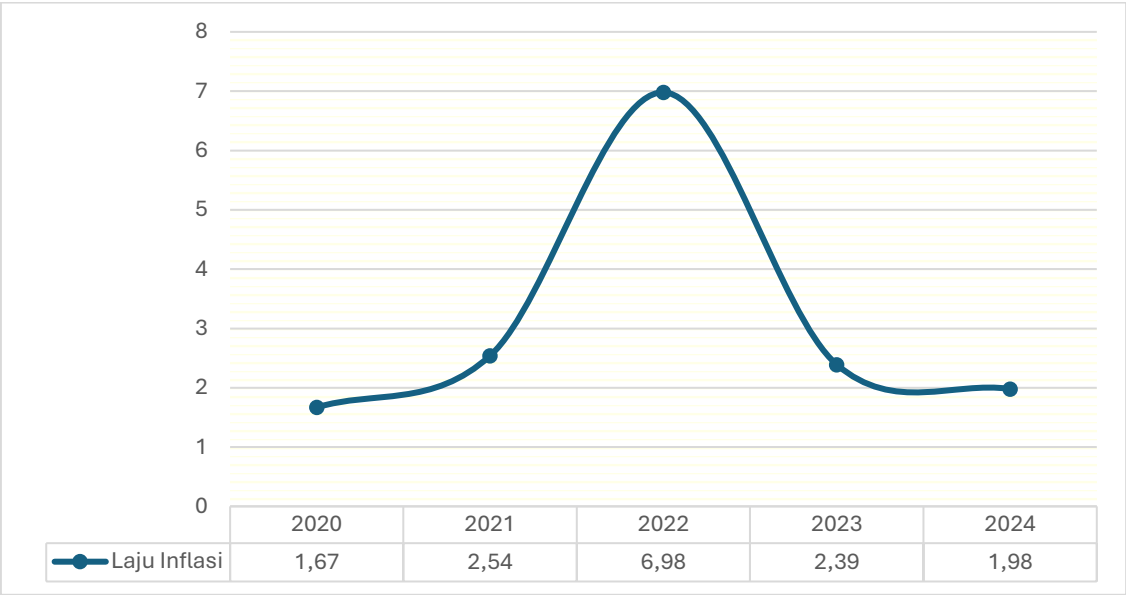
Indeks konektivitas prasarana di Kabupaten Banjar menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat interaksi, hubungan, dan kemudahan akses antarwilayah semakin bertambah, karena adanya jaringan termasuk prasarana yang lebih banyak dan efektif untuk perpindahan barang, jasa, dan manusia. Hal tersebut berdampak pada peningkatan mobilitas, potensi ekonomi, pengembangan pariwisata, dan pertumbuhan sosial di Kabupaten Banjar.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi di mana suatu perekonomian berada dalam keseimbangan yang berkelanjutan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, serta inflasi yang terkendali. Inflasi, sebagai salah satu indikator ekonomi makro, memiliki hubungan erat dengan stabilitas ekonomi karena fluktuasi tingkat inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, investasi, serta kebijakan moneter dan fiskal

pemerintah. Berikut adalah data inflasi Kota Banjarmasin sebagai acuan inflasi Kabupaten Banjar.

Inflasi merupakan salah satu kondisi perekonomian yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan perekonomian suatu wilayah. Inflasi adalah kondisi naiknya harga-harga kebutuhan pokok dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tinggi rendahnya inflasi suatu wilayah dapat memengaruhi kondisi perekonomian suatu wilayah. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi agar selalu terjaga, untuk menjaga rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Kondisi inflasi di Kabupaten Banjar dapat dilihat melalui daerah terdekat dari Kabupaten Banjar, yaitu Kota Banjarmasin. Berikut merupakan kondisi inflasi tahunan Kota Banjarmasin selama periode 2020 hingga 2024:



Gambar 2. 43 Grafik Laju Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Laju inflasi Kota Banjarmasin yang menjadi acuan inflasi Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang semakin meningkat sebesar 0,31 poin dari tahun 2020 hingga 2024. Laju inflasi ini harus dijaga secara berkesinambungan agar tidak berpengaruh negatif terhadap kekuatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar. Inflasi Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh tiga dimensi faktor, yaitu dimensi permintaan (*demand side*), penawaran (*supply side*) dan faktor eksternal (*external factors*). Daya beli masyarakat adalah faktor yang harus diperhatikan

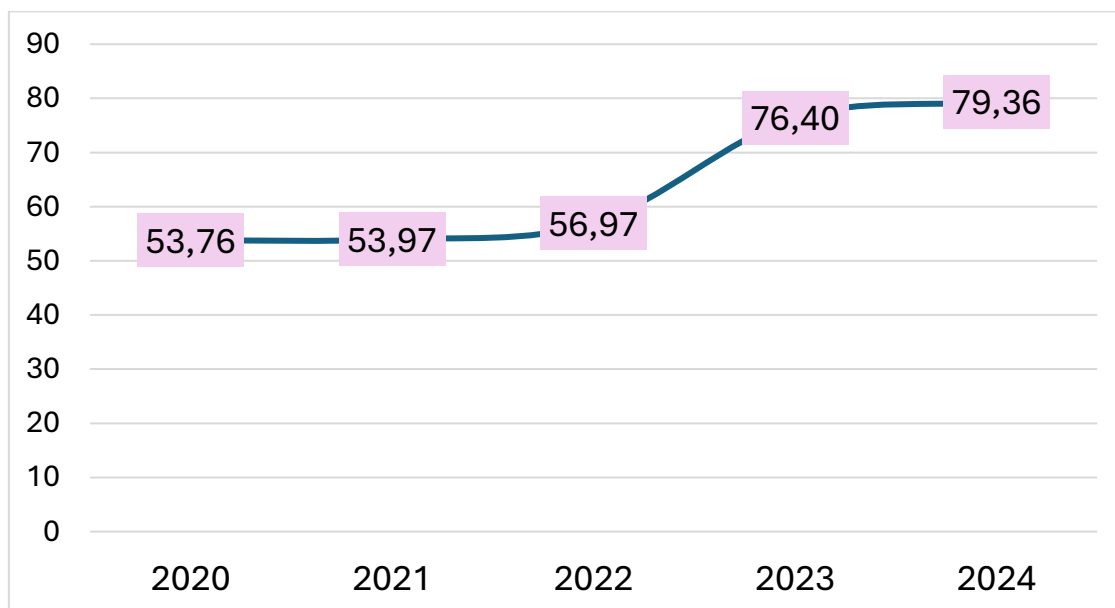
dari sisi permintaan. Harga makanan, infrastruktur dan rantai pasok adalah variabel yang harus diperhatikan untuk mengendalikan dimensi penawaran yang berpengaruh terhadap inflasi. Harga komoditas sawit dan batu bara menjadi variabel dari dimensi eksternal yang harus diperhatikan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pendukung manajemen pelayanan publik yang memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Berhasil tidaknya pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja tata kelola pemerintahan. Kinerja tersebut dinilai dari sejauh mana penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pendukung manajemen pelayanan publik yang memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Berhasil tidaknya pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja tata kelola pemerintahan. Kinerja tersebut dinilai dari sejauh mana penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak. Secara umum kinerja tata Kelola pemerintahan Kabupaten Banjar dapat dinilai dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), sebagai berikut.



Gambar 2. 44 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banjar

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar

Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cenderung naik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kenaikan nilai IRB menandakan bahwa penerapan reformasi birokrasi semakin baik, ditambah lagi dengan kenaikan nilai RB yang signifikan. Faktor yang mempengaruhi kinerja IRB diantaranya meliputi belum optimalnya penajaman dan penguatan program RB dari level pemerintah daerah ke perangkat daerah, belum optimalnya kinerja organisasi, belum optimalnya implementasi SPBE, belum optimalnya manajemen kepegawaian dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN, dan belum optimalnya sistem pelayanan publik. Kondisi ini didukung oleh data sebagai berikut.

Tabel 2. 21 Capaian Kinerja SAKIP Daerah, Indeks SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SAKIP Daerah	68,97 (B)	69,33 (B)	68,03 (B)	68,10 (B)	67,07 (B)
2	Indeks SPBE	2,68	2,43	2,558	2,87	2,87
3	Indeks Pelayanan Publik	3,67	4,21	4,29	3,46	-

Sumber: RPJMD Kab. Banjar ; <https://1data.menpan.go.id/>

Akuntabilitas kinerja yang dinilai dari SAKIP Daerah selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan predikat masih B. Meskipun demikian, nilai SAKIP daerah tahun 2024 masih lebih kecil dari tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas kinerja belum konsisten. Kondisi ini disebabkan oleh perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum optimal, penerapan kinerja lintas sektor belum optimal, dan pengelolaan data kinerja belum memadai.

Reformasi birokrasi dinilai dari penerapan digitalisasi di sektor pemerintahan menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banjar mengalami peningkatan pada 2023 dan bertahan pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sektor pemerintahan di Kabupaten Banjar sudah optimal. Untuk

meningkatkan kinerja SPBE perlu diperhatikan beberapa kondisi, yaitu beberapa wilayahnya masih *blank spot* dan infrastruktur TIK belum memadai.

Dari sisi pelayanan publik menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Banjar belum berjalan optimal. Kondisi ini ditandai dengan adanya penurunan nilai IPP dari kategori sangat baik menjadi kategori baik pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh belum meratanya digitalisasi pelayanan publik dan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek ini menjelaskan terkait Penegakan Perda, Aksi HAM, demokrasi lokal. Hal ini untuk menilai kondusivitas daerah mulai dari tingkat keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Semakin kondusif daerah maka semakin mudah dalam pencapaian pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja aspek ini dapat dinilai dari angka kriminalitas, sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjar

Uraian	2021	2022	2023	2024
Angka kriminalitas	555 kasus	591 kasus	809 kasus	876 kasus

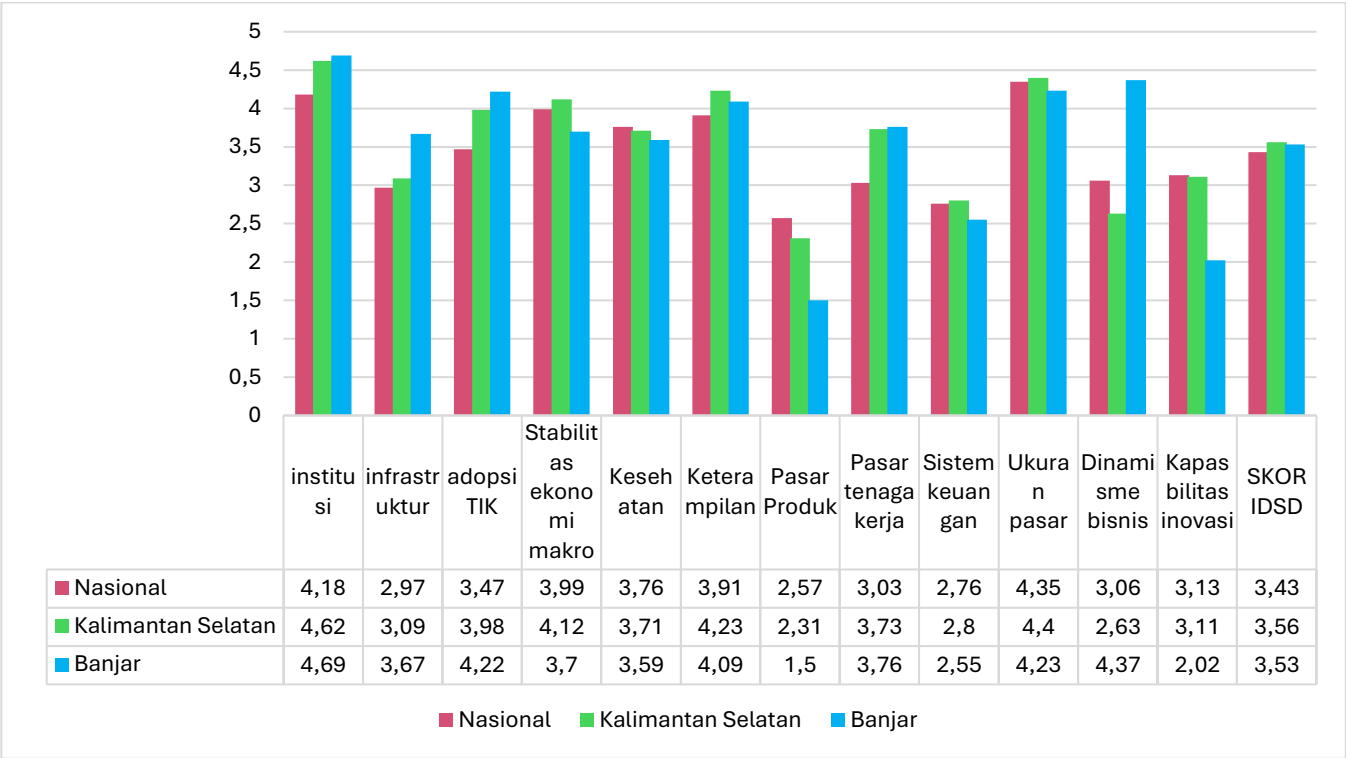
Sumber: Kesbangpol Kab. Banjar 2025

Kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 37 persen, sedangkan peningkatan kasus kriminalitas terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu hanya sebesar 6 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga kondisifitas daerah semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pencegahan dan penanganan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya secara intens dan berkualitas.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan saing dicerminkan melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan Pembangunan daerah. Daya

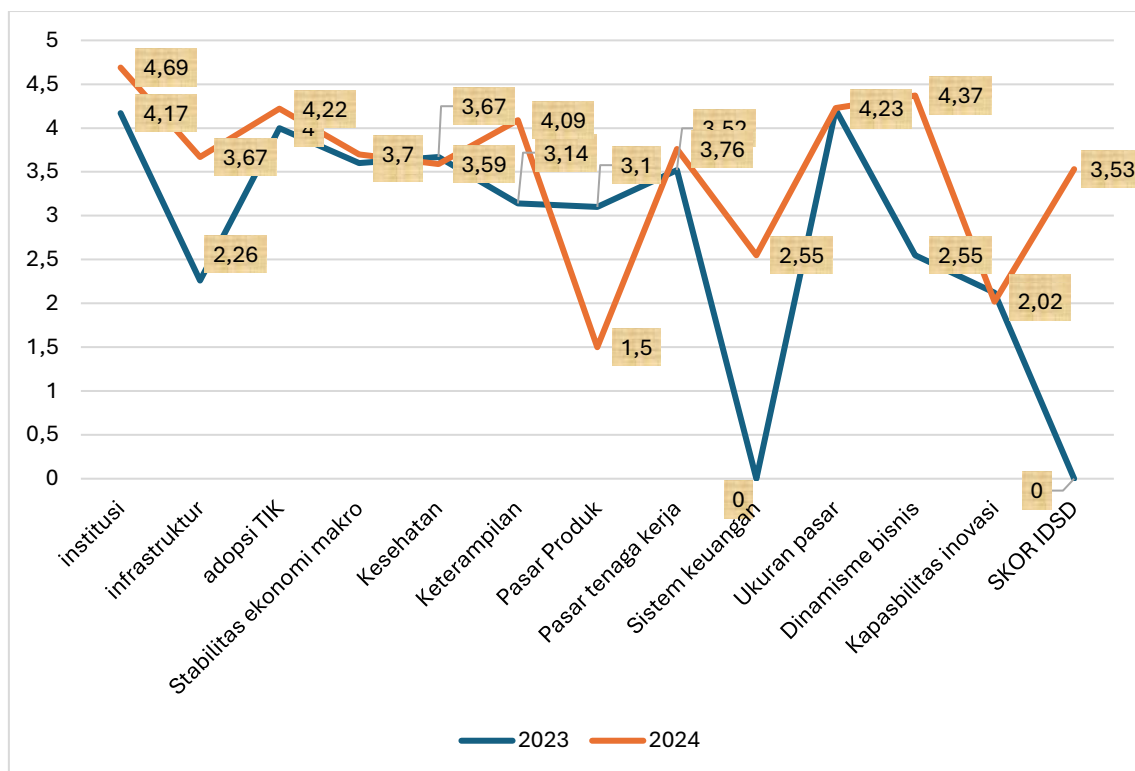
saing dikaitkan dengan masalah produktivitas. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara. Konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Faktor penentu daya saing kemudian diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Dalam konteks daerah atau dalam hal ini Kabupaten Banjar dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 2. 45 Skor Indeks Daya Saing Daerah

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2024

infrastruktur Nilai IDSD Kabupaten Banjar sangat bersaing dengan IDSD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perbedaan skor hanya sebesar 0,03. Perbandingan capaian skor IDSD Kabupaten Banjar pada tahun 2023 dan 2024 secara lebih detail dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 2. 46 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023-2024

Sumber: Diolah dari Indeks Daya Saing Daerah 2023 dan 2024

Daya saing Kabupaten Banjar 2023 dan 2024 yang diukur dengan IDSD tidak dapat dilihat, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 nilai pada pilar institusi dan pilar sistem keuangan tidak ditemukan. Namun, secara umum capaian nilai pada setiap pilar pada tahun 2024 untuk Kabupaten Banjar mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2023, hanya nilai pasar produk yang memiliki nilai lebih rendah.

2.4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Penyusunan RPJMD ini mengintegrasikan SPM sebagai bagian penting dari arah kebijakan pembangunan daerah dengan memastikan bahwa setiap

perangkat daerah yang memiliki urusan wajib pelayanan dasar dapat menyusun strategi pencapaian SPM secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemenuhan SPM tidak hanya menjadi indikator kinerja pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh berbagai daerah beracuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018. Berikut merupakan program pembangunan daerah di Kabupaten Banjar yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024.

Tabel 2. 23 Capaian SPM Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Jenis Pelayanan	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Urusan Pendidikan					
SD (7–12 Tahun)	89,65	85,65	89,06	88,78	83,89
SMP (13–15 Tahun)	68,33	68,00	67,48	60,18	89,36
Pendidikan Dasar	22,71	24,28	92,95	96,89	72,84
Pendidikan Anak Usia Dini	55,52	60,54	96,50	95,43	85,47
Urusan Kesehatan					
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	84,66	100,00	95,59	88,70
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,28	88,35	100,00	92,45	94,09
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	94,01	100,00	98,57	97,59
Pelayanan kesehatan balita	96,41	90,46	88,69	80,36	69,37
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	74,31	71,23	86,75	58,88	95,67
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	48,81	41,96	40,95	61,68	73,07
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	77,86	85,86	91,36	81,10	82,72
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	82,55	73,65	100,00	85,10	91,87
Pelayanan kesehatan diabetes melitus	96,51	90,89	100,00	100,00	100,00
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	100,00	96,58	100,00	100,00	100,00
Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	83,73	35,29	100,00	90,72	100,00
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	85,95	76,48	100,00	100,00	100,00
Urusan Pekerjaan Umum					
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	107,74	85,93	87,40	88,63	76,25
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	19,11	61,30	81,21	83,60	77,47
Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman					
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100,00	100,00	88,31	100,00	100,00

Jenis Pelayanan	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah/Kab/Kota	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat					
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pelayanan informasi rawan bencana	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,00	116,00	70,00	100,00	100,00
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Sosial					
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	6,00	17,00	100,00	100,00	64,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	52,00	92,00	100,00	100,00	72,02
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	7,00	96,00	100,00	100,00	78,96
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti	0,00	114,00	100,00	100,00	55,10
Perlindungan dan jaminan sosial saat & setelah tanggap darurat bagi korban bencana Kab/Kota	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Capaian SPM Kabupaten Banjar Tahun 2024

Secara umum, capaian SPM Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang masih belum optimal. Rata-rata capaian paling rendah selama lima tahun terakhir dialami dalam pencapaian SPM sektor pendidikan dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 74,68 persen, sedangkan pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi pencapaian SPM dengan rata-rata tertinggi dengan angka sebesar 94,24 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya akselerasi kinerja seluruh pihak dalam rangka mengoptimalkan pencapaian SPM Kabupaten Banjar selama lima tahun mendatang melalui pendekatan kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan efektif.

2.4.5 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara umum melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Melalui prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, daerah dapat melakukan kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dari pembangunan daerah yang dilakukan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banjar menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mulai dari elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah lain. Berikut merupakan daftar kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2024:

Tabel 2. 24 Daftar Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
SEMESTER I		
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) tentang Layanan Jasa Perbankan dan Sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar	Mengembangkan Pembangunan Daerah

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banjarmasin tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Jasa tertentu atas Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Banjar	Mengikatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Barang Jasa tertentu atas Tenaga Listrik
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Jasa tertentu atas Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Banjar	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Barang Jasa tertentu atas Tenaga Listrik
4	Kesepakatan Bersama antara Pemkab Banjar dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru tentang Bantuan Hukum Untuk masyarakat miskin di wilayah kabupaten Banjar	Dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat tidak mengalami kendala dalam memperoleh keadilan dalam perkara tertentu.
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Rumah Sakit Pelita Insani tentang Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran Secara Online	Pelayanan Kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat diuntungkan, dengan lebih mudah mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.
6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Rumah sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda tentang Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran Secara Online	Pelayanan Kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat diuntungkan, dengan lebih mudah mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tentang Kerjasama pembangunan Antar Daerah	Termafaatkannya potensi daerah untuk menunjang pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan publik.
8.	Kesepakatan Bersama antara Pemkab Banjar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kantor Cabang Banjarmasin tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kab Banja	Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi lebih optimal
9	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banjarmasin tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Banjar	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Barang Jasa tertentu atas Tenaga Listrik
10	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banrabai tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Banjar	Mengikatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Barang Jasa tertentu atas Tenaga Listrik
11	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Fasilitasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Kab Banjar
12	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Kab Banjar

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
	Administrator Pola Fasilitasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024	
13	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pola Fasilitasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Kab Banjar
14	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu Kota Banjarbaru di rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura Tahun 2024	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan tidak mampu di RSUD Ratu Zaleha
15	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Lembaga Bantuan Hukum Intan tentang Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Wilayah Kabupaten Banjar	Dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat tidak mengalami kendala dalam memperoleh keadilan dalam perkara tertentu.
16	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Lembaga Bantuan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga (LKBHUWK) tentang Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat Miskin Di Wilayah Kabupaten Banjar	Dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat tidak mengalami kendala dalam memperoleh keadilan dalam perkara tertentu.
17	PKS antara Pemkab Banjar dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru tentang Bantuan Hukum Untuk masyarakat miskin di wilayah kabupaten banjar	Dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat tidak mengalami kendala dalam memperoleh keadilan dalam perkara tertentu.

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
18	PKS antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Cabang Martapura tentang Penempatan Dana Deposito Berjangka	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
19	PKS Pemerintah Provinsi Kab Banjar, Baito Kuala Dan Tanah Laut Kolaborasi Pengelolaan Angkutan Umum Massal Trans Perkotaan Banjarbakula di kawasan Metropolitan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab Banjar, Kab Barito Kuala, dan Kab Tanah Laut	Terlayannya Kebutuhan Masyarakat dari segi transportasi
20	PKS antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Rumah Sakit Pelita Insani tentang Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran Secara Online	Pelayanan Kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat diuntungkan, dengan lebih mudah mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak
21	PKS antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Rumah sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda tentang Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran Secara Online	Pelayanan Kependudukan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat diuntungkan, dengan lebih mudah mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak
22	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Banjar Dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banjarmasin Tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Barang Jasa tertentu atas Tenaga Listrik.

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
23	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Banjar Dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Barabai Tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Barang Jasa tertentu atas Tenaga Listrik
24	PKS antara Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat Unlam dan pemerintah Kabupaten Banjar tentang penyelenggaraan asesmen psikologi mutasi masuk PNS ke lingkungan Pemerintah kab banjar	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Sipil Negara Kab Banjar.
25	PKS antara Pemkab Banjar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kantor Cabang Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Rentan Yang di Daftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024	Meningkatnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi pekerja Rentan
26	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Cabang Martapura tentang Layanan Jasa Perbankan dan Sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar	Meningkatnya Pendapatan PAD
27	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Tertanganinya permasalahan hukum di Kabupaten Banjar

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
28	Nota Kesepakatan Antara direktorat Air Tanah Dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pemerintah Kota Banjarmasin Dan pemerintah Kota Banjarbaru Dan Pemerintah Kabupaten Banjar Dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Di Wilayah Metropolitan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Dan Kabupaten Tanah Laut (Spam Regional Banjarbakula)	Tersedianya air minum
29	Nota Kesepakatan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Karang Intan dan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran	Meningkatnya kapasitas petugas dan warga binaan dalam mencegah, menanggulangi kebakaran
30	Nota Kesepakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Karang Intan dan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran	Meningkatnya kapasitas petugas dan warga binaan dalam mencegah, menanggulangi kebakaran

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
31	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tentang Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah , Serta Pemanfaatan Data Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah	pemanfaatan Data Pertanahan dan Data Perpajakan Daerah untuk percepatan Pelayanan perpajakan daerah bersamaan dengan penerbitan sertifikat tanah
32	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Anak Kelas IIA Karang Intan tentang Pelayanan Pengecekan Biometrik KTP El, Serta Pembuatan Dan Penerbitan Kartu Identitas Anak dan/ atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banjar
33	NK antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota tentang Sinergi Pengoperasian dan perawatan Jaringan Perlatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	
34	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum Pengembangan budaya Hukum serta	Pemohon Itsbat Nikah memperoleh kemudahan dalam layanan mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran.

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
	Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pelayanan Keimigrasian dan pelayan masyarakat di Kabupaten Banjar	
SEMESTER II		
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Papa Cookies Bakery Cabang Banjarbaru Tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (Kia) di Wilayah Kabupaten Banjar	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Aquatica Waterpark & Playground Tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (Kia) di Wilayah Kabupaten Banjar	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
3	Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Banjar dan universitas Lambung Mangkurat tentang Kerja Sama Pendidikan, penelitian, Pengkajian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Banjar	Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengkajian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Banjar dapat lebih cepat di atasi
4	Kesepakatan bersama antara Universitas Borneo lestari dengan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat	Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengkajian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Banjar dapat lebih cepat di atasi.
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Alan Baby & Kids Banjarbaru tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Banjar	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Gramedia Q Mall Banjarbaru tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Banjar	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Bukit Bintang Park	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
	& Resort tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Banjar	
8	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Papa Cookies Bakery Cabang Banjarbaru Tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak melalui Kia Lapis Manis "Kartu Identitas Anak belanja bermain dapat diskon, Multi Manfaat jadi Satu" di Wilayah Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
9	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Aquatica Waterpark & Playground Pemanfaatan Kartu Identitas Anak melalui Kia Lapis Manis "Kartu Identitas Anak belanja bermain dapat diskon, Multi Manfaat jadi Satu" di Wilayah Kabupaten Banjar	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
10	PKS Fakultas Farmasi Universitas Borneo lestari dengan Pemkab Banjar tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di RSUD Raza	kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengkajian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Banjar dapat lebih cepat di atasi
11	PKS Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi Universitas Borneo lestari dengan Pemkab Banjar tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di RSUD Raza	kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengkajian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Banjar dapat lebih cepat di atasi
12	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Alan Baby & Kids Banjarbaru tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Banjar	Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA
13	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Gramedia Q Mall Banjarbaru tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Banjar	Dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat tidak mengalami kendala dalam memperoleh keadilan dalam perkara tertentu.
14	Perjanjian Kerja Sama Bersama antara	Meningkatnya cakupan kepemilikan

No	Bentuk/Jenis Kerjasama Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Manfaat Bagi Pihak-Pihak yang Bekerjasama
1	2	3
	Pemerintah Kabupaten Banjar dan Bukit Bintang Park & Resort tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Banjar	KIA
15	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Pemerintah Kota Banjarmasin ,Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Kabupaten Tapin, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan , Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Kabupaten Hulu	Meningkatnya Kepariwisataaan di Kabupaten Banjar
16	PKS antara Pemerintah Kab Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalsel tentang Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar	Meningkatnya integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik
17	PKS antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan Melalui Riset dan pengembangan Inovasi Daerah	Kajian, kebijakan, pendidikan dan pelatihan inovasi administrasi negara serta pendidikan tinggi dapat lebih ditingkatkan.
18	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional	Optimalnya Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banjar.

Sumber: Buku Laporan Kerjasama Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Semester I dan II

Pemerintah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2024 telah menjalin kerjasama sebanyak 52 kerjasama dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kerjasama secara umum berhasil membawa manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kerjasama. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dialami, diantaranya adalah:

1. Belum seluruh perangkat daerah memahami dengan detail mengenai tata cara kerjasama daerah sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
2. Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah belum mengetahui prosedur kerja sama daerah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan.

Dari permasalahan yang terpetakan tersebut, dirumuskan beberapa solusi yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan perencanaan daerah kedepannya. Beberapa solusi tersebut diantaranya adalah:

1. Dilakukannya sosialisasi atas Permendagri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
2. Dilakukannya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Dilakukannya sosialisasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama Daerah; dan
4. Dilakukan Pemetaan Kerja Sama Daerah.

2.4.6 Pembangunan Infrastruktur Pendanaan APBN dan APBD

Dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi telah dimasukkan usulan dari Kabupaten Banjar terkait pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar meliputi:

Tabel 2. 25 Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Banjar

No	Pembangunan Infrastruktur	Lokasi
1.	Pembangunan Bendungan Riam Kiwa dan Jaringan Irigasi	Desa Angkipih dan Paramasan Bawah

No	Pembangunan Infrastruktur	Lokasi
2.	Penataan Koridor Ahmad Yani Kertak Hanyar-Gambut	Kertak Hanyar-Gambut
3.	Penataan Kawasan Sekumpul	Sekumpul, Kecamatan Martapura
4.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Sekumpul, Kecamatan Martapura
5.	Revitalisasi TPA Cahaya Kencana	Desa Padang, Kecamatan Karang Intan
6.	Pengembangan RSUD Ratu Zalecha	Martapura
7.	Pengembangan Air Santri di Kelurahan Murung Keraton dan Murung Kenanga	Desa Murung Keraton dan Desa Murung Kenanga
8.	Pembangunan jalan penghubung Sungai Pinang-Paramasan (Koridor Kandangan-Batulicin)	Sungai Pinang-Paramasan

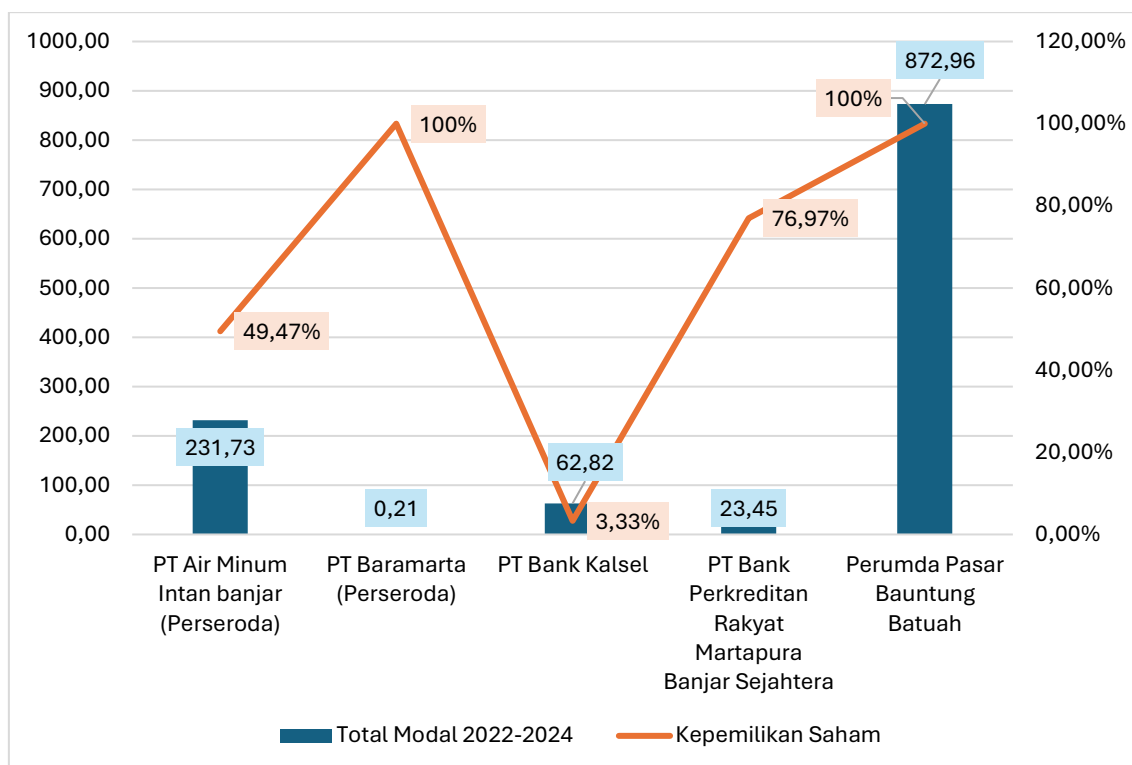
Pembangunan infrastruktur yang didanai APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan penyediaan infrastruktur dan penataan kawasan perkotaan di Kabupaten Banjar dalam lima tahun ke depan.

2.4.7 Kinerja BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Melalui berbagai unit usahanya, BUMD berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, keberadaan BUMD juga memperkuat sektor ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja serta meningkatkan kualitas layanan di bidang-bidang vital seperti air bersih, transportasi, dan perdagangan. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan BUMD menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2024 jumlah BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Banjar adalah sebanyak 5 badan usaha diantaranya yaitu PT Air Minum Intan Banjar, PT

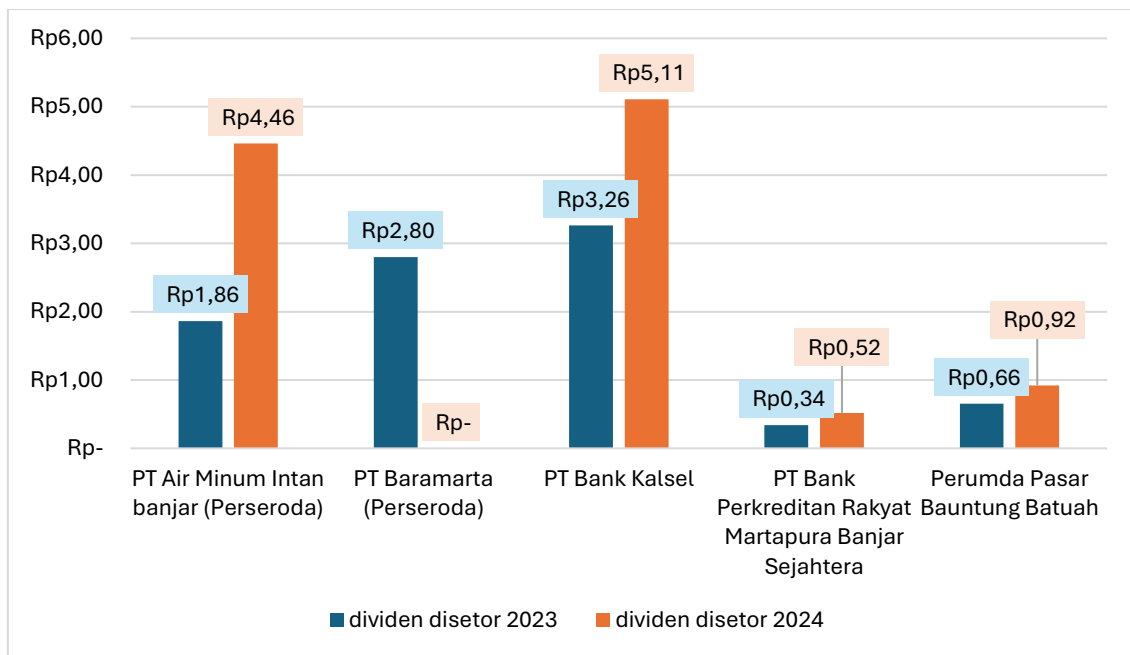
Baramarta, PT Bank Kalsel, PT Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera, dan Perumda Pasar Bauntung Batuah. Dari kelima BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Banjar dapat dilihat total penyertaan modal yang dimiliki oleh setiap badan usaha dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 serta kepemilikan saham atas badan usaha sebagai berikut



Gambar 2. 47 Total modal dan kepemilikan saham atas BUMD Kabupaten Banjar tahun 2022-2024 (Triliun rupiah)

Sumber: Diolah dari Hasil evaluasi kinerja BPKP Prov Kalimantan Selatan

Perumda Pasar Bauntung Batuah merupakan BUMD dengan modal terbesar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Total modal yang dimiliki mencapai Rp872,96 Triliun dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Urutan kedua terdapat PT Air Minum Intan Banjar dengan total kepemilikan modal mencapai Rp231,73 Triliun dengan kepemilikan saham mencapai 49,47%. Sedangkan BUMD dengan modal terkecil diduduki oleh PT Baramarta dengan modal sebesar Rp210 juta rupiah, dengan kepemilikan saham mencapai 100%. Analisis lebih lanjut mengenai deviden yang disetor atas BUMD Kabupaten Banjar dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. 48 Dividen atas kepemilikan BUMD yang disetorkan kepada Kabupaten Banjar tahun 2023 dan 2024 (Miliar rupiah)

Sumber: Diolah dari Hasil evaluasi kinerja BPKP Prov Kalimantan Selatan

Dividen BUMD adalah bagian dari keuntungan yang diperoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai pemilik atau pemegang saham. Dividen ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Besarnya dividen yang disetorkan BUMD kepada pemerintah daerah biasanya ditentukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah laporan keuangan tahunan diaudit, serta mempertimbangkan kebutuhan reinvestasi dan pengembangan usaha BUMD itu sendiri.

PT Bank Kalsel memiliki kontribusi terbesar dalam pembagian deviden kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjar baik pada tahun 2023 ataupun tahun 2024. Total deviden yang disetorkan oleh PT Bank Kalsel pada tahun 2024 mencapai Rp5,11 miliar rupiah dimana total deviden ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp3,26 miliar pada tahun 2023. Kontribusi terbesar kedua dalam pembagian deviden diperoleh dari PT Air Minum Intan Banjar dengan deviden yang dibagikan pada tahun 2024 mencapai Rp4,46 miliar dan Rp1,86 pada tahun 2023.

2.4.8 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dapat diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa IKK Hasil/Outcome, IKK Keluaran/Output, IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan total sebanyak 628 indikator telah dipenuhi untuk kedua tahun tersebut.

Tabel 2. 26 Capaian Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
Misi 1: Peningkatan Kualitas Hidup dan Kualitas Sumber Daya Manusia					
1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,01		104,77%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,49		100,35%
1		Indeks Kesehatan	73,86	106.772.457.664	100,14%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	72,00%	104.650.521.780	138,46%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	72,00%	2.121.935.884	90,00%
2		Indeks Pendidikan	62,66	145.816.047.284	103,08%
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah (APS) SD	91,90%	145.766.677.484	92,05%
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP	72,63%		81,67%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	91,45%		91,45%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	78,76%		89,05%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	83,78%		84,52%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	55,57%		71,60%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	91,26		141,88%
		Rasio Guru - Siswa PAUD	18,1	49.369.800	100,00%
		Rasio Guru - Siswa jenjang SD	12,89		100,16%
		Rasio Guru - Siswa jenjang SMP	11,62		111,62%
3		Indeks Daya Beli	78,85	950.326.132	100,72%
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	6,25%	862.366.332	33,33%
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,00%	87.959.800	100,00%
4		Indeks Ketahanan Pangan	81,63	653.009.300	101,67%
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Harga Pangan	13,65%	653.009.300	#VALUE!
		Ketersediaan Pangan Utama	31,93%	256.371.300	135,70%
		Skor PPH Konsumsi	78,60%	232.689.000	104,00%
5		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,53	2.017.921.287	90,27%
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,25		90,83%
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks PUG	0,5025	1.864.722.887	100%
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	20,00%	15.939.000	100,00%
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga berkualitas	10,00%	137.259.400	100%
Misi 2: Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan					
2		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,35%		155,36%
		Pendapatan Per Kapita	22.954.520		108,39%
6		Indeks Konektivitas	79,1	170.739.831.159	108,80%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	76,55%	164.856.430.953	105,09%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Administrasi (sarana)	59,8%	1.091.592.345	85,29%
		Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	71,00%	618.558.676	101,43%
		V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	0,39	4.173.249.185	100,00%
		LPE sub sektor pertanian	0,78%	1.567.814.318	34,67%
		LPE sub sektor perikanan	3,43%	378.070.400	91,71%
		Nilai Tukar Petani (NTP)	113,16	3.413.457.784	108,43%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.008	378.070.400	90,05%
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	63,21	75.077.400	103,59%
		Persentase Pertumbuhan Ekspor Produksi Perikanan	2,77%	125536700	34,63%
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Luas lahan Pertanian yang Didukung Sarana Pertanian yang Berkualitas	12,30%	1.567.814.318	1.139%
		Persentase Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan	-2,27		71%
		Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	-2,77%		-3,08%
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk asal hewan yang layak dikonsumsi	76%	1.212.677.734	100%
		Persentase Jenis Produk Olahan yang dikembangkan	20%		100%
		Persentase Menurunnya Angka Mortalitas Ternak Besar	0,30%		107%
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri	7,23%	2.000.165.950	1,74%
8		Jumlah kunjungan wisatawan	3.255.500	2.679.013.269	76,60%
	Program Peningkatan Daya	Prosentase destinasi wisata yang representatif	48%	1.978.865.969	100,00%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
	Tarik Destinasi Pariwisata				
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	10,80%	700.147.300	108,00%
3		Persentase Penduduk miskin	2,44%		110,44%
		Indeks Gini	0,297		104,81%
9		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,73	1.202.392.200	111,52%
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 22.677	1.052.821.400	109,16%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	39%	149.570.800	162,50%
10		Persentase Koperasi Berkualitas	39,72%	441.938.836	100,20%
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	13,71%		127,93%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	36,81%	119.907.076	368,10%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	63,60%	322.031.760	759,86%
11		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	29,77%	3.998.149.571	175,12%
	Program Pemberdayaan Sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	90,67%	972.415.800	90,67%
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	18,63%	512.465.600	138,00%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
		mendapatkan Rehabilitasi Sosial			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	48,38%	2.513.268.171	87,96%
12		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,728	158.177.026.732	107,17%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	2,89%	237.106.000	100,00%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang tertib	43,32%	155.603.129.765	100,00%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	81,23%	2.336.790.967	100,00%
13		Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	97,3%	5.027.027.800	170,70%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	54,65%	5.027.027.800	90,60%
14		Indeks Infrastruktur	78,55	221.151.186.991	105,10%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	49,34%	12.302.689.626	106,80%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak	86,94%	21.996.033.206	106,53%
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman	17,98%		100,00%
	Program Pengelolaan dan	Persentase Akses Sanitasi Aman	9,55%	21.996.033.206	121,04%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
	Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Akses Sanitasi Layak	84,95%		106,61%
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	75,14%	164.856.430.953	102,27%
Misi 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan					
4		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,62		115,05%
15		Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,52%	486.293.100	100,00%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,17%	486.293.100	100,00%
16		Persentase Kawasan Kumuh	9,12%	26.040.676.502	104,20%
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Yang Dibangun sesuai dengan dokumen teknis atau siteplan	100%	497.740.200	100,00%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	16,26%	3.875.128.115	106,76%
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24,20%	21.667.808.187	100,00%
17		Indeks Resiko Bencana	133,44	2.694.044.936	111,39%
	Program Penanggulangan Bencana	Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,38	2.694.044.936	100,00%
		Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana	0,54		80,60%
		Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana	0,8		150,94%
18		Persentase penurunan pelanggaran lingkungan hidup	22,85%	834.090.250	100,00%
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Air	1,273	760.266.250	175,98%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	100,00%	73.824.000	100,00%
Misi 4: Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif					
5		Indeks Reformasi Birokrasi	76,4		117,54%
		Indeks Inovasi Daerah	57,64		115,16%
19		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	30,00%	1.951.593.797	750,00%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88,10%	1.951.593.797	92,74%
20		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,56	79.877.407.111	100,66%
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,96%	65.892.000	100,71%
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	93,80%	128.933.900	107,82%
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00%	74.926.400	117,65%
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Regulasi Kemudahan Berinvestasi	20,00%	65.987.900	100,00%
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Terhadap Jumlah Penduduk	15,95%	318.290.768	167,54%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	91,19%		110,67%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100,00%	915.152.104	100,00%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	76,55%		153,10%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi produk hukum yang dibahas	100,00%	1.012.808.203	100,00%
		Persentase fasilitasi pelaksanaan reses	100,00%		100,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat DPRD	81,52	67.815.874.752	110,16%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	119,00%	8.698.189.211	143,37%
		Persentase Bangunan Gedung RS yang sesuai dengan Standar	90,00%		112,50%
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kebakaran yang terlayani	100,00%	403.905.573	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	11.250.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	18.170.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	58.996.000	100,00%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	10.600.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	5.237.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	14.242.300	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	3.000.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	65.657.500	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	50.500.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	7.973.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	100,00%	17.820.000	100,00%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
		Kecamatan Yang Terlaksana			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	1.650.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	16.339.500	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	25.300.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	9.100.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	12.476.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	8.100.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	5.560.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	100,00%	26.700.000	100,00%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100,00%	8.775.000	100,00%
21		Nilai SAKIP	68,1	45.856.542.772	91,42%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	43.187.250.235	135,14%
		Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat Daerah	90,4		122,16%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tepat Waktu	100,00%	1.806.199.290	100,00%
		Persentase Perencanaan Daerah yang Selaras	100,00%		100,00%
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78	863.093.247	100,00%
		Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Perekonomian dan SDA	78		100,00%
		Indeks Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	76		100,00%
		Nilai Opini BPK	WTP	231.194.260.362	100,00%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tertib dan Baik	90,00%	230.660.678.362	101,26%
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Penyerapan Belanja Daerah Yang Baik	99,00%		100,88%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
		Persentase Perangkat Daerah Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100,00%		117,40%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik dan Tertib	95,00%	533.582.000	109,16%
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,06	1.390.227.330	127,27%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	82,49	619.109.055	111,47%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4,33	771.118.275	101,88%
		Indeks SPBE	2,87	8.885.596.797	124,78%
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menerima informasi publik	71%	5.299.223.897	100,00%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	43,75%	3.509.919.000	100,00%
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	180	76.453.900	100,00%
22		Indeks Profesionalitas ASN	63,98	5.061.938.831	104,03%
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	51,15	2.224.467.440	121,50%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesional ASN Pada Dimensi Kompetensi	12,84	2.837.471.391	66,19%
Misi 5: Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis					
6		Rasio Kriminalitas	14,07		17,27%
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,53		100,29%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 3		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- 3 (%)
			2 (2023)		2 (2023)
			K	Rp	K
23		Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat yang tertangani	0	36.533.222.260	100%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan	0,11%	4.515.730.660	200%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik	0,41%	32.017.491.600	300%
24		Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	60,00%	1.300.996.550	107,99%
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda kabupaten sebagai budaya tak benda nasional	44,44%	1.300.996.550	79,99%
25		Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	76	9.012.275.350	70,37%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berdaya saing	39%	9.012.275.350	104,00%
26		Rasio pelanggaran perda dan trantibum	1	1.255.480.550	147,92%
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Penanganan Terhadap Tramtibum, Perda/Perkada dan LinMas	100,00%	1.255.480.550	100,00%

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Sub-bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Kabupaten Banjar dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lima tahun ke depan.

2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Gambaran ringkas keuangan daerah melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Banjar sehingga gambaran pengelolaan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan dan belanja daerah yang akan tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banjar untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banjar digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, perlu dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan tentang jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam periode Tahun 2020-2024. Analisis inilah yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Banjar dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 27 Realisasi APBD Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.755.293.338.641,52	1.698.433.324.874,52	2.138.112.511.477,77	2.361.153.311.871,04	2.990.463.010.676,01
4,1	Pendapatan Asli Daerah	206.230.417.569,52	217.359.726.433,52	201.509.353.000,77	277.941.575.026,04	315.774.855.372,01
4,2	Pendapatan Transfer	1.475.863.986.072,00	1.425.288.919.441,00	1.935.319.158.477,00	2.080.767.736.845,00	2.647.209.070.419,00
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	73.198.935.000,00	55.784.679.000,00	1.284.000.000,00	2.444.000.000,00	27.479.084.885,00
5	BELANJA	1.802.710.482.043,87	1.732.416.551.955,30	1.853.382.074.039,57	2.261.876.594.612,98	2.744.136.603.892,26
5,1	Belanja Operasi	1.239.086.972.456,98	1.213.427.712.346,94	1.310.051.052.369,00	1.504.021.084.905,02	1.832.482.411.263,75
5,2	Belanja Modal	173.429.470.080,50	181.251.166.020,36	197.477.491.062,57	376.369.085.069,96	504.865.053.327,51
5,3	Belanja Tidak Terduga	60.862.213.546,39	4.813.007.998,00	5.724.660.447,00	5.889.091.877,00	1.534.226.050,00
5,4	Belanja Transfer	329.331.825.960,00	332.924.665.590,00	340.128.870.161,00	375.597.332.761,00	405.254.913.251,00
	Surplus/Defisit	-47.417.143.402,35	-33.983.227.080,78	284.730.437.438,20	99.276.717.258,06	246.326.406.783,75
6	PEMBIAYAAN	179.340.524.327,76	131.372.430.925,41	78.689.203.844,63	329.843.617.282,83	403.146.358.540,89
6,1	Penerimaan Pembiayaan	179.340.524.327,76	131.872.430.925,41	97.389.203.844,63	365.893.617.282,83	429.146.358.540,89
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	500.000.000,00	18.700.000.000,00	36.050.000.000,00	26.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	179.340.524.327,76	131.372.430.925,41	78.689.203.844,63	329.843.617.282,83	403.146.358.540,89
	SILPA Daerah Tahun Berkenaan	131.923.380.925,41	97.389.203.844,63	363.419.641.282,83	429.120.334.540,89	649.472.765.324,64

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024

Tabel 2. 28 Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

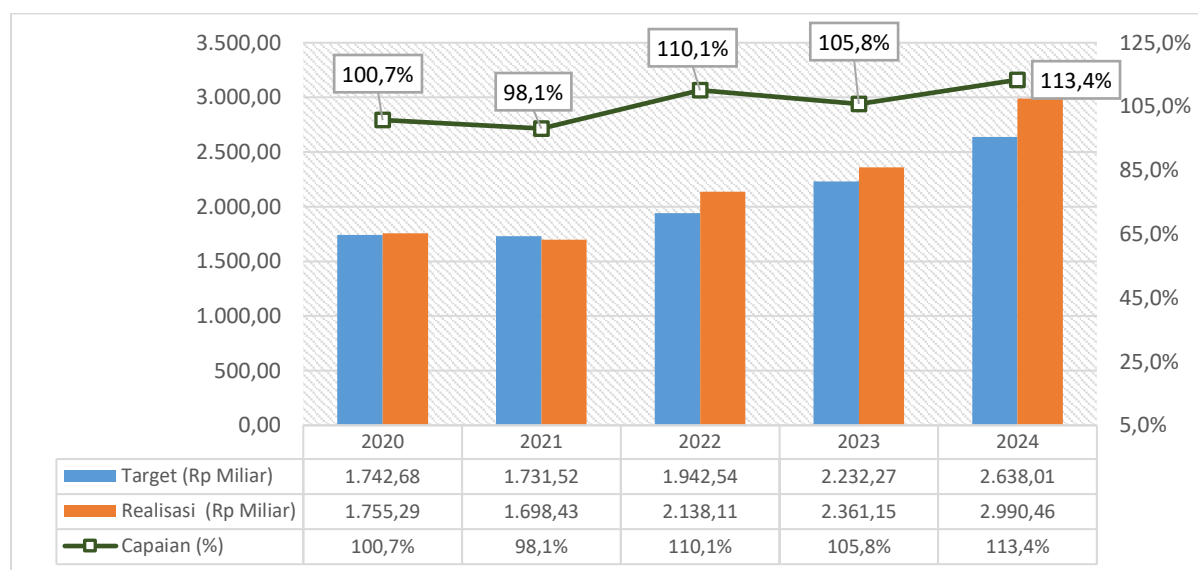
No.	Uraian	PERTUMBUHAN REALISASI APBD LIMA TAHUN TERAKHIR (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	(7,70)	(3,24)	25,89	10,43	26,65	10,41
A.	Pendapatan Asli Daerah	(7,54)	5,40	(7,29)	37,93	13,61	8,42
B.	Pendapatan Transfer	(9,52)	(3,43)	35,78	7,52	27,22	11,51
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	54,28	(23,79)	(97,70)	90,34	1.024,35	209,50
2	BELANJA	(5,74)	(3,90)	6,98	22,04	21,32	8,14
A.	Belanja Operasi	(0,30)	(2,07)	7,96	14,81	21,84	8,45
B.	Belanja Modal	(48,95)	4,51	8,95	90,59	34,14	17,85
C.	Belanja Tidak Terduga	0,00	(92,09)	18,94	2,87	(73,95)	(28,85)
D.	Belanja Transfer	(0,20)	1,09	2,16	10,43	7,90	4,28
	Surplus/Defisit	(338,59)	28,33	937,86	(65,13)	148,12	142,12
3	PEMBIAYAAN						
A.	Penerimaan Pembiayaan	(5,69)	(26,47)	(26,15)	275,70	17,29	46,94
B.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	3.640,00	92,78	(27,88)	740,98
	PEMBIAYAAN NETTO	(5,69)	(26,75)	(40,10)	319,17	22,22	53,77
	SILPA Daerah Tahun Berkenaan	(26,44)	(26,18)	273,16	18,08	51,35	57,99

Sumber: Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan belanja. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10,41 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 8,14 persen. Di sisi lain rata-rata pertumbuhan pembiayaan Kabupaten Banjar selama lima tahun ke belakang adalah sebesar 53,77 persen.

2.5.1.1 Capaian Kinerja Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan target, realisasi dan capaian pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. 49 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjar pada periode tahun 2020-2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022-2024 realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan yang signifikan. Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp2,990 Triliun rupiah atau meningkat 26,65 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan daerah ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp37,83 Miliar dari Rp277,94 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp315,77 miliar pada tahun 2024. Di samping itu pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar Rp463,981 miliar. Dimana hal ini telah berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pendapatan daerah pada tahun 2024.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari PAD sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi daerah tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020–2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

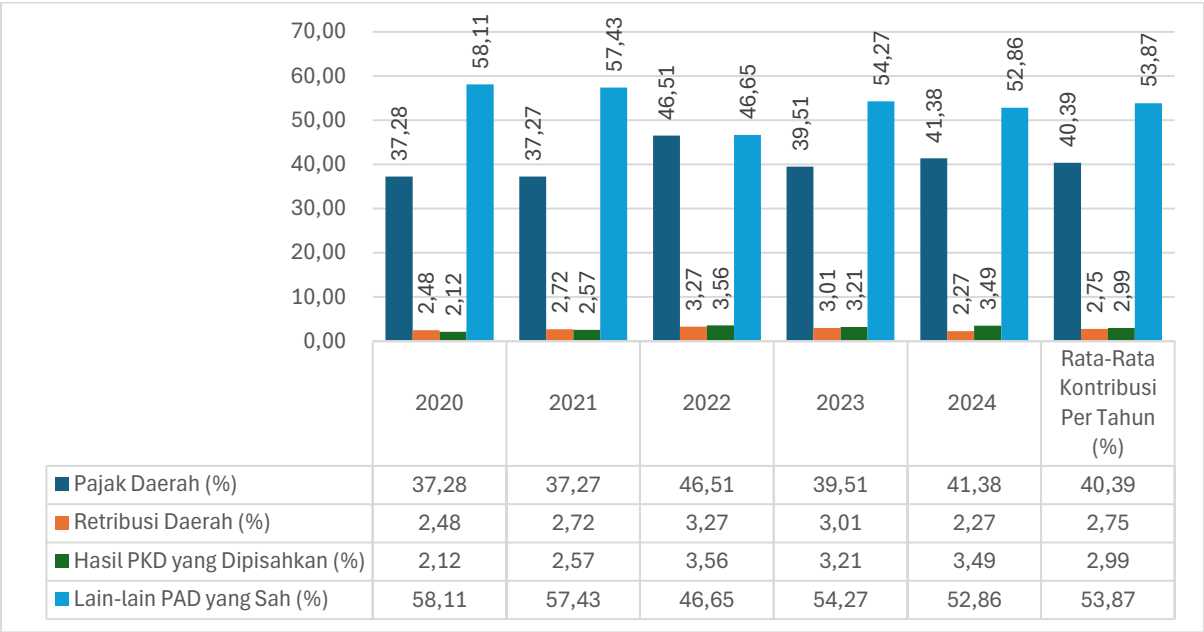
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	180,62	206,23	(3,71)	(7,54)	114,18
2021	212,96	217,36	17,91	5,40	102,07
2022	221,01	201,51	3,78	(7,29)	91,18
2023	250,30	277,94	13,25	37,93	111,04
2024	269,20	315,77	7,55	13,61	117,30
Rata-rata	210,49	225,22	7,76	8,42	107,15

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Pada lima tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar memiliki capaian kinerja rata-rata sebesar 107,15 persen, dimana hanya pada tahun 2022 capaian kinerjanya hanya 91,18 persen. Meskipun demikian, hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada PAD Kabupaten Banjar telah berjalan

baik. Realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2024 diakibatkan oleh adanya peningkatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 20 persen (atau meningkat sebesar Rp28,16 Miliar). Realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 dengan penurunan realisasi sebesar minus 7,29 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pada retribusi daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Terkait dengan realisasi capaian PAD, berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besarnya kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 50 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan data kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar tahun 2020–2024, terlihat bahwa struktur PAD masih didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah, dengan rata-rata kontribusi mencapai 53,87 persen per tahun. Dominasi komponen ini menunjukkan bahwa ketergantungan PAD Kabupaten Banjar masih cukup besar pada penerimaan yang sifatnya fluktuatif dan

kurang stabil dibandingkan komponen utama seperti pajak daerah. Meski demikian, kontribusi komponen ini cenderung mengalami penurunan pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya kontribusi pajak daerah.

Komponen Pajak Daerah menunjukkan tren yang cukup positif dengan rata-rata kontribusi sebesar 40,39 persen per tahun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 46,51 persen, yang dapat diindikasikan sebagai hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta membaiknya aktivitas ekonomi pasca-pandemi. Meskipun pada tahun berikutnya kontribusi pajak mengalami sedikit penurunan, namun secara keseluruhan peran pajak daerah semakin penting sebagai penopang utama PAD yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, kontribusi Retribusi Daerah relatif rendah, dengan rata-rata hanya 2,75 persen per tahun. Hal ini mencerminkan bahwa potensi penerimaan dari layanan publik daerah belum tergarap secara optimal, baik dari sisi cakupan layanan maupun efektivitas penarikan retribusi. Kondisi serupa juga terjadi pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang rata-rata kontribusinya sebesar 2,99 persen. Meskipun kontribusi komponen ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun porsinya masih kecil terhadap keseluruhan PAD, sehingga memerlukan strategi penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Banjar masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Ketergantungan yang cukup besar pada "Lain-lain PAD yang Sah" perlu secara bertahap dikurangi melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta peningkatan kinerja BUMD. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah di masa mendatang perlu difokuskan pada upaya memperluas basis penerimaan yang lebih stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara rinci perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 30 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	56,76	76,88	(14,10)	(4,88)	135,46
2021	70,80	81,01	24,74	5,36	114,42
2022	82,66	93,73	16,75	15,71	113,39
2023	96,20	109,82	16,37	17,17	114,17
2024	112,81	130,67	17,27	18,98	115,83
Rata-rata			12,21	10,47	118,65

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2020-2024, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banjar mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 10,47 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 118,65 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 24,74 persen yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan terbesar yang disumbang oleh pajak restoran yang meningkat sebesar 56,35 persen dari Rp5,34 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp8,36 persen pada tahun 2021.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Pajak Daerah menunjukkan target Pajak Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 12,21 persen dari realisasi Pajak Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 10,47 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang optimis.

Pajak Daerah memberikan kontribusi rata-rata yang cukup besar terhadap PAD yaitu sebesar 40,39 persen. Pajak Daerah ini mencakup penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perkembangan realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Rincian	Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan	Proporsi
1. Pajak Hotel	2,15	3,85	4,56	4,95	4,86	10,46	4,13
2. Pajak Restoran	5,34	8,36	10,53	11,25	13,18	14,23	9,76
3. Pajak Hiburan	0,13	0,07	0,36	0,66	0,29	58,81	0,29
4. Pajak Reklame	2,14	2,14	2,18	2,25	2,09	-0,37	2,28
5. Pajak Penerangan Jalan	24,76	25,44	30,56	33,80	37,44	8,93	31,13
6. Pajak Parkir	0,65	0,73	0,79	1,06	0,88	5,47	0,84
7. Pajak Air Tanah	0,18	0,23	0,26	0,27	0,27	25,09	0,25
8. Pajak Sarang Burung Walet	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	3,26	0,02
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,58	1,97	2,48	6,01	5,98	30,37	3,43
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6,45	7,63	7,83	8,99	11,33	11,31	8,60
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33,48	30,56	34,18	40,59	54,33	13,06	39,26
Jumlah	76,88	81,01	93,73	109,82	130,67	10,47	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Jika ditinjau dari struktur penerimaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi kontributor terbesar dengan proporsi rata-rata 39,26 persen. Kinerja BPHTB juga menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup baik, terutama pada tahun 2024 yang mencapai Rp54,33 miliar. Besarnya kontribusi BPHTB mengindikasikan tingginya dinamika sektor properti dan transaksi tanah di Kabupaten Banjar. Namun, dominasi yang terlalu besar juga mengandung risiko karena penerimaan cenderung fluktuatif, bergantung pada geliat pasar properti.

Komponen penting lainnya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang menyumbang rata-rata 31,13 persen dari total pajak daerah. Penerimaan PPJ relatif stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang terjaga dengan kontribusi yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan PPJ sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling andal dan berkelanjutan bagi daerah. Di sisi lain, Pajak Restoran juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata 14,23 persen per tahun. Kontribusinya terhadap PAD semakin meningkat, mencerminkan adanya perbaikan

iklim usaha dan pertumbuhan sektor jasa kuliner seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

Beberapa jenis pajak lain seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga memperlihatkan kinerja yang cukup menjanjikan. Pajak MBLB tumbuh pesat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 30,37 persen, meskipun proporsinya terhadap total pajak daerah masih relatif kecil (3,43 persen). Demikian pula, PBB-P2 menyumbang rata-rata 8,60 persen dengan tren peningkatan yang stabil, sehingga potensinya perlu terus dioptimalkan melalui pendataan objek pajak yang lebih komprehensif.

Sementara itu, pajak daerah dengan kontribusi rendah seperti Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan. Rendahnya kontribusi dari jenis pajak tersebut menunjukkan keterbatasan basis objek pajak maupun efektivitas pemungutannya. Namun, beberapa di antaranya memiliki prospek, misalnya Pajak Hiburan yang sempat tumbuh signifikan pada tahun 2022–2023, seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan hiburan pasca-pandemi.

Secara keseluruhan, kinerja pajak daerah Kabupaten Banjar pada periode 2020–2024 memperlihatkan arah yang positif. Namun, struktur penerimaan yang masih bertumpu pada BPHTB dan PPJ perlu diimbangi dengan penguatan jenis pajak lain yang berpotensi, seperti PBB-P2, Pajak Restoran, dan MBLB. Dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang tepat, Kabupaten Banjar berpeluang meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat di masa mendatang.

Selain pajak daerah, sumber PAD Kabupaten Banjar yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banjar adalah retribusi daerah. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 32 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	4,76	5,12	(35,52)	(20,25)	107,68
2021	6,92	5,92	45,48	15,58	85,55
2022	6,55	6,60	(5,39)	11,44	100,77
2023	8,26	8,37	26,18	26,79	101,26
2024	6,62	7,17	(19,93)	(14,26)	108,43
Rata-rata			2,16	3,86	100,74

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banjar mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 3,86 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 100,74 persen. Realisasi retribusi daerah Kabupaten Banjar tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp8,37 miliar, sejalan dengan persentase pertumbuhan realisasi di tahun yang sama yaitu sebesar 26,79 persen. Peningkatan retribusi daerah pada tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan pendapatan retribusi pada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi retribusi daerah menunjukkan target retribusi daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah, yakni 2,16 persen dari realisasi retribusi daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 3,86 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang relatif pesimis.

Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,87 persen per tahun terhadap PAD. Retribusi ini mencakup penerimaan dari pelayanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dikelompokkan ke dalam jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang mencakup: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

2. Retribusi Jasa Usaha, yang mencakup: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Besarnya kontribusi retribusi mencerminkan pentingnya layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah dan upaya untuk membiayai sebagian besar layanan tersebut melalui retribusi. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 33 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Rincian	Realisasi Retribusi Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan	Proporsi
Retribusi Jasa Umum	1,55	1,78	2,18	2,45	0,26	(9,53)	25,26
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,74	0,61	0,92	1,51	0,26	2,89	12,07
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,30	0,77	0,76	0,63	0,00	1,43	7,56
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,04	0,06	0,09	0,09	0,00	(2,57)	0,86
4. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,47	0,34	0,41	0,22	0,00	(29,56)	4,77
Retribusi Jasa Usaha	1,07	0,89	1,14	1,29	1,51	0,53	17,94
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,43	0,51	0,48	0,59	0,60	(0,11)	7,92
2. Retribusi Terminal	0,03	0,04	0,04	0,03	0,00	(30,46)	0,44
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,06	0,04	0,11	0,12	0,18	28,07	1,51
4. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,18	0,08	0,20	0,24	0,38	19,00	3,22
5. Retribusi Rumah Potong Hewan	0,20	0,12	0,12	0,14	0,17	6,19	2,38
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	33,64	0,05

Rincian	Realisasi Retribusi Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan	Proporsi
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	25,00	0,20
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,15	0,08	0,17	0,16	0,16	20,38	2,21
Retribusi Perizinan Tertentu	2,50	3,25	3,28	4,62	5,40	14,46	56,80
1. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00	(27,08)	0,24
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2,42	3,21	3,26	3,93	4,51	12,99	52,11
3. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,05	0,03	0,00	0,68	0,90	(34,62)	4,45
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00		(20,00)	-
Jumlah	5,12	5,92	6,60	8,37	7,17	3,86	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan data realisasi retribusi daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2020–2024, terlihat bahwa kinerja retribusi mengalami dinamika yang cukup beragam, baik antarjenis maupun antarperiode. Secara total, realisasi retribusi meningkat dari Rp5,12 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7,17 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan rata-rata tahunan tercatat sebesar 3,86 persen, angka yang relatif moderat dibandingkan dengan potensi retribusi yang dimiliki daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi masih belum maksimal dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sisi struktur penerimaan, Retribusi Perizinan Tertentu menjadi penyumbang terbesar dengan rata-rata proporsi 56,80 persen. Komponen dominan dalam kategori ini adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang menyumbang rata-rata 52,11 persen. Tingginya kontribusi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas pembangunan fisik di Kabupaten Banjar, meskipun sifat penerimaan ini cenderung bergantung pada dinamika sektor properti. Selain itu, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mulai memberikan kontribusi signifikan pada tahun 2023–2024, meski masih terbatas.

Retribusi Jasa Umum menyumbang rata-rata 25,26 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan (12,07 persen) dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (7,56 persen). Namun, tren keduanya menunjukkan ketidakstabilan: pelayanan kesehatan menurun drastis pada tahun 2024, sedangkan retribusi pengujian kendaraan bermotor bahkan tidak terealisasi pada tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi pelayanan publik berbasis retribusi.

Sementara itu, Retribusi Jasa Usaha memberikan kontribusi rata-rata 17,94 persen. Beberapa komponennya menunjukkan perkembangan menarik, seperti Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tumbuh rata-rata 28,07 persen, serta Retribusi Tempat Penginapan/Vila yang meningkat cukup signifikan seiring berkembangnya sektor pariwisata. Namun, sejumlah retribusi lain, seperti Retribusi Terminal dan Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi, justru cenderung menurun, bahkan tidak terealisasi pada tahun-tahun terakhir.

Secara keseluruhan, kinerja retribusi daerah Kabupaten Banjar masih menghadapi tantangan besar. Ketergantungan yang tinggi pada PBG menunjukkan kerentanan terhadap fluktuasi sektor konstruksi. Sementara itu, potensi dari retribusi jasa usaha, khususnya sektor pariwisata, parkir, dan pemanfaatan aset daerah, perlu terus digali agar dapat menjadi sumber penerimaan yang lebih stabil. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan sebaiknya berfokus pada penguatan sistem pengelolaan retribusi yang transparan, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta eksplorasi potensi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya, untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banjar yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Banjar bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah, dimana pada tahun 2023 Lain-Lain PAD yang sah menyumbang 58,4 persen dari total PAD, diikuti dengan penerimaan pajak daerah. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55,25 persen per tahun terhadap PAD. Kontribusi tersebut disokong oleh beberapa pendapatan terbesar diantaranya bersumber dari Pendapatan Berdasarkan Putusan

Pengadilan (Inkracht) dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp111,126 miliar, diikuti dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang terealisasi sebesar Rp17,618 miliar pada tahun 2023. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi Lain-lain PAD yang sah selama kurun waktu 2020-2024 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	108,33	119,85	0,52	(10,12)	110,64
2021	112,50	124,83	3,85	4,16	110,97
2022	120,32	94,01	6,95	(24,69)	78,13
2023	134,76	150,83	12,00	60,44	111,93
2024	138,76	217,47	2,97	44,18	156,73
Rata-rata			5,26	14,79	113,68

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Banjar memperlihatkan perkembangan yang cukup fluktuatif selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 14,79 persen. Sementara itu, realisasi capaian kinerja sebesar 113,68 persen dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 156,73 persen, sedangkan untuk capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat capaian sebesar 78,13 persen dari target proyeksi yang telah ditetapkan.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang disebabkan oleh adanya perubahan yang signifikan pada pendapatan dana kapapitasi i Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semula Rp17,618 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp54,967 miliar pada tahun 2024. Selain itu, peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga dipengaruhi oleh hampir keseluruhan pos pendapatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah memiliki rata-rata pertumbuhan

yang positif, yakni 5,26 persen dan realisasi pertumbuhan rata-rata sebesar 14,79 persen. Ditinjau dari perbedaan pertumbuhan rata-rata antara target dan realisasi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pemungutan pendapatan dengan proyeksi yang optimis.

Tabel 2. 35 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	10,77	4,37	69,78	78,80	40,59
2021	22,74	5,60	111,09	27,97	24,61
2022	11,48	7,17	(49,52)	28,08	62,43
2023	11,08	8,92	(3,46)	24,39	80,45
2024	11,01	11,01	(0,67)	23,47	100,00
Rata-rata			25,44	36,54	61,62

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Banjar mengalami perkembangan dengan tren positif selama kurun waktu 2020-2024 dengan kata lain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selalu mengalami peningkatan. Rata-rata realisasi pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 36,54 persen per tahun. Persentase realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 78,80 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk kabupaten Banjar tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan besaran penerimaan sebesar Rp11,01 miliar bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 25,44 persen dari realisasi yang rata-rata tumbuh sebesar 36,54 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki target yang pesimis.

2. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan Daerah selain PAD adalah Pendapatan Transfer. Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 106 Ketentuan UU 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa. Berikut ini adalah target penerimaan yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.496,67	1.475,86	(12,54)	(9,52)	98,61
2021	1.461,36	1.425,29	(2,36)	(3,43)	97,53
2022	1.721,53	1.935,32	17,80	35,78	112,42
2023	1.978,93	2.080,77	14,95	7,52	105,15
2024	2.334,10	2.544,75	17,95	22,30	109,02
Rata-rata			7,16	10,53	104,55

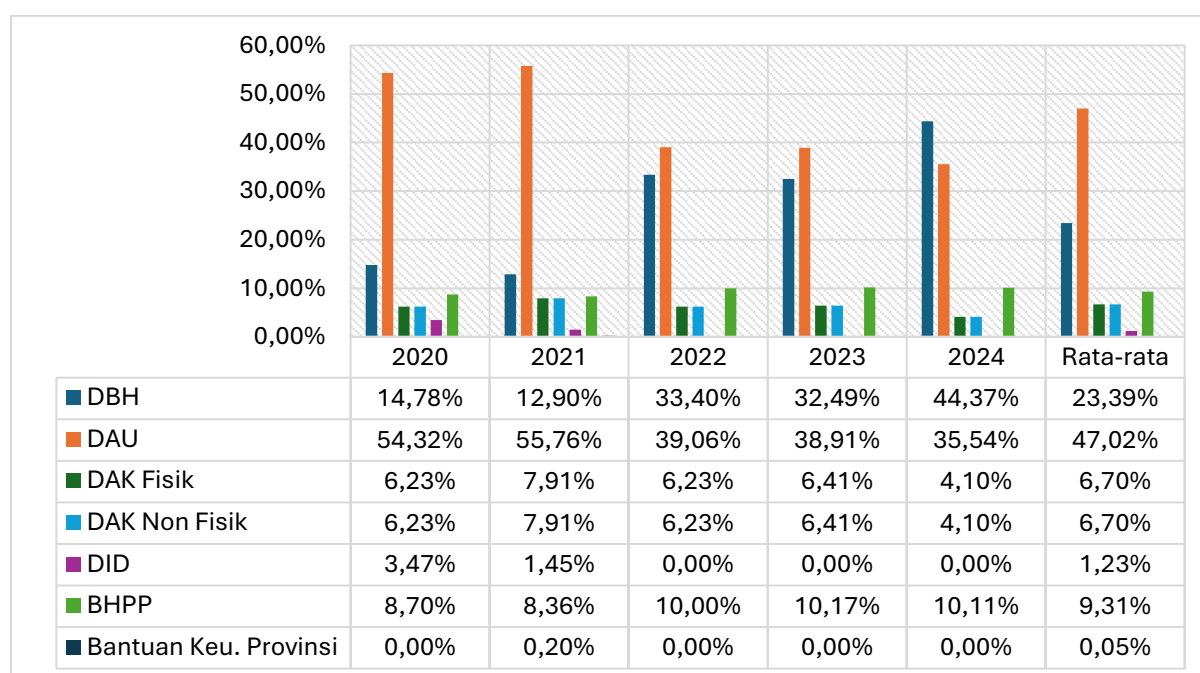
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Banjar cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 7,16 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 35,78 persen, terutama didukung oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan bagi hasil mengalami perubahan penerimaan dari Rp101,030 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp171,130 milyar pada tahun 2022. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -9,52 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu secara

keseluruhan penyumbang pendapatan transfer mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020.

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja pendapatan transfer Kabupaten Banjar mencapai 104,55 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 112,42 persen, sedangkan realisasi capaian kinerja terendah untuk pendapatan transfer Kabupaten Banjar terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat capaian sebesar 95,32 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan.

Adapun rincian pendapatan transfer yang terdiri dari (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah (DID) dan (b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 51 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas diperoleh gambaran Pendapatan Transfer di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen

DAU dengan rata-rata 47,02 persen per tahun. Dengan dominasi DAU, perencanaan keuangan Kabupaten Banjar harus mempertimbangkan prediksi dan ketepatan penerimaan DAU. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil yang mencakup dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	215,59	186,28	(29,52)	(27,49)	86,40
2021	139,58	155,99	(35,26)	(16,26)	111,75
2022	374,89	574,87	168,58	268,53	153,34
2023	553,92	601,89	47,76	4,70	108,66
2024	793,62	1.012,95	43,27	68,30	127,64
Rata-rata			38,97	59,55	117,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Banjar cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 59,55 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 268,53 persen dengan capaian kinerja mencapai 153,34 persen, tingginya pertumbuhan ini terutama didukung oleh pendapatan yang bersumber dari DBH Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 27,49 persen dengan capaian kinerja 86,40 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari DBH PPH Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, komponen dana perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kabupaten Banjar adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 38 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	689,49	684,70	(8,57)	(9,21)	99,31
2021	674,08	674,08	(2,23)	(1,55)	100,00
2022	674,15	672,37	0,01	(0,25)	99,74
2023	720,93	720,87	6,94	7,21	99,99
2024	821,31	811,19	13,92	12,53	98,77
Rata-rata			2,01	1,75	99,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer DAU Kabupaten Banjar cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 1,75 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 12,53 persen dengan capaian kinerja mencapai 99,56 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 9,21 persen dengan capaian kinerja 99,31 persen. Meskipun demikian, untuk realisasi capaian kinerja DAU Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja yang mencapai 99,56 persen yang berarti capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) relatif sudah mendekati sesuai dengan proyeksi target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini memastikan alokasi dan penyaluran DAU tepat waktu sehingga membantu menjaga konsistensi antara proyeksi dan realisasi.

Komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana alokasi khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	243,06	236,12	(15,81)	(10,24)	97,14
2021	280,46	257,80	15,39	9,18	91,92
2022	342,89	302,02	22,26	17,15	88,08
2023	358,27	341,36	4,49	13,02	95,28
2024	333,98	227,95	(6,78)	(33,22)	68,25
Rata-rata			3,91	(0,82)	88,14

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar minus 0,82 persen per tahun. Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 88,14 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahun 2022 menjadi capaian kinerja terendah untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar dengan tingkat capaian sebesar 88,08 persen

dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Komponen Pendapatan Transfer lainnya dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari DID yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Insentif Daerah (DID) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	17,80	43,69	(26,67)	80,05	245,52
2021	17,48	17,48	(1,75)	(59,98)	100,00
2022	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
2023	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00			0,00
Rata-rata			(42,81)	(26,65)	74,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Dari tabel di atas, selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar –26,65 per tahun selama kurun waktu lima tahun. Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana insentif daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini terjadi pada tahun 2019 serta tahun 2021. Kondisi ini terjadi dikarenakan bila terdapat sisa dana, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan rencana penggunaan dan realisasi dari sisa dana DID tersebut untuk

pendidikan (termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan), kesehatan (termasuk penanganan pandemi COVID-19 dan digitalisasi pelayanan kesehatan), pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial. Nilai persentase pertumbuhan dana inisiatif daerah baik target ataupun realisasi menunjukkan angka yang negatif jika dilihat dari rata-rata tahunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 hingga tahun 2024 baik target ataupun realisasi dana inisiatif daerah memiliki nilai 0.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Banjar untuk target dan realisasi selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banjar, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)

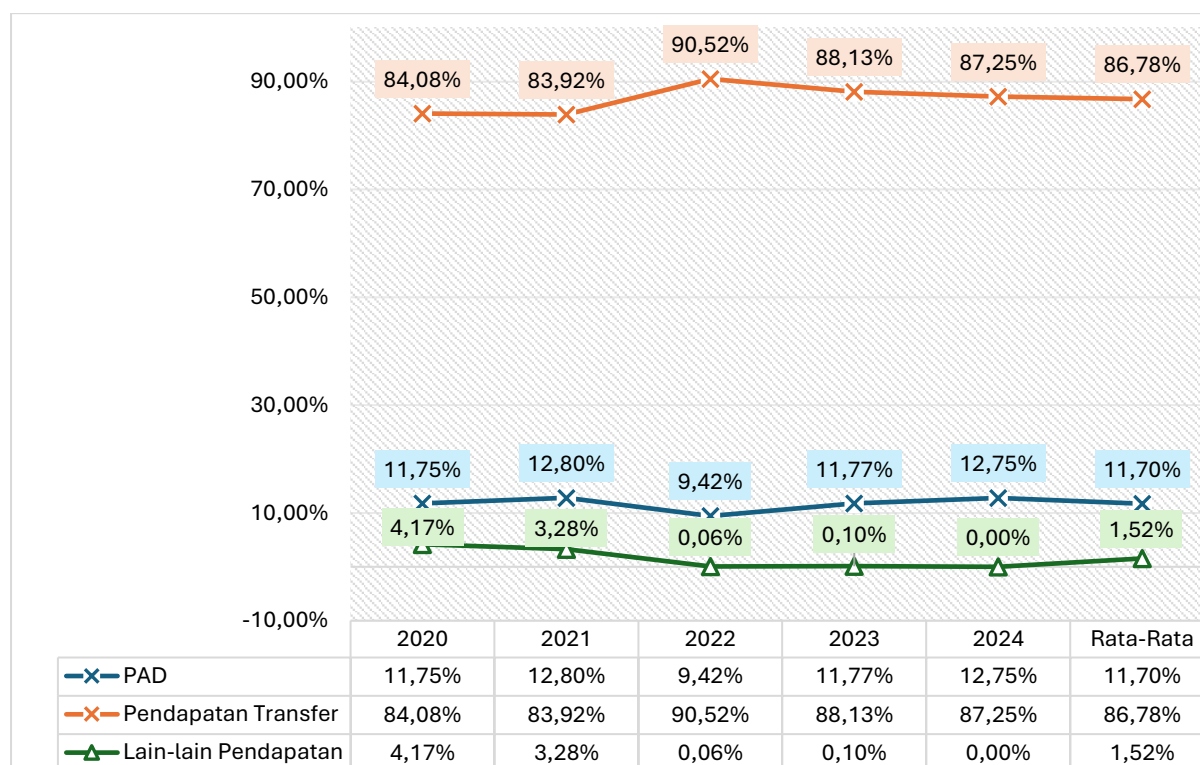
Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	65,40	73,20	24,36	54,28	111,93
2021	57,20	55,78	(12,53)	(23,79)	97,53
2022	0,00	1,28	(100,00)	(97,70)	0,00
2023	3,04	2,44	0,00	90,34	80,50
2024	34,71	0,00	1043,24	(100,00)	0,00
Rata-rata			191,01	(15,37)	57,99

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Banjar cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2020-2021 mengalami memiliki tren yang cenderung stabil jika dibandingkan dengan perubahan pada tahun 2021 ke 2022 yang perubahannya cukup timpang. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki nilai realisasi pertumbuhan rata-rata tahunan

sebesar minus 15,37 persen. Rendahnya rata-rata realisasi pertumbuhan ini dikarenakan mulai pada tahun 2022 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang awalnya dicatat sebagai "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" tidak lagi diterima. Selain itu, pada tahun 2024 tidak ada pendapatan pada lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah, selama kurun waktu 2020-2024 terlihat kontribusi sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi 86,78 persen per tahun, sedangkan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan masing-masing hanya 11,70 persen dan 1,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam membangun Banjar masih sebagian besar masih ditopang dari dana transfer. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah.



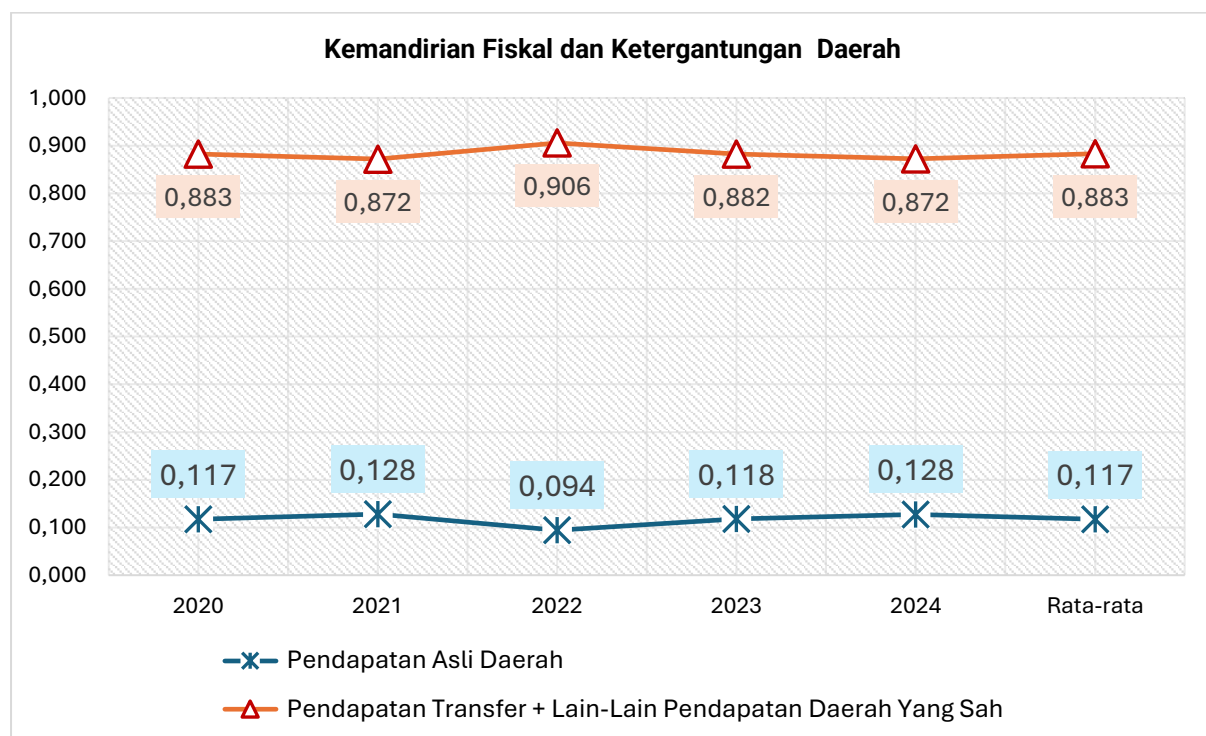
Gambar 2. 52 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2024 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Di samping itu, untuk melihat kemandirian Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan

menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Untuk derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi “Belum Mandiri” yaitu $0,00 \leq IKF < 0,25$; “Menuju Kemandirian” yaitu $0,25 \leq IKF < 0,50$; “Mandiri” $0,50 \leq IKF < 0,75$; dan “Sangat Mandiri” yaitu $0,75 \leq IKF \leq 1,00$.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berbalikan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Banjar 2020-2024.



Gambar 2. 53 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2019 – 2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan grafik di atas bahwa dalam kurun waktu 2020-2024 derajat kemandirian Kabupaten Banjar secara rata-rata sebesar 0,117 (atau 11,7 persen). Ini menunjukkan derajat kemandirian Kabupaten Banjar dalam berotonomi masuk ke dalam kategori “Belum Mandiri” yaitu $0,00 \leq IKF < 0,25$.

2.5.1.2 Capaian Kinerja Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.922,02	1.802,71	(7,04)	(5,74)	93,79
2021	1.860,34	1.732,42	(3,21)	(3,90)	93,12
2022	2.021,23	1.853,38	8,65	6,98	91,70
2023	2.559,64	2.261,88	26,64	22,04	88,37
2024	2.634,77	2.263,52	2,94	0,07	85,91
Rata-rata			5,59	3,89	90,58

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan dengan *slope* positif, dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 3,89 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 6,90 persen. Rendahnya pertumbuhan realisasi pada tahun 2020 diakibatkan oleh penurunan jumlah belanja pada pos Belanja Modal yang menurun hampir 50 persen yaitu dari Rp339,728 Milyar menjadi Rp173,429 milyar di tahun 2020.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,58 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat capaian sebesar 93,79 persen dari target belanja daerah Kabupaten Banjar yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selama kurun waktu 2020-2024, hanya ada tiga pos belanja pada Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Ketiga kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Operasi (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.341,66	1.239,09	(1,75)	(0,30)	92,36
2021	1.324,22	1.213,43	(1,30)	(2,07)	91,63
2022	1.454,53	1.310,05	9,84	7,96	90,07
2023	1.760,35	1.504,02	21,03	14,81	85,44
2024	2.084,24	1.764,55	18,40	17,32	84,66
Rata-rata			9,24	7,54	88,83

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi belanja operasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,54 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar –2,07 persen. Rendahnya pertumbuhan

realisasi dikarenakan terjadi penurunan pada seluruh pos belanja baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, ataupun belanja bantuan sosial dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Operasi Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 88,83 persen selama kurun waktu 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat capaian sebesar 92,36 persen dari target belanja operasi Kabupaten Banjar yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Belanja Modal

Kategori belanja daerah berikutnya adalah Belanja Modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Modal Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	180,72	173,43	(50,45)	(48,95)	95,97
2021	195,90	181,25	8,40	4,51	92,52
2022	215,36	197,48	9,93	8,95	91,70
2023	414,85	376,37	92,63	90,59	90,72
2024	540,53	540,53	30,30	43,62	100,00
Rata-rata			18,16	19,74	94,18

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi belanja modal mengalami pertumbuhan dengan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,74 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -48,95 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 100 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan belanja modal yang terjadi pada tahun 2024 menjadi Rp540,53 miliar. Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Modal

Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,18 persen selama kurun waktu 2020-2024.

3. Belanja Tidak Terduga

Kategori belanja daerah terakhir adalah Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	68,31	60,86	2632,22	0,00	89,10
2021	5,00	4,81	(92,68)	(92,09)	96,26
2022	9,22	5,72	84,36	18,94	62,10
2023	8,00	5,89	(13,21)	2,87	73,61
2024	10,00	1,52	25,00	(74,22)	15,18
Rata-rata			527,14	(28,90)	67,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Tidak Terduga Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 67,25 persen selama kurun waktu 2020-2024. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 28,90 persen per tahun. Pertumbuhan yang negatif tersebut menunjukkan lebih sedikit kejadian atau situasi darurat yang memerlukan pengeluaran tambahan. Seperti menurunnya kasus Covid-19, tidak ada bencana alam atau krisis yang signifikan.

2.5.1.3 Capaian Kinerja Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun cakupan pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Pembiayaan daerah selama kurun waktu 2020-2024 umumnya masih didominasi oleh penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	179,34	179,34	54,27	(5,69)	100,00
2021	128,82	131,37	(28,17)	(26,75)	101,98
2022	78,69	78,69	(38,92)	(40,10)	100,00
2023	327,37	329,84	316,03	319,17	100,76
2024	403,12	403,15	23,14	22,22	100,01
Rata-rata			65,27	53,77	100,55

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Untuk pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 53,77 persen selama kurun waktu 2020-2024 . Adapun penurunan terbesar untuk realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banjar terjadi pada tahun 2022 yang

mencapai minus 40,10 persen dan sebesar minus 26,75 persen pada tahun 2021. Rata-rata realisasi pertumbuhan pembiayaan daerah tertinggi berada pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 319 persen. Sementara itu, nilai pembiayaan daerah Kabupaten Banjar tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai Rp403,15 miliar.

Realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurun waktu 2020-2024. Pada seluruh tahun berjalan selama lima tahun ke belakang, realisasi pembiayaan daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan, yakni masing-masing tahun telah mencapai lebih dari atau sama dengan 100 persen capaian kinerja. Namun secara rata-rata, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Banjar telah mencapai 100,55 persen selama kurun waktu 2020-2024. Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah rincian dari komponen pembiayaan daerah Kabupaten Banjar untuk target dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2020-2024.

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Selama kurun waktu 2020-2024, satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar, 2020-2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	179,34	179,34	54,27	(5,69)	100,00
2021	131,92	131,87	(26,44)	(26,47)	99,96
2022	97,39	97,39	(26,18)	(26,15)	100,00
2023	363,42	365,89	273,16	275,70	100,68

2024	429,12	429,15	18,08	17,29	100,01
Rata-rata			58,58	46,94	100,13

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banjar memperlihatkan kinerja yang optimal selama kurun waktu 2020-2024. Secara rata-rata tingkat capaian kinerja untuk penerimaan daerah mencapai 100,13 persen. Pada tahun 2021 menjadi realisasi capaian kinerja terendah untuk penerimaan daerah Kabupaten Banjar dengan tingkat capaian sebesar 99,96 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2023 menjadi capaian kerja tertinggi untuk daerah Banjar yang dapat mencapai 100,68 persen dengan pertumbuhan realisasi sebesar 275,70 persen.

2. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2019–2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar, 2019–2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3,10	0,50	0,00	0,00	16,13
2022	18,70	18,70	503,23	3640,00	100,00
2023	36,05	36,05	92,78	92,78	100,00
2024	26,00	26,00	(27,88)	(27,88)	100,00
Rata-rata			113,63	740,98	63,23

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata sebesar 740,98 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 63,23 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 hingga tahun 2024 yang mencapai 100 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2020 menjadi capaian kinerja terendah dengan capaian kinerja nol persen.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banjar digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Banjar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Banjar pada BUMD selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Banjar, 2020–2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Penyertaan Modal Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16,70	16,70	542,31	0,00	100,00
2023	36,05	36,05	115,87	115,87	100,00
2024	26,00	26,00	(27,88)	(27,88)	100,00
Rata-rata			126,06	17,60	60,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024, terdapat tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan Penyertaan modal yaitu terbagi atas lembaga keuangan, aneka usaha, dan bidang air minum. Dengan rincian BUMD lembaga keuangan yang ikut serta pada bagi hasil penyertaan modal yaitu Bank Kalsel serta BPR Martapura Banjar Sejahtera. Bagian laba atas penyertaan modal BUMD aneka usaha terdiri atas PD Baramarta, PD Pasar Bauntung Batuah, dan PT Banjar Intan Mandiri. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan air minum yaitu PDAM Intan Banjar. Pertumbuhan realisasi penyertaan modal daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata sebesar 17,60 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata

sebesar 60,00 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 - 2024 yang mencapai 100 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan.

Selain untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD, pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjar dialokasikan untuk pemberian pinjaman daerah Kabupaten Banjar. Adapun besarnya target pemberian pinjaman daerah Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Banjar, 2020–2024 (Rp. Miliar)

Tahun	Pemberian Pinjaman Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,50	0,50	0,00	0,00	100,00
2022	2,00	2,00	300,00	300,00	100,00
2023	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata			40,00	40,00	40,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa target anggaran untuk pemberian pinjaman daerah hanya dialokasikan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp2 milyar. Pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2023, dan 2024, Pemerintah Kabupaten Banjar tidak mengalokasikan anggaran untuk pemberian pinjaman daerah.

2.5.1.4 Neraca Daerah

Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah atau disebut Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Peran penting komponen LKPD dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah sebagai keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah provinsi dalam hal aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah akan memberikan informasi berharga kepada pejabat pemerintah daerah, legislatif daerah, kreditur/debitur daerah, dan masyarakat umum

tentang keadaan kekayaan dan kewajiban daerah, termasuk masalah ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca Daerah menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang timbul melalui keadaan masa lampau yang penyelesaiannya melibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dapat dijelaskan yakni adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai sangat berperan penting untuk pemerintahan Kabupaten Banjar dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Sehingga untuk mengetahui sebuah posisi keuangan daerah Kabupaten Banjar, berikut disajikan perkembangan data Neraca Daerah Kabupaten Banjar periode 2020-2024.

Tabel 2. 51 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	3.637.804.788.484,81	3.556.611.185.592,91	3.806.252.264.856,85	4.411.938.561.173,80	5.159.758.783.346,22
1.1	ASET LANCAR	252.957.184.660,85	206.901.507.849,83	503.642.118.487,26	554.873.780.071,87	1.191.046.030.869,89
	Kas	131.927.734.925,41	97.389.203.844,63	363.419.641.282,83	429.120.334.540,89	649.472.765.324,64
	Piutang	92.700.293.498,88	93.285.999.465,88	121.906.683.067,49	103.738.456.739,23	522.641.176.647,32
	Persediaan	28.329.156.236,56	16.226.304.539,32	18.315.794.136,94	22.014.988.791,75	18.932.088.897,93
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.094.415.119.193,36	1.099.114.157.043,18	1.125.223.084.012,38	1.210.221.771.454,91	1.227.082.937.428,35
	Non Permanen		500.000.000,00	2.500.000.000,00	26.024.000,00	
	Permanen	1.094.415.119.193,36	1.098.614.157.043,18	1.122.723.084.012,38	1.210.195.747.454,91	1.227.082.937.428,35
1.3	ASET TETAP	2.132.700.984.544,70	2.093.431.170.154,01	2.077.596.077.723,33	2.184.982.268.167,23	2.438.951.591.840,20
	Tanah	592.020.671.103,99	625.302.005.775,74	639.739.327.990,92	638.373.372.999,47	653.682.059.495,30
	Peralatan dan Mesin	687.383.393.120,51	734.617.890.792,04	797.291.885.002,11	872.516.788.071,01	985.343.118.798,49
	Gedung dan Bangunan	1.051.707.179.096,36	1.101.208.918.780,84	1.147.206.923.443,10	1.199.334.535.324,35	1.345.320.541.305,33
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.648.588.405.116,25	1.714.481.077.183,51	1.792.215.738.120,42	1.979.211.943.293,42	2.275.804.196.983,88
	Aset tetap Lainnya	76.862.175.490,43	78.229.275.522,87	80.347.699.930,87	82.704.483.562,87	83.055.127.670,84
	Konstruksi dalam pengerjaan	919.330.250,00	8.502.329.279,34	2.377.604.679,00	18.610.383.715,00	7.457.107.489,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.924.780.169.632,84)	(2.168.910.327.180,33)	(2.381.583.101.443,09)	(2.605.769.238.798,89)	(2.911.710.559.902,64)
1.4	ASET LAINNYA	157.731.500.085,90	157.164.350.545,89	99.790.984.633,88	432.725.894.475,79	275.601.672.480,78
	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	29.352.500,00	23.382.500,00	244.862.500,00	111.142.500,00	480.548.030,00
	Aset tak berwujud	3.322.494.487,00	3.069.692.622,00	2.109.133.420,00	1.850.823.449,00	2.221.687.764,00
	Aset Lain-lain	154.379.653.098,90	154.071.275.423,89	56.493.078.310,88	111.924.009.526,79	112.772.550.447,78

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility			40.943.910.403,00	318.839.919.000,00	160.126.886.239,00
1.5	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	29.134.847.004,00	27.076.550.727,00
	Properti Investasi Tanah				1.638.397.500,00	1.638.397.500,00
	Properti Investasi Gedung dan Bangunan				43.880.535.554,00	43.880.535.554,00
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi				(16.384.086.050,00)	(18.442.382.327,00)
1.6	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Cadangan					
2	KEWAJIBAN	103.836.922.920,50	141.022.183.255,00	112.998.714.385,00	83.443.113.658,53	18.776.875.630,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103.836.922.920,50	141.022.183.255,00	112.998.714.385,00	83.443.113.658,53	18.776.875.630,00
	Pendapatan diterima dimuka	1.966.935.807,50	1.643.210.593,00	2.763.041.629,00	1.414.428.553,00	1.958.804.262,00
	Utang belanja	4.793.130.826,00	12.467.195.409,00	10.066.254.344,00	13.325.853.712,53	16.818.071.368,00
	Utang jangka pendek lainnya	97.076.856.287,00	126.911.777.253,00	100.169.418.412,00	68.702.831.393,00	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0
	Utang Jangka Panjang Lainnya					
3	EKUITAS	3.533.967.865.564,31	3.415.589.002.337,90	3.693.253.550.471,85	4.328.495.447.515,27	5.140.981.907.716,22
	Ekuitas	3.533.967.865.564,31	3.415.589.002.337,90	3.693.253.550.471,85	4.328.495.447.515,27	5.140.981.907.716,22
4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.637.804.788.484,81	3.556.611.185.592,90	3.806.252.264.856,85	4.411.938.561.173,80	5.159.758.783.346,22

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Banjar periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan signifikan pada sisi aset. Total aset daerah meningkat dari Rp3,64 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp5,16 triliun pada tahun 2024, mencerminkan adanya penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan kekayaan daerah yang lebih optimal. Pertumbuhan terbesar terjadi pada aset lancar, khususnya kas dan piutang, yang melonjak tajam dari Rp252,96 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,19 triliun pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan semakin kuatnya likuiditas daerah, meskipun peningkatan piutang yang tinggi juga menuntut perhatian pada efektivitas penagihan dan manajemen penerimaan.

Pada saat yang sama, investasi jangka panjang relatif stabil dengan tren kenaikan bertahap dari Rp1,09 triliun menjadi Rp1,23 triliun. Aset tetap sebagai komponen terbesar juga terus bertambah, terutama pada kategori peralatan, mesin, serta gedung dan bangunan, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat infrastruktur pelayanan publik. Meskipun demikian, akumulasi penyusutan yang terus meningkat hingga mencapai Rp2,91 triliun pada 2024 menjadi catatan penting agar pemerintah daerah dapat menjaga kualitas dan nilai ekonomis aset jangka panjang. Selain itu, munculnya properti investasi sejak 2023 menunjukkan diversifikasi aset yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Dari sisi kewajiban, tren justru menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, dari Rp103,84 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp18,77 miliar pada 2024. Penurunan beban kewajiban ini mengindikasikan adanya perbaikan manajemen utang jangka pendek serta pengelolaan belanja yang lebih hati-hati. Dengan demikian, ekuitas daerah mengalami peningkatan pesat, dari Rp3,53 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp5,14 triliun pada 2024. Hal ini memperlihatkan kapasitas fiskal yang semakin kuat serta struktur neraca daerah yang semakin sehat.

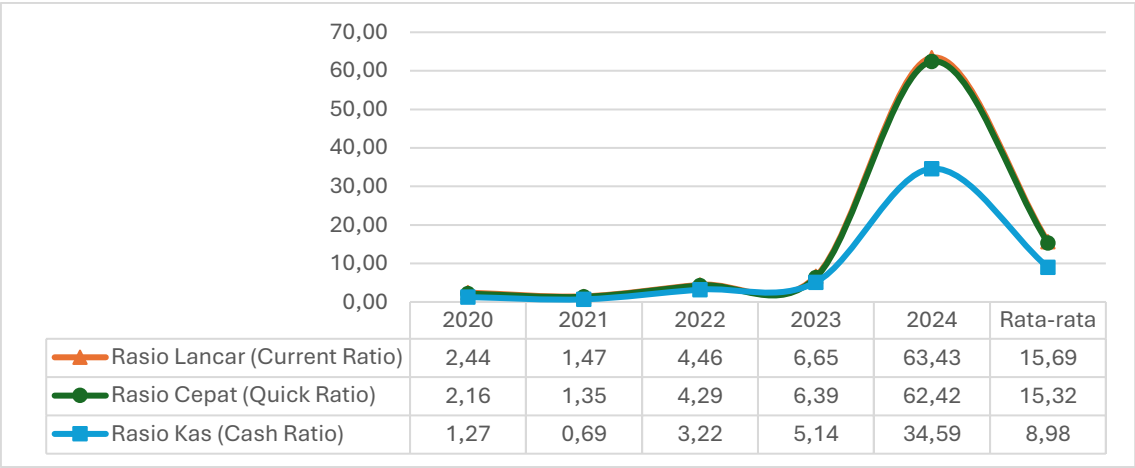
Secara keseluruhan, tren positif pada neraca daerah Kabupaten Banjar selama periode 2020–2024 menggambarkan arah tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan tetap ada,

terutama dalam memastikan pemanfaatan aset daerah secara produktif, mengendalikan piutang agar tidak menjadi beban fiskal, serta menjaga keberlanjutan nilai aset tetap yang mengalami penyusutan. Dengan strategi pengelolaan aset yang lebih inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik, Kabupaten Banjar berpeluang besar memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

1. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



Gambar 2. 54 Rasio Likuiditas Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rata-rata rasio lancar selama periode ini adalah 15,69 menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nilai 15,69 menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki aset lancar 16,69 kali lebih besar dari kewajiban jangka pendeknya, yang berarti likuiditasnya sangat baik.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan. Rata-rata rasio cepat selama lima tahun adalah 15,32 yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset likuid yang cukup tanpa harus mengandalkan persediaan.

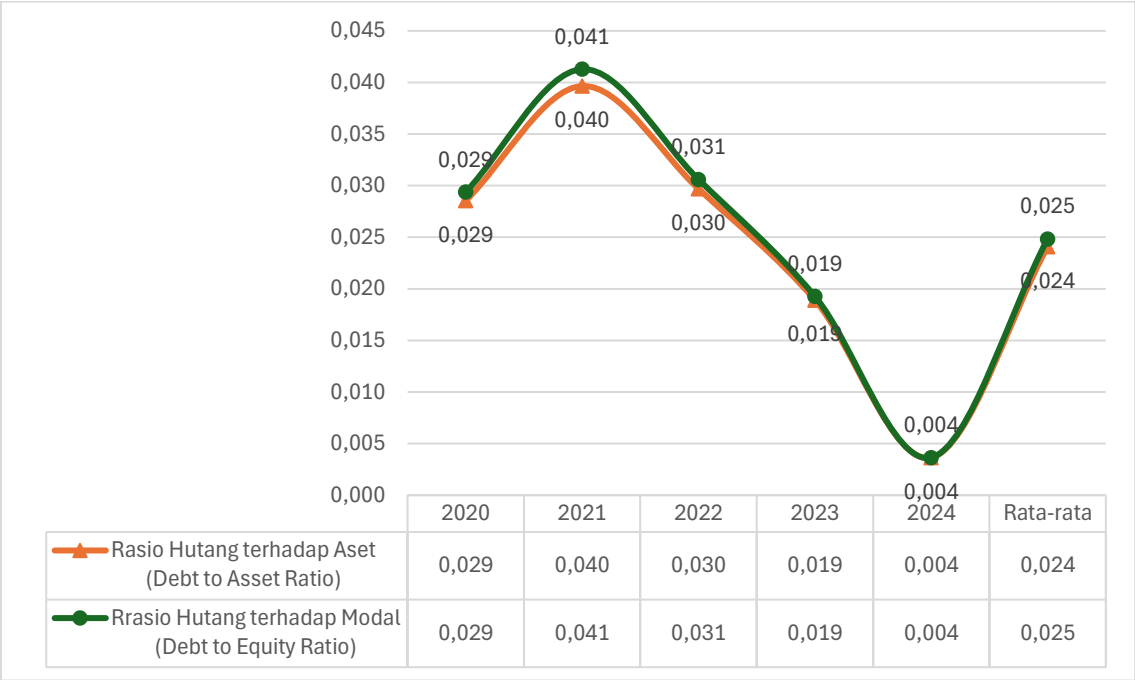
c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek

secara langsung. Rata-rata rasio cepat selama lima tahun adalah 18,98 ini berarti pemerintah memiliki kas 18,98 kali lipat lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya, yang mengindikasikan keuangan daerah sangat likuid.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



Gambar 2. 55 Rasio Solvabilitas Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Solvabilitas Kabupaten Banjar sangat kuat, ditunjukkan dengan rendahnya beban utang terhadap aset dan modal. Tren penurunan utang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang berhati-hati dan tidak bergantung pada pinjaman untuk operasional atau investasi.

a. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal.

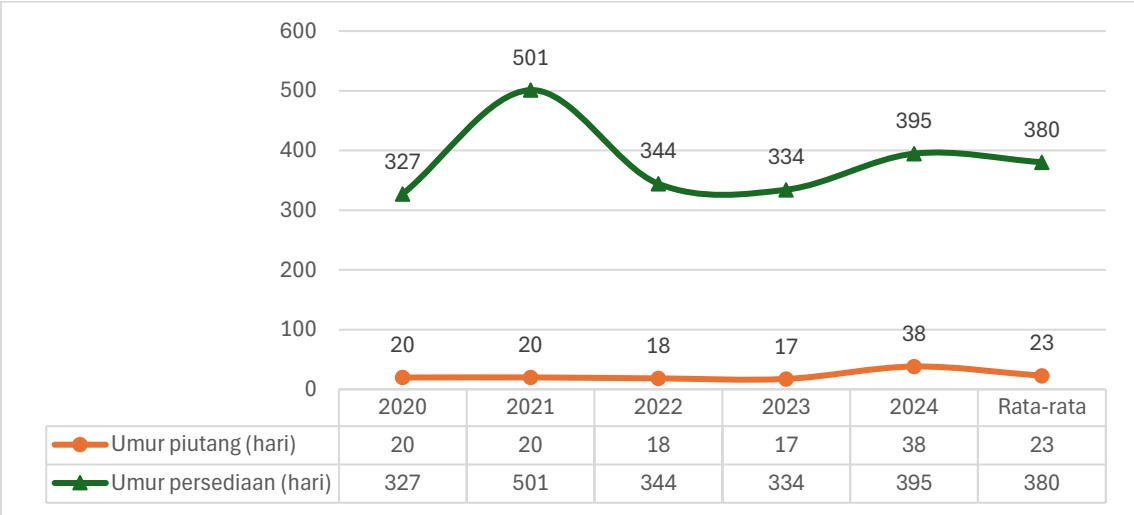
Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang. Nilai 0,024 (atau 2,4 persen) menunjukkan bahwa hanya 2,4 persen dari total aset yang berasal dari utang, yang berarti beban utang daerah relatif sangat kecil.

b. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya. Nilai rata-rata 0,025 atau 2,5 persen, ini berarti kabupaten memiliki modal yang sangat dominan dibandingkan dengan utangnya, menunjukkan solvabilitas yang sangat baik.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



Gambar 2. 56 Rasio Aktivitas Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

a. Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin

besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Rata-rata 23 hari menunjukkan waktu pencairan piutang relatif cepat, mengindikasikan pengelolaan piutang yang cukup efisien.

b. Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif. Rata-rata 380 hari menunjukkan persediaan rata-rata tersimpan hampir setahun sebelum digunakan atau dimanfaatkan. Manajemen persediaan perlu dievaluasi, mengingat angka 380 hari tergolong tinggi, yang bisa menyebabkan inefisiensi operasional atau biaya penyimpanan berlebih. Umur persediaan yang tinggi berpotensi menyebabkan inefisiensi, terutama jika menyangkut barang yang cepat usang atau memiliki biaya penyimpanan tinggi.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah periode 2026-2030.

Tabel 2. 52 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030

No	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	315.774.855.372,01	338.323.659.801,00	355.239.843.000,00	373.001.835.000,00	391.651.927.000,00	411.234.524.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.647.209.070.419,00	1.959.275.611.916,00	1.978.831.801.000,00	1.998.583.368.000,00	2.018.532.266.000,00	2.038.680.469.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.479.084.885,00	30.437.298.850,00	31.959.164.000,00	33.557.122.000,00	35.234.977.000,00	36.996.725.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.990.463.010.676,01	2.328.036.570.567,00	2.366.030.808.000,00	2.405.142.325.000,00	2.445.419.170.000,00	2.486.911.718.000,00
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	1.832.482.411.263,75	1.591.335.711.817,00	1.617.242.047.000,00	1.643.823.534.000,00	1.710.910.521.000,00	1.705.752.956.000,00
2.2	Belanja Modal	504.865.053.327,51	595.630.543.683,00	607.689.599.000,00	620.516.462.000,00	593.702.545.000,00	640.699.923.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.534.226.050,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	405.254.913.251,00	396.195.882.500,00	400.514.502.000,00	404.894.142.000,00	409.336.303.000,00	413.842.546.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.744.136.603.892,26	2.593.162.138.000,00	2.635.446.148.000,00	2.679.234.138.000,00	2.723.949.369.000,00	2.770.295.425.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	246.326.406.783,75	(265.125.567.433,00)	(269.415.340.000,00)	(274.091.813.000,00)	(278.530.199.000,00)	(283.383.707.000,00)
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	429.146.358.540,89	267.625.567.433,00	271.915.340.000,00	276.591.813.000,00	281.030.199.000,00	285.883.707.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	403.146.358.540,89	265.125.567.433,00	269.415.340.000,00	274.091.813.000,00	278.530.199.000,00	283.383.707.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	649.472.765.324,64	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Proyeksi kerangka pendanaan disusun dengan tidak memasukkan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam kelompok Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan pertimbangan bahwa DAK bersifat earmarked (terikat peruntukannya), tidak dapat digunakan secara fleksibel, serta sangat bergantung pada kebijakan sektoral pemerintah pusat yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. DAK bersifat tidak pasti dari sisi jumlah dan bidang yang didanai, karena mengikuti kebijakan sektoral yang dapat berubah setiap tahun. Hal ini membuatnya tidak cocok untuk dimasukkan dalam kerangka pembiayaan makro yang membutuhkan proyeksi stabil. Serta pada sisi belanja juga tidak dialokasikan.

Hasil Proyeksi Pendapatan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan pendapatan daerah yang konsisten selama periode 2026 hingga 2030. Total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp2,33 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,49 triliun pada tahun 2030. Kenaikan ini didorong oleh dua komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD diproyeksikan meningkat dari Rp338,32 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp411,23 miliar pada tahun 2030, atau tumbuh rata-rata sekitar 5 persen per tahun. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tetap menjadi sumber utama keuangan daerah, dengan nilai yang relatif stabil, yakni sekitar Rp1,96 triliun pada tahun 2026 dan mencapai Rp2,04 triliun pada tahun 2030.

Dari sisi belanja daerah, terjadi peningkatan belanja dari Rp2,59 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,77 triliun pada tahun 2030. Komponen terbesar belanja tetap didominasi oleh belanja operasi, yang mencerminkan kebutuhan pembiayaan untuk pelayanan publik rutin dan belanja pegawai. Belanja modal juga menunjukkan alokasi yang cukup signifikan, dengan rata-rata lebih dari Rp611 miliar per tahun, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan aset strategis lainnya.

Namun, pada periode 2026–2030, pemerintah daerah diproyeksikan mengalami defisit anggaran setiap tahunnya, dengan nilai defisit berkisar antara Rp 265 miliar hingga Rp283 miliar. Meski demikian, defisit tersebut dapat ditutup melalui pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan, seperti SiLPA tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan dirancang cukup fleksibel untuk merespons besarnya defisit setiap tahun, sehingga kondisi fiskal tetap dalam batas kendali. Sebagai contoh, pada tahun 2026, defisit sebesar Rp265 miliar akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Secara keseluruhan, proyeksi kerangka pendanaan ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Banjar menghadapi tantangan defisit dalam jangka menengah, namun strategi pembiayaan yang disusun secara hati-hati masih mampu menjaga keseimbangan fiskal daerah. Tidak terdapat proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk tahun 2026–2030, menandakan bahwa seluruh pembiayaan direncanakan untuk digunakan secara optimal guna mendukung program-program prioritas pembangunan.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan memiliki peran penting dalam perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah. Adanya estimasi pendapatan yang akurat, pemerintah dapat menyusun rencana pengeluaran secara lebih efektif, memastikan anggaran yang disusun realistis, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas pembangunan dan program yang direncanakan. Selain itu, proyeksi pendapatan juga berfungsi sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas fiskal serta menghindari potensi defisit anggaran. Keakuratan proyeksi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi risiko keuangan di masa depan dan mengambil langkah-langkah preventif guna memitigasi dampak negatifnya.

Dalam menyusun proyeksi pendapatan, pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tren historis penerimaan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pencapaian dan pertumbuhan pendapatan, kondisi ekonomi makro, serta kebijakan dan strategi pendapatan daerah yang akan diterapkan. Berdasarkan mempertimbangan faktor-faktor tersebut,

proyeksi yang dihasilkan diharapkan lebih realistis dan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan fiskal. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 53 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030

No	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	315.774.855.372,01	338.323.659.801,00	355.239.843.000,00	373.001.835.000,00	391.651.927.000,00	411.234.524.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	130.670.478.289,00	169.063.220.625,00	177.516.382.000,00	186.392.201.000,00	195.711.811.000,00	205.497.402.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.173.930.214,00	8.073.992.617,00	8.477.692.000,00	8.901.577.000,00	9.346.656.000,00	9.813.989.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.008.793.672,00	18.085.047.874,00	18.989.300.000,00	19.938.765.000,00	20.935.703.000,00	21.982.488.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	166.921.653.197,01	143.101.398.685,00	150.256.469.000,00	157.769.292.000,00	165.657.757.000,00	173.940.645.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.647.209.070.419,00	1.959.275.611.916,00	1.978.831.801.000,00	1.998.583.368.000,00	2.018.532.266.000,00	2.038.680.469.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.410.966.212.656,00	1.831.944.453.000,00	1.850.227.330.000,00	1.868.692.852.000,00	1.887.342.845.000,00	1.906.179.154.000,00
1.2.2	Transfer antar – daerah	236.242.857.763,00	127.331.158.916,00	128.604.471.000,00	129.890.516.000,00	131.189.421.000,00	132.501.315.000,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.479.084.885,00	30.437.298.850,00	31.959.164.000,00	33.557.122.000,00	35.234.977.000,00	36.996.725.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	27.479.084.885,00	30.437.298.850,00	31.959.164.000,00	33.557.122.000,00	35.234.977.000,00	36.996.725.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.990.463.010.676,01	2.328.036.570.567,00	2.366.030.808.000,00	2.405.142.325.000,00	2.445.419.170.000,00	2.486.911.718.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2026–2030 dengan baseline tahun 2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan daerah. Pada tahun 2024, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,99 triliun, yang didominasi oleh pendapatan transfer dengan kontribusi lebih dari 88 persen. Namun, memasuki tahun 2026 terjadi penurunan cukup tajam menjadi Rp2,33 triliun, terutama karena berkurangnya alokasi transfer pemerintah pusat dari Rp2,41 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,83 triliun di tahun 2026.

Meskipun demikian, proyeksi menunjukkan tren kenaikan bertahap hingga mencapai Rp2,48 triliun pada tahun 2030. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat pertumbuhan yang konsisten dari Rp315,77 miliar pada baseline 2024 menjadi Rp411,23 miliar pada tahun 2030, terutama didorong oleh peningkatan pajak daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini mencerminkan adanya potensi kemandirian fiskal daerah yang semakin kuat, meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil. Adapun komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan moderat.

Secara keseluruhan, meskipun pendapatan daerah Kabupaten Banjar masih sangat bergantung pada transfer pusat, arah proyeksi mengindikasikan perlunya strategi penguatan PAD secara lebih inovatif dan berkelanjutan, sehingga ketahanan fiskal daerah dapat lebih terjamin di tengah dinamika kebijakan transfer pemerintah pusat.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk berbagai tujuan yang esensial dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi belanja membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunan dengan mengestimasi kebutuhan pengeluaran. Ini memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara efektif dan efisien. Melalui proyeksi belanja yang akurat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Proyeksi belanja memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengendalikan

pengeluaran, mencegah pemborosan, dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Sementara itu, Efisiensi belanja daerah sangat penting untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal demi meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 54 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030

No	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	1.832.482.411.263,75	1.591.335.711.817,00	1.617.242.047.000,00	1.643.823.534.000,00	1.710.910.521.000,00	1.705.752.956.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	967.689.238.104,00	777.948.641.000,00	787.998.398.000,00	798.411.773.000,00	809.012.962.000,00	822.777.741.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	751.020.519.567,75	742.557.837.187,00	757.408.994.000,00	772.557.174.000,00	788.008.317.000,00	808.968.483.000,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	110.233.878.619,00	59.425.733.630,00	60.317.120.000,00	61.221.877.000,00	102.140.205.000,00	62.140.205.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.538.774.973,00	11.403.500.000,00	11.517.535.000,00	11.632.710.000,00	11.749.037.000,00	11.866.527.000,00
2.2	Belanja Modal	504.865.053.327,51	595.630.543.683,00	607.689.599.000,00	620.516.462.000,00	593.702.545.000,00	640.699.923.000,00
2.2.1	Tanah	2.620.790.400,00	30.450.882.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.600.000.000,00	0,00
2.2.2	Peralatan dan Mesin	119.720.105.120,20	61.833.955.074,70	64.925.653.000,00	68.171.936.000,00	65.580.533.000,00	80.859.560.000,00
2.2.3	Gedung dan Bangunan	81.543.291.953,81	165.795.789.862,30	174.085.579.000,00	182.789.858.000,00	181.929.351.000,00	211.025.819.000,00
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	297.042.963.062,50	336.730.250.746,00	337.850.504.000,00	338.718.527.000,00	314.748.158.000,00	347.961.596.000,00
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	3.409.392.790,00	397.666.000,00	401.643.000,00	405.659.000,00	409.716.000,00	413.813.000,00
2.2.6	Aset Lainnya	528.510.001,00	422.000.000,00	426.220.000,00	430.482.000,00	434.787.000,00	439.135.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.534.226.050,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	405.254.913.251,00	396.195.882.500,00	400.514.502.000,00	404.894.142.000,00	409.336.303.000,00	413.842.546.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.819.777.589,00	8.916.525.800,00	9.362.352.000,00	9.830.470.000,00	10.321.994.000,00	10.838.094.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	397.435.135.662,00	387.279.356.700,00	391.152.150.000,00	395.063.672.000,00	399.014.309.000,00	403.004.452.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.744.136.603.892,26	2.593.162.138.000,00	2.635.446.148.000,00	2.679.234.138.000,00	2.723.949.369.000,00	2.770.295.425.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Dalam menyusun proyeksi belanja daerah Kabupaten Banjar, pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam kelompok Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dimasukkan sebagai dasar perhitungan. Hal ini dimaksudkan agar proyeksi belanja mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang sesungguhnya, serta memberikan gambaran yang lebih realistis dan berkelanjutan terhadap kemampuan pembiayaan belanja daerah dalam jangka menengah. DAK sangat tergantung pada kebijakan sektoral pemerintah pusat dan proses pengusulan dari tahun ke tahun. Hal ini membuat proyeksi belanja berdasarkan DAK bersifat spekulatif dan tidak dapat dijadikan acuan yang konsisten untuk perencanaan.

Berdasarkan data proyeksi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2026–2030 dengan baseline tahun 2024, terlihat bahwa struktur belanja daerah secara umum menunjukkan pola yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan moderat dari tahun ke tahun. Total belanja daerah pada tahun 2024 sebesar Rp2,74 triliun diproyeksikan sedikit menurun pada 2026 menjadi Rp2,59 triliun, sebelum kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp2,77 triliun pada 2030. Dinamika ini menunjukkan adanya strategi pengendalian belanja yang hati-hati di awal periode, diikuti oleh akselerasi moderat pada tahun-tahun berikutnya.

Komponen belanja operasi tetap menjadi pos terbesar dalam struktur belanja daerah, meskipun cenderung menurun dari Rp1,83 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp1,59 triliun pada 2026, lalu relatif stabil di kisaran Rp1,6–1,7 triliun hingga 2030. Penurunan belanja pegawai yang cukup signifikan di awal proyeksi (dari Rp967,6 miliar pada 2024 menjadi Rp777,9 miliar pada 2026) dapat dipahami sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja rutin dan optimalisasi aparatur, sementara belanja barang dan jasa tetap dijaga stabil sebagai penopang pelayanan publik. Belanja hibah dan bantuan sosial juga diproyeksikan mengalami fluktuasi, mencerminkan adanya fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, belanja modal mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp504,8 miliar pada 2024 menjadi Rp640,7 miliar pada 2030. Peningkatan

terbesar tampak pada subkomponen gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan, yang mengindikasikan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur fisik dan mendukung pembangunan jangka panjang. Namun, terdapat pula pola fluktuatif, misalnya pada belanja tanah yang tinggi pada 2026–2029 tetapi kembali menjadi nol pada 2030, yang menunjukkan sifat kebijakan berbasis kebutuhan sektoral dan proyek tertentu.

Sementara itu, belanja transfer dan belanja tidak terduga diproyeksikan relatif stabil. Belanja transfer yang meliputi bagi hasil dan bantuan keuangan konsisten meningkat secara bertahap, dari Rp396,1 miliar pada 2026 menjadi Rp413,8 miliar pada 2030, mencerminkan kesinambungan komitmen daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan lintas wilayah. Belanja tidak terduga juga dijaga pada tingkat Rp10 miliar per tahun sejak 2026, yang mencerminkan kehati-hatian fiskal untuk mengantisipasi risiko dan kejadian tak terduga.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah Kabupaten Banjar 2026–2030 memperlihatkan arah kebijakan fiskal yang lebih berimbang: menekan beban belanja operasi, meningkatkan porsi belanja modal, dan menjaga stabilitas belanja transfer. Pola ini menunjukkan orientasi pembangunan daerah yang semakin strategis, dengan penekanan pada efisiensi, ketahanan fiskal, dan investasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan..

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah memegang peranan strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Proyeksi ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran tahunan, terutama dalam merespons kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran maupun mendanai program atau proyek strategis. Melalui proyeksi yang tepat, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola utang secara lebih efisien, termasuk dalam menentukan kebutuhan pinjaman serta jadwal pelunasannya. Selain itu, proyeksi pembiayaan berperan penting dalam mengidentifikasi serta mengendalikan berbagai risiko fiskal, seperti risiko

likuiditas dan fluktuasi suku bunga, guna menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

Penyusunan proyeksi pembiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis pembiayaan tahun 2020 hingga 2024, serta mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, strategi efisiensi belanja, peningkatan pendapatan daerah, dan kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan defisit anggaran juga menjadi komponen penting dalam perencanaan pembiayaan. Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, proyeksi pembiayaan diharapkan bersifat realistis, terukur, dan akuntabel. Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar untuk periode perencanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 55 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030

No	URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	429.146.358.540,89	267.625.567.433,00	271.915.340.000,00	276.591.813.000,00	281.030.199.000,00	285.883.707.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	429.120.334.540,89	267.625.567.433,00	271.915.340.000,00	276.591.813.000,00	281.030.199.000,00	285.883.707.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.1.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	26.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.1.2	Pembentukan Dana Cadangan	0,00					
	PEMBIAYAAN NETTO	403.146.358.540,89	265.125.567.433,00	269.415.340.000,00	274.091.813.000,00	278.530.199.000,00	283.383.707.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	649.472.765.324,64	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Banjar tahun 2026–2030 dengan baseline tahun 2024, dapat dilihat bahwa dinamika pembiayaan lebih banyak didorong oleh penerimaan pembiayaan yang hampir seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp429,15 miliar, namun menurun cukup signifikan pada tahun 2026 menjadi Rp267,63 miliar. Selanjutnya, proyeksi menunjukkan tren kenaikan yang relatif stabil hingga tahun 2030, mencapai Rp285,88 miliar. Pola ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah melalui SiLPA tetap tersedia, meskipun tidak lagi setinggi baseline, sehingga daerah dituntut untuk lebih hati-hati dalam mengelola belanja agar tidak menimbulkan defisit yang membebani keberlanjutan fiskal.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, nilai yang dialokasikan relatif kecil dan cenderung stabil. Pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp26 miliar, kemudian menurun drastis menjadi Rp2,5 miliar sejak tahun 2026 hingga 2030. Pengeluaran ini sepenuhnya diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah, tanpa ada alokasi untuk pembentukan dana cadangan. Kebijakan ini dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian fiskal, di mana pemerintah daerah berusaha menekan beban pembiayaan keluar demi menjaga keseimbangan anggaran, sekaligus mengurangi risiko fiskal jangka panjang.

Pembiayaan netto selama periode 2026–2030 selalu menunjukkan nilai positif, dengan tren kenaikan moderat dari Rp265,13 miliar pada 2026 menjadi Rp283,38 miliar pada 2030. Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas pembiayaan daerah masih cukup kuat untuk menutup potensi defisit anggaran, sekaligus memberikan ruang fiskal bagi keberlanjutan pembangunan. Namun demikian, dibandingkan dengan baseline 2024, terlihat adanya penurunan kapasitas, sehingga penguatan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang pada baseline 2024 tercatat cukup besar yakni Rp649,47 miliar, diproyeksikan tidak lagi muncul pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan pengelolaan anggaran menuju keseimbangan antara

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sehingga ruang fiskal tidak lagi bergantung pada akumulasi SILPA. Kondisi ini juga bisa dimaknai sebagai upaya memperkuat disiplin fiskal dengan mengarahkan seluruh potensi pendapatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara lebih terukur.

2.5.2.4 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banjar tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 56 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	2.990.463.010.676,01	2.328.036.570.567,00	2.366.030.808.000,00	2.405.142.325.000,00	2.445.419.170.000,00	2.486.911.718.000,00
2	Penerimaan Pembiayaan	429.146.358.540,89	267.625.567.433,00	271.915.340.000,00	276.591.813.000,00	281.030.199.000,00	285.883.707.000,00
	Total Penerimaan	3.419.609.369.216,90	2.595.662.138.000,00	2.637.946.148.000,00	2.681.734.138.000,00	2.726.449.369.000,00	2.772.795.425.000,00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	3.419.609.369.216,90	2.595.662.138.000,00	2.637.946.148.000,00	2.681.734.138.000,00	2.726.449.369.000,00	2.772.795.425.000,00
3	PRIORITAS I (70 %)		1.816.963.496.600,00	1.846.562.303.600,00	1.877.213.896.600,00	1.908.514.558.300,00	1.940.956.797.500,00
	a. Belanja pegawai		777.948.641.000,00	787.998.398.000,00	798.411.773.000,00	809.012.962.000,00	822.777.741.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	c. Belanja wajib dan mengikat lainnya		1.036.514.855.600,00	1.056.063.905.600,00	1.076.302.123.600,00	1.097.001.596.300,00	1.115.679.056.500,00
4	PRIORITAS II (20 %)		519.132.427.600,00	527.589.229.600,00	536.346.827.600,00	545.289.873.800,00	554.559.085.000,00
5	PRIORITAS III (10 %)		259.566.213.800,00	263.794.614.800,00	268.173.413.800,00	272.644.936.900,00	277.279.542.500,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (KKKD) Kabupaten Banjar Tahun 2026–2030 dengan baseline tahun 2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan dan prioritas belanja daerah. Pada tahun 2024, kapasitas riil tercatat sebesar Rp3,41 triliun, yang kemudian mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2026 menjadi Rp2,59 triliun. Meskipun demikian, proyeksi menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif secara bertahap hingga tahun 2030, dengan capaian Rp2,77 triliun. Hal ini menandakan adanya upaya konsolidasi fiskal yang diikuti dengan pemulihan kapasitas fiskal daerah secara gradual.

KKKD tersebut kemudian dialokasikan berdasarkan tiga prioritas utama. Prioritas I mengambil porsi sebesar 70 persen dari total kapasitas fiskal. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. Nilainya terus meningkat dari Rp1,816 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,94 triliun pada tahun 2030. Komponen terbesar dalam Prioritas I adalah belanja pegawai yang diproyeksikan naik dari Rp777,9 Miliar pada tahun 2026 menjadi Rp822,77 Miliar pada tahun 2030, mencerminkan beban belanja tetap yang signifikan bagi keuangan daerah. Selain itu, belanja wajib dan mengikat lainnya juga mengalami pertumbuhan, yang menunjukkan peningkatan kebutuhan pendanaan atas kewajiban dasar pemerintahan.

Sementara itu, alokasi untuk Prioritas II yang dialokasikan sebesar 20 persen dari kapasitas fiskal meningkat dari Rp519,13 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp554,55 miliar pada tahun 2030. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar yang mencerminkan alokasi untuk program-program pembangunan sektoral yang strategis dan memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan publik. Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencakup:

- a. Banjar Amanah
- b. Banjar Bausaha
- c. Banjar Berkarakter
- d. Banjar Cendekia
- e. Banjar Intan Maju
- f. Banjar Lestari
- g. Banjar Melayani
- h. Banjar Membangun
- i. Banjar Samawa
- j. Banjar Sigar
- k. Banjar Tangguh
- l. Banjar Tertata
- m. Smart Kampung Manis

Program-program prioritas II tersebut pada dasarnya beririsan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar dan belanja wajib (*mandatory spending*) yang dialokasikan dalam kelompok Prioritas I (70 persen dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah)

Sementara itu, Prioritas III yang dialokasikan sebesar 10 persen, juga meningkat secara konsisten dari Rp259,56 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp277,27 miliar pada tahun 2030. Dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Secara keseluruhan, struktur proyeksi KKPD Kabupaten Banjar menunjukkan pendekatan yang cukup konservatif dan proporsional dalam pembagian alokasi belanja, dengan tetap menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan belanja pembangunan. Meskipun demikian, dominasi belanja pegawai dan belanja wajib lainnya menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk pengembangan program prioritas pembangunan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan fiskal serta memperluas kapasitas fiskal daerah di masa mendatang.

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Sub-bab ini menyajikan analisis atas permasalahan pembangunan daerah yang dihasilkan dari penelahan atas data-data yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yang akan dirumuskan. Bab ini secara umum akan menyajikan dua hal, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk merumuskan intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banjar secara umum akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan lintas sektor dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan daerah. Kedua permasalahan ini pada umumnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspons oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama lima tahun mendatang.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor Kabupaten Banjar diidentifikasi melalui analisis berbasis landasan transformasi, yang secara umum dikategorikan berdasarkan dimensi pembangunan berkelanjutan dan landasan transformasi dalam perencanaan jangka panjang. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan meninjau capaian kinerja serta melalui diskusi kelompok terfokus bersama organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakan pendekatan pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan akar permasalahan. Sumber dari pemetaan masalah ini berasal dari penelahaan atas berbagai data yang tersaji dalam BAB II dan hasil dari diskusi grup terfokus (*focus group discussion*) yang dilakukan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Banjar dirinci sebagai berikut.

Tabel 2. 57 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan industri pengolahan belum optimal	Kapasitas produksi industri kecil menengah belum optimal
		Nilai tambah sektor pariwisata daerah masih belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi wisata berdasarkan konsep 7A pariwisata belum optimal
		Pembentukan modal tetap bruto belum optimal	Realisasi investasi sektor tersier masih rendah
			Intensifikasi investasi sektor primer dan sekunder belum optimal
		Ekspor barang dan jasa daerah belum terpetakan	Belum adanya standarisasi barang perdagangan
		Distribusi barang belum lancar	Sarpras perdagangan belum sesuai standar
			Belum memiliki pusat distribusi regional
		Omzet usaha mikro belum optimal	Keberdayaan usaha mikro masih rendah
		Belum optimalnya kualitas koperasi	Belum adanya regenerasi SDM koperasi
			Masih tingginya dominasi koperasi simpan pinjam
		Produktivitas angkatan kerja daerah belum optimal	Serapan tenaga kerja belum optimal
	Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan belum optimal	Nilai tambah sektor pertanian belum optimal	Produksi dan produktivitas pertanian kurang optimal
			Produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya belum optimal
	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Tingginya angka kecelakaan
			Belum optimalnya aksesibilitas distribusi orang dan barang
			Belum memadainya aksesibilitas menuju kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Sosial	Penguatan SDM yang berkualitas dan berkarakter belum optimal	Pelayanan pendidikan belum optimal	Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih belum merata
			Sarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Tata kelola pendidikan masih belum optimal
			Implementasi kurikulum merdeka masih belum optimal
			Minat dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan di usia pendidikan masih terbatas
			Integrasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal keagamaan melalui penyetaraan pendidikan masih terbatas
		Pelayanan kesehatan masih belum optimal	Sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas belum merata
			Kebutuhan tenaga medis dan paramedis masih belum tercukupi
			Layanan rumah sakit masih belum optimal
			Manajemen dan tata kelola kesehatan belum optimal
			Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan belum optimal
			Kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan
	Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif	Layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial masih belum optimal	Data penerima bantuan sosial masih perlu disesuaikan
			Cakupan penerima bantuan sosial masih terbatas
			Kolaborasi lintas sektor dalam rangka perlindungan sosial masih belum optimal

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemenuhan hak atas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan masih belum optimal
Transformasi Tata Kelola	Reformasi birokrasi daerah belum terimplementasi secara menyeluruh	Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Capaian akuntabilitas kinerja yang belum konsisten
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja
		Pelayanan publik yang belum optimal	Literasi masyarakat terhadap pelayanan publik digital masih rendah
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal	Kurangnya upaya pengelolaan keanekaragaman hayati
			Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan
			Belum optimalnya perlindungan kerusakan lingkungan
			Belum optimalnya pengelolaan sanitasi lingkungan
	Belum optimalnya implementasi ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Kurangnya akses pangan masyarakat	Belum meratanya akses air baku
			Menurunnya produksi dan produktivitas hasil pertanian akibat alih fungsi lahan, serangan hama, perubahan iklim, dan bencana
		Ketahanan pangan belum optimal	Ketersediaan pangan masih rendah
			Pemanfaatan pangan belum beragam
			Keterjangkauan pangan belum optimal

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum meratanya ketersediaan energi baru terbarukan	Penerapan energi baru terbarukan belum familier
			Belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk sumber energi baru
	Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan keselamatan	Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
			Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penanganan bencana dan kebakaran
			Belum meratanya cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran
			Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
		Implementasi aksi penurunan emisi GRK belum optimal	Masih rendahnya antisipasi kebencanaan akibat perubahan musim/iklim
			Pembentukan komunitas iklim belum maksimal
			Pengelolaan limbah gas buang belum optimal
	Belum optimalnya ketahanan sosial	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Masih tingginya pernikahan dini/anak
			Pemenuhan ruang dan hak anak yang masih belum optimal
			Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah singgah/penampungan
			Belum optimalnya pengarusutamaan gender
		Adanya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Deteksi dini dan sosialisasi pencegahan narkoba masih belum optimal
		Belum optimalnya akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan	Masih adanya permukiman dan perumahan yang belum terfasilitasi PSU
			Masih adanya kawasan kumuh
			Tingginya <i>backlog</i> permukiman

2.6.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mengalami berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui proses pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pembangunan berbasis urusan menjadi perlu untuk dilakukan dalam rangka pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Pemetaan masalah per urusan bersumber dari berbagai dari penelaahan atas berbagai data yang tersaji dalam BAB II dan hasil dari diskusi grup terfokus (*focus group discussion*) yang dilakukan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menggali berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan daerah masing-masing urusan yang diampu oleh perangkat daerah. Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan pemerintah daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 58 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Pelayanan pendidikan belum optimal	Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih belum merata
			Sarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Tata kelola pendidikan masih belum optimal
			Implementasi kurikulum merdeka masih belum optimal
			Minat dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan di usia pendidikan masih terbatas
			Integrasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal keagamaan melalui penyetaraan pendidikan masih terbatas
2	Kesehatan		Sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas belum merata

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan masih belum tercukupi
			Belum optimalnya jumlah dan distribusi tenaga Kesehatan
			Layanan rumah sakit masih belum optimal
			Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan belum optimal
			Kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan
			Upaya penurunan stunting dan perbaikan gizi masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Belum optimalnya aksesibilitas distribusi orang dan barang menuju kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan
			Kesulitan topografi Kabupaten Banjar
			Banjir menyebabkan kualitas jalan menurun
			Belum teridentifikasinya aset lahan untuk jalan baru
		Belum optimalnya pengairan daerah	Pasang surut air membuat pekerjaan tidak dapat dilakukan setiap waktu
			Beberapa petak sawah belum teraliri irigasi
			Menumpuknya sedimentasi sungai sehingga perlu normalisasi
		Belum optimalnya drainase daerah	Belum ada masterplan drainase kecuali di Martapura
			Belum terkoneksi drainase dengan sungai
			Kebiasaan membuang sampah di jaringan drainase
		Penataan bangunan dan gedung belum optimal	Integrasi dalam pengajuan IMB antar OPD
			Layanan SIMBG masih belum andal

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Bangunan area perkantoran masih belum ramah difabel
			Pengendalian bangunan belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan air minum dan air limbah	Data penerima layanan air minum belum aktual dan terkini
			Akses air baku sesuai standar aman di beberapa daerah sulit
			Kelembagaan masyarakat pengelola air minum kurang optimal
			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) kurang diminati
			Embung komunal sebagai perlindungan mata air kondisinya kering pada saat musim kemarau
			Belum optimalnya sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
		Meningkatnya alih fungsi lahan	Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan
			Masih adanya pelanggaran penataan ruang
			Belum adanya peta lahan sawah dilindungi
			Data lahan sawah dilindungi dari pusat tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan daerah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kurangnya akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan	Beberapa kawasan permukiman belum memenuhi standar
			Masih adanya permukiman dan perumahan yang belum terfasilitasi PSU
			Tingginya <i>backlog</i> permukiman
			Penanganan fisik atas rumah layak huni memerlukan intervensi OPD lain
			Data RTLH belum terkini
			Kerancuan pembagian kewenangan antara PU dan PKP dalam intervensi rumah tidak layak huni
		Masih adanya kawasan kumuh	Belum tersedia lahan untuk proses relokasi
			Data kawasan kumuh belum terkini

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Adanya penolakan perihal penertiban kawasan permukiman
		Penyelenggaraan PSU masih belum optimal	Pendanaan bagi optimalisasi PJU
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Sarana prasarana tantribum kurang memadai (transportasi patroli)
			Aparatur PPNS kurang memadai (PPNS cuma 1 orang)
			Minimnya kompetensi aparaturnya penegak peraturan daerah
			Belum optimalnya peran satlinmas di lingkungan desa
			Data trantib belum terkonsolidasi di seluruh kecamatan
			Kurangnya pemahaman perkara dari masyarakat
			Koordinasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan tantribum belum optimal
			Tingginya pelanggaran atas konsumsi minuman beralkohol
		Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
			Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penanganan bencana dan kebakaran
			Belum meratanya cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran
			Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
			Masih rendahnya antisipasi kebencanaan akibat perubahan musim/iklim
			Rekomendasi atas mitigasi bencana belum ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD terkait
			Permasalahan banjir akibat berkurangnya serapan di beberapa wilayah

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Cakupan sarana mitigasi bencana masih rendah (tanda dan rambu bencana)
			Praktik buka lahan yang menyebabkan karhutla masih terjadi
			Belum ada alat pemadam sumbut untuk lahan gambut
			Belum seluruh kecamatan memiliki destana
			Pemanfaatan hasil kajian kebencanaan belum optimal
			Ketahanan bencana keluarga belum optimal
			Kecamatan Tangguh Bencana belum optimal
			Sistem peringatan diri (Early Warning System) belum menyeluruh dan terbatas bencana banjir
		Belum optimalnya pemadaman kebakaran dan penyelamatan daerah	Cakupan pelayanan pemadaman kebakaran masih terbatas
			Pembangunan sektor masih menunggu tindak lanjut dari OPD terkait
			Akses jalan sulit di daerah-daerah tertentu untuk memadamkan kebakaran
			Aparatur dan perlengkapan kebakaran masih terpusat di wilayah perkotaan
			Ketidaktahuan masyarakat atas layanan kebakaran
			Barisan Pemadam Kebakaran belum berbadan hukum
			Infrastruktur pemadam kebakaran sudah tidak berfungsi
			Inspeksi proteksi kebakaran belum optimal
6	Sosial	Belum optimalnya kesejahteraan kelompok rentan	Bantuan sosial pada kelompok rentan masih perlu ditingkatkan
			Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial, dll. masih perlu ditingkatkan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Pengelolaan dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya perlindungan sosial
			Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah singgah/penampungan
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Produktivitas angkatan kerja daerah belum optimal	Kesesuaian kompetensi dengan permintaan pasar belum memadai
			Belum semua perusahaan memiliki RTK mikro
			Jaringan pemasaran tenaga kerja belum memadai
			Kompetensi tenaga kerja belum memadai
			Perselisihan hubungan industrial
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu dioptimalkan	Masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Indeks ketimpangan gender 0,530)
			Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak
			Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
			Masih adanya pernikahan dini/anak
9	Pangan	Ketersediaan pangan masih perlu ditingkatkan	Stok cadangan pangan perlu peningkatan (masih di dalam volume minimal)
			Lumbung pangan masih belum memadai
			Belum meratanya akses air baku
			Menurunnya produksi dan produktivitas hasil pertanian akibat alih fungsi lahan, serangan hama, perubahan iklim, dan bencana
		Keterjangkauan pangan belum optimal	Optimalisasi fungsi lumbung pangan
			Desa rawan pangan perlu diturunkan
			Beberapa komoditas masih tergantung daerah lain

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Pemanfaatan dan keamanan pangan belum optimal	Sering terjadi kekurangan pasokan karena cuaca yang berpengaruh ke kapal.
			Peningkatan diversifikasi pangan lokal belum memadai
			Peningkatan konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan belum memadai
			Penurunan pangan yang memiliki kandungan kimia di atas ambang batas (pangan segar asal tumbuhan, hewan dan ikan) masih perlu ditingkatkan
10	Pertanahan	Pengelolaan aset pertanahan daerah masih belum optimal	Masih adanya konflik sengketa pertanahan
			Dokumen kepemilikan tanah masih banyak yang tumpang tindih
			Tidak ada batas patok tanah yang jelas
			Sebagian tanah aset kabupaten berada di wilayah hutan
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal	Kurangnya upaya pengelolaan keanekaragaman hayati
			Belum optimalnya perlindungan kerusakan lingkungan
			Belum optimalnya pengelolaan sanitasi lingkungan
			Pengawasan atas aktivitas industri berdampak terhadap lingkungan hidup masih lemah
			Kewenangan penindakan pelanggaran lingkungan hidup masih rancu
		Belum meratanya ketersediaan energi baru terbarukan	Penerapan energi baru terbarukan belum familier
			Belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk sumber energi baru
		Implementasi aksi penurunan emisi GRK belum optimal	Pembentukan komunitas iklim belum maksimal
			Pengelolaan limbah gas buang belum optimal
		Pengelolaan sampah belum optimal	Pengelolaan sampah baru sampai 50%
			Sampah kiriman dari wilayah lain

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Unit pengelolaan sampah dalam kondisi kurang optimal
			Pelayanan sampah belum semua kecamatan
			TPS 3R terkonsentrasi di wilayah perkotaan
			Peran bank sampah belum optimal
		Penurunan kualitas dan kuantitas air	Adanya keramba ikan ilegal
			Banyaknya alih fungsi lahan permukiman
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelayanan publik pencatatan sipil	Jangkauan pelayanan kependudukan belum dapat diakses secara mudah karena kondisi geografis
			Literasi digital masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan masih rendah
			Belum optimal sarana dan prasarana pendukung pencatatan sipil
		Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan sipil
			Belum adanya regulasi yang mewajibkan kepemilikan Kartu Identitas Anak
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan informasi kependudukan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem informasi
			Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah
			Belum optimalnya implementasi standarisasi pengelolaan informasi
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan penganggaran desa
			Belum optimalnya pengelolaan potensi lokal desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk
			Belum optimalnya pelaksanaan kampung KB
15	Perhubungan	Masih tingginya kasus kecelakaan dan kemacetan	Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas
			Masih lemahnya pengawasan dan penindakan adanya kendaraan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			dengan <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL)
			Belum adanya skema reaksi cepat dalam penguraian kemacetan berbasis teknologi informasi
			Belum ada Area Traffic Control System
			Masih adanya ruas jalan yang belum dilengkapi fasilitas keselamatan
			Belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi
		Belum optimalnya pengelolaan transportasi air daerah	Sebagian besar kapal air yang beroperasi tidak sesuai standar
			Masih rendahnya ketaatan keselamatan pelayaran
			Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas awak kapal
			Masih adanya angkutan air yang tidak terdaftar
			Masih rendahnya kesadaran operator angkutan air untuk melakukan pemeriksaan kendaraan
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya pengelolaan informasi publik	Literasi digital masyarakat terhadap pelayanan publik digital masih rendah
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah desa (blank spot)
			Belum ada data spesifik mengenai blank spot di desa-desa
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan pengaduan
			Belum memiliki peta rencana dan arsitektur SPBE
			Belum optimalnya pemanfaatan website kecamatan oleh masyarakat
		Belum optimalnya penyelenggaraan aplikasi informasi daerah	Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas programmer
			Belum terintegrasinya aplikasi antar OPD dalam satu layanan aplikasi
			Belum optimalnya skema KPBU dalam pembiayaan pemerintahan digital
17			Produksi usaha mikro khususnya usaha non-pertanian belum memadai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Produktivitas omzet usaha mikro belum optimal	Kualitas produk usaha mikro belum memadai
			Kapasitas pemasaran produk usaha mikro belum optimal
			Memiliki legalitas usaha mikro perlu ditingkatkan
			Beberapa usaha mikro sudah memisahkan pencatatan laporan keuangan usahanya dengan rumah tangga
			Kurangnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro
		Volume usaha koperasi belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
			Regenerasi pengurus koperasi tidak ada
			Kurangnya pengawasan dan pendampingan
			Metode pengelolaan koperasi masih konvensional/ kewirausahaan koperasi tidak memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Masih tingginya dominasi koperasi simpan pinjam
			Digitalisasi koperasi masih kurang
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi belum optimal	Realisasi investasi sektor tersier masih rendah
			Intensifikasi investasi sektor primer dan sekunder belum optimal
			Kondusivitas iklim investasi perlu ditingkatkan
			Identifikasi potensi investasi belum optimal
			Promosi investasi belum memadai
			Kualitas penyusunan LKPM oleh pelaku usaha belum optimal
			Kualitas pelayanan perizinan perlu ditingkatkan
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda	Terbatasnya partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		dalam pembangunan	Belum optimalnya upaya pembinaan kepada pemuda
		Belum optimalnya prestasi dan pembinaan olahraga	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga
			Terbatasnya jumlah dan kompetensi pelatih
			Kurangnya dukungan sekolah dan tidak adanya sekolah khusus olahraga bagi para atlet
			Masih terbatasnya kompetisi olahraga yang diikuti
20	Statistik	Penyelenggaraan statistik sektoral daerah masih belum optimal	Belum adanya standar data yang seragam dari masing-masing perangkat daerah
21	Persandian	Pengamanan informasi masih belum optimal	Keterbatasan sumber daya persandian
22	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan daerah belum optimal	Minimnya sarana dan prasarana kebudayaan
			Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan
			Belum optimalnya pengembangan wisata budaya dan sejarah
23	Perpustakaan	Belum optimalnya literasi masyarakat	Sarana dan prasarana perpustakaan perlu ditingkatkan
			Terbatasnya layanan perpustakaan keliling
			Jam Buka perpustakaan bersamaan dengan waktu sekolah
			Koleksi buku digital dan non digital belum memenuhi standar
			Belum optimalnya peran seluruh stakeholder untuk meningkatkan minat baca
			Terbatasnya pustakawan
24	Kearsipan	Belum optimalnya layanan kearsipan	Tata kelola urusan kearsipan belum optimal
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan budidaya belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia perikanan belum memadai
			Kualitas sarana dan prasarana perikanan belum memadai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Pengembangan metode budidaya perikanan masih semi intensif/ semi tradisional
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Produksi perikanan tangkap belum optimal	Kapasitas SDM nelayan kurang memadai
			Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai
			Cara menangkap ikan masih tradisional
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Pengolahan dan pemasaran belum optimal	Pemasaran ke ritel modern terbatas
			Belum ada pabrik kemasan
		Kualitas produk perikanan belum optimal	Beberapa pembudidaya ikan sudah memiliki sertifikasi budidaya ikan yang baik dan cara pembuatan pakan yang baik
			Sertifikasi memiliki keterbatasan biaya
		Illegal fishing masih terjadi	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumber daya perikanan
			Pembentukan kelompok pengawas perikanan belum memadai
			Pelaku penyetruman di desa masih banyak
26	Pariwisata	Kunjungan wisatawan belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi belum memadai
			Pemasaran wisata perlu ditingkatkan
			Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
27	Pertanian	Produktivitas pertanian belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
			Kapasitas penyuluh pertanian masih belum memadai
			Sarana pertanian belum memadai
			Prasarana pertanian belum memadai
			Metode budidaya pertanian secara umum masih konvensional

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Kurangnya akses terhadap bantuan permodalan
			Bencana pertanian (pasang surut dan banjir rob) / dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
		Produksi hasil ternak belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia peternak belum optimal
			Sarana peternakan belum memadai
			Prasarana peternakan belum memadai
			Metode budidaya peternakan masih konvensional
			Akses terhadap bantuan permodalan masih belum memadai
		Populasi ternak masih belum sesuai target (sapi dan itik)	Tingkat kelahiran ternak masih rendah
			Kesehatan ternak belum memadai
			Tingkat kematian ternak masih dalam moderat
28	Perdagangan	Kapasitas pemasaran produk ekspor masih rendah	Kontinuitas produksi produk ekspor belum memadai
			Standarisasi ekspor kurang memadai
			Jaringan pemasaran ekspor belum optimal (kerjasama dengan indonesia export chanel)
		Stabilitas harga barang perdagangan belum optimal	Kurang terkendalinya stok bahan pokok dan penting
			Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional belum memadai
			Perlindungan konsumen belum memadai
			Belum memiliki pusat distribusi regional
29	Perindustrian	Kapasitas dan kualitas produksi IKM belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai
			Kualitas sarana dan prasarana IKM belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
			Standarisasi sertifikasi produk belum memadai

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
30	Transmigrasi	Pengembangan kawasan transmigrasi	Pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi belum optimal
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
31	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Belum optimalnya sistem akuntabilitas daerah
			Belum optimalnya pelayanan publik
32	Sekretariat DPRD	Tantangan dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD	Tantangan dalam memfasilitasi agenda anggota DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
33	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya perencanaan daerah yang berorientasi hasil	Belum optimalnya kualitas data kinerja
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
34	Keuangan	Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah serta validitas pendataan obyek pajak
			Belum optimalnya penyampaian data dan pemahaman anggaran oleh OPD
			Keterkaitan perencanaan dan penganggaran belum optimal
			Belum optimalnya pendataan dan pengelolaan aset daerah akibat keterbatasan sumber daya manusia
			Terdapat kesalahan dalam penginputan kode rekening
			Masih rendahnya pemahaman pelaporan keuangan
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengelolaan kepegawaian daerah belum berlandaskan sistem merit yang optimal	Kualifikasi dan kompetensi ASN belum sesuai dengan standar yang berlaku
			Pengembangan kompetensi pada ASN tidak selalu dilaporkan
			E-kinerja banyak yang belum berkontribusi terhadap IPA
			Masih rendahnya Indeks Sistem Merit nilai ketercapaian
36	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam proses pembangunan daerah

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		pengembangan daerah	Belum optimalnya kapasitas tim litbang daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
37	Inspektorat Daerah	Pengawasan internal masih belum optimal	Kualitas pengendalian dan integritas menurut penilaian internal belum optimal
			Akuntabilitas kinerja belum optimal
			Kapasitas dan kapabilitas APIP belum optimal
			Manajemen risiko belum terkelola dengan optimal
			Pencegahan dan pendidikan anti korupsi masih belum optimal
			Masih terjadinya praktik pemberian saat pemilu
Unsur Kewilayahan			
38	Kecamatan	Pelayanan masyarakat belum optimal	Perjanjian kinerja antar unit belum jelas akibat tugas dan fungsi serta struktur tidak seragam antar kecamatan
			Penerapan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi belum optimal di level kecamatan
			Pemahaman IT dari sumber daya manusia di desa masih kurang
			Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa belum optimal
			Kantor kecamatan belum ramah disabilitas
			Adanya <i>bypass</i> kinerja dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa
Unsur Pemerintahan Umum			
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Adanya potensi konflik sosial horizontal	Koordinasi Forkopimda kurang optimal
			Peran FKUB dalam pencegahan konflik belum optimal
			Data potensi konflik belum sinkron dengan data Polres
			Aktivitas penelitian di daerah belum terpetakan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Beberapa ormas belum terdata dan berbadan hukum
			Masih ada beberapa aksi unjuk rasa
			Pembinaan karang taruna belum optimal
		Tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Deteksi dini belum dilaksanakan
			Belum optimalnya peran kampung anti narkoba dalam pencegahan peredaran narkoba
			Kemudahan akses digital terhadap narkoba
			Sosialisasi pencegahan narkoba masih belum optimal
			Keakuratan data pendidikan politik (data pendidikan politik tidak mencerminkan pendidikan politik)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.6.3 Isu Strategis

Isu strategis jangka menengah Kabupaten Banjar disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkembang. Dalam proses perumusannya, sejumlah aspek menjadi acuan utama, termasuk isu-isu internasional, isu strategis nasional jangka menengah, isu strategis provinsi jangka menengah, isu strategis kabupaten jangka panjang, perencanaan tata ruang dan wilayah, serta hasil kajian lingkungan hidup strategis. Berikut ini adalah uraian dari setiap aspek yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan isu strategis jangka menengah Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029.

2.6.3.1 Isu Internasional

Dalam merumuskan isu strategis global untuk perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjar, digunakan acuan dari Roland Berger Trend Compendium 2050 yang dirilis oleh The Roland Berger Institute pada tahun 2023. Publikasi ini mengidentifikasi berbagai tren utama yang diperkirakan akan memengaruhi perkembangan dunia hingga tahun 2050.

Roland Berger mengidentifikasi enam megatren yang akan membentuk masa depan global. Keenam megatren ini diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang kemudian menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Berikut adalah penjabaran dari keenam megatren yang dirumuskan oleh The Roland Berger Institute:

1. Kemasyarakatan (People & Society)

Megatren pertama berkaitan dengan aspek masyarakat, mencakup isu-isu seperti demografi, migrasi, pendidikan, tenaga kerja, serta nilai-nilai kemanusiaan. Roland Berger menyoroti bahwa aspek ini menjadi pusat megatren global, karena dipengaruhi dan juga memengaruhi tren lainnya. Tantangan utama dalam kategori ini adalah perlambatan pertumbuhan populasi akibat menurunnya tingkat kesuburan, serta mayoritas dari total 9,7 miliar penduduk dunia diproyeksikan akan tinggal di negara-negara berkembang. Selain itu, tingkat pendidikan secara global diperkirakan akan meningkat, tetapi masih terdapat tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di berbagai wilayah.

2. Kesehatan dan Pengasuhan (Health & Care)

Megatren berikutnya mencakup aspek kesehatan dan perawatan, dengan fokus pada isu-isu seperti tantangan kesehatan global, layanan kesehatan masa depan, dan sistem pengasuhan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama antara negara maju dan berkembang. Perkembangan teknologi medis serta metode pengobatan menjadi faktor penting dalam transformasi sektor kesehatan. Selain itu, meningkatnya jumlah populasi lansia juga menjadi tantangan tersendiri dalam kebutuhan layanan pengasuhan di masa depan.

3. Lingkungan dan Sumber Daya (Environment & Resources)

Megatren ini mencakup isu-isu utama terkait lingkungan dan sumber daya alam, seperti perubahan iklim, polusi, keanekaragaman hayati, serta ketersediaan bahan mentah. Roland Berger menekankan bahwa membatasi peningkatan suhu global dalam kisaran 1,5-2 derajat Celsius sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu,

konservasi biodiversitas menjadi prioritas guna melindungi spesies yang terancam punah. Jika tidak ada intervensi signifikan, energi dunia pada tahun 2050 masih akan didominasi oleh bahan bakar fosil, serta ketergantungan terhadap sumber daya mentah tertentu akan semakin meningkat.

4. Teknologi dan Inovasi (Technology & Innovation)

Kemajuan teknologi dan inovasi menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk masa depan dunia. Isu-isu utama dalam kategori ini mencakup nilai teknologi, teknologi unggulan, serta hubungan antara manusia dan mesin. Perkembangan pesat teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi global. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan hubungan antara manusia dan mesin untuk meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Diperkirakan, nilai pasar sektor teknologi akan mencapai 9,5 triliun USD pada tahun 2030. Beberapa industri yang akan mengalami pertumbuhan pesat meliputi komunikasi 5G, teknologi blockchain, dan robotika. Sementara itu, teknologi ramah lingkungan yang berpotensi berkembang pesat antara lain hidrogen hijau, bahan bakar nabati, serta kendaraan listrik. Teknologi lainnya, seperti nanoteknologi dan pengeditan DNA, juga diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan.

5. Ekonomi dan Bisnis (Economics & Business)

Dalam aspek ekonomi dan bisnis, terdapat beberapa isu strategis, seperti rantai pasok global, pergeseran kekuatan ekonomi, transformasi energi, serta tantangan utang. Dunia saat ini sedang mengalami restrukturisasi rantai pasok global, disertai dengan pergeseran kekuatan ekonomi dan transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan. Tantangan ekonomi semakin diperberat oleh tingginya tingkat utang di berbagai negara akibat dampak pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik, seperti perang di Ukraina. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global yang perlu diantisipasi ke depan.

6. Politik dan Pemerintahan (Politics & Government)

Megatren terakhir berfokus pada dinamika politik dan pemerintahan global. Isu-isu utama dalam aspek ini meliputi risiko global, geopolitik, serta masa depan demokrasi. Tren geopolitik dunia menunjukkan kecenderungan menuju peningkatan ketegangan, dengan munculnya gerakan otokratis yang berpotensi mengancam tatanan demokrasi global. Selain itu, perdagangan internasional semakin mengalami fragmentasi, dengan negara-negara membentuk blok ekonomi yang lebih eksklusif, sehingga memperkuat polarisasi dalam hubungan ekonomi global.

Dengan memahami keenam megatren ini, perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjar dapat disusun secara lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan serta peluang yang akan muncul dalam beberapa dekade mendatang.

2.6.3.2 Isu Nasional

Isu strategis pada level nasional tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMN 2025-2029 berfokus pada penguatan fondasi pembangunan nasional tahap pertama yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Hasil analisis terhadap isu strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi beberapa tantangan pembangunan sebagai berikut:

- **Rendahnya produktivitas**, dimana tingkat produktivitas tenaga kerja nasional relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja negara-negara lain di Dunia. Beberapa penyebab relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja nasional diantaranya adalah kualitas SDM yang masih tertinggal terlebih pada perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, kapasitas pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.
- **Rendahnya kualitas sumber daya manusia**, dimana hal ini dicerminkan oleh capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia yang

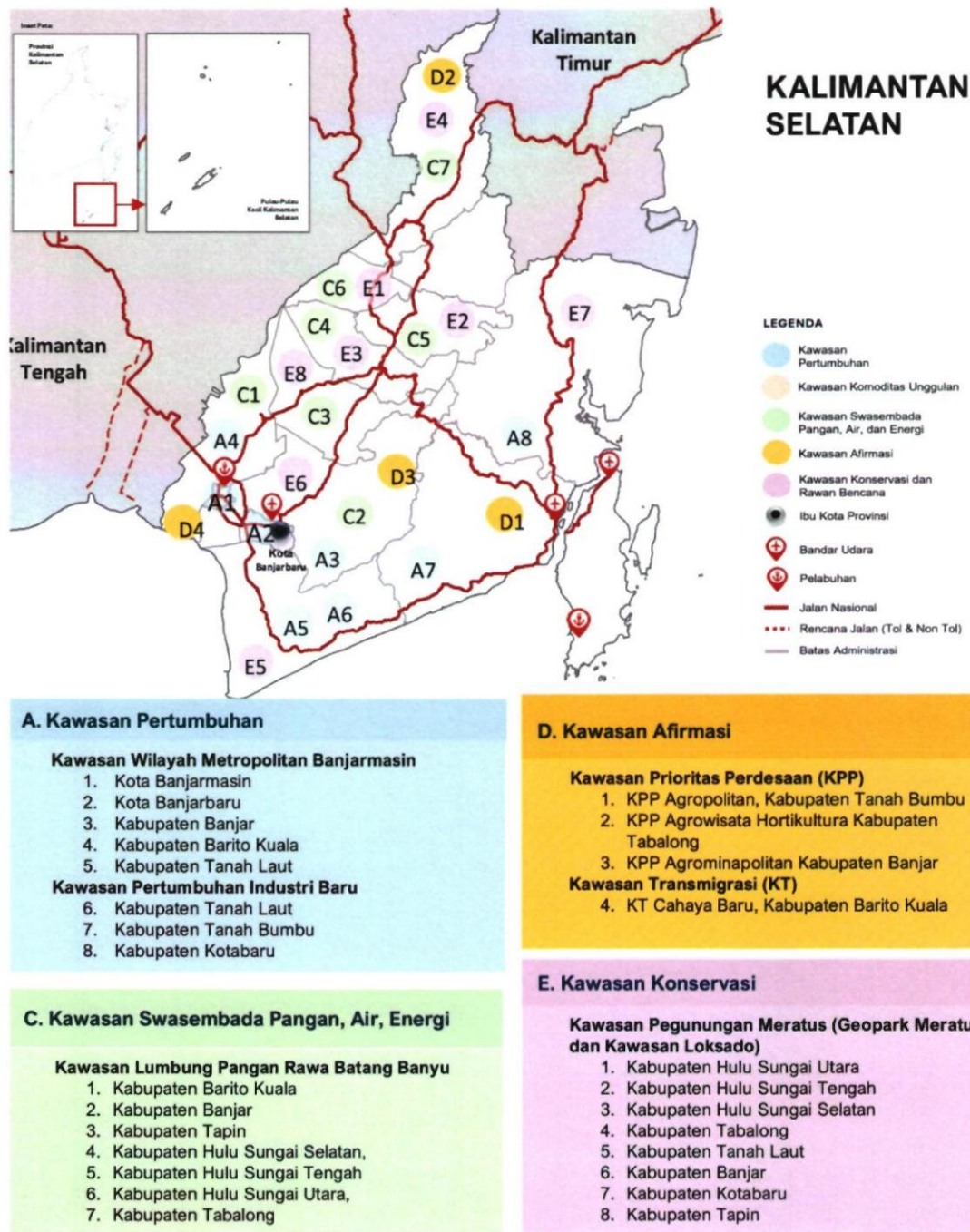
relatif masih tertinggal dibandingkan dengan capaian rata-rata nilai siswa dari negara-negara anggota OECD.

- **Pergeseran struktur kelas masyarakat**, dimana terjadi tren penurunan masyarakat kelas menengah menuju masyarakat calon kelas menengah hingga masyarakat rentan miskin. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka pemutusan kerja nasional yang salah satunya disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat.
- **Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif**, dimana terbatasnya ketersediaan kebutuhan hidup seperti energi, air, dan pangan disaat meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Hal ini membawa tantangan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi jumlah penduduk yang meningkat.
- **Krisis lingkungan**, dimana Dunia termasuk Indonesia dihadapkan oleh fenomena *triple planetary crisis* atau tiga krisis lingkungan yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Hal ini mendorong diperlukannya upaya untuk menggeser aktivitas perekonomian yang rendah emisi dan ramah lingkungan.
- **Geopolitik dan geoekonomi**, dimana kondisi politik dan ekonomi global yang semakin tidak menentu menjadi salah satu tantangan besar bagi pembangunan Indonesia. Perkembangan ini meliputi meningkatnya persaingan antar kekuatan adidaya global, kemunculan berbagai kekuatan baru yang memengaruhi kondisi kawasan dan tatanan global, dan bagaimana Indonesia menyikapi berbagai dinamika tersebut.
- **Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan**, dimana salah satu isu krusialnya adalah pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Selain itu, terdapat permasalahan tata kelola data yang juga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya.

Dengan memahami dan mengatasi isu-isu strategis ini, RPJMN 2025-2029 dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan nasional jangka

panjang menuju visi Indonesia 2045. Sehingga, pembangunan yang dilakukan di level daerah, dalam hal ini pembangunan jangka menengah daerah melalui RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dapat selaras dan efektif dalam merespons berbagai tantangan yang ada di level nasional.

Selain isu nasional yang menjadi tantangan pembangunan di level nasional sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN, perencanaan pembangunan jangka menengah nasional juga memiliki amanat pembangunan kewilayahan yang perlu diperhatikan di level daerah dalam rangka peningkatan sinergi pembangunan daerah. Arah pembangunan wilayah jangka menengah nasional merupakan amanat pembangunan nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan perencanaan jangka menengah daerah. Berikut merupakan arah pembangunan wilayah bagi Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dan Kabupaten Banjar secara khusus yang termuat dalam Lampiran IV RPJMN Tahun 2025–2029.



Gambar 2. 57 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lampiran IV RPJMD Tahun 2025-2029

Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam pembangunan jangka menengah kedepan, pemerintah pusat merencanakan beberapa pembangunan kewilayahan dimana Kabupaten Banjar menjadi bagiannya. Pertama, pemerintah pusat merencanakan pembangunan Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin sebagai salah satu pembangunan kewilayahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar bersama dengan

Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut menjadi daerah-daerah yang akan membentuk kawasan metropolitan tersebut. Pembangunan integratif antar daerah otonom ini diperlukan untuk memastikan pembangunan Kawasan Wilayah Metropolitan yang sinergis. Fokus intervensi pada Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin diantaranya:

1. Perwujudan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya yang difokuskan pada layanan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah swadaya, serta penanganan permukiman kumuh.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan.
3. Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh.
4. Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan *Transit Oriented Development (TOD)*.
5. Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu melalui pembentukan kelembagaan (atau form) pengelola WM Banjarmasin dan penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan.
6. Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan.

Kabupaten Banjar termasuk sebagai salah satu daerah yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu yang akan mendorong Kabupaten Banjar sebagai daerah swasembada pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim. Fokus intervensi pada Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu diantaranya:

1. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

2. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi).
3. Penguatan pascapanen pangan nabati.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan.
5. Pengembangan pengairan dan irigasi.
6. Peningkatan ketersediaan pangan.

Kabupaten Banjar direncanakan menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) yang terfokus pada pengembangan Agrominapolitan yang mendorong pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, terutama intervensi yang akan dilakukan diantaranya:

1. Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
2. Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi).
3. Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal.
4. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya).
5. Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.

Terakhir, Kabupaten Banjar termasuk dalam kawasan bentang alam konservasi yakni Kawasan Pegunungan Meratus (*Geopark Meratus*). Pelestarian lingkungan hidup dalam bentuk dukungan kebijakan di level daerah menjadi penting untuk memastikan pembangunan kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Banjar dapat dilakukan secara optimal, dengan fokus intervensi berupa:

1. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark* di *Geopark Geosite Meratus* dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja).
2. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

2.6.3.3 Isu Strategis Regional Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Selatan

Proses analisis isu-isu strategis di tingkat regional Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan langkah krusial dalam menyusun keterkaitan antara permasalahan dan agenda pembangunan di Kabupaten Banjar. Keterkaitan ini berperan sebagai modal utama dalam memperkuat peran strategis Kabupaten Banjar dalam pembangunan wilayah.

Dalam Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Pulau Kalimantan menghadapi sejumlah isu wilayah, di antaranya:

- Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.
- Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.
- Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
- Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara.
- Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur).
- Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.

- Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.

Menanggapi berbagai isu strategis tersebut, diperlukan respons kebijakan yang tepat untuk mewujudkan visi pembangunan Pulau Kalimantan dalam RPJPN Tahun 2025–2045, yaitu sebagai **“Superhub Ekonomi Nusantara”**, dimana hal ini juga merupakan tema wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Tahun 2025–2029. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan pusat aglomerasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan guna menciptakan pemerataan pembangunan di kawasan Timur Indonesia.

Pulau Kalimantan diproyeksikan akan menyumbang 9,6 persen terhadap perekonomian nasional pada tahun 2029. Dalam mendukung visi besar tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan berperan sebagai **“Gerbang Logistik Kalimantan”**. Untuk mewujudkan peran strategis ini, diperlukan langkah-langkah intervensi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan konektivitas, penguatan industri berbasis SDA, serta peningkatan kualitas SDM dan daya saing ekonomi daerah. Target kinerja pembangunan makro indikatif dan highlight indikasi intervensi pembangunan bagi wilayah Pulau Kalimantan:

Tabel 2. 59 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2025-2029

Tahun	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025	7,3 (Rata-rata 2025–2029)	8,6	114,7	4,23–4,58	4,24–5,24
2029	8,2 (2029)	9,0	167,5	3,45–4,25	2,52–3,52

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Selain sasaran pembangunan wilayah yang ditetapkan bagi Pulau Kalimantan, dokumen RPJMN juga menetapkan target kinerja indikator makro secara khusus bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan target ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan wilayah

yang sudah ditetapkan di atas. Berikut merupakan target kinerja makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029:

Tabel 2. 60 Target Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Indikator	2025	2029
Rata-rata LPE (%)	7,1 (2025–2029)	
LPE (%)	-	8,1
PDRB per kapita (Rp. Juta)	72,7	106,3
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,3	1,3
Tingkat Kemiskinan (%)	3,44–3,94	1,64–2,64
Rasio Gini	0,307–0,311	0,274–0,278
Indeks Modal Manusia	0,57	0,61
Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ² Equivalen)	75,97	80,99
IKLH Daerah	72,32	73,10
TPT (%)	3,86–4,25	3,29–3,97

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Provinsi Kalimantan Selatan dalam dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 telah mengidentifikasi sejumlah sembilan isu strategis pembangunan jangka panjang. Berbagai isu ini merupakan permasalahan yang penting untuk direspons oleh pemerintah daerah karena sifatnya yang strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah secara umum. Berikut merupakan isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal.
2. Pengembangan ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sementara sektor lainnya belum dikembangkan secara optimal.
3. Hilirisasi industri dan industri non ekstraktif belum dikembangkan sebagai sektor unggul di masa datang, terutama untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi nusantara.
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.
5. Kehidupan sosial masyarakat serta budaya lokal sebagai modal sosial perlu diperkuat dan dilestarikan.

6. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota.
7. Belum optimalnya pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan resilien terhadap bencana.
8. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi.
9. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor.

Sedangkan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi delapan isu strategis. Berikut merupakan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029:

1. Daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah;
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian, serta konektivitas yang masih terbatas;
3. Fondasi perekonomian berbasis SDA terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat;
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan belum dilakukan secara optimal; dan
5. Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal.

2.6.3.4 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan isu strategis jangka menengah Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029, diperlukan kajian mendalam terhadap isu-isu strategis jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2025-2045. Kajian ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan antara kebijakan jangka panjang dan jangka menengah. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjar

dirumuskan melalui analisis isu global, nasional, dan kewilayahan, evaluasi terhadap RPJPD sebelumnya, diskusi dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, serta kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. Berikut ini merupakan isu-isu strategis jangka panjang Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2045:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Sebagai aktor utama dalam pembangunan, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek yang krusial dan membutuhkan intervensi dari pemerintah. Kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas SDM yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Aspek ini juga memiliki dampak terhadap kualitas tenaga kerja dan kondisi sosial masyarakat. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur perkembangan SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama 13 tahun terakhir (2010-2023), Kabupaten Banjar mencatat peningkatan IPM sebesar 9,55 poin, dari 64,46 pada tahun 2010 menjadi 74,01 pada tahun 2023. Namun, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (74,66) maupun nasional (74,39). Beberapa komponen IPM yang masih perlu ditingkatkan mencakup Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Angka Harapan Hidup (AHH).

2. Perekonomian Inklusif Berbasis Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata

Pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu fokus strategis Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2045. Konsep ekonomi inklusif, sebagaimana didefinisikan oleh World Economic Forum (WEF), bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Ekonomi inklusif memiliki tiga pilar utama, yaitu: pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan peningkatan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Kabupaten Banjar berencana untuk mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai basis utama pembangunan ekonomi inklusif.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banjar mencerminkan kualitas air, udara, serta tutupan lahan yang masih relatif baik dan dapat mendukung kehidupan masyarakat. Namun, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, diperlukan pengelolaan yang efektif guna mencegah degradasi ekosistem. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan lingkungan dapat diimplementasikan dengan baik. Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Banjar adalah kebakaran hutan dan lahan, yang sering terjadi saat musim kemarau. Kebakaran ini menyebabkan menurunnya kualitas udara akibat asap serta mempercepat degradasi hutan. Selain itu, alih fungsi lahan dari pertanian dan perkebunan menjadi kawasan terbangun juga berkontribusi terhadap penurunan produktivitas lahan. Oleh karena itu, regulasi tata kelola lingkungan dan perizinan perlu diperkuat untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan lingkungan.

4. Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah berperan sebagai pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur yang baik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai kawasan di Kabupaten Banjar masih membutuhkan peningkatan, rehabilitasi, serta pembangunan baru guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, penyediaan sarana transportasi publik, terutama angkutan massal, juga menjadi perhatian utama. Penurunan minat masyarakat terhadap transportasi umum telah menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan pribadi, yang berimplikasi pada kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berbasis Digital

Kabupaten Banjar telah menunjukkan peningkatan dalam kinerja tata kelola pemerintahan selama pelaksanaan RPJPD sebelumnya, yang tercermin dari peningkatan skor reformasi birokrasi. Namun, beberapa

aspek masih perlu diperbaiki, di antaranya: peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penerapan sistem merit guna meningkatkan kompetensi serta kinerja pegawai, penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk memastikan efektivitas manajemen organisasi, serta digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi layanan publik. Pemerintah Kabupaten Banjar berencana untuk memperkuat implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Digitalisasi ini tidak hanya merupakan kebijakan nasional, tetapi juga menjadi solusi efektif untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan responsif.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis jangka panjang tersebut, Kabupaten Banjar dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan selaras dengan visi pembangunan daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

2.6.3.5 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Kajian lingkungan hidup strategis bertujuan untuk memastikan bahwa pada setiap dokumen rencana pembangunan yang disusun di daerah mengikutsertakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dokumen perencanaan yang telah memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan arah pembangunan yang ideal dan seimbang antara aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan juga tata kelola di Kabupaten Banjar. Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan isu strategis yang relevan di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, perumusan isu di Kabupaten Banjar diharapkan telah memuat isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkesesuaian dengan kondisi saat ini.

Melalui hasil identifikasi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Banjar dapat diketahui bahwa dari total 205

indikator TPB, hanya terdapat 132 indikator TPB yang mencapai target. Proporsi capaian indikator menurut masing-masing kategori disajikan sebagai berikut ini:

- Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 132 indikator atau 64,39 persen;
- Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional sebanyak 44 indikator atau 21,46 persen;
- Belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 4 indikator atau 1,95 persen; dan
- Tidak ada data sebanyak 25 indikator atau 12,20 persen.

Lebih lanjut lagi, jika dikelompokkan dalam masing-masing pilar TPB, capaian setiap indikator pada setiap kategori disajikan pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2. 61 Capaian TPB Berdasarkan Pilar di Kabupaten Banjar

Pilar	Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data (N/A)
Pilar sosial	65,98%	61,36%	25%	20%
Pilar ekonomi	55,55%	20,45%	75%	48%
Pilar Lingkungan	62,76%	15,91%	0%	24%
Pilar Hukum dan Tata Kelola	85%	2,27%	0%	8%

Sumber: KLHS Rantek RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Melalui proses hasil penjaringan isu pada kajian lingkungan hidup strategis juga dihasilkan isu-isu strategis terkait pembangunan di Kabupaten Banjar. Terdapat 12 isu strategis yang dikelompokkan sebagai isu prioritas di Kabupaten Banjar. 12 isu strategis tersebut yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Berikut ini merupakan isu strategis dalam KLHS Rantek RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

1. Meningkatnya alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian (sawah) menjadi lahan non pertanian;
2. Meningkatnya kejadian bencana hidro meteorologi, terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan;

3. Meningkatnya pencemaran air;
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. Kondisi TPA Cahaya Kencana yang *over capacity*;
6. Meningkatnya kejadian gagal panen;
7. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba;
8. Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, terutama jaringan jalan, penerangan jalan umum, sistem drainase, sistem penyediaan air bersih, sistem sanitasi/air limbah;
9. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
11. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar; dan
12. Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB.

Dua belas isu strategis pada dokumen KLHS tersebut patut dijadikan pertimbangan terhadap perumusan dokumen rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2025-2029.

2.6.3.6 Telaah RTRW Kabupaten Banjar

Isu strategis Kabupaten Banjar yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu isu yang mencerminkan potensi serta isu yang menggambarkan berbagai permasalahan dalam pengembangan wilayah. Berdasarkan analisis keruangan, Kabupaten Banjar memiliki sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah, antara lain:

1. Kelimpahan sumber daya air, termasuk Bendungan Riam Kanan seluas 161.993 Ha serta beberapa sungai besar seperti Sungai Alalak, Sungai Riam Kanan, dan Sungai Riam Kiwa. Sumber daya air ini berpotensi

mendukung sektor pariwisata, pertanian, minapolitan, serta transportasi air di wilayah Kabupaten Banjar.

2. Ketersediaan hutan seluas 86.510 Ha yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, menjadi aset sumber daya alam yang bernilai bagi Kabupaten Banjar.
3. Potensi sumber daya mineral seperti batu bara, emas, dan batu mulia yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
4. Pengembangan industri kecil di berbagai wilayah, termasuk industri pengolahan batu mulia, penggosokan batu permata, serta kerajinan emas dan perak.
5. Dominasi sektor pertanian, terutama komoditas padi, yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan.
6. Penetapan Kabupaten Banjar sebagai bagian dari Kawasan Strategis Banjar Bakula yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
7. Kehadiran kawasan dengan pertumbuhan ekonomi pesat, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin seperti Gambut, Kertak Hanyar, dan Sungai Tabuk.
8. Posisi Kabupaten Banjar sebagai penghubung utama antarwilayah di Kalimantan Selatan, menjadikannya simpul utama dalam aktivitas ekonomi regional.
9. Potensi industri kecil dan menengah, meliputi:
 - Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan.
 - Industri Rubber Sheet Smoked (RSS) di beberapa kecamatan seperti Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron, dan Sungai Pinang.
 - Industri perbengkelan yang berkembang di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Astambul, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh.

Selain berbagai potensi, Kabupaten Banjar juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan wilayahnya, di antaranya:

1. Wilayah yang masih terisolasi akibat minimnya sarana dan prasarana, terutama di desa-desa terpencil dengan kondisi sosial ekonomi yang masih tertinggal.

2. Pertumbuhan penduduk di pedesaan yang tinggi menyebabkan permasalahan sosial ekonomi, termasuk ketimpangan distribusi penduduk serta keterbatasan lapangan kerja.
3. Kesenjangan antarwilayah dalam hal pertumbuhan dan pemerataan pembangunan akibat perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan geografis.
4. Konflik penggunaan lahan yang semakin meningkat, terutama alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, serta konversi kawasan lindung dan daerah resapan air menjadi lahan pertanian.
5. Pola penggunaan lahan yang tidak selaras dengan daya dukung lingkungan, seperti:
 - Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali.
 - Tumpang tindih antar sektor pembangunan.
 - Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - Terjadinya tanah terlantar, erosi, banjir, dan menurunnya produktivitas lahan.
 - Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian yang berdampak pada ketidakseimbangan ketahanan pangan.
6. Belum optimalnya jaringan transportasi, ditandai dengan belum tersedianya simpul-simpul transportasi di seluruh kecamatan.
7. Distribusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sehingga belum seluruh kecamatan dapat mengakomodasi arus investasi.
8. Keterbatasan akses terhadap energi yang menyebabkan ketimpangan distribusi sumber daya di berbagai kecamatan.
10. Pasokan air baku yang belum merata, terutama di daerah luar ibu kota kabupaten yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air irigasi dan air bersih.
11. Pemanfaatan kawasan pinggir sungai yang kurang tertata, menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan.
12. Penurunan luas area penghijauan di sepanjang tepi sungai akibat ekspansi lahan budidaya serta pencemaran air, yang berkontribusi pada degradasi kualitas lingkungan perairan. Untuk mengatasi hal ini,

telah dilakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian pencemaran.

13. Persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, termasuk:

- Erosi tanah pada musim hujan yang mengakibatkan sedimentasi dan pendangkalan sungai serta waduk.
- Keberadaan lahan kritis di sepanjang garis pantai dan di kawasan pertambangan yang dikelola dengan metode konvensional tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Tumpang tindih kebutuhan lahan untuk konservasi dan kebutuhan pembangunan, yang berimbas pada konversi lahan pertanian menjadi permukiman serta infrastruktur lainnya.

Dengan memahami berbagai potensi serta tantangan yang dihadapi, Kabupaten Banjar dapat menyusun kebijakan tata ruang yang lebih efektif guna mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.6.3.7 Isu Strategis Daerah

Dari permasalahan pembangunan daerah baik yang bersifat multisektor maupun sektoral menjadi bahan lebih lanjut dalam perumusan isu strategis daerah melalui pertimbangan urgensi (*urgency*), kegentingan (*seriousness*), dan pertumbuhan (*growth*). Berikut merupakan hasil rumusan dari isu strategis RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 yang disajikan melalui tabulasi silang berbagai isu yang relevan dalam pembangunan daerah Kabupaten Banjar::

Tabel 2. 62 Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				(Isu RPJMN)	(Isu RPJMD Provinsi)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Karakter masyarakat Banjar yang cukup religius berpotensi mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan toleran - Pembangunan kualitas SDM memiliki tren meningkat (IPM naik 2,74 poin atau tumbuh 3,78 persen)	- Penguatan SDM yang berkualitas dan berkarakter belum optimal - Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif - Belum optimalnya ketahanan sosial	- Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba - Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjar	- Demografi global - Urbanisasi dunia	- Rendahnya kualitas sumber daya manusia - Pergeseran struktur kelas masyarakat	Daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah	Penguatan SDM Unggul dan Berkarakter
						Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal
Kontribusi sektor pertanian dan perikanan lima tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 16,42 persen per tahun	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata - Belum optimalnya pengelolaan dan	- Perkembangan Teknologi - Konstelasi Perdagangan Global	- Rendahnya produktivitas - Geopolitik dan geoekonomi	Fondasi perekonomian berbasis SDA terbaru yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat	Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh dan Ramah Lingkungan

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				(Isu RPJMN)	(Isu RPJMD Provinsi)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata kunjungan wisata sepuluh tahun terakhir sebesar 3,8 juta per tahun	Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan belum optimal	- pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) - Meningkatnya kejadian gagal panen	- Persaingan Sumber Daya Alam - Geopolitik dan Geoekonomi			Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan serta Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
- IKLH Kabupaten Banjar sebesar 74,59 termasuk dalam kategori Baik - Daya dukung air Kabupaten Banjar seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan - Daya dukung pangan Kabupaten Banjar berstatus surplus	- Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup - Belum optimalnya implementasi ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	- Meningkatnya alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian (sawah) menjadi lahan non pertanian - Meningkatnya kejadian bencana hidro meteorologi, terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan - Meningkatnya pencemaran air	Persaingan Sumber Daya Alam	- Krisis lingkungan - Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan belum dilakukan secara optimal	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				(Isu RPJMN)	(Isu RPJMD Provinsi)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		• Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) • Kondisi TPA Cahaya Kencana yang over capacity				
• Persentase konektivitas Kabupaten Banjar menunjukkan kenaikan • Persentase penduduk berakses air minum/air bersih perpipaan terus mengalami peningkatan • Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Banjar	• Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	• Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, terutama jaringan jalan, penerangan jalan umum, sistem drainase, sistem penyediaan air bersih, sistem sanitasi/air limbah	• Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan merata	• Rendahnya produktivitas	• Pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian, serta konektivitas yang masih terbatas	Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kewilayahan

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				(Isu RPJMN)	(Isu RPJMD Provinsi)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
terus mengalami peningkatan						
• Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam implementasi reformasi birokrasi dengan adanya Perbup Roadmap RB Daerah • Adanya koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait implementasi SAKIP • Penerapan sistem pengendalian pembangunan daerah berbasis IT	• Reformasi birokrasi daerah belum terimplementasi secara menyeluruh	• Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	• Tata Kelola Keuangan Global	• Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	• Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan Tata Kelola yang Akuntabel dan Melayani

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berbagai isu strategis RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 merupakan hasil penyilangan dari berbagai isu yang ada, mulai dari potensi, permasalahan, isu KLHS, hingga isu lingkungan dinamis baik yang berada di level global, nasional, hingga regional. Berikut merupakan penjelasan masing-masing isu strategis jangka menengah daerah Kabupaten Banjar selama lima tahun mendatang.

1. Penguatan SDM Unggul dan Berkarakter

Isu strategis penguatan SDM unggul dan berkarakter merujuk pada upaya untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, serta memiliki karakter kepribadian dan perilaku yang baik. SDM merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses pembangunan di suatu daerah. SDM yang unggul dan berkarakter akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dan kesejahteraan secara umum, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter, dibutuhkan kerja sama lintas sektor baik antar pemerintah maupun dengan sektor swasta, pemangku agama, dan masyarakat.

Pada aspek pendidikan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui peningkatan sarpras dan fasilitas penunjang pendidikan yang berkualitas, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan. Selain itu, kompetensi tenaga kerja juga perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan standar perusahaan, baik pada dimensi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hal ini diperlukan guna membekali angkatan kerja di Kabupaten Banjar bersaing di dalam maupun luar daerah. Pada aspek kesehatan, pemerintah perlu meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar memiliki tantangan tidak hanya dari segi layanan, namun juga pencegahan dan pengendalian penyakit menular (HIV, TBC, dll.) dan penyakit tidak menular (diabetes, jantung, hipertensi, dll.). Tingginya mobilitas penduduk dan belum optimalnya penerapan pola hidup bersih dan sehat (PBHS) juga menjadi perhatian dalam mewujudkan manusia yang sehat dan mampu berkegiatan secara produktif.

Penguatan SDM yang unggul dan berkarakter juga dilakukan melalui peningkatan ketahanan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam internalisasi nilai-nilai positif, serta pembentukan karakter pada anak. Kualitas keluarga yang baik memungkinkan terwujudnya pemenuhan hak anak yang terdiri dari lima dimensi (dimensi legalitas, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan budaya), serta mampu mencegah perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba, miras, judi, dan sebagainya. Di sisi lain, pengarusutamaan nilai GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial) juga perlu ditingkatkan pada semua aspek pembangunan, termasuk dalam lingkup keluarga. Pengarusutamaan GEDSI menjadi salah satu agenda penting di Kabupaten Banjar terutama dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender, salah satunya melalui partisipasi perempuan di politik dan legislatif. Selain itu, perlindungan terhadap anak dan perempuan yang dimulai dari lingkup keluarga juga penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan SDM unggul dan berkarakter. Pembangunan yang sensitif terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial akan mewujudkan Kabupaten Banjar yang lebih inklusif dan toleran.

2. Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan di sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator RLS mencerminkan jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal. RLS di Kabupaten Banjar mencapai 7,95 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP pada tahun 2025. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan RLS relatif lambat, namun tetap mengalami peningkatan, yakni sebesar 0,60 poin.

Perlambatan ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk usia sekolah yang memilih melanjutkan pendidikan di pesantren, yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Hal itu dikarenakan adanya pemahaman di masyarakat bahwa lebih penting sekolah diniyah (keagamaan) dibandingkan

sekolah formal. Selain itu, ada kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anaknya terlebih dulu baru kemudian anaknya diminta melanjutkan sekolah atau mengambil penyetaraan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya integrasi antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren, mengingat budaya dan sistem pendidikan di Kabupaten Banjar yang kental dengan nilai-nilai keagamaan.

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten Banjar adalah memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan lembaga pendidikan pesantren. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam program pendidikan kesetaraan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di daerah tersebut. Penyeimbangan pendidikan formal dan agama di Kabupaten Banjar diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki karakter yang kuat di masa depan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah turut ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada sektor pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat jumlah tahun yang digunakan penduduk umur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2023 RLS di Kabupaten Banjar berada pada angka 7,94 atau setara dengan kelas 1 SMP. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, RLS Kabupaten Banjar mengalami peningkatan namun cenderung lambat, yaitu hanya meningkat 0,61 poin. Lambatnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar disebabkan oleh faktor banyaknya penduduk usia sekolah yang melanjutkan ke pendidikan pesantren, sehingga tidak tercatat sebagai siswa di pendidikan formal.

Merespons kondisi tersebut, upaya integrasi antara pendidikan formal dengan pendidikan pesantren menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan konteks dan budaya pendidikan di Kabupaten Banjar yang kental dengan nuansa agama dan pendidikan pesantren. Salah satu upaya yang

perlu diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Banjar adalah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan penyelenggara pendidikan pesantren guna meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan pendidikan kesetaraan, sehingga akan turut meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar. Adanya keseimbangan antara pendidikan formal dengan pendidikan agama diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Banjar yang berkualitas dan berkarakter di masa yang akan datang.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh dan Ramah Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar menunjukkan tren positif setelah mengalami dampak pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 3% dalam periode 2021 hingga 2023. Salah satu peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2020-2021, di mana Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Banjar melonjak sebesar 5,17 poin. Pada tahun 2021, LPE tercatat sebesar 3,21% sebelum mengalami kenaikan drastis menjadi 4,48% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, LPE mengalami sedikit perlambatan, turun sebesar 0,13 poin menjadi 4,35%.

Meskipun mengalami pertumbuhan, angka LPE Kabupaten Banjar dalam periode 2019-2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Secara struktural, perekonomian daerah ini dalam lima tahun terakhir ditopang oleh beberapa sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lima sektor dominan tersebut adalah:

1. Pertambangan dan Penggalian (18,66%) – sektor ini menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian daerah, sejalan dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Banjar.
2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,41%) – sektor ini memainkan peran penting dalam ketahanan pangan dan ekspor daerah.
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,63%) – menunjukkan daya beli masyarakat yang cukup stabil.

4. Konstruksi (10,03%) – didorong oleh pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang.
5. Industri Pengolahan (6,43%) – meskipun lebih kecil, sektor ini berperan dalam hilirisasi produk lokal.

Sebagai strategi ke depan, penguatan sektor-sektor unggulan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Banjar. Selain itu, diversifikasi ekonomi dan peningkatan investasi di sektor industri kreatif serta pariwisata berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurut data BPS, Kabupaten Banjar juga memiliki potensi dalam sektor ekonomi digital yang mulai berkembang, terutama di bidang *e-commerce* dan UMKM berbasis teknologi.

Sektor pertambangan dan penggalian, yang menjadi pilar utama perekonomian Kabupaten Banjar, memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu, sektor ini bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga keberlanjutan ekonomi daerah memerlukan strategi diversifikasi pendapatan. Oleh karena itu, Kabupaten Banjar perlu mengembangkan sumber pendapatan alternatif yang lebih ramah lingkungan guna menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, memiliki potensi untuk menurunkan kualitas lingkungan. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran air, sementara praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak atau jaring trawl, dapat mengancam kelestarian ekosistem perairan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2022, sekitar 30% lahan pertanian di Indonesia mengalami degradasi akibat penggunaan bahan kimia berlebihan, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.

Sebagai langkah solutif, penguatan sektor industri pengolahan menjadi salah satu strategi utama yang harus segera dioptimalkan. Selain sebagai mandat dari pemerintah pusat untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, sektor ini dapat dikembangkan sejalan dengan peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan. Misalnya, dengan mengembangkan industri hilir berbasis komoditas unggulan daerah, seperti pengolahan hasil pertanian (kopi dan kelapa sawit), pengolahan kayu berkelanjutan, serta industri perikanan terpadu.

Untuk mewujudkan ekonomi yang kokoh dan berorientasi pada kelestarian lingkungan, beberapa langkah strategis perlu diterapkan:

- a. Diversifikasi ekonomi – Kabupaten Banjar perlu mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian berkelanjutan, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, sektor jasa, dan teknologi digital. Selain itu, investasi dalam energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan biomassa dapat membantu mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa potensi energi surya di Kalimantan Selatan mencapai 4,8 kWh/m²/hari, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi ramah lingkungan.
- b. Inovasi teknologi – Kabupaten Banjar perlu mendorong riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, penggunaan biopestisida dan pupuk organik berbasis limbah pertanian, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah industri yang lebih efisien.
- c. Dukungan regulasi pemerintah – Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi hijau, misalnya dengan memberikan insentif bagi usaha ramah lingkungan serta menerapkan sanksi terhadap aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan. Sebagai

contoh, beberapa daerah telah menerapkan skema "*green tax*" bagi perusahaan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar.

- d. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan – Kabupaten Banjar dapat menerapkan sistem agroforestri dan pertanian regeneratif untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia tanpa mengorbankan produktivitas petani. Selain itu, pengelolaan hasil hutan berbasis sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan sektor kehutanan.

Melalui penerapan strategi-strategi ini, Kabupaten Banjar dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang.

4. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan serta Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Kabupaten Banjar dikenal luas karena keunggulannya dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, terutama dalam pengembangan wisata religi. Pembangunan ketiga sektor ini secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Sebagai pilar utama dalam mendorong ekonomi inklusif di Kabupaten Banjar, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata juga menjadi bagian dari identitas daerah. Oleh karena itu, produktivitas di ketiga sektor ini perlu terus ditingkatkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar merupakan sektor atau lapangan usaha dengan kontribusi ekonomi terbesar kedua di Kabupaten Banjar dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,42 persen per tahunnya. Hal ini merupakan potensi lebih lanjut untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar ke depan. Dari sektor pariwisata, Kabupaten Banjar terkenal sebagai

destinasi wisata khususnya wisata religi pada kesempatan-kesempatan tertentu. Dengan angka rata-rata 3,8 juta kunjungan per tahunnya, Kabupaten Banjar merupakan salah satu destinasi bagi masyarakat untuk berkunjung. Tantangan dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Banjar adalah memastikan kunjungan wisata ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi lebih lanjut bagi daerah. Oleh karenanya, perkembangan destinasi wisata diperlukan untuk memastikan kunjungan wisata daerah dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Hal ini selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Banjar dalam mewujudkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah ke depan.

Peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, kemudahan akses pembiayaan, penerapan metode pertanian dan perikanan modern, ketersediaan benih dan bibit unggul, serta pengendalian hama, penyakit, dan bencana pertanian. Sementara itu, pengembangan daya tarik wisata dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan tujuh elemen utama pariwisata (7A), yaitu atraksi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, aktivitas, aplikasi digital, paket wisata, serta layanan tambahan. Selain itu, strategi pemasaran juga perlu diperkuat dengan mengadaptasi konsep bauran pemasaran (*marketing mix*) agar daya saing destinasi wisata semakin meningkat.

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim

Peningkatan kualitas lingkungan hidup memberikan kontribusi terhadap upaya adaptasi perubahan iklim. Lingkungan hidup yang berkualitas akan mempermudah proses adaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banjar dapat dilihat melalui capaian IKLH yang termasuk dalam kategori baik pada tahun 2024. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banjar banyak dipengaruhi oleh kualitas udara dan air. Kualitas udara di Kabupaten Banjar sering terganggu karena kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebakaran lahan yang terjadi menyebabkan berkurangnya tutupan

lahan, sehingga perlu adanya intervensi terkait reboisasi di kawasan yang terbakar dan juga di kawasan bekas tambang.

Kualitas air di Kabupaten Banjar mengalami penurunan karena sebagian masyarakat masih membuang sampah di sungai serta kebiasaan masyarakat yang masih BABS di sungai. Hal itu dapat dilihat melalui akses sanitasi aman dan layak yang hanya mencapai 9,20 persen pada tahun 2023. Selain itu pencemaran industri, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta perubahan tata guna lahan di sekitar Kabupaten Banjar juga sebagian menjadi faktor menurunnya kualitas air di Kabupaten Banjar. Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama terkait kualitas udara dan air juga dalam rangka merespons salah satu isu strategis di KLHS yakni meningkatnya kejadian bencana hidro meteorologi, seperti banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, dipengaruhi juga dengan kondisi kualitas lahan di Kabupaten Banjar yang saat ini kondisinya termasuk dalam kategori sedang. Meningkatnya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian (sawah) yang berubah menjadi lahan non pertanian juga menjadi penyebab menurunnya kualitas lahan di Kabupaten Banjar. Sebaran lahan kritis di wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan tahun 2022 meliputi 14.535,30 Ha di kawasan hutan dan 4.263,19 Ha di kawasan non hutan, sedangkan lahan sangat kritis meliputi 40.835,75 Ha di kawasan hutan dan 13.394,03 Ha di kawasan non hutan dengan total 15,86% dari luas wilayah Kabupaten Banjar.

6. Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kewilayahan

Layanan infrastruktur yang merata menjadi salah satu modal pembangunan yang penting sebagai upaya penguatan fondasi pembangunan daerah di Kabupaten Banjar. Beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan kondisi infrastruktur meliputi jaringan telekomunikasi, akses sanitasi aman, akses dan kualitas air baku, serta kondisi konektivitas wilayah akan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Banjar. Upaya pembangunan infrastruktur

difokuskan untuk memperkuat pembangunan sarana prasarana pelayanan publik dan pendukung perekonomian yang kondisi saat ini masih belum memadai. Persoalan pertama yang mendasar dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar yaitu masih adanya beberapa wilayah dengan kondisi *blank spot* sehingga akses terhadap jaringan telekomunikasi belum merata. Keberadaan *blank spot* disebabkan oleh faktor kesulitan geografis sehingga belum terjangkau jaringan internet, seperti di Kecamatan Paramasan. Kesulitan dalam akses telekomunikasi ini menjadi penyebab berbagai persoalan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Berbagai upaya baik dalam rangka pemberian insentif, kerja sama dengan swasta, maupun pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi perlu dilakukan untuk memastikan cakupan layanan telekomunikasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Banjar.

Belum optimalnya akses sanitasi aman di Kabupaten Banjar menunjukkan masih adanya permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan. Permasalahan akses sanitasi aman dibuktikan dengan persentase masyarakat yang telah mendapat akses terhadap sanitasi aman pada tahun 2023 hanya sebesar 9,55 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hanya 9 dari 100 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang aman di Kabupaten Banjar pada tahun 2023. Perlu perkuatan koordinasi antar pemda dan sosialisasi dengan masyarakat, untuk dapat mewujudkan akses sanitasi aman. Selain akses sanitasi aman, akses terhadap air bersih juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan, mengingat kondisi air baku di Kabupaten Banjar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Namun, tidak semua air baku layak untuk digunakan, bahkan kurang lebih 50 persen masyarakat masih bergantung dengan sungai, sedangkan sungai banyak yang tercemar sampah dan tempat BABS.

Konektivitas wilayah Kabupaten Banjar telah optimal yang dibuktikan dengan sebagian besar wilayah telah terhubung jaringan jalan maupun transportasi sungai/danau yang memadai dengan capaian persentase konektivitas wilayah pada tahun 2023 telah mencapai 98,84 persen. Meskipun demikian, Kabupaten Banjar masih memiliki permasalahan terkait dengan

kualitas kondisi jalan yang masih rusak maupun rusak berat. Hingga tahun 2023, kondisi jalan mantap di Kabupaten Banjar masih berada pada angka 72,73 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat jaringan jalan yang perlu diintervensi melalui revitalisasi kondisi jalan. Selain itu, akselerasi konektivitas juga diperlukan untuk menghubungkan daerah-daerah di Kabupaten Banjar yang belum terhubung dengan jaringan jalan seperti di wilayah pemukiman di waduk yang berada di Kecamatan Aranio. Penyediaan sarana dan prasarana penyeberangan juga perlu dilakukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat, terutama yang berada di kawasan yang dilintasi sungai.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani

Kabupaten Banjar terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, memastikan transparansi, serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil. Saat ini, akuntabilitas daerah belum berjalan optimal terutama dari sisi akuntabilitas kinerja. Untuk mencapai hal ini, berbagai intervensi terhadap beberapa kondisi, seperti penguatan sistem pengawasan, optimalisasi penggunaan teknologi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik, Kabupaten Banjar juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak dan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan keterbukaan informasi publik menjadi langkah-langkah strategis yang diterapkan. Dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan penguatan pelayanan terpadu, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Akan tetapi, tantangan dalam meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan melayani masih perlu diatasi. Masih terdapat kendala dalam hal kolaborasi antar instansi maupun masyarakat, perubahan budaya kerja birokrasi yang

semakin dinamis, serta resistensi terhadap inovasi. Oleh karena itu, komitmen dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan publik, Kabupaten Banjar dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan melayani secara optimal.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Visi dan misi berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan tujuan dan sasaran, sementara tujuan dan sasaran mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Perumusan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada isu-isu strategis serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Daerah

Perumusan visi mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dalam hal ini pada tahun 2029 mendatang. Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar menjadi dasar utama dalam menyusun berbagai elemen pendukung, mulai dari misi, tujuan, hingga sasaran pembangunan jangka menengah. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah:

VISI

***"TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU,
MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG
ROYONG DAN KEADILAN"***

Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Maju: kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat.

Mandiri: kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Agamis: kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar

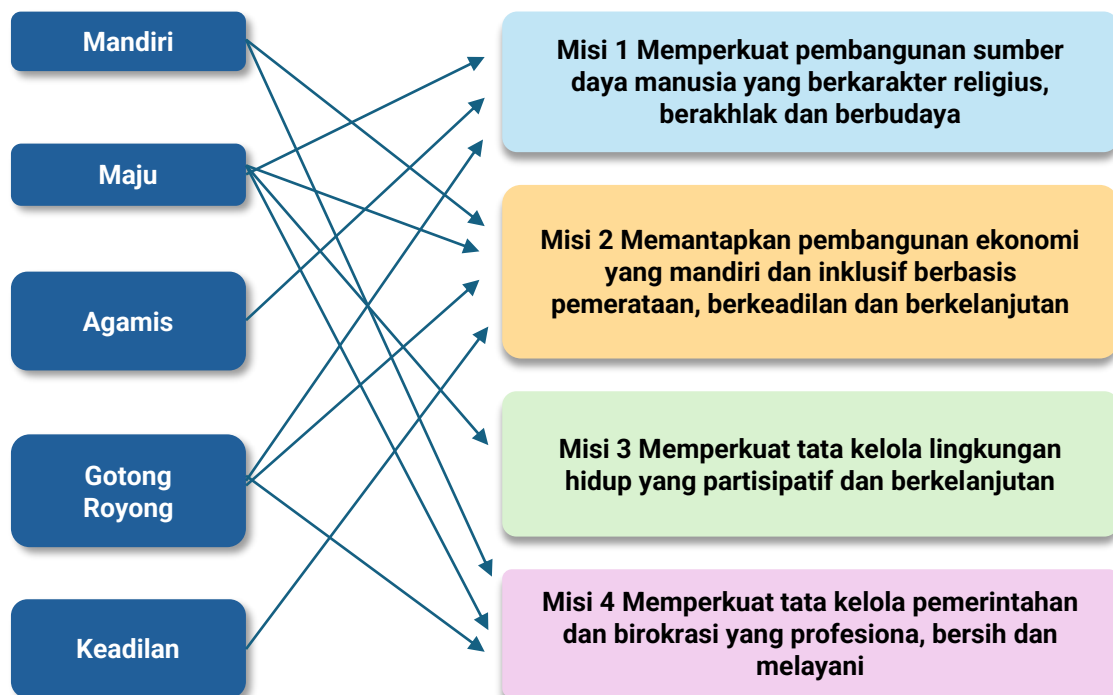
Gotong Royong: kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

Keadilan: kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Banjar dirumuskan guna mendukung terwujudnya Visi Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya sebagai gerbang logistik di Kalimantan. Kemajuan dan kemandirian daerah menjadi salah satu

prasyarat penting untuk mendukung peran strategis provinsi dalam konektivitas dan distribusi barang. Kabupaten Banjar, dengan potensi sumber daya alam, pertanian, dan posisi geografis yang strategis di jalur utama transportasi, dapat menjadi simpul penting dalam rantai pasok regional. Nilai gotong royong dan keadilan yang diusung dalam visi daerah akan memperkuat partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sosial, sehingga infrastruktur, layanan publik, dan iklim investasi dapat berkembang selaras dengan target provinsi. Dengan demikian, penguatan kapasitas lokal Kabupaten Banjar tidak hanya mendorong pencapaian visi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai pusat logistik yang andal dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Berbagai kata kunci dari visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan masing-masing misi yang ada. Hal ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara visi yang ingin diwujudkan dengan langkah-langkah atau misi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi. Berikut merupakan keterkaitan antara masing-masing kata kunci visi dengan misi-misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.



Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Dalam pelaksanaannya, visi daerah perlu memiliki keselarasan terhadap visi-visi lainnya yang berada di level pemerintahan lain. Oleh karenanya, diperlukan proses penyandingan visi antara Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia dalam rangka memperkuat sinergitas antar visi yang telah dirumuskan. Sinergitas ini menjadi penting untuk memastikan proses pembangunan yang selaras. Berikut merupakan penyandingan visi dan misi antara Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan Indonesia secara detail:

Tabel 3. 1 Penyandingan Visi dan Misi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan Indonesia

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	RPJM Nasional Tahun 2025-2029
Visi: Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, Dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong Dan Keadilan	Visi: Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan	Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Misi 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya	Misi 1: Pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia	Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z) dan penyandang disabilitas
		Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur
Misi 2: Memantapkan pembangunan ekonomi	Misi 2: Pembangunan infrastruktur yang andal	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	RPJM Nasional Tahun 2025-2029
yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 3: Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan syariah	kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
		Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Misi 3: Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan	Misi 4: Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan	Misi 5: Tata kelola pelayanan	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	RPJM Nasional Tahun 2025-2029
birokrasi yang profesional, bersih dan melayani	publik yang mudah dan cepat	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dna pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Sumber: Hasil analisis, 2025

3.1.2 Misi Daerah

Dalam pelaksanaannya, kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, terdapat empat misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing misi pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

3.1.2.1 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya

Misi Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, baik dari sisi moral maupun intelektual. Beberapa fokus pembangunan yang tertuang dalam misi ini diantaranya adalah meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi. Hal tersebut dapat diupayakan dengan penguatan layanan pendidikan baik formal, maupun informal, pelatihan keterampilan hingga upaya pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat.

Karakter religius dalam misi ini bertujuan untuk memperkuat identitas Kabupaten Banjar sebagai daerah yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat,

dengan cara menanamkan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan. Penguatan pendidikan Islam, peningkatan fasilitas keagamaan hingga penguatan program-program berbasis keagamaan menjadi beberapa fokus dari misi ini.

Upaya pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak dirumuskan guna menciptakan kondisi wilayah Kabupaten Banjar yang harmonis dan kondusif. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan karakter baik di lingkungan sekolah, maupun keluarga. Penanaman nilai-nilai moral sejak dini menjadi salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan guna mewujudkan misi ini.

Selain dikenal dengan karakter masyarakatnya yang religius, Kabupaten Banjar juga dikenal dengan karakter masyarakatnya yang memiliki budaya dan adat istiadat yang khas. Oleh karena itu, misi ini juga turut diarahkan untuk memperkuat kelestarian seni dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Banjar, sebagai langkah untuk menjaga identitas kedaerahan.

3.1.2.2 Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi inklusif dijalankan dengan memperhatikan tiga pilar ekonomi inklusif yaitu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan.

Pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator ekonomi makro, namun pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia, lingkungan, dukungan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif di Kabupaten Banjar dapat diwujudkan dengan 6 cara, yaitu 1) melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur 2) melanjutkan dan memantapkan pemerataan

pembangunan 3) Melanjutkan dan mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan 4) Melanjutkan dan memantapkan restrukturisasi ekonomi 5) Membangun ketahanan pangan daerah, dan 6) Membangun kembali keunggulan sektor pertanian dan perikanan.

Perwujudan 6 cara pendukung pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif juga sejalan dengan proyek prioritas strategis (*major project*) yaitu fondasi Banjar Bumi Intan (Banjar Berkelanjutan, Maju, Agamis, Sebagai Sentra Perikanan, Pariwisata Dan Pertanian) dan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan menjadi Program Hasil Terbaik dan Cepat yang dikawal langsung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga didukung dengan 6 dimensi pada misi kedua yaitu melalui dimensi infrastruktur dan kewilayahan, dimensi pembangunan desa, dimensi pembangunan perkotaan, dimensi pembangunan pertanian, dimensi pembangunan perikanan, dan dimensi lapangan pekerjaan.

3.1.2.3 Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang memperhatikan generasi yang akan datang. Penguatan tata kelola lingkungan hidup merupakan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, yang ditopang sinergi antara kebijakan dan pelayanan publik dengan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. Upaya ini dilakukan melalui percepatan pembangunan yang difokuskan pada: 1) melanjutkan perbaikan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan; 2) melanjutkan pengembangan penataan ruang; 3) melanjutkan penataan lingkungan permukiman yang layak huni; dan 4) melanjutkan penanggulangan bencana. Adapun misi ini mencakup dimensi lingkungan hidup melalui proyek prioritas strategis air dan limbah layak, sampah komunitas, dan sampah sekolah; dan dimensi kebencanaan melalui proyek prioritas strategis pendidikan kebencanaan, jejaring *crisis center*, dan infrastruktur pengendali banjir.

Pada dimensi lingkungan hidup difokuskan pada melanjutkan perbaikan dan pencapaian akses layanan air bersih layak dan akses air limbah yang layak, melanjutkan pengelolaan sampah berbasis individual dan komunitas untuk mengurangi produksi sampah di masyarakat melalui inovasi dan integrasi pengelolaan sampah, dan mendorong pembentukan pendidikan tentang sampah dan pengelolaan sampah yang mendasar dan dapat diterapkan secara nyata di sekolah. Adapun pada dimensi kebencanaan difokuskan pada memberikan pendidikan kebencanaan di sekolah baik pada upaya pencegahan maupun penanggulangan bencana sehingga meningkatkan keamanan dan tanggap terhadap bencana, memberikan layanan yang untuk menyediakan bantuan darurat dan dukungan dalam situasi krisis yang dirancang untuk memberikan respons cepat dan dukungan dalam berbagai situasi darurat, seperti bencana alam, insiden keamanan, krisis kesehatan atau keadaan darurat lainnya, dan menyediakan serangkaian fasilitas dan sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengurangi dampak banjir. Infrastruktur ini bertujuan untuk melindungi daerah yang rentan terhadap banjir, menjaga keselamatan masyarakat, dan mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh banjir.

3.1.2.4 Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Misi memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani merupakan misi penting dalam mendukung visi kepala daerah. Memperkuat tata kelola pemerintahan harus dilakukan melalui prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. *Good governance* dan *clean governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah daerah harus memiliki birokrasi yang profesional, bersih, melayani, dan terpercaya.

Beberapa kondisi yang harus diperkuat dalam mendukung birokrasi tersebut agar reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan terwujud diperlukan ASN yang profesional. ASN yang profesional adalah ASN

yang memiliki pola pikir bahwa ASN adalah pelayan masyarakat dan abdi negara. ASN profesional dibentuk melalui penerapan sistem merit, integritas, dan kesejahteraan ASN. Selain itu, perencanaan dan penganggaran yang akuntabel juga penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan terutama terkait perumusan program yang tepat sasaran, berorientasi hasil, dan berdampak dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang semakin baik.

Selain dari sisi aparatur dan sistem, perlu juga adanya perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi melalui reformasi birokrasi tematik yang mengarah pada kemiskinan, investasi, digitalisasi pemerintahan, lingkungan hidup berkelanjutan, dan pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui penerapan manajemen kinerja, mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, dan adanya kolaborasi dan sinergitas antar lembaga birokrasi. Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menguatkan aksi pencegahan korupsi menjadi prasyarat penting juga terutama melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, membangun zona integritas, meningkatkan kapasitas aparatur pengawas, dan menerapkan manajemen risiko di seluruh sektor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan perwujudan dari visi dan misi pembangunan serta intervensi yang dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang menjadi isu strategis daerah. Tujuan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode lima tahun. Setiap tujuan memiliki sasaran yang dirumuskan untuk menggambarkan pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah rumusan tujuan, sasaran, dan indikator dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 2 Isu Strategis dan Tujuan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No.	Isu Strategis	Tujuan RPJMD
1.	Penguatan SDM Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
2.	Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal	

3.	Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif
4.	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan serta Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	
5.	Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kewilayahan	
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terwujudnya ketahanan iklim daerah
7.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,41	74,78	75,48	75,95	76,43	76,90	77,43	
			Indeks Kesalehan Sosial	Nilai	80,83	81,53	82,22	82,92	83,61	84,31	85,00	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Nilai	73,55	73,89	74,18	74,46	74,75	75,03	75,32	
			Prevalensi Stunting	Persen	30,10	20,00	19,25	18,50	17,75	17,00	16,25	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Nilai	7,95	8,12	8,31	8,50	8,69	8,88	9,07	
			Harapan lama sekolah (HLS)	Nilai	13,04	13,07	13,14	13,21	13,28	13,35	13,43	
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Nilai	60,84	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,26	
			Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,53	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	
		Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	N/A	6,00	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	
			Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	N/A	85,33	85,53	85,73	85,93	86,13	86,13	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58,55	62,41	64,25	66,10	67,94	69,78	71,62	
2	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,76	5,25	5,35	5,45	5,54	5,64	5,75	
			Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,53	3,57	3,61	3,65	3,69	3,73	3,77	
		Meningkatnya produktivitas ekonomi	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	40,03	42,93	52,78	62,64	72,49	82,34	92,19	
			Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalan	Persen	79,02	80,00	80,30	80,60	80,90	81,20	81,75	
		Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,36	2,18	2,02	1,87	1,71	1,56	1,40	
			Rasio Gini	Nilai	0,258	0,256	0,255	0,253	0,251	0,249	0,245	
		Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,310	1,316	1,323	1,329	1,336	1,342	1,348	
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
			Indeks Infrastruktur	Nilai	87,50	87,94	88,38	88,82	89,26	89,71	90,16	
			Indeks Konektivitas	Nilai	84,44	84,86	85,29	85,71	86,14	86,57	87,01	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Terwujudnya ketahanan iklim daerah		Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK	Persen	36,81	0,93	0,91	0,85	0,79	0,73	0,66	
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indesk Risiko Bencana	Nilai	118,31	117,31	116,31	115,31	114,31	113,31	112,31	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,40	71,39	71,60	71,81	72,02	72,24	72,45	IKLH mulai 2025 mengalami perubahan metodologi
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	79,36	79,46	79,61	79,76	79,91	80,06	81,62	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	83,79	83,95	84,10	84,26	84,41	84,57	84,73	
			Indeks Sistem Merit (Nilai Merit)	Nilai	0,42	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57	0,61	
			Predikat SAKIP Daerah	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A	
			Indeks Integritas	Nilai	76,72	80,00	80,75	81,50	82,25	83,00	83,75	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks SPBE	Nilai	2,87	2,97	3,07	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	N/A	N/A	1,00	1,05	1,07	1,09	1,11	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,87	87,95	89,05	90,15	91,25	92,35	93,45	
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,49	4,54	4,59	4,65	4,70	4,75	4,80	

Sumber: Diolah, 2025

3.3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Sub-bab ini menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Upaya tersebut dirancang untuk mencapai target dalam lima tahun ke depan melalui strategi serta kebijakan pembangunan daerah. Secara garis besar, bab ini mencakup tiga aspek utama, yaitu tahapan pembangunan RPJMD, strategi dan kebijakan arah pembangunan, serta program prioritas pembangunan daerah.

3.3.1 Strategi Pembangunan

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah perlu dirumuskan dengan memerhatikan strategi dalam tahapan pembangunan di setiap tahunnya dan fokus kewilayahan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus dan prioritas yang berbeda untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada proyeksi kebutuhan daerah yang perlu mendapat intervensi setiap tahunnya. Dalam aspek penahapan, hal pertama yang dapat dirujuk adalah penahapan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 bagi periode pembangunan 2025-2029 atau periode pertama pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Periode I RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2045	Misi RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029	Arah Kebijakan I (2025–2029) Penguatan Fondasi
Banjar Berkelanjutan, Maju, Agamis, Sebagai Sentra Perikanan, Pariwisata dan Pertanian (Banjar Bumi Intan)	Mewujudkan transformasi sosial yang berkarakter dan berdaya saing	Penguatan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial
	Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif berbasis sektor pertanian, perikanan dan pariwisata	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai lumbung logistik kalimantan

Visi RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2045	Misi RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029	Arah Kebijakan I (2025–2029) Penguatan Fondasi
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan dinamis	Peningkatan kualitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat guna, Peningkatan tata kelola yang profesional dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas berbasis TIK, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatkan ketertiban dan stabilitas daerah	Penguatan kelembagaan penegak hukum daerah, pengendalian inflasi daerah, dan optimalisasi kapasitas fiskal daerah
	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Penguatan fondasi sosial budaya dan ekologi yang tangguh
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pemenuhan dan peningkatan pembangunan wilayah yang merata & pembangunan pusat perkantoran baru
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Penguatan sinkronisasi dan integrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah

Sumber: RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045

Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar

Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Tema tahunan ini akan menjadi dasar bagi pembangunan yang dilakukan dalam periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan penjabaran perihal tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjar selama periode 2026-2030:

Tabel 3. 5 Strategi Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

TAHAP 1 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Landasan Transformasi: • Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar • Penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan • Peningkatan upaya pelestarian lingkungan • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	Akselerasi Pembangunan: • Penguatan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan di semua wilayah • Integrasi pendidikan non formal • Peningkatan produktivitas sektor unggulan • Pelestarian lingkungan hidup yang komprehensif • Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal	Peningkatan Daya Saing: • Peningkatan keterampilan SDM daerah • Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah (limau madang, dan lain sebagainya) • Peningkatan mitigasi bencana daerah • Penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif	Pemantapan Daya Saing: • Penguatan keberdayaan SDM daerah • Penguatan ekonomi produktif dan berkeadilan • Penguatan resiliensi daerah terhadap bencana • Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik	Perwujudan Komprehensif: Terwujudnya Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan Menuju Banjar Bumi Intan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3.2 Lokus Pembangunan Kewilayahan

Perumusan strategi kewilayahan dilakukan untuk merespons lingkungan dinamis sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Bagian ini akan menjabarkan strategi kewilayahan yang dirumuskan berdasarkan perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga usulan masing-masing kecamatan di Kabupaten Banjar.

Strategi kewilayahan yang dirumuskan berdasarkan perencanaan nasional dan provinsi diindikasikan dari intervensi pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Banjar. Untuk menjaga keselarasan arah kebijakan kewilayahan antara Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan, maka berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 arah kebijakan kewilayahan untuk Kabupaten Banjar difokuskan pada pelestarian lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana yang menitikberatkan pada:

1. Restorasi lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi Daerah Aliran Sungai, pembangunan pertanian berbasis ekosistem rawa
2. Pembangunan sistem mitigasi dan pengendali banjir
3. Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
4. Pengelolaan sampah organik yang efektif
5. Memaksimalkan pelestarian lingkungan dalam alih fungsi lahan

Intervensi pembangunan tersebut dilakukan pada kawasan prioritas yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah baik perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3. 6 Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Kabupaten Banjar

No	Kawasan Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan	Kecamatan
1.	Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin	1. Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya; 2. Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh; 3. Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi.	1. Kecamatan Aluh-Aluh 2. Kecamatan Aranio 3. Kecamatan Astambul 4. Kecamatan Beruntung Baru 5. Kecamatan Gambut; 6. Kecamatan Karang Intan; 7. Kecamatan Kertak Hanyar; 8. Kecamatan Martapura Barat; 9. Kecamatan Martapura Timur;

No	Kawasan Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan	Kecamatan
			10. Kecamatan Mataraman; 11. Kecamatan Sungai Tabuk; 12. Kecamatan Tatah makmur:
2	Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu	1. Pengembangan infrastruktur irigasi dan tata air; 2. Peningkatan kelembagaan petani dan ekonomi; 3. Pengembangan akses pasar dan distribusi; dengan output perbaikan jalan usaha tani dan konektivitas ke pasar 4. Teknologi dan sarana produksi pertanian; dengan output penyediaan benih unggul dan peralatan pertanian;	
3	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP):	1. Infrastruktur dasar dan aksesibilitas penghubung antardesa dan ke pusat kegiatan ekonomi. 2. Peningkatan kelembagaan petani dan ekonomi KPP dengan output penguatan BUMDes Pendukung KPP. 3. Pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha produktif; 4. Pemberdayaan masyarakat desa secara optimal.	1. Kecamatan Martapura 2. Kecamatan Martapura Barat;
4.	Kawasan Pegunungan Meratus	1. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di Kawasan Geopark Meratus; 2. Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas yang mendukung Kawasan Pariwisata Pegunungan Meratus.	1. Kecamatan Aranio 2. Kecamatan Karang Intan; 3. Kecamatan Sungai Pinang; 4. Kecamatan Pengaron; 5. Kecamatan Paramasan;

No	Kawasan Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan	Kecamatan
5.	Kawasan Perkantoran Baru	1. Perencanaan Kawasan Perkantoran Baru untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih efektif; 2. Penyediaan lahan perkantoran baru.	Kecamatan Karang Intan
6.	Kawasan Kampung Papuyu	1. Penyediaan alat dan mesin perikanan budidaya; 2. Perbaikan akses jalan produksi perikanan; 3. Penguatan kelompok pembudidaya ikan; 4. Pengembangan hilirisasi produk perikanan; 5. Pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha, offtaker atau BUMDes; 6. Pengelolaan lingkungan hidup terhadap ekosistem air tawar.	Kecamatan Karang Intan
7.	Kawasan Strategis Kabupaten	1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Religi. 2. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan, Holtikultura; 3. Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Banjar.	1. Kecamatan Kertak Hanyar; 2. Kecamatan Gambut; 3. Kecamatan Tatah Makmur; 4. Kecamatan Aluh-aluh; 5. Kecamatan Beruntung Baru; 6. Kecamatan Martapura Barat; 7. Kecamatan Martapura Timur; 8. Kecamatan Sungai Tabuk; 9. Kecamatan Astambul; 10. Kecamatan Mataraman 11. Kecamatan Simpang Empat; 12. Kecamatan Sambung Makmur; 13. Kecamatan Pengaron; 14. Kecamatan Martapura;

No	Kawasan Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan	Kecamatan
			15. Kecamatan Aranio; 16. Kecamatan Karang Intan.

Sumber: Hasil analisis, 2025

Intervensi pembangunan melalui pengembangan kawasan prioritas tersebut secara tidak langsung telah mendorong pengembangan potensi wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjar. Pengembangan potensi wilayah kecamatan tentunya membutuhkan pengembangan infrastruktur dasar dan pendukung yang melayani aktivitas masyarakat. Strategi kewilayahan per kecamatan di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 7 Strategi Kewilayahan Per Kecamatan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
1	Kecamatan Aluh-Aluh	Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan akses air bersih
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		Pendampingan dan pembinaan pengembangan kawasan wisata
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Penanganan Stunting terintegrasi
		Penguatan potensi kesejahteraan sosial untuk pemberdayaan PPKS
		Peningkatan kualitas data status sosial yang akurat
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Optimalisasi pemanfaatan tempat pelelangan ikan (TPI)
		Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
2	Kecamatan Aranio	Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan infrastruktur jalan
		Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Pendampingan dan pembinaan pengembangan kawasan wisata
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
		Peningkatan keterampilan peternak
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Penanganan Stunting terintegrasi
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
3	Kecamatan Astambul	Peningkatan infrastruktur pengendali bencana
		Pengembangan potensi perikanan tangkap
		Pengawasan pemanfaatan ruang
		Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Peningkatan infrastruktur jalan
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Pengembangan pengolahan potensi tanaman jeruk
		Pengembangan kawasan wisata religi
		Pengembangan peternakan itik
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Penguatan potensi kesejahteraan sosial untuk pemberdayaan PPKS
		Peningkatan kualitas data status sosial yang akurat
		Penanganan Stunting terintegrasi
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa
		Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
4	Kecamatan Beruntung Baru	Peningkatan akses air bersih
		Peningkatan infrastruktur jalan
		Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat
		Pengembangan pengolahan potensi padi organik
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
5		Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
	Kecamatan Cintapuri Darussalam	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa
		Peningkatan akses air bersih
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Pengembangan sektor peternakan
		Optimalisasi pengelolaan sawit
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Penanganan Stunting terintegrasi
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
6	Kecamatan Gambut	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Pengawasan pemanfaatan ruang
		Optimalisasi penggunaan transportasi massal
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan akses air bersih
		Peningkatan infrastruktur pengendali bencana
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Pengelolaan sumber daya air
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
7	Kecamatan Karang Intan	Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
		Peningkatan akses air bersih
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Pengembangan kawasan perikanan budidaya
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Pengembangan kawasan wisata
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Pengembangan sentra Florikultur Melati
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
8	Kecamatan Kertak Hanyar	Pengawasan pemanfaatan ruang
		Optimalisasi penggunaan transportasi massal
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Pengembangan sentra industri sasirangan
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
9	Kecamatan Martapura	Peningkatan infrastruktur jalan
		Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat
		Penataan Kawan Permukiman dan Perumahan
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengawasan pemanfaatan ruang
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Pengembangan Kawasan Pertanian Agrominapolitan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan jaringan irigasi
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Penguatan potensi kesejahteraan sosial untuk pemberdayaan PPKS
		Peningkatan kualitas data status sosial yang akurat
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
10	Kecamatan Martapura Barat	Peningkatan infrastruktur jalan
		Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem Sungai
		Peningkatan akses sanitasi
		Pengawasan pemanfaatan ruang
		Peningkatan infrastruktur pengendali bencana

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
		Pengembangan Kawasan Pertanian Agrominapolitan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan jaringan irigasi
		Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Penanganan Stunting terintegrasi
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
11	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan upaya rehabilitasi lingkungan
		Peningkatan infrastruktur jalan
		Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem Sungai
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
12	Kecamatan Mataraman	Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Penyusunan RDTR
		Peningkatan infrastruktur jalan
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
13	Kecamatan Paramasan	Peningkatan akses air bersih
		Peningkatan infrastruktur jalan
		Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Penanganan Stunting terintegrasi
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
14	Kecamatan Pengaron	Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Pengembangan Kawasan Agribisnis
		Peningkatan upaya rehabilitasi lingkungan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
15	Kecamatan Sambung Makmur	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan kualitas data status sosial yang akurat
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Pengembangan Komoditas unggulan perkebunan
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
16	Kecamatan Simpang Empat	Penyusunan RDTR
		Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
17	Kecamatan Sungai Pinang	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
18	Kecamatan Sungai Tabuk	Peningkatan infrastruktur jalan
		Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Pengembangan Komoditas unggulan
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		peningkatan fasilitasi dan pelatihan pelaku UKM yang berkelanjutan
		Peningkatan akses air bersih
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Penanganan Stunting terintegrasi
		Penguatan potensi kesejahteraan sosial untuk pemberdayaan PPKS
		Peningkatan kualitas data status sosial yang akurat
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
19	Kecamatan Tatah Makmur	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
		Penguatan keahlian dan kompetensi petani daerah
		Peningkatan akses air bersih
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Hilirisasi produk pertanian
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
20	Kecamatan Telaga Bauntung	Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik
		Peningkatan daya saing tenaga kerja
		Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
		Peningkatan akses air bersih
		Peningkatan infrastruktur telekomunikasi
		Pengembangan Komoditas unggulan padi gunung, karet
		digitalisasi dan optimalisasi pemasaran produk UKM
		Penataan Sentra, Pemberdayaan, dan Kemitraan Pemasaran Produk UMKM/IKM/Ekonomi Kreatif
		Pengembangan kawasan wisata
		Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
		Kolaborasi pengelolaan potensi wilayah
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik

No	Wilayah	Strategi Kewilayahan
		Peningkatan daya saing tenaga kerja

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain strategi kewilayahan berdasarkan hasil usulan masing-masing kecamatan, ditampilkan juga strategi kewilayahan Kabupaten Banjar berdasarkan indikasi program yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar tahun 2021-2041 sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Strategi Kewilayahan Kabupaten Banjar berdasarkan RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG			
Perwujudan Pusat Kegiatan			
Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Kecamatan Martapura, Timur Astambul, Mataraman, Simpang Empat	RTRW
2	Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas lainnya;		RTRW
3	Pusat kegiatan jasa dan perdagangan skala kabupaten;		RTRW
4	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kabupaten;		RTRW
5	Pusat kegiatan pengolahan industri hasil pertanian;		RTRW
6	Pusat kegiatan wisata religius;		RTRW
7	Pusat kegiatan pengembangan pertanian Lahan basah		RTRW
8	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Martapura Timur-Simpang Empat		RTRW
Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) :			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Tabuk	RTRW
2	Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan;		RTRW
3	Pusat kegiatan pengembangan industri menengah dan pengolahan hasil pertanian;		RTRW
4	Pusat kegiatan pariwisata alam dan budaya:		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
5	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
6	Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan.		RTRW
7	Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kertak Hanyar – Gambut - Sungai Tabuk		RTRW
Pengembangan dan pementapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK):			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Beruntung Baru	RTRW
2	Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian;		RTRW
3	Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;		RTRW
4	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
5	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.		RTRW
Pengembangan dan pementapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Tatah Makmur	RTRW
2	Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat pengolahan hasil pertanian;		RTRW
3	Pusat kegiatan pengembangan permukiman;		RTRW
4	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
5	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan skala lokal.		RTRW
Pengembangan dan pementapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Martapura Barat	RTRW
2	Pusat kegiatan pengembangan permukiman;		RTRW
3	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;		RTRW
4	Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
5	Pusat kegiatan pengembangan perikanan darat.		RTRW
Pengembangan dan pematapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK):			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Karang Intan	RTRW
2	Pusat kegiatan permukiman perkotaan;		RTRW
3	Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;		RTRW
4	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
5	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;		RTRW
6	Pusat kegiatan budidaya perikanan air tawar;		RTRW
7	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);		RTRW
8	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);		RTRW
9	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, pertanian, dan kehutanan;		RTRW
10	Peningkatan aksesibilitas kawasan		RTRW
Pengembangan dan pematapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Aranio	RTRW
2	Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan;		RTRW
3	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
4	Pusat kegiatan pelayanan dan simpul transportasi antar moda;		RTRW
5	Pusat kegiatan pengembangan pariwisata alam;		RTRW
6	Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;		RTRW
7	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;		RTRW
8	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);		RTRW
9	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL;		RTRW
10	Peningkatan aksesibilitas kawasan.		RTRW
Pengembangan dan pematapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Sungai Pinang	RTRW
2	Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;		RTRW
3	Pusat kegiatan budidaya perkebunan dan pertanian;		RTRW
4	Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan;		RTRW
5	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;		RTRW
6	Pusat kegiatan pengolahan industri hasil pertanian;		RTRW
7	Pusat kegiatan pengembangan pariwisata alam.		RTRW
Pengembangan dan pematapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Paramasan	RTRW
2	Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;		RTRW
3	Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan adat dayak meratus;		RTRW
4	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan.		RTRW
Pengembangan dan pematapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Pengaron	RTRW
2	Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan;		RTRW
3	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
4	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;		RTRW
5	Pusat kegiatan pariwisata alam dan religius;		RTRW
6	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);		RTRW
7	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);		RTRW
8	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, pertanian, dan kehutanan;		RTRW
9	Peningkatan aksesibilitas kawasan		RTRW
Pengembangan dan pematapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Sambung Makmur	RTRW
2	Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;		RTRW
3	Pusat kegiatan budidaya perkebunan;		RTRW
4	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
5	Pusat pengembangan permukiman perdesaan;		RTRW
6	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.		RTRW
Pengembangan dan pementapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Telaga Bauntung	RTRW
2	Pusat kegiatan perkebunan dan pengolahan perkebunan;		RTRW
3	Pusat kegiatan pengembangan permukiman;		RTRW
4	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
5	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;		RTRW
6	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);		RTRW
7	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)		RTRW
8	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, pertanian, dan kehutanan		RTRW
9	Peningkatan aksesibilitas kawasan.		RTRW
Pengembangan dan pementapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Cinta Puri Darussalam	RTRW
2	Pusat kegiatan pertambangan;		RTRW
3	Pusat kegiatan pengembangan permukiman pedesaan;		RTRW
4	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
5	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.		RTRW
Pengembangan dan pementapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK)			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
1	Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Kecamatan Aluh-Aluh	RTRW
2	Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;		RTRW
3	Pusat kegiatan jasa pariwisata alam;		RTRW
4	Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;		RTRW
5	Pusat kegiatan pendaratan hasil perikanan;		RTRW
6	Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;		RTRW
7	Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;		RTRW
8	Kawasan pengembangan industri dan pergudangan;		RTRW
9	Pusat Kegiatan simpul transportasi angkutan sungai dan angkutan darat .		RTRW
Perwujudan Sistem Prasarana			
Sistem jaringan Transportasi Darat			
1	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan kolektor primer empat (JKP-4)	Ruas Gambut - Beruntung Baru	RTRW
		Ruas Jalan Desa Mandiingin Timur - Bendungan Irigasi Desa Mandi Kapau Karang Intan	RTRW
		Ruas Jalan Lingkar Selatan (Desa Melintang) - Aluh Aluh	RTRW
		Ruas Banjarmasin - Kuin Kecil - Aluh Aluh - Sungai Musang	RTRW
		Ruas Jalan Mahligai	RTRW
		Ruas Jalan Manarap	RTRW
		Ruas Jalan Pengaron - Karang Intan	RTRW
		Ruas Jalan Benteng - Pengaron	RTRW
		Ruas Jalan Kuin Kecil - Handil Bujur	RTRW
		Jalan Syekh.Moh .Arsyad Al Banjari	RTRW
		Rencana pembangunan ruas jalan lingkar	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		Kecamatan Simpang Empat dan Karang Intan	
		Rencana pembangunan ruas jalan Sungai Kitano - Kelampayan	RTRW
		Rencana pembangunan ruas jalan Kampung Melayu - Kelampayan	RTRW
		Rencana pembangunan ruas jalan Martapura - Kawasan Perkantoran Baru	RTRW
		Rencana pembangunan ruas Jalan Simpang Empat – Cintapuri – Simpang Lima – Martapura Barat	RTRW
		Rencana pembangunan ruas jalan Karang Intan - Pengaron	RTRW
		Rencana pembangunan ruas jalan Cindai Alus – Banjarbaru	RTRW
		Rencana peningkatan ruas jalan Astambul - Kelampayan	RTRW
		Rencana pembangunan ruas jalan sungai lulut tembus batas Banjarmasin	RTRW
		Rencana peningkatan ruas jalan Astambul - Bincau	RTRW
		Rencana pembangunan ruas jalan Veteran - Pesayangan	RTRW
		Ruas jalan di Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengembangan dan pemeliharaan ruas jalan di Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
3	Rencana pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang	mulai dari <i>underpass</i> (Jalan A. Yani Km 71), Desa Simpang Empat, Desa Cintapuri, Desa Banua Anyar, Desa Alalak Padang, Desa Batik sampai pada pelabuhan khusus yang terletak di Sungai Barito	RTRW
4	Pengembangan dan pemeliharaan jalan Daerah pertambangan/daerah perkebunan	Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar - <i>underpass</i> pada jalan nasional kurang lebih pada kilometer 71 (tujuh satu) di Desa Lokcantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar – <i>flyover</i> pada jalan provinsi Margasari – Marabahan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala	RTRW
5	Pengembangan dan pemeliharaan jalan daerah pertambangan/daerah perkebunan	Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar – <i>underpass</i> pada jalan nasional kurang lebih kilometer pada 94 (sembilan empat) di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin – pelabuhan khusus Sungai Puting Kabupaten Tapin.	RTRW
6	Pengembangan dan pemeliharaan Terminal tipe A	Kecamatan Gambut	RTRW
7	Pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Martapura	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
8	Pengembangan dan pemeliharaan terminal tipe C	• Kecamatan Kertakhanyar; • Kecamatan Aluh-Aluh; • Kecamatan Tatah Makmur; • Kecamatan Beruntung Baru; • Kecamatan Sungai Tabuk; • Kecamatan Martapura Barat; • Kecamatan Martapura Timur; • Kecamatan Karang Intan; • Kecamatan Aranio; • Kecamatan Astambul; • Kecamatan Mataraman; • Kecamatan Simpang Empat; • Kecamatan Cintapuri Darussalam; • Kecamatan Pengaron; • Kecamatan Sungai Pinang; • Kecamatan Telaga Bauntung; • Kecamatan Paramasan; • Kecamatan Sambung Makmur.	RTRW
9	Studi Pembangunan Terminal Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar	RTRW
Rencana Jaringan Sungai, Danau dan Penyebrangan			
1	Pengelolaan Alur pelayaran	Sungai Martapura, melintasi Martapura – Banjarmasin	RTRW
2	Pengembangan dan/atau Pengelolaan Pelabuhan sungai dan danau	• Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		• Dermaga Depan Kantor amat di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh • Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk • Dermaga Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk • Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk • Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk • Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio • Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio • Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura • Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul • Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur.	
Rencana Jaringan Prasarana Telekomunikasi			
1	Jaringan bergerak terrestrial;	Kecamatan Martapura	RTRW
2	Jaringan bergerak seluler	Kabupaten Banjar	RTRW
3	Jaringan tetap (jaringan kabel).	• Kecamatan Kertakanyar, • Kecamatan Gambut,	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		• Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Sungai Tabuk, • Kecamatan Martapura, • Kecamatan Martapura Barat, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Karang Intan, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Tatah Makmur, • Kecamatan Beruntung Baru, • Kecamatan Aranio, • Kecamatan Mataraman, • Kecamatan Sambung Makmur, • Kecamatan Pengaron • Kecamatan Simpang Empat	
4	Peningkatan Kapasitas Sentral Telepon Otomat 1. Martapura	Kabupaten Banjar (KSN Banjarbakula)	RTRW
5	Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Letak Menara / RTL (Zona Cell Plan)	Kab. Banjar (KSP Rawa Batang Banyu)	RTRW
Jaringan Sumber Daya Air			
1	Normalisasi sungai dan pemeliharaan sempadan sungai	• Sungai Martapura, • Sungai Riam Kanan, • sungai kecil di Kabupaten Banjar • Sungai Riam Kiwa	RTRW
2	Pemeliharaan air baku berupa mata air	Kecamatan Paramasan	RTRW
3	Kawasan sempadan mata air memiliki radius 100 meter dari titik keluar air	Kecamatan Paramasan	RTRW
4	Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air	Kecamatan Paramasan	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
5	Pembangunan dan Pengembangan Waduk Riam Kiwa	Kecamatan Paramasan	RTRW
6	Pengembangan Waduk Riam Kanan	Kecamatan Aranio	RTRW
7	Pengembangan dan pemeliharaan Waduk Check Dam Madurejo	Kabupaten Banjar	RTRW
8	Pemeliharaan dan peningkatan air tanah pada cekungan air tanah (CAT)	Palangkaraya - Banjarmasin	RTRW
9	Penyusunan dokumen pengelolaan DAS antar Kabupaten	Seluruh Kabupaten Banjar	RTRW
10	Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi primer	- Kecamatan Karang Intan, - Kecamatan Martapura, - Kecamatan Martapura Barat, - Kecamatan Sungai Tabuk	RTRW
11	Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi sekunder	- Kecamatan Karang Intan, - Kecamatan Martapura, - Kecamatan Martapura Barat, - Kecamatan Sungai Tabuk, - Kecamatan Tatah Makmur, - Kecamatan Beruntung Baru, - Kecamatan Kertak Hanyar, - Kecamatan Gambut	RTRW
12	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengendali banjir: 1. Bendungan Ir. Pangeran Muhammad, 2. Bendungan Riam Kiwa, 3. Bendung Karang Intan, 4. Bendung Sungkai, 5. Bendung Mandiingin, 6. Bendung Takuti	- Kecamatan Aranio, - Kecamatan Paramasan, - Kecamatan Karang Intan, - Kecamatan Simpang Empat, - Kecamatan Pengaron	RTRW
13	Pengembangan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa Kewenangan Nasional	Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar dan Daerah Rawa (DR) Belanti	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
14	Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Provinsi	Daerah Rawa (DR) Folder Liang, Daerah Rawa (DR) Polder Tambak Hanyar, Daerah Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR) Antasan Bawah Ringin, Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura	RTRW
15	Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Banjar	RTRW
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya			
1	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengembangan dan Rencana Air Baku PDAM Intan Banjar	Kabupaten Banjar	RTRW
3	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kabupaten Banjar	RTRW
4	Pembangunan dan peningkatan jaringan distribusi penyediaan air minum	Kabupaten Banjar	RTRW
5	Peningkatan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	• Kecamatan Martapura, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Sungai Tabuk • Kecamatan Martapura Barat	RTRW
6	Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	• Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Aranio, • Kecamatan Beruntung Baru, • Kecamatan Paramasan, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Sambung Makmur, • Kecamatan Sungai Pinang,	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		• Kecamatan Sungai Tabuk, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Tatah Makmur, • Kecamatan Telaga Bauntung, • Kecamatan Cintapuri Darussalam, • Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Karang Intan, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Mataraman, • Kecamatan Pengaron, • Kecamatan Simpang Empat	
7	Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	• Kecamatan Beruntung Baru, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Tatah Makmur • Kecamatan Aluh-Aluh	RTRW
8	Peningkatan dan/atau pengelolaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	• Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Sungai Tabuk, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Martapura, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Matraman, • Kecamatan Pengaron, • Kecamatan Simpang Empat • Kecamatan Sungai Pinang	RTRW
9	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pengelolaan empat penampungan sampah sementara (TPS)	• Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Aranio, • Kecamatan Beruntung Baru,	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		• Kecamatan Paramasan, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Sambung Makmur, • Kecamatan Sungai Pinang, • Kecamatan Sungai Tabuk, • Kecamatan Martapura, • Kecamatan Martapura Barat, • Kecamatan Tatah Makmur, • Kecamatan Telaga Bauntung, • Kecamatan Cintapuri Darussalam, • Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Karang Intan, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Mataraman, • Kecamatan Pengaron, • Kecamatan Gambut • Kecamatan Simpang Empat	
10	Peningkatan dan/atau pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)	Kecamatan Karang Intan	RTRW
11	Penetapan jalur evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana	RTRW
12	Pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana	RTRW
13	Pengembangan rambu-rambu jalur evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana	RTRW
14	Pengembangan ruang evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana	RTRW
15	Pengoptimalan fasilitas evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana	RTRW
PERWUJUDAN POLA RUANG			
Perwujudan Kawasan Lindung			
Kawasan Hutan Lindung			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
1	Perlindungan terhadap penggunaan lahan di sekitar hutan lindung yang menimbulkan kerusakan hutan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar	RTRW
2	Penertiban dan penegasan kebijakan terkait penebangan liar yang di lakukan pada hutan lindung		RTRW
3	Rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung		RTRW
4	Sosialisasi dengan penduduk sekitar hutan lindung untuk turut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan		RTRW
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya			
1	Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan		RTRW
3	Pengolahan tanah secara teknis		RTRW
4	Pembuatan sistem saluran		RTRW
5	Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau <i>ground cover</i> untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air		RTRW
6	Pengendalian kegiatan budidaya		RTRW
7	Penataan sempadan sungai		RTRW
Kawasan Konservasi			
Kawasan Suaka Alam (KSA)			
1	pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Mempertahankan hutan hujan tropis		RTRW
3	Pemanfaatan cagar alam sebagai kawasan resapan air		RTRW
4	Pengembangan menjadi obyek wisata pariwisata penelitian, out bond dan sebagainya		RTRW
5	Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan yang terdapat alih fungsi		RTRW
6	Program pengelolaan, hutan kemasyarakatan dengan konsep berkelanjutan dan konsep desa hutan		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
7	Program pengelolaan hutan bersama masyarakat		RTRW
Kawasan Pelestarian Alam (KPA)			
1	Pengelolaan Taman Hutan Raya	Kabupaten Banjar	RTRW
Kawasan Lindung Geologi			
1	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pemanfaatan lahan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai imbuhan air tanah		RTRW
Kawasan Ekosistem Mangrove			
1	Rehabilitasi kawasan hutan bakau yang mengalami kerusakan	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove		RTRW
Perwujudan Kawasan Budidaya			
Kawasan Hutan Produksi			
1	Pengembangan Hutan Produksi	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya		RTRW
Kawasan Pertanian			
Kawasan Tanaman Pangan			
1	Perencanaan dan sosialisasi penetapan LP2B	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Inventarisasi Lahan LP2B dengan <i>by name by address</i>		RTRW
3	Pelaksanaan Perda LP2B		RTRW
4	Peningkatan produktivitas pertanian		RTRW
5	Pengembangan dan pengelolaan prasarana pertanian		RTRW
6	Perencanaan pembelian Lahan LP2B menjadi asset Pemerintah Daerah		RTRW
Kawasan Hortikultura			
1	Peningkatan produktivitas hortikultura	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengembangan dan pengelolaan prasarana hortikultura		RTRW
Kawasan Perkebunan			
1	Pengembangan industri pengolahan hasil komoditi	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi		RTRW
3	Pengembangan perkebunan		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
4	Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan		RTRW
5	Diversifikasi tanaman perkebunan		RTRW
6	Pengembangan pasar produksi perkebunan		RTRW
7	Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan meningkatkan kualitas bahan baku untuk memperoleh nilai tambah		RTRW
Kawasan Perikanan			
1	Pengembangan budidaya perikanan budidaya darat (kolam dan keramba)	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pembinaan petani ikan budidaya darat		RTRW
3	Peningkatan pelatihan keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan		RTRW
4	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendukung kawasan pengolahan ikan		RTRW
5	Pengembangan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI)	Kecamatan Aluh-Aluh	RTRW
6	Pembinaan petani ikan budidaya laut/pesisir muara sungai		RTRW
Kawasan Pertambangan dan Energi			
1	Pengembangan kawasan pertambangan	Kabupaten Banjar	RTRW
Kawasan Peruntukan Industri			
1	Pengembangan kawasan industri kimia dasar dan aneka industri	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengembangan kawasan aneka industri		RTRW
3	Pengembangan sentra industri bahan setengah jadi dan makanan ringan		RTRW
4	Pengembangan sentra industri permata		RTRW
5	Pengembangan kawasan pergudangan		RTRW
6	Pengembangan sentra industri kain sasirangan		RTRW
Kawasan Pariwisata			
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
3	Perencanaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)		RTRW
4	Pembangunan prasarana dan sarana wisata		RTRW
5	Meningkatkan pelestarian pada bangunan peninggalan sejarah dan budaya		RTRW
6	Pada kawasan sekitar bangunan cagar budaya harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya		RTRW
7	Menetapkan pembatasan bangunan yang terdapat disekitar kawasan cagar budaya		RTRW
Kawasan Permukiman			
1	Pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan	• Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Tatah Makmur, • Kecamatan Beruntung Baru, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Mataraman, • Kecamatan Simpang Empat, • Kecamatan Cintapuri Darusalam, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Karang Intan, • Kecamatan Aranio, • Kecamatan Sungai Tabuk, • Kecamatan Sungai Pinang, • Kecamatan Paramasan, • Kecamatan Telaga Bauntung, • Kecamatan Pengaron, • Kecamatan Sambung Makmur	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
2	Peningkatan kualitas permukiman perdesaan	• Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Tatah Makmur, • Kecamatan Beruntung Baru, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Mataraman, • Kecamatan Simpang Empat, • Kecamatan Cintapuri Darusalam, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Karang Intan, • Kecamatan Aranio, • Kecamatan Sungai Tabuk, • Kecamatan Sungai Pinang, • Kecamatan Paramasan, • Kecamatan Telaga Bauntung, • Kecamatan Pengaron, • Kecamatan Sambung Makmur	RTRW
3	Pengembangan kawasan perumahan baru	Kabupaten Banjar	RTRW
4	Pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan	• Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Karang Intan, • Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Martapura, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Martapura Barat,	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		- Kecamatan Simpang Empat, - Kecamatan Mataraman, - Kecamatan Sungai Tabuk	
5	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan	- Kecamatan Aluh-Aluh, - Kecamatan Astambul, - Kecamatan Gambut, - Kecamatan Karang Intan, - Kecamatan Kertak Hanyar, - Kecamatan Martapura, - Kecamatan Martapura Timur, - Kecamatan Martapura Barat, - Kecamatan Simpang Empat, - Kecamatan Mataraman, - Kecamatan Sungai Tabuk	RTRW
6	Pemenuhan RTH Sebesar 30 % wilayah dengan 20 % untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat	Kawasan Perkotaan Kabupaten Banjar	RTRW
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			
1	Pengembangan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Banjar	RTRW
Kawasan Ketentuan Khusus (Overlay)			
Kawasan Rawan Bencana Banjir			
1	Pengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mempertimbangkan permasalahan banjir pasca bencana alam tahun 2021	Kabupaten Banjar	RTRW
2	Pengaturan debit banjir dilakukan melalui pembangunan dan pengaturan bendung dan pintu air		RTRW
3	Pengaturan daerah rawan banjir		RTRW
4	Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
5	Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir		RTRW
6	Pengelolaan daerah tangkapan air alam pengendalian banjir		RTRW
Perwujudan Kawasan Strategis			
Kawasan Strategis Kabupaten			
Kepentingan Ekonomi			
1	Kawasan peruntukan industri Jalan Lingkar Selatan	• Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Gambut, • Kecamatan Tatah Makmur, • Kecamatan Aluh-aluh, • Kecamatan Beruntung Baru;	RTRW
2	Kawasan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Pengembangan Padi), Holtikultura dan tanaman pangan	• Kecamatan Gambut, • Kecamatan Kertak Hanyar, • Kecamatan Beruntung Baru, • Kecamatan Tatah Makmur, • Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Martapura Barat, • Kecamatan Martapura Timur, • Kecamatan Martapura, • Kecamatan Sungai Tabuk, • Kecamatan Astambul, • Kecamatan Mataraman, • Kecamatan Simpang Empat, • Kecamatan Cintapuri Darussalam, • Kecamatan Sambung Makmur, • Kecamatan Pengaron;	RTRW
3	Kawasan Perikanan Budidaya	• Kecamatan Martapura, • Kecamatan Martapura Barat, • Kecamatan Aluh-Aluh, • Kecamatan Aranio,	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber
		Kecamatan Karang Intan	
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya			
1	Kawasan Tradisional, Religius dan Bersejarah Kabupaten Banjar	- Sekumpul, - Teluk Selong, - Lok Baintan, Pesayangan, Kelampayan - seluruh Kabupaten Banjar.	RTRW
2	Kawasan Pariwisata	- Kecamatan Astambul, - Kecamatan Sungai Tabuk, - Kecamatan Aranio, - Kecamatan Martapura Barat, - Kecamatan Karangintan - Kecamatan Martapura (Wisata Budaya, Wisata Agro, Wisata Alam, Wisata Religi).	RTRW

Sumber: RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041

3.3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi yang dirumuskan guna mendukung pencapaian setiap misi yang direncanakan oleh kepala daerah. Arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan secara lebih spesifik dan kontekstual pada level renstra. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No.	Misi	Arah Kebijakan
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya	- Memperkuat sistem kesehatan daerah dengan perluasan akses kesehatan jasmani dan rohani masyarakat - Peningkatan pelayanan kesehatan primer melalui revitalisasi Pustu

No.	Misi	Arah Kebijakan
		• Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan mendorong kebijakan insentif serta kerjasama pendidikan untuk pemenuhan layanan kesehatan lanjutan • Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat melalui Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) • Percepatan pembentukan posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa • Memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata berbasis sains dan teknologi • Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor • Percepatan pengembangan layanan pendidikan dasar dan kesetaraan • Pemenuhan sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan pendidikan • Peningkatan layanan transportasi inklusif pendukung akses pendidikan • Penguatan peran perempuan • Peningkatan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). • Penguatan peran anak, pemuda, dan santri • Penguatan peran kelompok rentan dan penyandang disabilitas • Penguatan karakter religius masyarakat yang beragama dan berbudaya, untuk menciptakan toleransi dalam beragama, bernegara, dan berdemokrasi • Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dengan menggandeng lintas sektor • Penguatan Basis Data Kesejahteraan Masyarakat (DTKS) secara aktif dan berkala • Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat • Pelindungan dan pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya • Peningkatan dukungan pemajuan kebudayaan • Peningkatan dukungan pelestarian budaya tak benda

No.	Misi	Arah Kebijakan
2.	Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dengan meningkatkan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. • Melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur • Mendorong penyediaan jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah blankspot • Melanjutkan dan memantapkan pemerataan pembangunan • Melanjutkan dan mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan • Melanjutkan dan memantapkan restrukturisasi ekonomi • Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif • Membangun ketahanan pangan daerah • Membangun kembali keunggulan sektor pertanian dan perikanan • Pengembangan kawasan pariwisata religi dengan branding pariwisata halal • Pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi dan pariwisata • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan peran pemerintah dalam pengelolaan wisata di wilayah taman hutan raya • Penguatan PAD melalui kajian potensi parkir terutama di kawasan komersial, pasar, dan titik wisata • Penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan standar tipping fee;
3.	Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan	• Melanjutkan perbaikan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan • Melanjutkan pengembangan penataan ruang • Melanjutkan penataan lingkungan permukiman yang layak huni • Pembangunan sanitasi layak • Perluasan cakupan pelayanan dan ketersediaan air bersih • Melanjutkan penanggulangan bencana • Mewujudkan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir; • Peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan, kapasitas regulator dan operator, pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan hukum berjalan seimbang dan optimal;

No.	Misi	Arah Kebijakan
		• Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah • Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan Platform Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; • Pembentukan Kelembagaan Operator (UPTD/BLUD) Layanan Persampahan yang Terpisah dari Regulator; • Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah; • Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana Persampahan • Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle dan Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste the energy, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan off-taker hasil olahan sampah; • Mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan kampanye menuju budaya literasi sampah • Penerapan sistem <i>sanitary landfill</i> untuk TPA yang sudah ada. TPA hanya sebagai tempat untuk menampung residu hasil pengolahan sampah • Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengendali banjir
4.	Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani	• Penerapan sistem merit dan manajemen talenta • Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional • Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel • Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi • Melanjutkan pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan • Memperkuat aksi pencegahan korupsi • Pengembangan jaringan informasi geospasial daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah • Penguatan kolaborasi multipihak dalam pembangunan daerah

No.	Misi	Arah Kebijakan
		• Penyediaan insentif dan disinsentif berbasis kinerja serta pendanaan inovatif, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku lainnya;

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain arah kebijakan yang menyasar pelaksanaan misi, terdapat arah kebijakan yang dirumuskan dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berikut merupakan arah kebijakan dalam rangka pencapaian SPM selama lima tahun mendatang:

Tabel 3. 10 Arah Kebijakan Dukungan Pencapaian SPM

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
Bidang Pendidikan	
Pendidikan dasar	• Pendataan anak tidak sekolah <i>by name by addres</i> pada jenjang pendidikan dasar • Penyediaan peralatan dan perlengkapan sekolah bagi Masyarakat miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar • Peningkatan jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar yang terakreditasi • Pemberian beasiswa penuh bagi Masyarakat miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar • Pemenuhan jumlah minimal tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar • Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan dasar • Pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar • Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-12 tahun untuk sekolah di SD/MI • Peningkatan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs
Pendidikan kesetaraan	• Pendataan anak putus sekolah <i>by name by addres</i> pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
	• Peningkatan sosialisasi dan pemahaman Masyarakat terkait pendidikan kesetaraan • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan kesetaraan • Pemenuhan jumlah minimal tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan partisipasi anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan • Pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar
Pendidikan anak usia dini	• Peningkatan sosialisasi layanan pendidikan PAUD kepada masyarakat • Pendataan anak tidak sekolah by name by address pada jenjang pendidikan dasar • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan PAUD • Pemenuhan jumlah minimal tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan PAUD • Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar • Pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar
Bidang Kesehatan	
Pelayanan kesehatan ibu hamil	• Peningkatan kunjungan K6 ibu hamil • Penguatan kelas Ibu hamil dan pemanfaatan buku KI • Pemenuhan gizi ibu hamil, terutama yang beresiko kekurangan energi kronis (KEK)
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	• Peningkatan persalinan di fasilitas Kesehatan • Peningkatan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di RSUD Ratu Zalecha • Peningkatan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas • Kemitraan bidan dengan dukun bersalin: dukun tidak membantu persalinan, tetapi mendampingi secara sosial.

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	• Optimalisasi Kunjungan Neonatal (K1, K2, K3) dan pemanfaatan buku KIA • Peningkatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) • Pemberian ASI eksklusif sejak awal • Peningkatan layanan HBB (Helping Babies Breathe), pemenuhan alat inkubator dan alat resusitasi bayi
Pelayanan kesehatan balita	• Peningkatan Cakupan Imunisasi Lengkap • Rutin pemantauan status gizi (BB/U, TB/U, BB/TB, LILA) dan klasifikasinya (normal, risiko, wasting, stunting) • Pemberian PMT berbasis pangan local • Edukasi MP-ASI tepat waktu • Peningkatan fasilitas posyandu (alat timbang digital, Pengukur tinggi badan/antropometri, Meja konsultasi ibu-anak)
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	• Pemeriksaan kesehatan berkala di satuan pendidikan • Peningkatan koordinasi deteksi dini masalah kesehatan pada anak usia sekolah dasar. • Penyediaan dukungan layanan kesehatan preventif dan promotif di lingkungan sekolah. • Peningkatan literasi terkait pencegahan penyakit dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). • Optimalisasi program UKS • Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan layanan kesehatan dasar lainnya untuk anak usia sekolah.
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	• Penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk kelompok usia 15-64 tahun • Peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) • Edukasi perilaku hidup sehat • Edukasi pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan reproduksi. • Penyediaan layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan reproduksi • Edukasi pencegahan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS • Penguatan layanan kesehatan kerja sektor formal dan informal • Optimalisasi peran Puskesmas dalam kegiatan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular)

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	• Pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya • Peningkatan cakupan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular • Pengembangan Posyandu Lansia di tingkat desa dan kelurahan. • Edukasi perawatan kesehatan lansia berbasis keluarga dan komunitas. • Penguatan sinergi lintas sektor dalam rangka perlindungan, perawatan, dan peningkatan kesejahteraan lansia. • Pemantauan kesehatan lansia secara berkala.
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	• Peningkatan deteksi dini, pengobatan, dan pemantauan kesehatan bagi penderita hipertensi • Penguatan layanan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) • Edukasi dan promosi kesehatan terkait pencegahan faktor risiko hipertensi • Optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan kasus hipertensi • Penyediaan obat, alat pemeriksaan, dan sarana penunjang di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. • Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hipertensi • Edukasi pola hidup sehat.
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	• Penguatan penerapan pola hidup sehat melalui promosi ekstensif • Pelayanan terapi nutrisi medis secara menyeluruh • Edukasi pelatihan fisik dalam proses pelayanan kesehatan • Pelayanan terapi farmakologis yang terjangkau
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	• Penguatan upaya rehabilitatif bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat • Peningkatan pelayanan rehabilitasi psikiatrik • Pelayanan rehabilitasi sosial integratif
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	• Skrining dan pendataan penderita TB yang menyeluruh • Penguatan deteksi dini dan rujukan bagi penanganan kasus TB • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap TB

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
	• Perluasan akses vaksin TB yang terjangkau • Pemberian pelayanan kesehatan menyeluruh bagi penderita TB
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	• Edukasi pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HIV/AIDS • Pemeriksaan dan skrining bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV secara menyeluruh • Pengobatan teratur bagi penderita HIV yang terjangkau
Bidang Pekerjaan Umum	
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	• Peningkatan ketersediaan air bersih • Perluasan cakupan pelayanan air bersih • Peningkatan kualitas air minum yang layak bagi seluruh masyarakat • Pengembangan infrastruktur pengelolaan sumber daya air • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional • Pemerataan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	• Peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik • Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik • Peningkatan akses sanitasi masyarakat
Bidang Perumahan Rakyat	
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	• Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan • Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	• Peningkatan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh • Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman • Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan • Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha • Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
Bidang Trantibumlinmas	

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	• Peningkatan koordinasi lintas sektor • Peningkatan kapasitas dan kelembagaan trantribum
Pelayanan informasi rawan bencana	• Pemanfaatan TIK dalam informasi rawan bencana • Peningkatan kualitas data kebencanaan
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	• Peningkatan mitigasi kebencanaan • Peningkatan informasi kerawanan kebencanaan • Peningkatan desa berketahanan bencana • Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan kebencanaan
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	• Pemanfaatan TIK dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Peningkatan kapasitas aparatur Pemberian bantuan kebencanaan
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	• Pemanfaatan TIK dalam penyeleamatan dan evakuasi korban kebakaran • Peningkatan sarpras pemadam kebakaran • Peningkatan kapasitas aparatur • Pemberian bantuan kebakaran
Bidang Sosial	
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	• Peningkatan kualitas pendataan dan asesmen • Peningkatan kualitas rehabilitasi di luar panti • Pemberian bantuan sarana • Peningkatan kemandirian ekonomi • Peningkatan keterlibatan keluarga dan komunitas • Peningkatan kolaborasi antar sektor • Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara rutin
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	• Peningkatan pendataan dan identifikasi anak terlantar • Peningkatan bimbingan sosial dan penguatan psikologikal • Penguatan keluarga sebagai pengasuh utama • Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan • Peningkatan pelatihan keterampilan dan pengembangan bakat • Pengembangan allternatif pengasuhan non-panti • Peningkatan pemantauan dan evaluasi secara berkala

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	• Peningkatan kualitas identifikasi dan pendataan lansia terlanter • Peningkatan layanan home visit dan bimbingan sosial • Pemenuhan kebutuhan dasar • Peningkatan pelayanan kesehatan keliling • Peningkatan dukungan dan keterlibatan keluarga • Peningkatan kualitas layanan rujukan dan advokasi • Peningkatan pemantauan dan evaluasi secara berkala
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	• Peningkatan identifikasi, pendataan dan asesmen • Peningkatan pendampingan dan bimbingan sosial • Pemulangan dan reintegrasi keluarga • Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi • Peningkatan pencegahan melalui pengawasan terpadu • Peningkatan pelibatan komunitas dan lembaga sosial • Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan administrasi kependudukan • Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala

Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Peningkatan intervensi pada saat tahap tanggap darurat: • Evakuasi dan penyelamatan • Pemberian bantuan sosial darurat • Peningkatan kualitas layanan dukungan psikologikal • Pendataan dan verifikasi korban Peningkatan intervensi pada saat tahap paca bencana: • Rehabilitasi sosial untuk korban • Pemberian bantuan stimulan dan jaminan sosial • Penanganan kelompok rentan • Pemberdayaan sosial dan ekonomi Peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor: • Peningkatan kualitas koordinasi dengan forum tanggap bencana daerah • Peningkatan kualitas koordinasi pemulihan sosial jangka panjang dengan <i>stakeholders</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Secara operasional, janji politik tersebut telah dianalisis ke dalam nomenklatur program yang sesuai dengan regulasi guna mempermudah dimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis

terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut merupakan program prioritas yang merupakan hasil kanalisasi dari program prioritas kepala daerah dari hasil *cascading* kinerja yang telah dilakukan.

Tabel 3. 11 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan Misi 1 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya Misi 2 Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan Misi 3 Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan Misi 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesalehan Sosial(Nilai)		
				Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya akses layanan kesehatan	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standart (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Rasio Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rasio)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Indeks)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan (Indeks)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan (Rasio)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Kualitas Gizi Keluarga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi wasting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil Resiko KEK (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kefarmasian	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase apotek dan toko obat yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	Persentase sarana prasarana sesuai dengan standar Pelayanan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan	Persentase layanan Rumah Sakit yang sesuai dengan Standar Pelayanan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki sertifikat ijin kompetensi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar secara kuantitas (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia rumah sakit	Persentase Sumber Daya Manusia rumah sakit yang kompeten (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Pelayanan berorientasi Pasien	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Hipertensi dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Keberhasilan Tuberkulosis (TBC) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat ditatanan masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di 5 tatanan masyarakat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Kunjungan Pemustaka	Jumlah Pemustaka (Orang)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Norma Standar Perpustakaan (SNP) (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Rapor Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Minimal Baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Rapor Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nilai Minimal Baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Rapor Pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan Nilai Minimal Baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Rapor Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dengan Nilai Minimal Baik (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Dasar) (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Menengah Pertama) (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi (Pendidikan Anak Usia Dini) (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi (Sekolah Dasar) (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi (Sekolah Menengah Pertama) (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender		Standar Nasional Pendidikan (SNP) (%)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* ((%))		
			Meningkatnya Keluarga dengan ketahanan yang berkualitas	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Tribina Paripurna) (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Kualitas Konseling Keluarga	Persentase Desa yang Menerapkan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Indeks)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Meningkatnya Perlindungan Korban Kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Menurunnya Pernikahan Dini	Median usia kawin pertama (MUKP) wanita (Tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Meningkatnya harmoni sosial dan kemajuan kebudayaan		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
				Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai)		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
			Meningkatnya Atlet Berprestasi	Persentase atlet yang berdaya saing (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
					PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kapasitas SDA Satpol PP dan Satlinmas	Persentase SDA Satpol PP dan Satlinmas yang memiliki kualifikasi (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya Penanganan Perda dan Perkada yang terselesaikan sesuai dengan SOP	Pesentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penetapan Warisan Budaya Banjar	Persentase Warisan Budaya Kabupaten sebagai Budaya Yang Ditetapkan Secara Nasional (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Meningkatnya Perlindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Pengembangan Warisan Budaya Banjar Meningkat	Persentase Pelaku Seni Budaya Yang Aktif (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
		Meningkatnya produktivitas ekonomi		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))		
				Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian (%) (%)		
			Destinasi Wisata Yang Representatif Meningkat	Persentase Destinasi Wisata yang Representatif (Memiliki 3A) (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Daerah	Persentase Produk Daerah yang Terakses Pasar (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Daerah	Persentase Produk Daerah yang Terakses Pasar (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Efektivitas Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kompeten (Orang)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Industri yang Berstandarisasi	Persentase IKM bersertifikasi Halal (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase IKM bersertifikasi PIRT (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase IKM bersertifikasi TKDN (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase IKM berkemasan Standar (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Data Industri SIINAS	Persentase IKM yang patuh melaporkan data industri di SIINAS (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian sesuai standar (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana produksi pertanian sesuai standar (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah produk hasil pertanian pasca panen yang berkualitas (sertifikasi, pengemasan, dll) (Komoditas)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Sarana Perdagangan yang dikelola/dimanfaatkan dengan baik	Persentase Sarana perdagangan yang dikelola/dimanfaatkan dengan baik (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Persentase kerusakan bencana tanaman pangan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase kerusakan bencana tanaman hortikultura (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase kerusakan bencana tanaman perkebunan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Persentase angka kematian peternakan (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Optimalnya Pengelolaan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Olahan (Kg)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Meningkatnya perekonomian yang inklusif		Tingkat Kemiskinan ((%))		
				Rasio Gini (Indeks)		
			Kualitas Pemuda Yang Berkarakter Dan Mandiri Meningkat	Persentase pemuda yang berdaya saing (mampu	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
				bersaing di level prov dan nasional) (%)		
			Meningkatnya Atlet Berprestasi	Persentase atlet yang berdaya saing (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Ekonomi Perdesaan	Persentase desa yang memiliki PADes (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Persentase desa yang memiliki Produk Unggulan (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase fasilitasi penanaman modal yang berkualitas (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Jaringan Pemasaran Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi jaringan pemasaran kerja (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Persentase Koperasi Sehat (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahanya (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan (Rasio)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya Konstruksi Jalan Sesuai Standar	Persentase Panjang Jalan yang Berkonstruksi Sesuai Standar (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Kualitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Inclusion Error (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Exclusion Error (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang Aktif Melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase penataan administrasi tata wilayah desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya kualitas Pengendalian LKPM	Persentase peningkatan pelaporan LKPM yang Berkualitas (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	persentase SDM koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya minat Investasi Penanaman Modal	Persentase jumlah investor baru (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan standar (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal	Persentase Peningkatan pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial sesuai standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Standar (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
				Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)		
				Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola keuangan dan aset Desa sesuai standar (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya tindakan lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok kebutuhan pokok dan penting	persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok kebutuhan pokok dan penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
				Indeks Konektivitas (Nilai)		
				Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	V/C Rasio (Indeks)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Konstruksi Jalan Sesuai Standar	Persentase Panjang Jalan yang Berkonstruksi Sesuai Standar (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Luas Penataan Jalan lingkungan (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Persentase Gedung Pemerintah yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Kualitas Pra Sarana Penunjang Jalan	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Sambungan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Terkendalinya Daya Rusak Air pada Sungai Kabupaten	Persentase Sungai yang Dinormalisasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Rasio PAD terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Rasio Pajak Terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD (Rasio)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Terwujudnya ketahanan iklim daerah			Persentase penurunan intensitas Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)(%)		
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Menurunnya risiko bencana	Menguatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani dalam Waktu 24 Jam (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang Sesuai Ketentuan Rencana Tata Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penanggulangan Bencana	Persentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan/pengendalian kebakaran dan penyelamatan	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang ditindak lanjuti dan diproses tepat waktu (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase tingkat pemahaman masyarakat (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pemadaman dan penyelamatan (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase harta, benda dan nyawa yang dapat diselamatkan pasca kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Sesuai Standar (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau (Ha)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya Sampah yang Dibuang ke TPA	Persentase Sampah Yang Dibuang Ke TPA (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas	Indeks Sistem Merit (Nilai Merit) (Nilai)		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)		
				Predikat SAKIP Daerah (Predikat)		
				Indeks Integritas (Nilai)		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Fasilitas Bidang Aset Tanah Pemkab yang Didaftarkan (%) (%)	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
			Meningkatnya hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP	Nilai Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Skor)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya implementasi rencana aksi inflasi	Persentase Implementasi Rencana aksi inflasi (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat DPRD (Indeks)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum sekretariat DPRD (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan (Indeks)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Rasio Pajak Terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas ASN	IP ASN dimensi Kualifikasi (Indeks)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				IP ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Kualitas Data	Nilai Kematangan Domain Kualitas Data (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya Kualitas Data, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Performa Kinerja dan Disiplin ASN	Persentase data ASN yang berkualitas (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase tahapan pengadaan ASN yang terlaksana sesuai ketentuan (Aduan)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase formasi yang terisi sesuai dengan kebutuhan formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				IP ASN dimensi Kinerja (Indeks)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				IP ASN Dimensi Disiplin (Indeks)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterisian IKK dan Ketepatan waktu penyampaian Laporan SILPPD (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi dalam LHE Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas pengawasan APIP (rekom GRC)	Persentase Pengawasan yang memuat rekomendasi perbaikan tata kelola (Governance, Risk, and Compliance/GRC) (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Sektor Ekonomi dan Sumber Data Alam dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sumber Data Alam dengan Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang /Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang telah sesuai (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang telah sesuai (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya Laba BUMD	Persentase Peningkatan Laba BUMD (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai SAP (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Indeks Pengelolaan Aset (Indeks)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah	Indeks Penyerapan Belanja Daerah (Indeks)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya peran dan layanan APIP dalam mengawal perbaikan tata kelola GRC (Governance, Risk, and Compliance)	Persentase Komponen GRC (Governance, Risk, and Compliance) yang terasistensi (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya PNS Yang Masuk Kotak Nine Box	Persentase PNS Yang Terpetakan di Kotak 7-8-9 (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD (Rasio)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Kebijakan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Penerapan Perda APBD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase SKPD yang Mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Dengan Nilai B (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Riset dalam perencanaan	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Terjaganya kualitas koordinasi pencegahan korupsi	Persentase pemenuhan dokumen monitoring dan pencegahan korupsi (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Terwujudnya pengelolaan risiko perangkat daerah yang baik	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan risiko secara memadai (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Indeks Pemerintahan Digital (Nilai)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kematian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan akta perceraian non muslim (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan titik layanan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang memiliki Dokumen Teknis (arsitektur, alur sistem, API) dan SOP layanan lengkap (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan pengolahan dan penyajian data kependudukan yang sesuai aturan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pengelolaan Jaringan SIAK	Persentase jaringan dan aplikasi siak yang dikelola dengan baik di seluruh titik layanan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Menurunnya risiko kebocoran informasi	Persentase insiden kebocoran informasi atau akses ilegal (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital yang terintegrasi	Persentase layanan Publik berbasis digital yang terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

Sumber: Diolah, 2025

Tabel 3. 12 Definisi dan Rincian Program Prioritas RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
BANJAR SIGAR	Banjar Sigar merupakan program prioritas yang menyasar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar. Berbagai intervensi yang menyasar peningkatan layanan dan infrastruktur dalam pelayanan	Bantuan asupan makan bergizi bagi bayi/ anak untuk memastikan kesehatan tumbuh kembang anak/bayi	- Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Sehat cepat, memberikan layanan kesehatan cepat melalui layanan <i>hotline</i> dan mendatangi ke rumah	
		Merevitalisasi rumah sakit dan membangun rumah sakit baru	
		Layanan kesehatan bagi warga kurang mampu	
		Puskesmas melayani yakni memiliki prasarana dan sarana kesehatan yang memadai	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	kesehatan menjadi upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar	Posyandu masa depan sebagai pusat pendidikan dan kesehatan keluarga dilengkapi fasilitas ramah anak dan fasilitas kesehatan yang cukup	• Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pemerataan rasio tenaga kesehatan di desa, khususnya bidan desa di tempat terpencil dengan mengutamakan tenaga kesehatan lokal desa	
BANJAR CENDEKIA	Banjar Cendekia adalah program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjar. Program prioritas Banjar Cendekia menekankan pada berbagai intervensi dalam bidang pendidikan melalui	Pesantren dapat menerima bantuan untuk kegiatan operasional pesantren dan pendidikan santri	• Dinas Pendidikan • Sekretariat Daerah • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan • Dinas Pertanian
		Sekolah layak, yakni revitalisasi dan pembangunan sekolah, dan ruang kelas dengan prasarana dan sarana yang memadai	
		Sekolah gratis bagi warga yang membutuhkan	
		Belajar berpikir dan berekspresi, yaitu belajar sesuai dengan minat dan bakat	
		Tuan guru/ guru mengaji masuk sekolah untuk menguatkan pendidikan agama, dan penguatan nilai-nilai akhlak mulia	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	peningkatan kualitas pengajar, infrastruktur, dan bantuan operasional baik kepada sekolah formal maupun sekolah keagamaan di Kabupaten Banjar	Alumni Pesantren dapat menerima bantuan untuk kegiatan penyetaraan pendidikan	• Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata • Dinas Perhubungan
		Pemberian insentif/tunjangan bagi tuan guru/ guru mengaji	
		Pemerataan rasio guru dan murid	
		Memberikan tunjangan yang berkeadilan dan/ insentif bagi guru sesuai dengan prestasi dan pencapaian kinerja	
		Satu Pesantren Satu Produk, yakni pesantren dapat memiliki kemandirian ekonomi melalui perdagangan dan jasa	
BANJAR SAMAWA	Banjar Samawa merupakan program prioritas yang menysasar peningkatan kualitas keluarga Kabupaten Banjar. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam kemasyarakatan memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pembangunan manusia ke depan. Banjar Samawa menekankan intervensi kepada penguatan keluarga sebagai institusi sosial, pemberdayaan	Penguatan keluarga sebagai basis pendidikan moral, yakni mengadakan kelas <i>parenting</i> dan konseling keluarga untuk membantu orang tua dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral yang kuat	• Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Sekretariat Daerah • Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi • Dinas Pendidikan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Sekolah muslimat, yakni memberikan pelatihan kepada kaum perempuan agar memahami hak dan kewajiban perempuan, pendidikan anak, dan pendidikan keluarga	
		Muslimat terampil, yakni memberikan keterampilan bagi perempuan sehingga mampu berdaya sebagai ketahanan keluarga	
		Penambahan fasilitas ramah anak, khususnya di tempat ibadah	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh		
BANJAR BERKARAKTER	Banjar Berkarakter adalah program prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pembangunan kebudayaan Kabupaten Banjar secara menyeluruh. Program prioritas ini menekankan kepada pembangunan kebudayaan sebagai landasan hidup yang kokoh dalam masyarakat Kabupaten Banjar untuk menciptakan keharmonisan sosial antar elemen masyarakat di Kabupaten Banjar.	Festival budaya untuk mempromosikan dan melestarikan budaya, khususnya Budaya Banjar yang religius menjadi daya tarik wisata	• Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata • Dinas Pendidikan • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Sekretariat Daerah
		Budaya dari sekolah, yakni pengenalan dan pengembangan Kebudayaan Banjar melalui program-program di sekolah	
		Pendidikan etika dan moral religius, yakni mengadakan pendidikan yang fokus pada ajaran etika dari berbagai agama dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari	
		Gerakan kesadaran sosial, yakni mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sukarela seperti membersihkan lingkungan, membantu yang membutuhkan, anti-Kekerasan dan anti-Perundungan	
BANJAR INTAN MAJU	Banjar Intan Maju merupakan program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi sektor unggulan Kabupaten Banjar. Dalam dokumen RPJPD ditetapkan bahwa sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian sebagai tiga sektor unggulan daerah yang perlu dikembangkan lebih lanjut.	Destinasi wisata unggulan, yakni pengembangan destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian daerah dengan dukungan infrastruktur, promosi dan event keagamaan	• Dinas Pertanian • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan • Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
		Wisata Perikanan, yakni mendorong pengembangan kampung nelayan dan kampung perikanan sebagai destinasi wisata potensial	
		Bantuan Benih, Pakan, dan Obat, yakni upaya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan menyalurkan bantuan kepada pembudidaya, berupa benih, pakan, dan obat-obatan.	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	Banjar Intan Maju merumuskan berbagai intervensi untuk mendukung pencapaian tujuan ini, melalui penyediaan sarana dan prasarana di ketiga sektor tersebut, perluasan akses pasar, dan peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut secara lebih lanjut.	Bantuan Peralatan, yakni upaya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan menyalurkan bantuan kepada nelayan dan pembudidaya serta pengolah ikan, berupa mesin dan peralatan	Dinas Perhubungan
		Pembangunan Coldstorage, yakni upaya pengendalian harga dan melindungi risiko kerusakan hasil panen, serta jaminan ketersediaan pangan diperlukan pembangunan coldstorage	
		Pembangunan Gudang Logistik, yakni upaya pengendalian harga dan melindungi risiko kerusakan hasil panen, serta jaminan ketersediaan pangan diperlukan pembangunan gudang logistic, berupa lumbung desa hingga gudang logistik pangan	
		Bantuan Peralatan, yaitu upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menyalurkan bantuan kepada petani, berupa peralatan pertanian	
		Bantuan Bibit, Pupuk, dan Obat, yaitu upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menyalurkan bantuan kepada petani, berupa benih/ bibit, pupuk, dan obat-obatan	
		Revitalisasi Lahan Pertanian, yakni upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan melakukan perluasan dan revitalisasi lahan pertanian	
		Kindai limpuar, yakni peningkatan produksi dan produktivitas padi dengan menjadikan lahan pertanian tanaman pangan menjadi kawasan prioritas yang didukung infrastruktur memadai.	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
		Revitalisasi/ Pembangunan Saluran Irigasi, yaitu upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan melakukan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi pertanian.	
BANJAR MEMBANGUN	Banjar Membangun merupakan program prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur daerah dalam rangka mendukung upaya pembangunan secara umum. Intervensi dalam program prioritas ini memfokuskan kepada pembangunan jalan, jembatan, dan optimalisasi transportasi publik di Kabupaten Banjar.	Jalan dan jembatan mantap, yakni akselerasi dalam pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa dengan sumber pembiayaan dari multi-stakeholder, termasuk bantuan pembiayaan khusus jalan kabupaten	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan • Dinas Perhubungan • Sekretariat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Pengembangan angkutan massal yang nyaman dan aman	
BANJAR TERTATA	Banjar Tertata adalah program prioritas daerah dalam rangka penataan ruang daerah yang lebih baik. Ruang sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Oleh karenanya, peningkatan	Alun-alun dan Koridor, yaitu melanjutkan penataan alun-alun dan koridor kota martapura melalui pembiayaan dari multy stakeholder termasuk dari badan usaha/usaha swasta yang ingin berpartisipasi aktif dalam pembangunan.	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Kawasan Religi, yakni melanjutkan penataan kawasan religi sebagai identitas kota yang religius melalui pembiayaan dari multi stakeholder.	
		Smart City, yaitu penerapan konsep kota cerdas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan angka literasi digital.	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	kualitas ruang yang berkeadilan untuk semua menjadi hal yang penting untuk dilakukan.	Kota Ramah Difabel, dengan memastikan bahwa kota adalah kota untuk semua sehingga pembangunan infrastruktur bias diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).	• Sekretariat Daerah • Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan
		Penataan ruang berkeadilan dan pengelolaan kawasan kumuh yang terpadu	
SMART KAMPUNG MANIS	Smart Kampung Manis ialah program unggulan daerah dalam rangka pembangunan desa yang lebih berdaya dan mandiri. Desa yang berdaya menjadi faktor yang penting dalam pembangunan daerah secara umum. Sebagai unit pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat secara intensif, pemerintah desa perlu memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karenanya,	Kesejahteraan Perangkat Desa, yakni memberikan bantuan tambahan keuangan bagi perangkat desa sebagai insentif dalam upaya peningkatan pelayanan di desa.	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan • Dinas Pertanian • Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata • Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		BUMDesa Berkarya, yaitu memastikan bahwa BUMdesa di wilayah Kabupaten Banjar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian desa, berupa PADesa dan menciptakan lapangan pekerjaan mandiri di desa	
		Internet Desa, yakni memastikan bahwa seluruh desa di wilayah Kabupaten Banjar telah dijangkau akses internet, dalam upaya pemerataan dan penyebaran informasi.	
		Satu Desa Satu Produk, yakni memberikan bantuan teknis dalam upaya pengembangan ekonomi desa dengan mengembangkan produk lokal desa setempat untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	pembangunan dan pemberdayaan baik pemerintah maupun masyarakat desa menjadi penting.		
BANJAR BAUSAHA	Banjar Bausaha merupakan program prioritas daerah dalam rangka mendorong kewirausahaan dan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif di Kabupaten Banjar. Program prioritas ini didukung oleh intervensi dalam pengembangan kewirausahaan melalui UMKM serta peningkatan kapasitas tenaga kerja daerah.	Dukungan untuk UMKM, yakni memberikan bantuan teknis, pelatihan, akses ke pembiayaan, dan penyederhanaan regulasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	• Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
		Diversifikasi Ekonomi, yakni mengembangkan berbagai sektor ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor	
		Pengembangan Wirausaha, yakni mendorong budaya kewirausahaan melalui pendidikan, pelatihan, dan program mentor untuk membantu individu memulai dan mengembangkan usaha serta memfasilitasi akses ke pembiayaan bagi wirausaha melalui pinjaman mikro, modal ventura, dan skema pendanaan lainnya	
		Pelatihan dan Magang, yaitu menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk memastikan lulusan siap kerja dan fasilitasi program magang untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja, khususnya di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja terampil	
BANJAR TANGGUH	Banjar Tangguh adalah program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Peningkatan	Jejaring Crisis Center, Menyediakan bantuan darurat dan dukungan dalam situasi krisis	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pendidikan
		Pendidikan Kebencanaan, Memberikan pendidikan ke-Bencana-an disekolah baik pada upaya pencegahan maupun penanggulangan bencana	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	ketahanan daerah ini didukung oleh penguatan mitigasi bencana dan infrastruktur pendukung dalam penanggulangan bencana	Infrastruktur Pengendali Banjir, Menyediakan serangkaian fasilitas dan sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengurangi dampak banjir	• Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
BANJAR LESTARI	Banjar Lestari merupakan program prioritas daerah dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah secara berkelanjutan. Program prioritas ini memuat intervensi dalam pengelolaan air dan limbah yang memadai serta pengelolaan sampah yang partisipatif.	Air dan Limbah Layak, yaitu melanjutkan perbaikan dan pencapaian akses layanan air bersih layak dan akses air limbah yang layak	• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kecamatan • Dinas Pendidikan
		Sampah Komunitas, yaitu melanjutkan penatakelolaan sampah berbasis individual dan komunitas untuk mengurangi produksi sampah di masyarakat melalui inovasi dan integrasi pengelolaan sampah	
		Sampah Sekolah, yaitu mendorong pembentukan pendidikan mengenai sampah dan pengelolaan sampah yang mendasar dan dapat diterapkan secara nyata di sekolah	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
BANJAR AMANAH	Banjar Amanah adalah program prioritas daerah yang menysasar pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, dan berdampak. Pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel merupakan kunci penting dalam mendukung penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan APBD yang efektif juga akan meningkatkan keberdampakan dari penggunaan anggaran daerah. Program prioritas ini didukung oleh berbagai intervensi untuk memastikan APBD yang lebih transparan dan berdampak.	APBD untuk Infrastruktur dan Pembangunan Manusia, yaitu penggunaan APBD difokuskan pada pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia	• Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah
		APBD untuk Membangun Desa, yaitu pemanfaatan APBD untuk membangun desa melalui ADD (Alokasi Dana Desa) sesuai dengan kebutuhan daerah	
		KPBU, yakni membangun kemitraan Pemerintah – Swasta untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.	
		BUMD untuk PAD, yakni reformasi BUMD dengan menerapkan GCG (Good Corporate Governance) dan perusahaan yang efektif dan efisien guna meningkatnya PAD melalui BUMD	
		Optimalisasi Aset, yakni mengusahakan aset untuk aktivitas ekonomi sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah	
		Kemitraan BUMD dengan Badan Usaha Swasta, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi usaha BUMD melalui pengembangan kerjasama dengan Badan Usaha Swasta guna meningkatkan perekonomian daerah	
BANJAR MELAYANI	Banjar Melayani merupakan program prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Banjar kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas	Pelayanan Publik yang Handal, yakni percepatan pembangunan pelayanan publik yang terintegrasi dan mampu langsung menjangkau kebutuhan masyarakat.	• Sekretariat Daerah • Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Manajemen ASN, yaitu percepatan penerapan Sistem Merit, yakni manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi	

Program Prioritas			Perangkat Daerah
Program Prioritas	Definisi	Rincian Program	
	pelayanan publik kepada masyarakat, mulai dari penataan aparatur sipil yang efektif, digitalisasi layanan publik, dan pemerataan akses pelayanan publik secara umum.	Renumerasi Adil Berbasis Kinerja dan Risiko, yakni percepatan renumerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adil berbasis kinerja dan manajemen risiko kecurangan untuk membentuk ASN yang bersih dan melayani.	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Inspektorat • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
		Tata Kelola Berbasis Elektronik, yakni mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	
		APBD Elektronik, yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pengawasan APBD	
		Satu Data, yaitu pembangunan satu data yang handal terkait tata kelola pemerintahan guna memberikan informasi akurat yang dapat diakses langsung oleh masyarakat	
		Pelayanan Publik yang Handal, yakni percepatan pembangunan pelayanan publik yang terintegrasi dan mampu langsung menjangkau kebutuhan masyarakat.	

Sumber: Diolah, 2025

3.3.5 Dukungan Program RPJMD Banjar Tahun 2025-2029 terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas daerah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 13 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Prioritas Nasional 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	URUSAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4	Pengembangan Pangan Hewani		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
5	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
6	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
7	Peningkatan Penyediaan Energi		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
8	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
9	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
10	Konservasi Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN
11	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN
12	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN
13	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
14	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
15	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
16	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi,		PROGRAM PENGELOLAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
	Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik		KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	LINGKUNGAN HIDUP	KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
17	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
18	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
19	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN
20	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	URUSAN PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	URUSAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
21	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
			UTILITAS UMUM (PSU)		DAN LINGKUNGAN HIDUP
22	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
23	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
24	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
25	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
26	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
27	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
28	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
29	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
30	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
31	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
32	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
33	Pencegahan dan Penurunan Stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
34	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
35	Penuntasan TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
36	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
37	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
38	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
39	Investasi pelayanan kesehatan primer		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
39	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
40	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
41	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
42	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	URUSAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
43	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Prioritas Nasional 5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN
44	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
45	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
47	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL P3AP2KB
48	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
49	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
50	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
51	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		PROGRAM PENATAAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
52	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH
53	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	URUSAN KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
54	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
55	Ekstensifikasi dan Intensifikasi		PROGRAM PENGELOLAAN	URUSAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Urusan Pengampu	OPD Pengampu
	Penerimaan Perpajakan	Prioritas Nasional 8	PENDAPATAN DAERAH		PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
56	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	URUSAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
57	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
58	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
59	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

3.3.6 Dukungan Program RPJMD Banjar Tahun 2025-2029 terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029

Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Banjar juga turut serta dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tahun 2025-2029. Berikut merupakan rincian dukungan program terhadap proyek strategis nasional.

Tabel 3. 14 Dukungan Program RPJMD Banjar Tahun 2025-2045 terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN Tahun 2025-2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
	Makan Bergizi Gratis			

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (Koordinator)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat 3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program Peningkatan Kualitas 5. KeluargaProgram Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Program Penanganan Kerawanan Pangan 9. Program Rehabilitasi Sosial
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
				Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
	Swasembada Pangan			
6	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
7	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital			
8	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, BSLI, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	Swasta	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9	Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat,	PT MIND ID, Swasta	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
10	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Komunikasi dan Informatika
	Perumahan dan Permukiman			
11	Pembangunan 3 juta rumah	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)	Program Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Banjar yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah, sekaligus memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Selain mencakup target program, bab ini juga memuat pagu indikatif sebagai proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk alokasi dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan. Besaran dana yang tersedia merujuk pada Bab III RPJMD, khususnya terkait kerangka pendanaan yang meliputi kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

4.1 Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD. Setiap program dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program-program ini juga mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					438.674.679.000		447.154.369.000		459.097.541.000		464.467.542.000		475.707.636.000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					364.571.939.000		371.619.205.000		381.544.887.000		386.007.765.000		395.349.136.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan (Indeks)	88,72	89,72	90,15	364.571.939.000	90,86	371.619.205.000	91,67	381.544.887.000	92,29	386.007.765.000	93	395.349.136.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					73.799.404.000		75.225.965.000		77.235.196.000		78.138.606.000		80.029.557.000	
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) (%)	57,82	67,3	71,19	41.972.181.000	75,11	43.074.303.500	77,02	44.369.164.000	78,83	44.876.512.000	80,54	45.968.261.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) (%)	76,7	78,32	79,55		80,82		82,19		83,39		84,56		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Persentase Masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan (%)	49,01	58,74	65,23	10.850.210.500	71,72	10.960.809.000	72,48	11.098.529.000	73,24	11.218.919.000	74	11.452.116.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) (%)	35,16	7,5	15		22,5		30		37,5		45		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Raport Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nilai Minimal Baik (%)	5,33	7,33	9,33	20.977.012.500	11,33	21.190.852.500	13,33	21.767.503.000	15,33	22.043.175.000	17,33	22.609.180.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Raport Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dengan Nilai Minimal Baik (%)	34,31	42,31	50,31		58,31		66,31		74,31		82,31		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Raport Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengai Nilai Minimal Baik (%)	31,16	37,66	44,16		50,66		57,16		63,66		70,16		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Raport Pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan Nilai Minimal Baik (%)	7,14	10,64	13,64		16,64		19,64		22,64		25,64		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					229.336.000		233.769.000		240.013.000		242.820.000		248.696.000	
Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100	229.336.000	100	233.769.000	100	240.013.000	100	242.820.000	100	248.696.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					74.000.000		75.430.000		77.445.000		78.351.000		80.247.000	
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Indeks)	0,54	0,53	0,52	74.000.000	0,51	75.430.000	0,5	77.445.000	0,49	78.351.000	0,48	80.247.000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Dasar) (Indeks)	0,66	0,64	0,62		0,6		0,58		0,56		0,54		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Indeks Pemerataan Guru (Sekolah Menengah Pertama) (Indeks)	0,86	0,84	0,82		0,8		0,78		0,76		0,74		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi (Pendidikan Anak Usia Dini) (%)	36,44	39,09	43,97		44,71		45,45		46,2		46,94		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi (Sekolah Dasar) (%)	56,77	62,15	67,54		72,92		78,3		83,69		90		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi (Sekolah Menengah Pertama) (%)	56,49	62,08	67,66		73,25		78,83		84,42		90		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					574.462.919.000		586.058.887.000		587.321.834.000		590.968.521.000		593.348.413.000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					356.057.313.000		362.939.989.000		372.633.855.000		376.992.502.000		386.115.704.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan (Indeks)	88,34	88,43	88,6	256.357.313.000	88,7	260.439.989.000	88,85	266.633.855.000	90	268.992.502.000	90,05	275.415.704.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Indeks)	76	78	80		82		84		86		88		1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Rasio Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rasio)	49	50	51	97.500.000.000	52	100.000.000.000	53	103.000.000.000	54	105.000.000.000	55	107.000.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia rumah sakit	Persentase Sumber Daya Manusia rumah sakit yang kompeten (%)	-	20	25	2.200.000.000	26	2.500.000.000	27	3.000.000.000	28	3.000.000.000	30	3.700.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					217.500.849.000		222.196.652.000		213.741.100.000		213.018.065.000		206.251.573.000	
Meningkatnya Kualitas Gizi Keluarga	Prevalensi wasting (%)	9,8	-	7,5	5.852.971.000	7	5.958.530.420	6,5	6.066.086.029	5	6.175.676.601	5	6.287.341.669	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil Resiko KEK (%)	13,46	13	13		12		11		10		10		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	-	-	8	2.949.051.100	7,5	3.008.032.122	7	3.068.192.766	6,5	3.129.556.616	6	3.156.147.752	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	-	-	2		1,75		1,5		1		0,75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Keberhasilan Tuberkulosis (TBC) (%)	-	-	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai Universal Child Immunitaation (UCI) (%)	-	-	85		86		87		88		89		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian (%)	-	-	6		7		8		9		10		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar (%)	-	-	77	59.566.576.420	78	58.671.944.439	79	44.313.500.943	80	44.749.721.839	81	33.971.980.820	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar (%)	-	-	72		73		74		75		76		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi (%)	59	60	63		65		68		71		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar (%)	-	-	85		86		87		88		89		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Martapura 1
Meningkatnya akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	99,47	100	100	143.543.967.480	100	148.861.839.019	100	154.444.870.262	100	153.046.250.944	100	156.776.055.759	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (%)	-	-	46		55		61		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standart (%)	-	54,75	60		63		65		71		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Martapura 1
Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan	Persentase layanan Rumah Sakit yang sesuai dengan Standar Pelayanan (%)	-	75	75	254.410.201	75	220.500.000	75	220.500.000	100	225.500.000	100	225.500.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	Persentase sarana prasarana sesuai dengan standar Pelayanan (%)	62	65	70	5.207.472.799	73	5.349.400.000	75	5.500.000.000	77	5.561.359.000	78	5.699.547.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
Meningkatnya Pelayanan berorientasi Pasien	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (%)	60	80	80	126.400.000	80	126.406.000	80	127.950.000	80	130.000.000	80	135.000.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					399.332.000		407.051.000		417.923.000		422.811.000		433.043.000	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar secara kuantitas (%)	100	100	100	399.332.000	100	407.051.000	100	417.923.000	100	422.811.000	100	433.043.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki sertefikat ijin kompentensi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					18.500.000		18.858.000		19.362.000		19.588.000		20.062.000	
Meningkatnya kualitas kefarmasian	Persentase apotek dan toko obat yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar (%)	50	50	52	18.500.000	54	18.858.000	54	19.362.000	56	19.588.000	56	20.062.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar (%)	-	-	52		54		56		58		60		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					486.925.000		496.337.000		509.594.000		515.555.000		528.031.000	
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat ditatanan masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di 5 tatanan masyrakat (%)	-	-	68	486.925.000	72	496.337.000	80	509.594.000	90	515.555.000	100	528.031.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					288.435.317.000		293.150.844.000		300.980.693.000		264.501.223.000		315.902.141.000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.362.181.000		16.678.466.000		17.123.936.000		17.324.232.000		17.743.478.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Indeks)	87,56	87,58	87,6	16.362.181.000	87,65	16.678.466.000	87,7	17.123.936.000	87,75	17.324.232.000	87,8	17.743.478.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN					9.302.935.000		9.482.763.000		9.736.041.000		9.849.922.000		10.088.290.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	-	75,75	76,64	4.930.556.000	77,52	5.025.864.000	78,41	5.160.102.000	79,29	5.220.459.000	80,17	5.346.794.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Terkendalinya Daya Rusak Air pada Sungai Kabupaten	Persentase Sungai yang Dinormalisasi (%)	n/a	0,257	0,513	4.372.379.000	0,77	4.456.899.000	1,026	4.575.939.000	1,283	4.629.463.000	1,54	4.741.496.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					17.519.467.000		17.858.123.000		18.335.101.000		18.549.564.000		18.998.463.000	
Meningkatnya Sambungan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)	100	100	100	17.519.467.000	100	17.858.123.000	100	18.335.101.000	100	18.549.564.000	100	18.998.463.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					7.052.432.000		7.188.757.000		7.380.764.000		7.467.096.000		7.647.799.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	100	100	100	7.052.432.000	100	7.188.757.000	100	7.380.764.000	100	7.467.096.000	100	7.647.799.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					12.130.447.000		12.364.932.000		12.695.190.000		12.843.684.000		13.154.501.000	
Meningkatnya Kualitas Pra Sarana Penunjang Jalan	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	n/a	8,4	8,72	12.130.447.000	9,04	12.364.932.000	9,36	12.695.190.000	9,68	12.843.684.000	10	13.154.501.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					651.858.000		664.459.000		682.206.000		690.186.000		706.888.000	
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100	651.858.000	100	664.459.000	100	682.206.000	100	690.186.000	100	706.888.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					50.568.240.000		51.545.737.000		52.922.487.000		53.541.514.000		54.837.216.000	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Gedung Pemerintah yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	n/a	16,85	24,72	50.568.240.000	32,58	51.545.737.000	40,45	52.922.487.000	48,31	53.541.514.000	56,18	54.837.216.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Luas Penataan Jalan lingkungan (%)	-	38,12	44,68		51,24		57,8		64,37		70,93		1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					171.397.155.000		174.710.304.000		179.376.690.000		141.474.835.000		189.898.520.000	
Meningkatnya Konstruksi Jalan Sesuai Standar	Persentase Panjang Jalan yang Berkonstruksi Sesuai Standar (%)	n/a	54,16	56,16	171.397.155.000	58,16	174.710.304.000	60,16	179.376.690.000	62,16	141.474.835.000	64,16	189.898.520.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					608.613.000		620.378.000		636.948.000		644.398.000		659.992.000	
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi (%)	-	20	35	608.613.000	55	620.378.000	70	636.948.000	85	644.398.000	100	659.992.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.841.989.000		2.036.925.000		2.091.330.000		2.115.792.000		2.166.994.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Sesuai Standar (%)	-	22,22	27,78	2.330.430.000	33,33	1.670.279.000	38,89	1.714.891.000	44,44	1.734.949.000	50	1.776.935.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang Sesuai Ketentuan Rencana Tata Ruang (%)	-	70	70	511.559.000	70	366.646.000	70	376.439.000	70	380.843.000	70	390.059.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					69.520.608.000		70.979.538.000		72.992.731.000		73.966.246.000		75.878.350.000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.530.131.000		21.946.314.000		22.532.484.000		22.796.043.000		23.347.706.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Indeks)	80,00	81	82	21.530.131.000	83	21.946.314.000	84	22.532.484.000	84,5	22.796.043.000	85	23.347.706.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					993.196.000		1.012.395.000		1.039.435.000		1.051.593.000		1.077.042.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	76,75	76,81	76,94	993.196.000	77,09	1.012.395.000	77,24	1.039.435.000	77,4	1.051.593.000	77,55	1.077.042.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					9.275.539.000		9.454.837.000		9.707.369.000		9.820.915.000		10.058.581.000	
Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	54,5	54,6	54,7	9.275.539.000	54,8	9.454.837.000	54,9	9.707.369.000	55	9.820.915.000	55,1	10.058.581.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					7.069.394.000		7.206.047.000		7.398.515.000		7.485.054.000		7.666.192.000	
Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	54,5	54,6	54,7	7.069.394.000	54,8	7.206.047.000	54,9	7.398.515.000	55	7.485.054.000	55,1	7.666.192.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					30.652.348.000		31.359.945.000		32.314.928.000		32.812.641.000		33.728.829.000	
Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	54,5	54,6	54,7	30.652.348.000	54,8	31.359.945.000	54,9	32.314.928.000	55	32.812.641.000	55,1	33.728.829.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					50.493.279.000		51.469.327.000		53.394.036.000		53.468.578.000		54.762.515.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.858.055.000		39.609.191.000		40.667.124.000		41.142.801.000		42.138.455.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Indeks)	88,62	88,63	88,64	38.858.055.000	88,65	39.609.191.000	88,66	40.667.124.000	88,67	41.142.801.000	88,68	42.138.455.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Indeks)	82,96	86	87		87,5		88		88,5		89		1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja (Indeks)	77,75	78	80		82		84		86		88		1.05.1.05.1.05.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.129.905.000		4.209.737.000		4.322.176.000		4.372.732.000		4.478.552.000	
Meningkatnya Penanganan Perda dan Perkada yang terselesaikan sesuai dengan SOP	Pesentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada (%)	n/a	4,3	4,5	815.834.000	4,8	831.824.346	5	848.128.101	5,3	864.751.417	5,6	901.814.993	1.05.1.05.1.05.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan transtibum yang diselesaikan (%)	100	100	100	966.155.000	100	985.091.638	100	1.004.399.434	100	1.024.085.663	100	1.044.157.742	1.05.1.05.1.05.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kapasitas SDA Satpol PP dan Satlinmas	Persentase SDA Satpol PP dan Satlinmas yang memiliki kualifikasi (%)	n/a	100	100	2.347.916.000	100	2.392.821.016	100	2.469.648.465	100	2.483.894.920	100	2.532.579.265	1.05.1.05.1.05.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.841.325.000		4.934.909.000		5.616.717.000		5.132.415.000		5.256.619.000	
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	100	100	100	1.942.067.000	100	1.886.909.000	100	2.508.717.000	100	2.179.415.000	100	2.203.619.000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Menguatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani dalam Waktu 24 Jam (%)	100	100	100	2.525.861.000	100	2.620.000.000	100	2.655.000.000	100	2.435.000.000	100	2.400.000.000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penanggulangan Bencana	Persentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan bencana (%)	100	100	100	373.397.000	100	428.000.000	100	453.000.000	100	518.000.000	100	653.000.000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.663.994.000		2.715.490.000		2.788.019.000		2.820.630.000		2.888.889.000	
Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan/pengendalian kebakaran dan penyelamatan	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang ditindak lanjuti dan diproses tepat waktu (%)	100	100	100	1.176.493.000	100	897.873.000	100	945.873.000	100	1.068.494.000	100	1.097.652.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Persentase tingkat pemahaman masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	Persentase harta, benda dan nyawa yang dapat diselamatkan pasca kebakaran (%)	68	68,34	68,68	1.487.501.000	69,03	1.817.617.000	69,37	1.842.146.000	69,72	1.752.136.000	70,07	1.791.237.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pemadaman dan penyelamatan (%)	90,15	90,33	90,51		90,69		90,87		91,06		91,24		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					22.066.996.000		22.493.557.000		23.094.344.000		23.364.477.000		23.929.897.000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.467.695.000		13.728.029.000		14.094.695.000		14.259.559.000		14.604.640.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Indeks)	84,81	84,81	84,9	13.467.695.000	85	13.728.029.000	85	14.094.695.000	85,2	14.259.559.000	85,5	14.604.640.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					750.377.000		764.882.000		785.311.000		794.497.000		813.724.000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial sesuai standar (%)	-	70	75	234.972.000	78	242.882.000	80	253.000.000	85	258.497.000	90	270.724.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang Aktif Melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	n/a	90	92	515.405.000	94	522.000.000	96	532.311.000	98	536.000.000	100	543.000.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.806.893.000		1.841.821.000		1.891.015.000		1.913.134.000		1.959.432.000	
Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan standar (%)	15,76	15,85	20,00	1.806.893.000	20,10	1.841.821.000	20,15	1.891.015.000	20,20	1.913.134.000	20,25	1.959.432.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.559.746.000		4.647.887.000		4.772.029.000		4.827.847.000		4.944.681.000	
Meningkatnya Kualitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Exclusion Error (%)	-	11	10	461.056.000	9	520.000.000	8	622.000.000	6	674.000.000	5	726.000.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Inclusion Error (%)	-	11	10		9		8		6		5		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Standar (%)	45,65	50	54	4.098.690.000	56	4.127.887.000	58	4.150.029.000	60	4.153.847.000	70	4.218.681.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.451.921.000		1.479.987.000		1.519.516.000		1.537.290.000		1.574.492.000	
Meningkatnya Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.451.921.000	100	1.479.987.000	100	1.519.516.000	100	1.537.290.000	100	1.574.492.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	-	70	80		85		90		95		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					30.364.000		30.951.000		31.778.000		32.150.000		32.928.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	30.364.000	100	30.951.000	100	31.778.000	100	32.150.000	100	32.928.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.950.757.000		12.181.769.000		12.507.135.000		12.653.429.000		12.959.641.000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.150.856.000		7.289.084.000		7.483.770.000		7.571.307.000		7.754.532.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Indeks)	91,65	86	91,80	7.150.856.000	91,90	7.289.084.000	92,00	7.483.770.000	92,10	7.571.307.000	92,25	7.754.532.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					53.000.000		54.025.000		55.468.000		56.117.000		57.475.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun Sesuai Ketentuan (%)	42,10	46,15	53,85	53.000.000	61,54	54.025.000	69,23	55.468.000	76,92	56.117.000	100	57.475.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.437.281.000		1.465.064.000		1.504.195.000		1.521.789.000		1.558.616.000	
Meningkatnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar (%)	-	12,05	20,83	1.437.281.000	28,85	1.465.064.000	35,71	1.504.195.000	37,5	1.521.789.000	39,06	1.558.616.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					407.904.000		415.789.000		426.894.000		431.887.000		442.339.000	
Meningkatnya Jaringan Pemasaran Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi jaringan pemasaran kerja (%)	-	100	100	407.904.000	100	415.789.000	100	426.894.000	100	431.887.000	100	442.339.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.901.716.000		2.957.807.000		3.036.808.000		3.072.329.000		3.146.679.000	
Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	36,18	40	40	2.901.716.000	40,53	2.957.807.000	41,07	3.036.808.000	41,6	3.072.329.000	42,13	3.146.679.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.422.474.000		3.488.632.000		3.581.811.000		3.623.706.000		3.711.399.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.214.160.000		1.237.630.000		1.270.686.000		1.285.549.000		1.316.659.000	
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Indeks)	13,51	13,6	14	1.214.160.000	14,5	1.237.630.000	15	1.270.686.000	15,5	1.285.549.000	16	1.316.659.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					172.000.000		175.325.000		180.008.000		182.114.000		186.521.000	
Meningkatnya Perlindungan Korban Kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	172.000.000	100	175.325.000	100	180.008.000	100	182.114.000	100	186.521.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					931.600.000		949.608.000		974.971.000		986.375.000		1.010.245.000	
Meningkatnya Kualitas Konseling Keluarga	Persentase Desa yang Menerapkan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak (%)	n/a	10	20	931.600.000	40,00	949.608.000	60,00	974.971.000	80,00	986.375.000	100,00	1.010.245.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					15.300.000		15.596.000		16.013.000		16.200.000		16.592.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	n/a	100	100	15.300.000	100	15.596.000	100	16.013.000	100	16.200.000	100	16.592.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					776.584.000		791.596.000		812.739.000		822.245.000		842.143.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	55,47	55,48	55,5	776.584.000	55,8	791.596.000	56,1	812.739.000	56,4	822.245.000	56,7	842.143.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					312.830.000		318.877.000		327.394.000		331.223.000		339.239.000	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	74,8	74,9	75	312.830.000	75,2	318.877.000	75,4	327.394.000	75,6	331.223.000	75,8	339.239.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					12.057.473.404		12.290.546.000		12.618.818.000		12.766.420.000		13.075.365.000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.646.045.000		9.832.505.000		10.095.124.000		10.213.205.000		10.460.364.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Indeks)	82,26	82,3	82,35	9.646.045.000	82,40	9.832.505.000	82,45	10.095.124.000	82,50	10.213.205.000	82,55	10.460.364.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					815.888.000		831.659.000		853.872.000		863.860.000		884.765.000	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan (Rasio)	1,10	1,2	1,30	815.888.000	1,40	831.659.000	1,50	853.872.000	1,60	863.860.000	1,70	884.765.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.092.636.404		1.113.757.000		1.143.505.000		1.156.881.000		1.184.877.000	
Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	2.262	2.235	2.208	1.092.636.404	2.100	1.113.757.000	2.100	1.143.505.000	2.100	1.156.881.000	2.100	1.184.877.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					184.187.000		187.747.000		192.762.000		195.017.000		199.736.000	
Menurunnya Kerentanan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan (%)	6,55	6,2	5,86	184.187.000	5,52	187.747.000	5,17	192.762.000	4,83	195.017.000	4,48	199.736.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					318.717.000		324.878.000		333.555.000		337.457.000		345.623.000	
Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan (%)	96,40	96,41	100	318.717.000	100	324.878.000	100	333.555.000	100	337.457.000	100	345.623.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					30.632.162.000		31.224.289.000		32.058.267.000		32.433.248.000		33.218.130.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					131.933.000		134.483.000		138.075.000		139.690.000		143.070.000	
Meningkatnya Fasilitas Sengketa Tanah Pemkab	Persentase Kasus Sengketa Tanah Pemkab yang Difasilitasi (%)	100	100	100	131.933.000	100	134.483.000	100	138.075.000	100	139.690.000	100	143.070.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					10.815.000		11.024.000		11.318.000		11.450.000		11.727.000	
Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan redistribusi TORA	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (%)	100	100	100	10.815.000	100	11.024.000	100	11.318.000	100	11.450.000	100	11.727.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					30.422.738.000		31.010.817.000		31.839.094.000		32.211.512.000		32.991.029.000	
Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Fasilitas Bidang Aset Tanah Pemkab yang Didaftarkan (%) (%)	0	60,94	68,59	30.422.738.000	76,24	31.010.817.000	83,89	31.839.094.000	91,55	32.211.512.000	99,2	32.991.029.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					66.676.000		67.965.000		69.780.000		70.596.000		72.304.000	
Meningkatnya Inventarisasi Tanah Pemkab	Persentase Aset Tanah Pemkab yang terinventarisir (%)	100	100	100	66.676.000	100	67.965.000	100	69.780.000	100	70.596.000	100	72.304.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					43.416.738.596		44.455.996.000		45.893.383.000		46.680.193.000		47.359.850.000	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					265.000.000		470.123.000		732.680.000		991.250.000		565.238.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia (%)	100	100	100	265.000.000	100	470.123.000	100	732.680.000	100	991.250.000	100	565.238.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.592.389.000		2.642.501.000		2.713.080.000		2.744.815.000		2.811.239.000	
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100	100	100	2.592.389.000	100	2.642.501.000	100	2.713.080.000	100	2.744.815.000	100	2.811.239.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Persentase Lokasi Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100	100	100		100		100		100		1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
												1.04.2.11.0.00.01.0002 - UPTD Laboratorium Lingkungan		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					8.631.936.000		8.798.793.000		9.033.802.000		9.139.469.000		9.360.644.000	
Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan (Persentase)	0,37	0,4	0,43	595.926.215	0,45	598.926.215	0,47	601.926.215	0,5	604.926.215	0,52	607.926.215	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau (Ha)	15,79	17,09	18,00	8.036.009.785	19,00	8.199.866.785	20,00	8.431.875.785	21,00	8.534.542.785	22,00	8.752.717.785	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					221.530.000		225.812.000		231.843.000		234.555.000		240.231.000	
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik (%)	35,71	46,43	57,14	221.530.000	67,86	225.812.000	78,57	231.843.000	89,29	234.555.000	100,00	240.231.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN					316.804.000		322.928.000		331.553.000		335.431.000		343.548.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan	Persentase Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan (%)	100	100	100	316.804.000	100	322.928.000	100	331.553.000	100	335.431.000	100	343.548.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					172.246.000		175.576.000		180.266.000		182.375.000		186.788.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat peduli lingkungan	Persentase partisipasi masyarakat peduli lingkungan (%)	100	100	100	172.246.000	100	175.576.000	100	180.266.000	100	182.375.000	100	186.788.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					291.535.000		297.170.000		305.107.000		308.676.000		316.146.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat peduli lingkungan	Persentase partisipasi masyarakat peduli lingkungan (%)	100	100	100	291.535.000	100	297.170.000	100	305.107.000	100	308.676.000	100	316.146.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					269.715.000		274.929.000		282.272.000		285.574.000		292.485.000	
Meningkatnya Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan (%)	100	100	100	269.715.000	100	274.929.000	100	282.272.000	100	285.574.000	100	292.485.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					30.655.583.596		31.248.164.000		32.082.780.000		32.458.048.000		33.243.531.000	
Menurunnya Sampah yang Dibuang ke TPA	Persentase Sampah Yang Dibuang Ke TPA (%)	73,45	71,44	65	30.655.583.596	62	31.248.164.000	60	32.082.780.000	58	32.458.048.000	55	33.243.531.000	1.04.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.04.2.11.0.00.01.0001 - UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.502.689.000		10.705.709.000		10.991.651.000		11.120.218.000		11.389.327.000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.623.667.000		9.809.695.000		10.071.705.000		10.189.512.000		10.436.098.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Indeks)	92,73	92,74	92,75	9.623.667.000	92,76	9.809.695.000	92,77	10.071.705.000	92,78	10.189.512.000	92,79	10.436.098.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					124.422.000		126.827.000		130.214.000		131.737.000		134.925.000	
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2,57	2,58	3,9	124.422.000	4,6	126.827.000	5,3	130.214.000	6	131.737.000	6,7	134.925.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	52,22	59	67		72		77		82		87		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase perekaman KTP elektronik (%)	99,4	99,99	99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					345.000.000		351.669.000		361.062.000		365.285.000		374.125.000	
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	96,3	97,5	98,5	345.000.000	99,3	351.669.000	99,4	361.062.000	99,5	365.285.000	99,7	374.125.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta perceraian non muslim (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					409.600.000		417.518.000		428.670.000		433.684.000		444.179.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan pengolahan dan penyajian data kependudukan yang sesuai aturan (%)	100	100	100	95.000.000	100	95.000.000	100	96.820.000	100	96.830.000	100	99.400.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna (%)	100	100	100	23.750.000	100	24.216.000	100	24.860.000	100	25.184.000	100	25.763.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan (%)	100	100	100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan titik layanan (%)	100	100	100	78.000.000	100	79.502.000	100	81.625.000	100	82.570.000	100	84.571.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pengelolaan Jaringan SIAK	Persentase jaringan dan aplikasi siak yang dikelola dengan baik di seluruh titik layanan (%)	20,00	100	100	212.850.000	100	218.800.000	100	225.365.000	100	229.100.000	100	234.445.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					192.158.000.000		195.872.462.000		201.104.074.000		203.456.361.000		208.379.996.000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.280.994.000		7.421.737.000		7.619.966.000		7.709.096.000		7.895.656.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Indeks)	78	80	81	7.280.994.000	82	7.421.737.000	83	7.619.966.000	84	7.709.096.000	85	7.895.656.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					199.782.000		203.644.000		209.083.000		211.529.000		216.648.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase penataan administrasi tata wilayah desa (%)	11,91	13,71	15,52	199.782.000	17,32	203.644.000	19,13	209.083.000	20,93	211.529.000	22,74	216.648.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					414.528.000		422.541.000		433.827.000		438.901.000		449.522.000	
Meningkatnya Ekonomi Perdesaan	Persentase desa yang memiliki PADes (%)	41,15	42,23	43,32	414.528.000	45,12	422.541.000	46,93	433.827.000	52,34	438.901.000	54,15	449.522.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase desa yang memiliki Produk Unggulan (%)	n/a	0,72	1,81		3,61		5,41		7,22		9,02		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					180.968.185.000		184.466.345.000		189.393.308.000		191.608.616.000		196.245.536.000	
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	n/a	19,85	39,7	180.968.185.000	59,56	184.466.345.000	79,42	189.393.308.000	89,53	191.608.616.000	100,00	196.245.536.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola keuangan dan aset Desa sesuai standar (%)	100	100	100	100	100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.294.511.000		3.358.195.000		3.447.890.000		3.488.219.000		3.572.634.000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (%)	100	100	100	3.294.511.000	100	3.358.195.000	100	3.447.890.000	100	3.488.219.000	100	3.572.634.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.173.736.000		2.215.754.000		2.274.935.000		2.301.544.000		2.357.242.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					682.783.000		695.981.000		714.570.000		722.928.000		740.423.000	
Menurunnya Pernikahan Dini	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	28,10	28,05	28	682.783.000	27,6	695.981.000	27,3	714.570.000	27,1	722.928.000	27	740.423.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Median usia kawin pertama (MUKP) wanita (Tahun)	20,80	20,85	20,9		21		21		21		21		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					974.392.000		993.227.000		1.019.755.000		1.031.683.000		1.056.650.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69,20	69,5	69,7	974.392.000	70	993.227.000	70,25	1.019.755.000	70,5	1.031.683.000	70,75	1.056.650.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	5,36	5,3	5,25		5,15		5,05		4,95		4,8		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					516.561.000		526.546.000		540.610.000		546.933.000		560.169.000	
Meningkatnya Keluarga dengan ketahanan yang berkualitas	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Tribina Paripurna) (%)	-	58	60	516.561.000	62	526.546.000	64	540.610.000	66	546.933.000	70	560.169.000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					13.757.052.000		14.022.979.000		14.397.523.000		14.565.929.000		14.918.424.000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.742.324.000		8.911.315.000		9.149.330.000		9.256.348.000		9.480.351.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan (Indeks)	89,75	90	90,25	8.742.324.000	90,5	8.911.315.000	90,75	9.149.330.000	91	9.256.348.000	91,25	9.480.351.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					4.443.253.000		4.529.142.000		4.650.112.000		4.704.504.000		4.818.353.000	
Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan (%)	78	79	80,00	657.312.000	81,00	682.312.000	82,00	712.554.000	83,00	726.153.000	84,00	749.614.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	V/C Rasio (Indeks)	0,38	0,37	0,368	1.393.386.000	0,364	1.423.386.000	0,36	1.453.628.000	0,358	1.467.225.000	0,355	1.510.688.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib (%)	8	9	10	58.591.000	12	78.591.000	14	108.834.000	16	122.432.000	18	145.895.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif (%)	8,33	16,67	16,68	2.099.029.000	25,00	2.099.029.000	33,33	2.099.029.000	41,00	2.099.029.000	50,00	2.099.029.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar (%)	55	56,34	61	234.935.000	67	245.824.000	73	276.067.000	79	289.665.000	85	313.127.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					571.475.000		582.522.000		598.081.000		605.077.000		619.720.000	
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik (%)	42,11	46,89	51,67	571.475.000	56,45	582.522.000	61,22	598.081.000	66	605.077.000	70,78	619.720.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					18.620.032.000		18.979.962.000		19.486.903.000		19.714.838.000		20.191.936.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.723.253.000		8.891.876.000		9.129.372.000		9.236.157.000		9.459.672.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Indeks)	80,82	82	84,00	8.723.253.000	85,00	8.891.876.000	86,00	9.129.372.000	87,00	9.236.157.000	89,00	9.459.672.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.915.784.000		5.010.807.000		5.144.642.000		5.204.818.000		5.330.774.000	
Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	69	70	70,55	4.294.712.500	72,1	4.390.606.000	73,65	4.478.417.000	75,2	4.567.995.040	76,75	4.659.354.941	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%)	77,5	78,5	78,9	621.071.500	79,5	620.201.000	80,1	666.225.000	80,7	636.822.960	81,9	671.419.059	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.980.995.000		5.077.279.000		5.212.889.000		5.273.863.000		5.401.490.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang memiliki Dokumen Teknis (arsitektur, alur sistem, API) dan SOP layanan lengkap (%)	-	-	1,19	128.466.000	2,38	141.035.000	3,57	143.656.000	4,76	146.328.000	5,95	149.056.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital yang terintegrasi	Persentase layanan Publik berbasis digital yang terintegrasi (%)	4,35	8,7	13,04	4.852.529.000	17,39	4.936.244.000	21,74	5.069.233.000	26,09	5.127.535.000	30,43	5.252.434.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					13.300.204.000		13.987.301.000		14.360.892.000		14.528.869.000		14.880.466.000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.963.675.000		12.194.936.000		12.520.654.000		12.667.106.000		12.973.649.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan (Indeks)	76	78	80	11.963.675.000	82	12.194.936.000	84	12.520.654.000	86	12.667.106.000	88	12.973.649.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					137.500.000		140.158.000		143.902.000		145.585.000		149.108.000	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	42,95	46,31	46,66	137.500.000	53,02	140.158.000	56,38	143.902.000	59,73	145.585.000	63,09	149.108.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Koperasi Sehat (%)	3,36	5,37	8,05		10,74		13,42		16,11		18,79		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					143.172.000		575.940.000		591.323.000		598.240.000		612.717.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	persentase SDM koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	4,24	8,49	12,73	143.172.000	16,97	575.940.000	21,22	591.323.000	25,46	598.240.000	29,7	612.717.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					118.678.000		120.972.000		124.203.000		125.656.000		128.697.000	
Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahanya (%)	20,13	23,49	26,85	118.678.000	30,2	120.972.000	33,56	124.203.000	36,91	125.656.000	40,27	128.697.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					816.652.000		832.438.000		854.672.000		864.669.000		885.594.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (%)	-	4	4,28	816.652.000	4,51	832.438.000	4,71	854.672.000	4,87	864.669.000	5,22	885.594.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					120.527.000		122.857.000		126.138.000		127.613.000		130.701.000	
Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya (%)	0,05	0,107	0,164	120.527.000	0,221	122.857.000	0,279	126.138.000	0,336	127.613.000	0,393	130.701.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					18.031.388.000		13.141.140.000		13.492.131.000		13.649.947.000		13.980.274.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.869.179.000		11.956.464.000		12.275.813.000		12.419.402.000		12.719.951.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)	89,12	88	89,15	16.869.179.000	89,17	11.956.464.000	89,2	12.275.813.000	89,23	12.419.402.000	89,3	12.719.951.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					462.612.000		471.554.000		484.149.000		489.812.000		501.665.000	
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase fasilitasi penanaman modal yang berkualitas (%)	20	100	100	462.612.000	100	471.554.000	100	484.149.000	100	489.812.000	100	501.665.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					287.557.000		293.116.000		300.945.000		304.465.000		311.833.000	
Meningkatnya minat Investasi Penanaman Modal	Persentase jumlah investor baru (%)	13	100	100	287.557.000	100	293.116.000	100	300.945.000	100	304.465.000	100	311.833.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					197.490.000		201.308.000		206.685.000		209.103.000		214.163.000	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	89,01	88	89,1	197.490.000	90,15	201.308.000	91,25	206.685.000	92,35	209.103.000	93,45	214.163.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					138.470.000		141.147.000		144.917.000		146.612.000		150.160.000	
Meningkatnya kualitas Pengendalian LKPM	Persentase peningkatan pelaporan LKPM yang Berkualitas (%)	100	80	80	138.470.000	80	141.147.000	80	144.917.000	80	146.612.000	80	150.160.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					76.080.000		77.551.000		79.622.000		80.553.000		82.502.000	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal	Persentase Peningkatan pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal (%)	100	100	100	76.080.000	100	77.551.000	100	79.622.000	100	80.553.000	100	82.502.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					45.967.426.000		43.875.797.000		31.917.688.000		34.161.024.000		36.363.720.000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.978.044.000		12.209.583.000		12.535.692.000		12.682.320.000		12.989.232.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Indeks)	77,29	78	79	11.978.044.000	80	12.209.583.000	81	12.535.692.000	82	12.682.320.000	83	12.989.232.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					4.778.190.000		6.590.554.000		8.486.583.000		10.455.849.000		12.084.880.000	
Kualitas Pemuda Yang Berkarakter Dan Mandiri Meningkat	Persentase pemuda yang berdaya saing (mampu bersaing di level prov dan nasional) (%)	-	17,3	18	4.778.190.000	18,6	6.590.554.000	19	8.486.583.000	19,8	10.455.849.000	20	12.084.880.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					29.211.192.000		25.075.660.000		10.895.413.000		11.022.855.000		11.289.608.000	
Meningkatnya Atlet Berprestasi	Persentase atlet yang berdaya saing (%)	-	40	40	29.211.192.000	40	25.075.660.000	40	10.895.413.000	40	11.022.855.000	40	11.289.608.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					228.623.000		233.042.000		239.266.000		242.065.000		247.923.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					228.623.000		233.042.000		239.266.000		242.065.000		247.923.000	
Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,11	2,15	2,3	158.534.000	2,39	161.551.000	2,49	166.346.000	2,53	167.686.000	2,55	172.057.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Data	Nilai Kematangan Domain Kualitas Data (Indeks)	2,05	2,08	2,1	70.089.000	2,15	71.491.000	2,2	72.920.000	2,25	74.379.000	2,3	75.866.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					87.524.000		89.216.000		91.599.000		92.670.000		94.913.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					87.524.000		89.216.000		91.599.000		92.670.000		94.913.000	
Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	21,79	39,22	39,52	64.534.200	39,74	65.766.000	39,96	67.680.000	40,17	68.273.000	40,39	70.028.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Menurunnya risiko kebocoran informasi	Persentase insiden kebocoran informasi atau akses ilegal (%)	0	0	0	22.989.800	0	23.450.000	0	23.919.000	0	24.397.000	0	24.885.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.569.815.000		1.600.160.000		1.642.899.000		1.662.116.000		1.702.339.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.173.534.000		1.196.219.000		1.228.169.000		1.242.535.000		1.272.604.000	
Pengembangan Warisan Budaya Banjar Meningkat	Persentase Pelaku Seni Budaya Yang Aktif (%)	NA	90	91,8	1.173.534.000	92,7	1.196.219.000	93,6	1.228.169.000	94,5	1.242.535.000	95,4	1.272.604.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					38.386.000		39.128.000		40.173.000		40.643.000		41.627.000	
Meningkatnya Penyebarluasan Sejarah	Persentase Sejarah Budaya Banjar Yang disebarluaskan (%)	60	100	100	38.386.000	100	39.128.000	100	40.173.000	100	40.643.000	100	41.627.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					357.895.000		364.813.000		374.557.000		378.938.000		388.108.000	
Meningkatnya Penetapan Warisan Budaya Banjar	Persentase Warisan Budaya Kabupaten sebagai Budaya Yang Ditetapkan Secara Nasional (%)	n/a	20	40	81.611.400	60	83.225.300	80	85.456.400	80	86.485.100	100	88.589.100	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Meningkatnya Perlindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	276.283.600	100	281.587.700	100	289.100.600	100	292.452.900	100	299.518.900	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.709.132.000		7.858.152.000		8.068.038.000		8.162.409.000		8.359.939.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.853.502.000		6.985.982.000		7.172.573.000		7.256.470.000		7.432.076.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Indeks)	85,21	85,25	85,27	6.853.502.000	85,3	6.985.982.000	85,35	7.172.573.000	85,4	7.256.470.000	85,45	7.432.076.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					821.202.000		837.076.000		859.434.000		869.487.000		890.529.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Norma Standar Perpustakaan (SNP) (%)	1,87	2,85	3,82	49.492.000	4,82	54.492.000	5,8	61.092.000	6,78	62.092.000	7,77	69.500.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kunjungan Pemustaka	Jumlah Pemustaka (Orang)	37.086	38.586	40.186	559.451.000	41.886	565.325.000	43.686	569.683.000	45.586	569.683.000	47.586	569.683.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk (%)	0,3733	0,37567	0,3776	212.259.000	0,3797	217.259.000	0,3818	228.659.000	0,3841	237.712.000	0,3864	251.346.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					34.428.000		35.094.000		36.031.000		36.452.000		37.334.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional, naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang Dimiliki	Persentase koleksi nasional, naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki (%)	51,25	59,31	67	34.428.000	76	35.094.000	84	36.031.000	92	36.452.000	100	37.334.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					424.760.000		432.970.000		444.534.000		449.734.000		460.618.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					320.809.000		327.010.000		335.744.000		339.671.000		347.891.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase SKPD yang Mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Dengan Nilai B (%)	19	37	41	320.809.000	44	327.010.000	48	335.744.000	52	339.671.000	56	347.891.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	79	77,5	78		79,05		79,1		79,15		79,2		2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					103.951.000		105.960.000		108.790.000		110.063.000		112.727.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Arsip yang Telah Terdigitalisasi (%)	-	38	46	103.951.000	54	105.960.000	63	108.790.000	71	110.063.000	79	112.727.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	-	86,2	86,7		87,2		87,7		88,2		88,7		2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.693.605.000		2.745.672.000		2.819.007.000		2.851.981.000		2.920.999.000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					278.018.000		283.392.000		290.961.000		294.364.000		301.488.000	
Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.142	9.146	9.156	278.018.000	9.166	283.392.000	9.176	290.961.000	9.186	294.364.000	9.196	301.488.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.479.913.000		1.508.520.000		1.548.811.000		1.566.928.000		1.604.848.000	
Optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	54.273	55.099	55.936	1.479.913.000	56.786	1.508.520.000	57.649	1.548.811.000	58.526	1.566.928.000	59.402	1.604.848.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					148.857.000		151.734.000		155.787.000		157.609.000		161.423.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	persentase kepatuhan pelaku usaha terhdapa peraturan perundang undangan di bidang perikanan (%)	73	73	74	148.857.000	75	151.734.000	76	155.787.000	77	157.609.000	78	161.423.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					786.817.000		802.026.000		823.448.000		833.080.000		853.240.000	
Optimalnya Pengelolaan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Olahan (Kg)	56.970	57.500	58.000	786.817.000	58.500	802.026.000	59.000	823.448.000	59.500	833.080.000	60.000	853.240.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.706.274.000		5.816.578.000		5.971.934.000		6.041.787.000		6.187.997.000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.285.330.000		1.310.176.000		1.345.170.000		1.360.904.000		1.393.838.000	
Destinasi Wisata Yang Representatif Meningkat	Persentase Destinasi Wisata yang Representatif (Memiliki 3A) (%)	-	40,6	43,5	1.285.330.000	44,6	1.310.176.000	46,2	1.345.170.000	47,2	1.360.904.000	49,7	1.393.838.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					4.059.714.000		4.138.189.000		4.248.717.000		4.298.414.000		4.402.435.000	
Meningkatnya Efektivitas Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	10	11	12	4.059.714.000	13	4.138.189.000	14	4.248.717.000	15	4.298.414.000	16	4.402.435.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	5.756.354	5.867.206	5.977.127		6.095.922		6.218.113		6.346.748		6.489.877		2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					15.000.000		15.290.000		15.698.000		15.882.000		16.266.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan produk ekonomi kreatif yang difasilitasi HKI (%)	-	-	0,35	15.000.000	0,7	15.290.000	1,23	15.698.000	2,11	15.882.000	3,16	16.266.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					346.230.000		352.923.000		362.349.000		366.587.000		375.458.000	
Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kompeten (Orang)	-	10	11	346.230.000	12	352.923.000	13	362.349.000	14	366.587.000	15	375.458.000	2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					51.438.721.000		52.433.044.000		53.833.492.000		54.463.175.000		55.781.181.000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.721.186.000		37.431.016.000		38.430.771.000		38.880.290.000		39.821.191.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Pertanian (Indeks)	82,33	-	80,00	36.721.186.000	85,00	37.431.016.000	87,00	38.430.771.000	90,00	38.880.290.000	92,00	39.821.191.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.155.220.000		2.196.881.000		2.255.558.000		2.281.941.000		2.337.164.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah produk hasil pertanian pasca panen yang berkualitas (sertifikasi, pengemasan, dll) (Komoditas)	3	-	3	2.155.220.000	3	2.196.881.000	4	2.255.558.000	4	2.281.941.000	5	2.337.164.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana produksi pertanian sesuai standar (%)	3	-	5		6		7		8		9		3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.228.114.000		6.348.505.000		6.518.069.000		6.594.310.000		6.753.892.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian sesuai standar (%)	2,5	-	4,5	6.228.114.000	5	6.348.505.000	5,5	6.518.069.000	6	6.594.310.000	6,5	6.753.892.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					978.197.000		997.106.000		1.023.738.000		1.035.713.000		1.060.777.000	
Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Persentase angka kematian peternakan (%)	0,15	-	0,29	978.197.000	0,29	997.106.000	0,28	1.023.738.000	0,28	1.035.713.000	0,27	1.060.777.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.818.674.000		1.853.829.000		1.903.343.000		1.925.606.000		1.972.206.000	
Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Persentase kerusakan bencana tanaman hortikultura (%)	3	-	5	1.818.674.000	5	1.853.829.000	5	1.903.343.000	5	1.925.606.000	5	1.972.206.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase kerusakan bencana tanaman pangan (%)	3,00	-	5		5		5		5		5		3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase kerusakan bencana tanaman perkebunan (%)	15	-	15		14		13		12		11		3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					492.924.000		502.452.000		515.872.000		521.906.000		534.536.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan (%)	23,59	-	25	492.924.000	26	502.452.000	27	515.872.000	28	521.906.000	29	534.536.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3.044.406.000		3.103.255.000		3.186.141.000		3.223.409.000		3.301.415.000	
Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri (%)	5,80	-	6,3	3.044.406.000	6,6	3.103.255.000	6,9	3.186.141.000	7,2	3.223.409.000	7,5	3.301.415.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.106.188.000		2.146.900.000		2.204.243.000		2.230.026.000		2.283.992.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					110.000.000		112.126.000		115.121.000		116.468.000		119.287.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan Perizinan Pelaku Usaha Perdagangan (Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan) yang memiliki izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha perdagangan (TDG) yang memiliki ijin sesuai ketentuan (%)	39,77	45,45	51,14	110.000.000	56,82	112.126.000	62,5	115.121.000	68,18	116.468.000	73,86	119.287.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pelaku usaha perdagangan (Toko Swalayan, pusat perbelanjaan) yang memiliki ijin sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					644.550.000		657.009.000		674.557.000		682.447.000		698.962.000	
Meningkatnya Sarana Perdagangan yang dikelola/dimanfaatkan dengan baik	Persentase Sarana perdagangan yang dikelola/dimanfaatkan dengan baik (%)	45,00	-	52	644.550.000	60	657.009.000	68	674.557.000	75	682.447.000	82	698.962.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					755.712.000		770.320.000		790.895.000		800.146.000		819.509.000	
Meningkatnya tindaklanjut atas ketidakstabilan harga dan stok kebutuhan pokok dan penting	persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok kebutuhan pokok dan penting (%)	100	100	100	755.712.000	100	770.320.000	100	790.895.000	100	800.146.000	100	819.509.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					303.894.000		309.768.000		318.042.000		321.762.000		329.549.000	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Daerah	Persentase Produk Daerah yang Terakses Pasar (%)	45	46	52	303.894.000	52,6	309.768.000	60	318.042.000	68	321.762.000	77	329.549.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					218.528.000		222.752.000		228.702.000		231.377.000		236.976.000	
Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase tertib Ukur (%)	79,99	81,06	82,27	218.528.000	83,49	222.752.000	84,71	228.702.000	85,93	231.377.000	87,15	236.976.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					73.504.000		74.925.000		76.926.000		77.826.000		79.709.000	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Daerah	Persentase Produk Daerah yang Terakses Pasar (%)	45,00	-	52	73.504.000	52,5	74.925.000	60	76.926.000	68	77.826.000	77	79.709.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.834.831.000		1.870.298.000		1.920.252.000		1.942.713.000		1.989.727.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.688.931.000		1.721.578.000		1.767.560.000		1.788.235.000		1.831.510.000	
Meningkatnya Industri yang Berstandarisasi	Persentase IKM berkemasan Standar (%)	14,81	-	23	1.688.931.000	27,1	1.721.578.000	31,19	1.767.560.000	35,29	1.788.235.000	39,39	1.831.510.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM bersertifikasi Halal (%)	27,88	-	47,17		57,41		67,65		77,78		88,12		2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM bersertifikasi PIRT (%)	12,29	-	17,06		19,45		21,84		24,23		26,62		2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM bersertifikasi TKDN (%)	0,33	-	0,88		1,16		1,43		1,71		1,98		2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					71.250.000		72.627.000		74.567.000		75.439.000		77.265.000	
Meningkatnya Transformasi Industri Informal ke Formal	persentase IKM berlegalitas usaha (%)	18,54	-	25	71.250.000	33	72.627.000	45	74.567.000	58	75.439.000	70	77.265.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					74.650.000		76.093.000		78.125.000		79.039.000		80.952.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Data Industri SIINAS	Persentase IKM yang patuh melaporkan data industri di SiINAS (%)	21,66	-	30	74.650.000	40	76.093.000	52	78.125.000	65	79.039.000	75	80.952.000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					286.726.000		292.268.000		300.074.000		303.584.000		310.931.000	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					286.726.000		292.268.000		300.074.000		303.584.000		310.931.000	
Meningkatnya SDM Transmigran Yang Mandiri	Persentase Transmigran Yang Mandiri (%)	-	18,75	25	286.726.000	31,25	292.268.000	37,5	300.074.000	43,75	303.584.000	50	310.931.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					91.870.882.000		93.646.769.000		96.148.006.000		97.272.636.000		99.626.629.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					44.846.928.000		45.713.830.000		46.934.813.000		47.483.803.000		48.632.909.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)	86,67	86,7	86,8	390.241.000	86,9	401.948.230	87	412.680.248	87,1	420.933.854	87,2	429.352.532	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya implementasi Sistem Kerja	Persentase implementasi sistem kerja (%)	n/a	50	55	345.870.000	60	356.246.100	65	365.757.871	70	373.073.029	75	380.534.490	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi dalam LHE Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti (%)	n/a	75	80	491.456.200	85	506.199.886	90	519.715.423	95	530.109.732	100	540.711.927	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan (%)	100	100	100	47.490.000	100	48.439.800	100	49.733.143	100	50.727.806	100	51.742.363	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Optimalnya layanan Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Umum (Indeks)	n/a	85,1	85,36	22.828.905.700	85,37	23.612.374.378	85,4	24.706.529.199	86,1	25.012.671.258	86,72	25.720.570.525	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Sekretariat Daerah (Indeks)	89,66	89,76	89,9	20.742.965.100	90	20.788.621.606	90,35	20.880.397.116	90,76	21.096.287.321	91,76	21.509.997.163	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					45.501.782.000		46.381.343.000		47.620.155.000		48.177.161.000		49.343.046.000	
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterisian IKK dan Ketepatan waktu penyampaian Laporan SILPPD (%)	100	100	100	546.085.000	100	556.640.825	100	571.503.136	100	578.184.010	100	592.176.064	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	n/a	65	66	285.314.100	67	292.446.000	68	298.764.584	69	302.147.600	70	308.190.555	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas regulasi daerah dan perlindungan hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	-	45	45,665	465.102.000	46,33	472.475.644	46,995	486.580.469	47,66	492.385.991	48,32	505.570.750	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Optimalnya layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Indeks)	n/a	89	89,3	44.205.280.900	89,4	45.059.780.531	89,5	46.263.306.811	89,6	46.804.443.399	89,7	47.937.108.631	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.522.172.000		1.551.596.000		1.593.038.000		1.611.672.000		1.650.674.000	
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang /Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	83,06	81	82	851.205.000	83	867.658.794	85	890.833.961	87	901.167.637	90	922.975.428	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya implementasi rencana aksi inflasi	Persentase Implementasi Rencana aksi inflasi (%)	100	100	100	245.674.000	100	250.422.880	100	257.111.677	100	260.094.175	100	266.388.455	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Laba BUMD	Persentase Peningkatan Laba BUMD (%)	8	9	10	335.000.000	11	341.475.961	12	350.595.651	13	354.817.313	14	363.403.892	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Optimalnya layanan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Indeks)	n/a	86	86,1	90.293.000	86,2	92.038.365	86,3	94.496.711	86,4	95.592.875	86,5	97.906.225	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					97.623.855.000		99.510.948.000		102.168.813.000		103.363.868.000		105.865.269.000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					93.958.388.000		95.774.627.000		98.332.698.000		99.482.882.000		101.890.363.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat DPRD (Indeks)	80,8	81	82	93.958.388.000	83	95.774.627.000	84	98.332.698.000	85	99.482.882.000	86	101.890.363.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum sekretariat DPRD (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					3.665.467.000		3.736.321.000		3.836.115.000		3.880.986.000		3.974.906.000	
Meningkatnya fasilitasi pelayanan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase pelayanan fasilitasi tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100	3.665.467.000	100	3.736.321.000	100	3.836.115.000	100	3.880.986.000	100	3.974.906.000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					14.323.879.000		14.600.763.000		14.990.739.000		16.076.083.000		16.765.124.000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.264.955.000		11.482.709.000		11.789.404.000		11.927.303.000		12.215.943.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Indeks)	93	97	98	11.264.955.000	99	11.482.709.000	100	11.789.404.000	100	11.927.303.000	100	12.215.943.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.624.279.000		1.655.677.000		1.699.899.000		2.629.782.000		2.993.423.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Sinergritas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan (%)	100	100	100	856.926.000	100	873.490.000	100	896.820.000	100	907.310.000	100	929.267.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Keselarasan Kebijakan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten (%)	-	100	100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		
Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas (%)	100	100	100	767.353.000	100	782.187.000	100	803.079.000	100	1.722.472.000	100	2.064.156.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.434.645.000		1.462.377.000		1.501.436.000		1.518.998.000		1.555.758.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	701.696.000	100	715.260.000	100	734.264.000	100	742.952.000	100	760.933.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	100	100	100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sumber Data Alam dengan Daerah (%)	100	100	100	243.328.000	100	248.031.000	100	254.656.000	100	257.636.000	100	263.870.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Sektor Ekonomi dan Sumber Data Alam dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	100	100	100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Daerah (%)	100	100	100	489.621.000	100	499.086.000	100	512.516.000	100	518.410.000	100	530.955.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
5.02 - KEUANGAN					307.327.843.000		313.268.566.000		321.635.744.000		325.397.873.000		333.272.487.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					67.689.639.000		68.998.096.000		70.840.985.000		71.669.602.000		73.404.003.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Indeks)	75	78	80	67.689.639.000	82	68.998.096.000	84	70.840.985.000	86	71.669.602.000	88	73.404.003.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					236.006.095.000		240.568.151.000		246.993.553.000		249.882.603.000		255.929.751.000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Penerapan Perda APBD (%)	100	100	100	1.409.949.800	100	1.437.204.480	100	1.475.591.176	100	1.492.850.964	100	1.528.977.891	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	223.025.584.500	100	227.336.724.273	100	233.408.724.560	100	236.138.874.538	100	241.853.424.722	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah	Indeks Penyerapan Belanja Daerah (Indeks)	15	15	15	104.303.500	15	106.319.712	15	109.159.435	15	110.436.258	15	113.108.811	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan (Indeks)	5,086	5,087	5,088	640.908.400	5,089	653.297.318	5,09	670.746.420	5,091	678.592.049	5,092	695.013.946	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya L. aporan keuangan daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai SAP (%)	100	100	100	10.825.348.800	100	11.034.605.217	100	11.329.331.409	100	11.461.849.191	100	11.739.225.630	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					974.841.000		993.685.000		1.020.226.000		1.032.159.000		1.057.137.000	
Meningkatnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Indeks Pengelolaan Aset (Indeks)	2,7	2,71	2,72	974.841.000	2,73	993.685.000	2,74	1.020.226.000	2,75	1.032.159.000	2,76	1.057.137.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.657.268.000		2.708.634.000		2.780.980.000		2.813.509.000		2.881.596.000	
Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Rasio Pajak Terhadap PAD (%)	36,63	44	45	2.633.157.000	46	2.684.056.928	47	2.755.746.215	48	2.787.979.802	49	2.855.448.788	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD (Rasio)	1,93	6	6,1	24.111.000	6,2	24.577.072	6,3	25.233.785	6,4	25.529.198	6,5	26.147.212	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					17.906.822.000		18.252.965.000		18.740.488.000		18.959.693.000		19.418.517.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.118.410.000		13.371.992.000		13.729.148.000		13.889.736.000		14.225.867.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Indeks)	85,26	78	80	13.118.410.000	81	13.371.992.000	82	13.729.148.000	83	13.889.736.000	84	14.225.867.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.788.412.000		4.880.973.000		5.011.340.000		5.069.957.000		5.192.650.000	
Meningkatnya Kualitas Data, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Performa Kinerja dan Disiplin ASN	IP ASN Dimensi Disiplin (Indeks)	5	5	5	3.691.331.000	5	3.713.265.520	5	3.785.247.146	5	3.782.559.504	5	3.920.687.477	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	IP ASN dimensi Kinerja (Indeks)	25,07	24	24,25		24,5		24,6		24,7		24,75		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase data ASN yang berkualitas (%)	0	95	95		95		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase formasi yang terisi sesuai dengan kebutuhan formasi (%)	n/a	95	95		95		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase tahapan pengadaan ASN yang terlaksana sesuai ketentuan (Aduan)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya PNS Yang Masuk Kotak Nine Box	Persentase PNS Yang Terpetakan di Kotak 7-8-9 (%)	n/a	4	5	1.097.081.000	6	1.167.707.480	7	1.226.092.854	8	1.287.397.496	9	1.271.962.523	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.301.590.000		4.384.741.000		4.501.854.000		4.554.512.000		4.664.731.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.301.590.000		4.384.741.000		4.501.854.000		4.554.512.000		4.664.731.000	
Meningkatnya Kualitas ASN	IP ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	27,61	31	31,25	4.301.590.000	31,5	4.384.741.000	31,6	4.501.854.000	31,65	4.554.512.000	31,75	4.664.731.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	IP ASN dimensi Kualifikasi (Indeks)	20,87	19	19,3		19,4		19,5		19,6		20		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.999.278.000		2.037.925.000		2.092.357.000		2.116.831.000		2.168.058.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.999.278.000		2.037.925.000		2.092.357.000		2.116.831.000		2.168.058.000	
Meningkatnya Tindaklanjuti Hasil Riset dalam perencanaan	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.654.100.000	100	1.637.925.000	100	1.640.000.000	100	1.626.831.000	100	1.620.000.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	57,75	57,8	58	345.178.000	58,05	400.000.000	58,1	452.357.000	58,15	490.000.000	58,2	548.058.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					19.500.939.000		19.877.897.000		20.408.822.000		20.647.542.000		21.147.212.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.993.321.000		15.283.146.000		15.691.348.000		15.874.888.000		16.259.060.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Inspektorat Daerah (Indeks)	93,93	93,93	94,02	9.250.234.931	94,05	9.538.987.709	94,07	9.930.832.271	94,09	10.081.215.697	95	10.433.165.467	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP	Nilai Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Skor)	4,15	4,15	4,18	5.743.086.069	4,21	5.744.158.291	4,24	5.760.515.729	4,27	5.793.672.303	4,3	5.825.894.533	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.037.589.000		2.076.976.000		2.132.451.000		2.157.394.000		2.209.603.000	
Terwujudnya pengelolaan risiko perangkat daerah yang baik	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan risiko secara memadai (%)	n/a	80	80,00	370.777.000	85,00	380.164.000	90,00	395.639.000	95,00	400.582.000	100,00	412.791.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas pengawasan APIP (rekam GRC)	Persentase Pengawasan yang memuat rekomendasi perbaikan tata kelola (Governance, Risk, and	n/a	50	50	1.365.901.000	55	1.395.901.000	60	1.435.901.000	65	1.455.901.000	70	1.495.901.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Compliance/GRC) (%)													
Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang telah sesuai (%)	85,74	86	86,5	150.455.500	87	150.455.500	87,5	150.455.500	88	150.455.500	88,5	150.455.500	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang telah sesuai (%)	92	92	92,5	150.455.500	93	150.455.500	93,5	150.455.500	94	150.455.500	94,5	150.455.500	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.470.029.000		2.517.775.000		2.585.023.000		2.615.260.000		2.678.549.000	
Meningkatnya peran dan layanan APIP dalam mengawal perbaikan tata kelola GRC(Governance, Risk, and Compliance)	Persentase Komponen GRC (Governance, Risk, and Compliance) yang terasistensi (%)	-	100	100	477.180.000	100	497.180.000	100	527.180.000	100	537.417.000	100	560.706.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Terjaganya kualitas koordinasi pencegahan korupsi	Persentase pemenuhan dokumen monitoring dan pencegahan korupsi (%)	n/a	100	100	1.992.849.000	100	2.020.595.000	100	2.057.843.000	100	2.077.843.000	100	2.117.843.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					86.635.300.000		88.309.979.000		90.668.677.000		91.729.217.000		93.949.064.000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					65.140.577.000		66.399.761.000		68.173.250.000		68.970.664.000		70.639.752.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar (Indeks)	91,57	91,6	91,65	65.140.577.000	91,7	66.399.761.000	91,75	68.173.250.000	91,80	68.970.664.000	91,85	70.639.752.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul (Indeks)	97,92	97,92	80,00		81,00		82,00		82,50		83,00		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Astambul
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut (Indeks)	88,07	88,50	89,00		89,50		90,00		90,50		91,00		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Gambut
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan (Indeks)	87,62	88	88,3		88,5		89		89,5		90		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Karang Intan
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura (Indeks)	82,73	83	83,25		83,50		83,75		84,00		84,25		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Martapura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio (Indeks)	74	76	88,31		89		90		91		92		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Aranio
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk (Indeks)	79,46	80	80,5		81		81,5		82		82,5		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sungai Tabuk
														7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Lulut
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aluh-Aluh (Indeks)	79,18	80	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman (Indeks)	89,28	89,29	89,3		89,31		89,32		89,33		89,34		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Mataraman
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat (Indeks)	90,84	94	94,5		95		95,5		96		96,5		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron (Indeks)	72,96	73	73,5		74		74,5		75		75,31		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pengaron
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang (Index)	77,32	78	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru (Indeks)	82,08	85	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Beruntung Baru
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat (Indeks)	86,43	87	88,00		89,00		90,00		91,00		92,50		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Martapura Barat
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur (Indeks)	92,90	93	93,25		93,50		93,75		94,00		94,25		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sambung Makmur
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur (Indeks)	74,99	76	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Martapura Timur
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan (Indeks)	71,86	81	81,25		81,50		81,75		82,00		82,25		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Paramasan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur (Indeks)	74,15	74,15	74,65		74,90		75,15		75,40		75,65		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Tatah Makmur
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung (Indeks)	76	78	80		81		82		83		84		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam (Indeks)	69,45	78,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.850.041.000		1.885.803.000		1.936.170.000		1.958.817.000		2.006.218.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100	1.850.041.000	100	1.885.803.000	100	1.936.170.000	100	1.958.817.000	100	2.006.218.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Astambul
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Gambut
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Karang Intan
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Martapura
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Aranio
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sungai Tabuk
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Aluh-Aluh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Mataraman
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat		
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pengaron
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Paramasan
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Tatah Makmur
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.822.812.000		15.109.340.000		15.512.900.000		15.694.352.000		16.074.157.000	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100	14.822.812.000	100	15.109.340.000	100	15.512.900.000	100	15.694.352.000	100	16.074.157.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kertak Hanyar
														7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Manarap Lama
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Astambul
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Gambut
														7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Gambut
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Karang Intan
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Martapura
														7.01.0.00.0.00.05.0001 - Kelurahan Sungai Paring
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Aranio
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sungai Tabuk
														7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Lulut

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Mataraman
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pengaron
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Paramasan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Tatah Makmur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Telaga Bauntung		
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					666.192.000		679.070.000		697.209.000		705.365.000		722.435.000	
Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	666.192.000	100	679.070.000	100	697.209.000	100	705.365.000	100	722.435.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Astambul		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Gambut		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Karang Intan		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Martapura		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Aranio		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sungai Tabuk		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Aluh-Aluh		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Mataraman		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pengaron		
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	50	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Paramasan
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Tatah Makmur
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							3.394.490.000				3.460.105.000		
Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100	3.394.490.000	100	3.460.105.000	100	3.552.523.000	100	3.594.077.000	100	3.681.056.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Astambul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Gambut
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Karang Intan
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Martapura
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Aranio
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sungai Tabuk
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Mataraman
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pengaron
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Martapura Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Martapura Timur		
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Paramasan		
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Tatah Makmur		
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Telaga Bauntung		
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					761.188.000		775.900.000		796.625.000		805.942.000		825.446.000	
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100	761.188.000	100	775.900.000	100	796.625.000	100	805.942.000	100	825.446.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Astambul		
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Gambut		
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	80	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Karang Intan		
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Martapura		
														7.01.0.00.0.00.05.0001 - Kelurahan Sungai Paring

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Aranio
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sungai Tabuk
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Mataraman
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Pengaron
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Paramasan
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Tatah Makmur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.286.678.000		16.601.504.000		17.044.919.000		71.244.292.000		18.968.400.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.050.764.000		6.167.727.000		6.332.463.000		6.406.533.000		6.561.571.000	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	84,85	84,86	84,9	6.050.764.000	84,95	6.167.727.000	85	6.332.463.000	85	6.406.533.000	85	6.561.571.000	8.01.1.05.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.331.454.000		1.357.191.000		1.393.441.000		1.409.740.000		1.443.856.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.331.454.000	100	1.357.191.000	100	1.393.441.000	100	1.409.740.000	100	1.443.856.000	8.01.1.05.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					4.973.485.000		5.069.624.000		5.205.030.000		59.265.913.000		6.700.145.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	4.973.485.000	100	5.069.624.000	100	5.205.030.000	100	59.265.913.000	100	6.700.145.000	8.01.1.05.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					274.447.000		279.752.000		287.224.000		290.584.000		297.616.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	31	40	41	274.447.000	42	279.752.000	43	287.224.000	44	290.584.000	50	297.616.000	8.01.1.05.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					2.315.208.000		2.359.962.000		2.422.995.000		2.451.336.000		2.510.658.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar (%)	100	100	100	2.315.208.000	100	2.359.962.000	100	2.422.995.000	100	2.451.336.000	100	2.510.658.000	8.01.1.05.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.341.320.000		1.367.248.000		1.403.766.000		1.420.186.000		1.454.554.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.341.320.000	100	1.367.248.000	100	1.403.766.000	100	1.420.186.000	100	1.454.554.000	8.01.1.05.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Subbab ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banjar untuk lima tahun ke depan. Kinerja tersebut diukur berdasarkan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah, yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Banjar.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,41	74,78	75,48	75,95	76,43	76,90	77,43
2	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai	74,35	81,53	82,22	82,92	83,61	84,31	85,00
3	Usia Harapan Hidup	Nilai	73,55	73,89	74,18	74,46	74,75	75,03	75,32
4	Prevalensi Stunting	Persen	30,10	20,00	19,25	18,50	17,75	17,00	16,25
5	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai	7,95	8,12	8,31	8,50	8,69	8,88	9,07
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Nilai	13,04	13,07	13,14	13,21	13,28	13,35	13,43
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,36	2,18	2,02	1,87	1,71	1,56	1,40
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,76	5,25	5,35	5,45	5,54	5,64	5,75
9	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	40,03	42,93	52,78	62,64	72,49	82,34	92,19
10	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalan	Persen	79,02	80,00	80,30	80,60	80,90	81,20	81,75
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
12	Indeks Konektivitas	Nilai	84,44	84,86	85,29	85,71	86,14	86,57	87,01

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Indeks Risiko Bencana	Nilai	118,31	117,31	116,31	115,31	114,31	113,31	112,31
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,59	71,39	71,60	71,81	72,02	72,24	72,45
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	79,36	79,46	79,61	79,76	79,91	80,06	81,62
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	83,79	83,95	84,10	84,26	84,41	84,57	84,73
17	Predikat SAKIP Daerah	Nilai	67,06	B	BB	BB	BB	A	A
18	Indeks Integritas	Indeks	76,72	80,00	80,75	81,50	82,25	83,00	83,75
19	Indeks SPBE	Indeks	2,87	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47
20	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	1,00	1,05	1,07	1,09	1,11
21	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,49	4,54	4,59	4,65	4,70	4,75	4,80

Sumber: Analisis Data, 2025

4.2.2 Indikator Makro Daerah

Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja indikator makro yang baik, bahkan unggul pada beberapa indikator seperti TPT, Gini Rasio, dan kemiskinan. Tantangan ke depan terletak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM agar dapat sejajar atau melampaui capaian provinsi, sekaligus mempertahankan keunggulan pada aspek ketenagakerjaan, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Berikut adalah tabel dukungan kabupaten banjar terhadap pencapaian target indikator makro di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4. 3 Dukungan Kabupaten Banjar Terhadap Pencapaian Target Indikator Makro di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	2024			2025			2026			2027		
		Kalsel	Banjar	Target	Kalsel	Banjar	Target	Kalsel	Banjar	Target	Kalsel	Banjar	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,05	4,76	4,76	5,3 - 5,4	4,7 - 4,7	5,25	5,6 - 6,4	4,9 - 5,7	5,35	85,47-89,86	5,05 - 6,08	5,45
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,59	74,59	74,59	72,32	71,39	71,39	72,51	71,6	71,6	72,71	71,81	71,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,2	2,71	2,71	3,63 - 4,18	2,25 - 2,81	2,70	3,56 - 4,14	2,18 - 2,77	2,66	3,48 - 4,10	2,1 - 2,7	2,62
4	Gini Rasio	0,302	0,258	0,258	0,29 - 0,301	0,275 - 0,286	0,256	0,285 - 0,296	0,27 - 0,281	0,255	0,291-0,297	0,27 - 0,28	0,25
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,19	74,41	74,41	75,7	74,78	74,78	75,48 - 76,18	74,82 - 75,52	75,48	75,99-76,69	75,36 - 76,06	75,95
6	Tingkat Kemiskinan	4,11	2,36	2,36	3,44 - 3,94	1,90 - 2,18	2,18	3,23 - 3,46	1,72 - 2,22	2,02	2,87-3,30	1,52 - 1,99	1,87
No	Indikator	2028			2029			2030					
		Kalsel	Banjar	Target	Kalsel	Banjar	Target	Kalsel	Banjar	Target			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	93,74-98,44	5,2 - 6,45	5,54	102,0-107,0	5,35 - 6,83	5,64	6,2 - 8,2	5,5 - 7,2	5,75			
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,90	72,02	72,02	73,10	72,24	72,24	73,30	72,46	72,46			
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,39 - 4,04	2,02 - 2,64	2,58	3,29 - 3,97	1,93 - 2,57	2,54	3,20-3,83	1,85 -2,50	2,50			
4	Gini Rasio	0,282-0,290	0,26 - 0,27	0,25	0,274-0,281	0,26 - 0,27	0,25	0,262-0,274	0,251 - 0,262	0,25			
5	Indeks Pembangunan Manusia	76,50-77,20	75,91 - 76,61	76,43	77,00-77,71	76,45 - 77,15	76,90	77,51 - 78,21	76,99 - 77,69	77,43			
6	Tingkat Kemiskinan	2,59-2,98	1,31 - 1,79	1,71	2,30-2,64	1,11 - 1,6	1,56	1,89 - 2,39	0,9 - 1,4	1,40			

Sumber: Diolah, 2025

Berdasarkan dukungan Kabupaten Banjar terhadap pencapaian target indikator makro di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Banjar cenderung positif dan selaras dengan arah capaian provinsi. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, meskipun laju Kabupaten Banjar sedikit berada di bawah rata-rata provinsi pada seluruh periode, tren yang ditunjukkan relatif stabil dan meningkat secara bertahap dari kisaran 4,76 persen pada 2024 menjadi 5,5–7,2 persen pada 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah terus berkembang, meski diperlukan upaya intensif dalam mendorong sektor unggulan agar kesenjangan dengan capaian provinsi dapat dipersempit.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar juga relatif mendekati capaian provinsi, meskipun nilainya sedikit lebih rendah pada setiap periode. IKLH yang cenderung stabil di kisaran 71–72, peningkatan kualitas lingkungan perlu menjadi fokus kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Banjar mencatat capaian yang lebih baik daripada rata-rata provinsi, dengan tingkat pengangguran yang konsisten lebih rendah dan menunjukkan tren penurunan dari 2,71 persen pada 2024 menjadi 1,85–2,50 persen pada 2030. Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap angkatan kerja, meskipun kualitas dan keberlanjutan pekerjaan tetap menjadi tantangan.

Dari sisi Gini Rasio, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banjar lebih rendah dibandingkan provinsi. Angka ini bergerak dari 0,258 pada 2024 menuju 0,251–0,262 pada 2030, menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata. Namun, stabilitas ini perlu dijaga melalui kebijakan inklusif yang memastikan pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar menunjukkan kemajuan yang konsisten, meningkat dari 74,41 pada 2024 menjadi 76,99–77,69 pada 2030. Walaupun sedikit di bawah capaian provinsi,

perbedaan ini relatif kecil dan dapat diatasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Sementara itu, pada persentase penduduk miskin, Kabupaten Banjar berhasil mempertahankan angka kemiskinan yang jauh di bawah rata-rata provinsi. Penurunan dari 2,36 persen pada 2024 menjadi hanya 0,9–1,4 persen pada 2030 menandakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Keberhasilan ini perlu dijaga dengan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan sosial yang memadai serta kesempatan berusaha yang lebih luas.

4.2.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan IKD merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	81,54	81,97	82,35	82,74	83,12	83,50	83,88	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	3,97	3,24	3,07	2,90	2,73	2,56	2,43	IUP
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1.958,00	2.016,74	2.077,24	2.139,56	2.203,75	2.269,86	2.337,95	IUP
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (Persentase Penduduk Berakses Air Minum)	% (%)	86,94	89,71	92,34	94,97	97,60	100,00	100,00	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	77,40	71,39	71,60	71,81	72,02	72,24	72,45	Sasaran Visi/IUP
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Akses Sanitasi Aman)	%	10,22	10,69	12,66	14,62	16,59	18,55	20,51	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	80,70	82,15	83,71	85,27	86,82	88,38	89,94	IUP
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,81	0,93	0,91	0,85	0,79	0,73	0,66	Sasaran Visi
10	Penurunan Emisi GRK Tahunan	CO2 eq	- 195.280,55	26.509,15	29.563,35	34.927,88	37.809,39	37.043,25	42.247,97	
11	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	CO2 eq	-18.946,85	307.323,06	336.882,26	371.806,00	409.611,56	446.651,20	488.890,00	
12	Indeks Risiko Bencana	indeks	118,31	117,31	116,31	115,31	114,31	113,31	112,31	
13	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,69	0,79	0,89	0,98	1,08	1,17	1,27	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	4,44	1,50	1,45	1,41	1,36	1,32	1,28	
15	Rasio Penduduk	%	101,95	101,77	101,67	101,56	101,45	101,33	101,21	
16	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	125,24	130,59	132,48	134,35	136,18	137,98	139,75	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	5,25	5,35	5,45	5,54	5,64	5,75	Sasaran Visi
2	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	2,18	2,02	1,87	1,71	1,56	1,40	Sasaran Visi/IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	40,03	42,93	52,78	62,64	72,49	82,34	92,19	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,71	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54	2,50	IUP
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	
6	Indeks Gini	indeks	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Sasaran Visi
7	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	74,41	74,78	75,48	75,95	76,43	76,90	77,43	Sasaran Visi
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,55	73,89	74,18	74,46	74,75	75,03	75,32	IUP
9	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	
10	Prevalensi Stunting	%	30,10	20,00	19,25	18,50	17,75	17,00	16,25	IUP/RIBK
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	8,12	8,31	8,50	8,69	8,88	9,07	IUP
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,04	13,07	13,14	13,21	13,28	13,35	13,43	IUP
13	Angka Literasi/ Numerasi									
14	Kemampuan Literasi									
	a. SD	Nilai	61,67	66,44	71,08	75,73	80,37	85,01	89,65	IUP
	b. SMP	Nilai	73,21	76,64	80,16	83,67	87,19	90,71	94,22	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Kemampuan Numerasi									
	a. SD	Nilai	54,03	61,10	68,31	75,53	82,75	89,97	97,19	IUP
	b. SMP	Nilai	64,78	67,31	72,05	76,72	81,32	85,83	90,26	IUP
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	71,80	74,20	76,68	79,24	81,89	84,63	87,46	
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	10,09	24,06	25,00	25,95	26,89	27,83	28,77	IUP
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	%	N/A	7,09	7,35	7,62	7,88	8,15	8,23	IUP
19	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	N/A	74,78	75,80	76,83	77,85	78,87	79,89	IUP
20	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Kalimantan Selatan)	indeks	75,53	78,22	78,22	78,22	78,22	78,22	78,22	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	N/A	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kalimantan Selatan)	indeks	58,55	62,00	63,52	65,04	66,56	68,09	69,61	
23	Indeks Perlindungan Anak	indeks	59,20	60,17	61,14	62,11	63,08	64,05	65,02	
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/ Indeks Kualitas Keluarga (Kalimantan Selatan)	indeks	79,23	81,06	82,94	84,86	86,82	88,83	90,89	
25	Indeks Kualitas Keluarga (Kab. Banjar)	indeks	74,84	80,95	84,39	87,84	91,29	94,73	98,18	
26	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,53	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	54,67	55,72	56,79	57,88	58,99	60,12	61,27	
28	Total Fertility Rate	Nilai	2,28	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	PJPK
29	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	Angka	264,65	140,00	134,25	128,50	122,75	117,00	111,00	IUP/RIBK
30	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	15,88	14,29	12,86	11,58	10,42	9,38	8,44	RIBK
31	Cakupan kepesertaan JKN	%	99,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IUP/RIBK
32	Cakupan Penemuan Kasus TB (%)	%	60,74	62,26	63,81	65,41	67,05	68,72	70,44	RIBK
33	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)	%	85,17	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	RIBK
34	Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk									
	i) Literasi Membaca	Skor	N/A	19,56	22,55	25,54	28,52	31,51	34,50	IUP
	ii) Numerasi	Skor	N/A	0,90	4,07	7,24	10,41	13,58	16,70	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk									
	i) Literasi Membaca	Skor	N/A	35,57	39,29	43,02	46,74	50,46	52,20	IUP
	ii) Numerasi	Skor	N/A	17,42	20,43	23,44	26,45	29,46	31,48	IUP
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	Nilai	45,90	43,61	41,42	39,35	37,39	35,52	33,74	
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	5,64	5,92	6,22	6,53	6,86	7,20	7,56	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,24	3,23	3,29	3,35	3,40	3,46	3,51	IUP
4	Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel)	Orang	NA	4.750.000	4.787.500	4.825.000	4.862.500	4.900.000	4.937.500	IUP
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	8.052	8.455	8.878	9.322	9.788	10.277	10.791	
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	10,84	12,11	13,27	14,43	15,59	16,75	17,91	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)		N/A	2,65	2,68	2,70	2,73	2,75	2,78	
8	Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten	%	NA	2,67	2,77	2,87	2,96	3,06	3,16	IUP
9	Rasio Kewirausahaan	%	0,04	3,10	3,21	3,33	3,44	3,55	3,66	IUP
10	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	N/A	0,47	0,50	0,52	0,55	0,57	0,60	IUP
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,21	70,64	71,07	71,50	71,93	72,36	72,78	
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,45	57,52	58,37	59,21	60,06	60,90	61,74	IUP
13	Indeks Inovasi Daerah	indeks	57,75	61,05	62,00	62,95	63,89	64,84	65,79	IUP
14	Indeks Ekonomi Hijau	indeks	53,74	57,85	62,27	67,04	72,16	77,68	83,62	
15	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	N/A	83,36	84,66	85,95	87,25	88,54	89,84	
16	Indeks Pembangunan	indeks	6,32	6,55	6,61	6,66	6,72	6,77	6,83	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Teknologi Informasi dan Komunikasi									
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	29,23	31,17	31,36	31,55	31,74	31,93	32,12	IUP
18	Ekspor Barang dan Jasa	&	-7,59	-4,24	-3,78	-3,32	-2,85	-2,39	-1,93	IUP
19	Indeks Infrastruktur	indeks	87,50	87,94	88,38	88,82	89,26	89,71	90,16	
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	64,92	69,22	70,76	72,30	73,83	75,37	76,91	
21	Persentase Desa Mandiri	%	31,05	31,05	31,48	31,91	32,34	32,77	36,37	IUP
22	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,31	1,32	1,32	1,33	1,34	1,34	1,35	IUP
23	Tingkat Inflasi	%	1,98	2,02 - 3,00	2,02 - 3,00	2,02 - 3,00	2,02 - 3,00	2,02 - 3,00	2,02 - 3,00	IUP
24	Total dana pihak ketiga/PDRB	%	N/A	32,65	33,41	34,18	34,94	35,70	36,46	
25	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	N/A	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	
26	Total Kredit/PDRB	%	N/A	23,50	23,90	24,30	24,70	25,10	25,50	
27	Indeks Akses Keuangan Daerah	%	3,56	23,50	23,90	24,30	24,70	25,10	25,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian	%	NA	79,00	79,55	80,10	80,65	81,20	81,75	IUP
29	Nilai PDRB ADHB Kab/Kota dalam Kawasan Metropolitan Banjarkabula ADHB	Rupiah (Triliun)	NA	25,29	33,14	40,99	48,84	56,69	64,55	IUP
30	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	NA	54,04	54,48	54,91	55,35	55,78	56,22	IUP
31	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	NA	6,00	6,06	6,12	6,18	6,24	6,30	IUP
32	Kapasitas Air Baku	m3/detik	NA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	IUP
33	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman	%	NA	30,55	33,47	36,40	39,32	42,24	45,16	IUP
34	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,53	3,57	3,61	3,65	3,69	3,73	3,77	Sasaran Visi/IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	%	15,02	15,05	15,44	15,83	16,21	16,60	16,80	Sasaran Visi
36	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	6,09	6,68	6,89	7,10	7,31	7,52	7,73	Sasaran Visi/IUP
37	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi	%	8,45	9,59	9,74	9,89	10,04	10,19	10,34	Sasaran Visi
38	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	N/A	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	IUP
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	NA	45,00	45,67	46,33	47,00	47,66	48,32	IUP
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,87	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47	IUP
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,49	4,54	4,59	4,65	4,70	4,75	4,80	IUP
4	Indeks Integritas Nasional	Indeks	76,72	80,00	80,75	81,50	82,25	83,00	83,75	IUP
5	Persentase Penegakan Perda	%	85,71	86,86	88,03	89,21	90,41	91,63	92,86	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	NA	65,00	68,75	72,50	76,25	80,00	83,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian	%	N/A	67,85	68,64	69,44	70,23	71,02	71,81	
8	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	77,21	77,50	77,78	78,07	78,36	78,65	78,94	
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	NA	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34	93,81	

Sumber: Diolah, 2025

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	83,88921	100	100	100	100	100	100
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	89,35823	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	72,83673	100	100	100	100	100	100
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	85,46702	100	100	100	100	100	100
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
2.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	1,641913	1,659016	1,715197	1,769519	1,822074	1,872947	1,922216
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	90	1	1	1	1	1	1
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	88,69893	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	94,09177	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	97,58642	100	100	100	100	100	100
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	69,36538	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	95,6706	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	73,06993	100	100	100	100	100	100
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	82,72125	100	100	100	100	100	100
2.1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	91,86738	100	100	100	100	100	100
2.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	persen	41,10251	45,78	48,19	51,22	54,24	57,06	60,2
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	66,68336	66,68	66,68	66,68	66,68	66,68	66,68
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	69,81804	76,08	79,216	82,442	85,623	88,804	91,985
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	76,25309	77,35	78,45	79,55	80,65	81,75	82,85
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	78,53	79,53	80,53	81,53	82,53	83,53	84,53
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	52,17056	54,16	56,16	58,16	60,16	62,16	64,16
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	0	0	100	100	100	100	100
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	12,7656	3	6	9	12	15	18
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	3,174677	23,18439	23,115	23,04561	22,97622	22,90682	22,90682
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	94,94316	95	95,25	95,5	95,75	96	96,25
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	85,71429	86,11	88,88	88,88	88,88	88,88	88,88

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	96,875	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,12
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	75,81528	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	1,959179	12,5	13,25	14,2	15,15	16,1	17.05
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	rupiah	44741792	46588466	49078140	52045005	55411314	59143633	63156679
1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	35,9743	40	40,1	40,27	40,41	40,85	41
1.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	44,93192	45,03	46,53	50,03	56,53	58,03	59,53
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	13,84764	13,9	14	14,5	15	15,5	16
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	persen	6,5627	5,48	4,38	3,30	2,27	1,28	0,31
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	persen	160,9246	188,66	243,32	297,99	344,84	399,5	454,16
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								
4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	persen	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	100	100	0	0	0	0	0
4.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	indeks	74,59	71,39	71,6	71,81	72,02	72,24	72,45

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	persen	72,65252	72,65	75	77	79	81	0,83
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	3,333333	3,333333	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Perekaman KTP elektronik	persen	99,14408	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	50,58209	62	67	72	77	82	87
6.3	Kepemilikan akta kelahiran	persen	95,52097	97,5	98,5	99,3	99,4	99,5	99,6
6.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	43,47826	45,65	47,83	50	52,17	54,35	56,52
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	persen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	56,09756	18.52	22.73	29.41	41.67	71.43	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	persen	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,1
8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	76,52659	76,55	76,6	76,65	76,7	76,75	76,8
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	5,361962	5,3	5,25	5,15	5,05	4,95	4,8
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
9.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	0,925	0,4875	0,519	0,575	0,606	0,663	0,694
9.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	persen	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
10.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100	100	100
10.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	85,71429	100	100	100	100	100	100
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	41,61074	44,96644	48,32215	51,67785	55,03356	58,38926	61,74497
11.1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	persen	16,71177	17,71	18,71	19,71	20,71	21,71	22,71
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
12.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	8,465476	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	2,044273	2,06	2,07	2,08	2,09	2,10	2,11
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	4,988647	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
13.3	Peningkatan prestasi olahraga	persen	23	23	23	23	23	23	23
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
14.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
14.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	57,36434	57,67434	57,98434	58,29434	58,60434	58,91434	59,22434
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	81,16	81,5	81,84	82,18	82,86	83,54	83,7
16.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	71,8	76,56	77,56	78,56	79,56	80	80,05
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	nilai	78,9605	79,65	80,34	81,03	81,72	82,41	83,1
17.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	100	100	100	100	100	100	100
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
18.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	100	100	100	100	100	100	100
C	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	persen	99,10699	99,10699	100	100	100	100	100
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata								
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	-49,5893	0,22	0,22	0,24	0,24	0,25	0,26

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persen	146,3181	1,8	1,88	1,99	2,01	2,07	2,26
2.3	Tingkat hunian akomodasi	persen	36,4051	36,77	37,14	37,51	37,88	38,26	38,64
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	3,236917	3,62	3,69	3,79	3,89	3,98	4,08
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	4,483239	5,98	7,48	8,98	10,48	11,98	13,5
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
3.1	Produktivitas; pertanian per hektar per tahun	persen	392,6486	36,5	37	38	39	40	41
3.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	persen	0,15	0,3	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	39,72537	40,25	41,97	42,36	43,49	44,15	45,5
4.3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	78,36538	79	80	81	82	83	84
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	persen	0	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	52,71	52,81	52,91	53,01	53,11	53,21	53,31
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	5,856354	8,618785	11,38122	14,14365	16,90608	19,66851	22,43094
5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0	5	5	5	5	5	5
5.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	persen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	100	100	100	100	100	100	100
D	Urusan Penunjang Pemerintahan								
1	Keuangan								
1.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	10,73909	10,5	10	9,5	9	8,5	8
1.2	Rasio PAD	persen	10,55946	11	11,5	12	12,5	13	13,5
1.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	62,63075	60	58	55	53	50	48
1.4	Opini Laporan Keuangan	persen	10	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	0,573135	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51
1.6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	26,15937	22	19	17	14	11	9
1.7	Manajemen Aset	jumlah	4	4	4	4	4	4	4
1.8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	persen	28,71213	20	19	18	17	16	15
2	Sekretariat Daerah								
2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.& yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	43,99774	44	45	46	47	48	49
2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	54,70256	54	55	56	57	58	59
2.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	persen	48,61592	49	50	51	52	53	54
3	Kepegawaian								
3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	74,7011	78	80	82	83	84	85
3.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	20,5165	13	15	18	22	25	30

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	68,76457	69	70	72	75	78	80
4	Kepegawaian								
4.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	persen	3	3,2	3,23	3,25	3,27	3,3	3,35
4.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	persen	3	3,11	3,15	3,18	3,2	3,22	3,25
5	Transparansi dan Partisipasi Publik								
5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	persen	86,91141	87,5	88	88,5	89	89,5	90
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	persen	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah, 2025

BAB V

PENUTUP

Dokumen RPJMD ini menjadi pijakan utama bagi perwujudan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis berlandaskan gotong royong dan berkeadilan. Fokus pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu pada penguatan SDM unggul dan berkarakter, integrasi pendidikan pesantren dan pendidikan formal, pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan ramah lingkungan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim, pemerataan infrastruktur pelayanan dasar dan kewilayahan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan melayani. Fokus tersebut akan menjadi komitmen bersama seluruh stakeholders pembangunan untuk mewujudkan visi-misi kepala daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang strategis bagi pedoman pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai referensi utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan daerah secara umum, termasuk perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 menerapkan pendekatan teknokratik yang berbasis analisis data serta metode ilmiah untuk mengevaluasi berbagai aspek penting, termasuk kondisi umum daerah, capaian pembangunan, serta kerangka pendanaan yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan didasarkan pada kajian objektif, terukur, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan daerah.

Sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh, RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 juga mengidentifikasi permasalahan utama serta isu-isu strategis yang menjadi tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah. Isu strategis yang tercantum dalam dokumen ini mencakup permasalahan mendesak dengan dampak luas yang membutuhkan respons kebijakan yang cepat dan tepat agar dapat ditangani secara efektif dalam waktu lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunannya, analisis terhadap isu-isu tersebut dilakukan tidak hanya secara internal, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal seperti SDGs, isu global, kebijakan pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, serta perencanaan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045. Melalui berbagai pendekatan dan penyilangan isu ini, diharapkan intervensi pembangunan yang dihasilkan dapat lebih relevan, aplikatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan daerah dan perwujudan kesejahteraan masyarakat Banjar.

Lebih lanjut, isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program-program prioritas yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang. Setiap program yang disusun dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara berkala dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di masa depan.

Dengan adanya dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, diharapkan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berlangsung secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjar, serta memertimbangkan kondisi lingkungan yang lestari. RPJMD ini diharapkan menjadi pedoman yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi Kabupaten Banjar yang lebih maju, mandiri, agamis berlandaskan gotong royong dan keadilan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dapat terwujud melalui komitmen, kolaborasi, dan partisipasi seluruh *stakeholders* pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan RPJMD. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen pembangunan 5 tahun yang menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja dan pencapaian kinerja RPJMD memerlukan kolaborasi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dan sektor bisnis sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing;
2. Dalam rangka memastikan sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) wajib memedomani RPJMD.
3. Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar wajib memedomani dalam setiap penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan, seperti Renstra, Renja, serta perencanaan dan kebijakan sektoral lainnya, misalnya dalam bentuk *Masterplan* dan Rencana Induk;
4. Pelaksanaan RPJMD perlu menjaga konsistensi dan sinkronisasi pelaksanaan antara RPJMD Kabupaten Banjar dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.
5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pencapaian kinerja RPJMD, maka membutuhkan sinkronisasi dan dukungan kebijakan penganggaran. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan penganggaran setiap tahun;
6. Pendanaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pendanaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pendanaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif,

peningkatan digitalisasi dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah;

7. Penerapan kaidah pelaksanaan ini harus didukung oleh penguatan pemerintahan digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan.
8. Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan *force majeure*, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
9. Setiap penyesuaian atau perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 harus dengan prinsip akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku;
10. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 dapat berjalan baik dan adaptif terhadap berbagai kondisi dinamis, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
11. Berbagai risiko yang kemungkinan terjadi, baik konteks internal misalnya terkait dinamika koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor maupun konteks eksternal misalnya terkait dinamika kebijakan nasional dan kondisi global yang berdampak pada perekonomian daerah, akan direspon melalui langkah mitigasi dan perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun; dan
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan tingkat Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh unit kerja yang membidangi perencanaan.
5. Hasil pengendalian digunakan untuk akselerasi kinerja pembangunan daerah sehingga realisasinya mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Informasi dan dokumentasi hasil evaluasi termuat di dalam laporan kinerja, misalnya dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Perangkat Daerah.
7. Berbagai laporan hasil pembangunan daerah disampaikan kepada DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan peraturan tentang pertanggungjawaban kinerja yang berlaku.
8. Laporan hasil pembangunan daerah dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan membuka ruang partisipasi publik di dalam pembangunan.

Bupati Banjar

Saidi Mansyur



Pemerintah
Kabupaten Banjar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar

Tahun 2025-2029